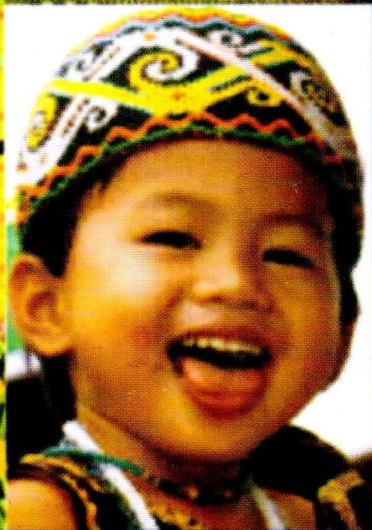
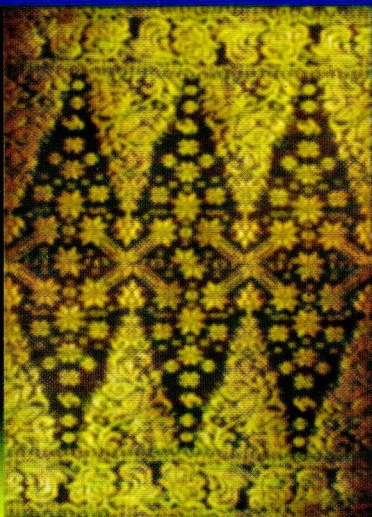
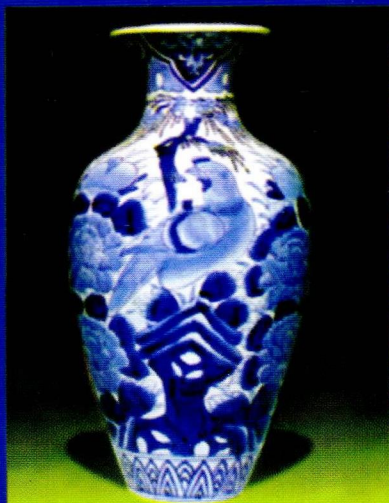


KALBAR

MULTIKULTURAL
DAN
PARIWISATA



Direktorat
Kebudayaan

2

KERJASAMA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RI
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNG PURA
2008

2006.4832

KAB

KALBAR

MULTIKULTURAL DAN PARIWISATA

Kerjasama
Departemen Kebudayaan & Pariwisata RI
Dengan
Universitas Tanjung Pura
2008



SEKAPUR SIRIH

Pertama-tama saya menyambut gembira dan memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada Para Staf Ahli Menteri yang telah memperakarsai diadakannya dialog di tiga propinsi yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Propinsi-propinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kalimantan Barat. Dialog dan penulisan yang melibatkan para akademisi di berbagai perguruan tinggi di ketiga propinsi tersebut sangat penting artinya karena merekalah yang secara dekat dengan daerah masing dan juga secara harfiah mengetahui lebih dalam persoalan di daerahnnya masing-masing. Karena itu tingkat akurasi penulisan ini sangat tinggi. Hasil dialog yang kemudian diwujudkan dalam 3 (tiga) buah buku tersebut adalah:

1. Dimensi Sosial-Budaya Dalam Pengembangan Pariwisata di Sulawesi Selatan.
2. Mozaik Sosial - Budaya untuk Pengembangan Kepariwisata di Aceh.
3. Multikultural dan Pariwisata di Kalimantan Barat.

Ketiga buku ini sangat penting untuk dibaca di cermati dan di kaji karena informasi dan nuansa data yang di kemukakan dalamnya sangat terkait dengan upaya yang dewasa ini sedang di galakkan di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yakni

Pembangunan sektor Kebudayaan dan Kepariwisata yang berkelanjutan, karena itulah kami sangat mendukung dialog akademis di tiga daerah dan upaya Penerbitan buku ini, dengan disertai harapan semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pengambilan keputusan dan juga sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan menuju masa depan yang lebih baik.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jero Wacik', with a stylized, cursive script.

Ir. Jero Wacik, SE

KATA PENGANTAR

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi yang memiliki keanekaragaman Budaya dan keunikan tradisi yang eksotik. Ada dua kelompok etnik besar di KalBar, Dayak dan Melayu, sementara dua lainnya Madura dan Cina sekalipun jumlahnya tidak sebanyak dua terdahulu tapi memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perekonomian di Kalimantan Barat, kelompok etnik lainnya Jawa dan Bugis jumlahnya lebih kecil tapi dalam hal – hal tertentu peranannya sangat besar.

Ciri utama provinsi ini adalah masyarakatnya yang sangat plural dan kemampuannya untuk meredam konflik serta kepatuhan masyarakatnya untuk hidup rukun dalam tatanan multikultural patut dipuji. Walau demikian tidak dapat dinafikan bahwa beberapa tahun lalu tempatnya pada tahun 1999 terjadi konflik yang memperhadapkan antara suku Dayak melawan Madura, suku Madura melawan Melayu dan bahkan pernah Cina melawan Dayak atau Cina melawan Melayu. Benturan-benturan sosial ini mewarnai dinamika mesyarakat KalBar. Ada empat tulisan dalam buku ini secara khusus mengamati masalah pluralisme dan multikulturalisme di KalBar. Masing – masing tulisan:

1. Dhidik Aprianyanto; Transmigrasi dan multikulturalisme di Era OTODA
2. Donatianus BSE Praptantya; Mertiso, pluralisme dan multikulturalisme
3. Dwi Haryono; pluralitas etnik serta usaha identifikasi pola konflik dan intergrasi antar etnik dalam rangka membangun masyarakat multikultural di KalBar
4. Drs. Poltak Johansen; Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Dayak dalam Masyarakat Multikultural

Dari keempat tulisan pluralisme dan multikultural tersebut. Ada empat hal yang dapat di simpulkan secara teoritis.

1. Multikultural merupakan suatu konsep dengan aspek – aspek yang sangat luas dan kompleks karena berhubungan dengan masalah – masalah budaya, politik, sosial, ekonomi, filsafat. Oleh sebab itu konsep multikulturalisme perlu terus dikaji terutama karena masyarakat kita berhadapan langsung dengan manusia yang serba kompleks di dalam dunia terbuka di era globalisasi. Konsep multikulturalisme merupakan konsep yang terbuka karena itu perlu disesuaikan dengan perkembangan budaya dan kehidupan sosial ekonomi suatu bangsa.
2. Budaya merupakan salah satu unsur penting yang menentukan masa depan manusia (*culture matters*). Multikulturalisme merupakan upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital (*cultural capital*) yang dapat membawa suatu komunitas menghadapi masa depan yang penuh resiko. Pengembangan multikulturalisme yang positif untuk menghadapi situasi yang tidak menentu, merupakan salah satu tugas umat manusia dalam menyelamatkan kehidupan bersama yang aman dan saling menghargai. Multikulturalisme menuntut kehidupan bersama yang penuh toleransi, tetapi saling pengertian antar budaya, antar bangsa dalam membina suatu dunia yang baru.
3. Multikulturalisme telah merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern tetapi yang perlu terus menerus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hal ini menuntut adanya revitalisasi multikulturalisme agar supaya multikulturalisme terhindar dari pengembangannya ke arah fundamentalisme serta narsisme budaya. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa kebencian terhadap kelompok budaya yang lain, bahkan dapat menyuburkan hidupnya terorisme internasional yang merupakan salah satu ciri dari masyarakat beresiko (*the risk society*) di masa depan. Multikulturalisme hendaknya dapat menyumbangkan rasa cinta terhadap sesama, membantu sesama yang dirundung kemalangan dan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan

bangsa dan sesama manusia. Multikulturalisme adalah alat yang aman dan sejahtera, dimana bangsa-bangsa saling menghargai dan saling membantu.

4. Apabila Huntington mengkhawatirkan dunia masa depan akan terjadi *clash* dari berbagai budaya, ternyata *clash* tersebut terjadi dalam kebudayaan sendiri seperti yang diamati oleh Fareed Zakaria. Multikulturalisme berupaya untuk meluaskan pandangan seseorang bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh dirinya sendiri atau kelompoknya tetapi kebenaran juga dimiliki oleh kelompok yang lain. Dengan saling mengenal dan menghargai mungkin dapat diciptakan kesepakatan untuk membangun kebenaran yang sama. Perbedaan didalam persepsi mengenai apa yang benar bukanlah merupakan halangan untuk tidak dapat bersama – sama dan membangun masyarakat dunia yang aman dan bahagia. Multikulturalisme akan memberikan peranan dan sumbangan yang sangat vital dan menentukan didalam membangun dunia yang baru dari reruntuhan masyarakat yang penuh resiko.

Selain tema Multikultural, ada enam tulisan lainnya menyangkut kepariwisataan, masing – masing tulisan :

1. Prof. Dr. Syarif Ibrahim Al Qadrie (Identitas Budaya dan Kompetitif Lokal dalam Pengembangan Sektor Kepariwisata di Kalimantan Barat)
2. Benedikta Juliatri Widi Wulandari (Pembangunan Kepariwisata Kota Singkawang di Era Otonomi Daerah; Peluang Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pariwisata Budaya)
3. Erdi Abidin (Peluang Pengembangan Industri Pariwisata Pedesaan di Kalimantan Barat)
4. M. Natsir (Kerajaan Kalimantan Barat sebagai Objek Wisata Sejarah Budaya)
5. Nurfitri Nugrahaningsih (Identifikasi Peluang dan Tantangan Pengembangan Pariwisata di Perbatasan Kalimantan Barat)

6. Wilis Maryanto (Naga dalam Perayaan Imlek dan Can Meh)

Dari keenam tulisan tentang kepariwisataan di Kalimantan Barat semuanya sepakat untuk menyatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi kunci utama pembangunan kepariwisataan di Kalimantan Barat, yakni:

1. Sumber daya fisik
2. Sumber daya manusia (SDM)
3. Sumber daya pengorganisasian modal

Bila ketiga sumber daya di atas diformulasikan ke dalam kondisi realitas Kalimantan Barat, maka ketiganya harus berjalan seiring seiring antara masyarakat dan pemerintah keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menanggapinya.

Potensi yang dimiliki masyarakat hendaknya menjadi program pemerintah, pemerintah tidak sebatas memberi pembinaan, tapi juga melalui kebijakan dan penganggaran daerah harus perlu diarahkan ke sana, karena jika hanya kepada masyarakat kepedulian itu diserahkan atau kepada pelaku bisnis semata tanpa keterlibatan pemerintah secara vital dalam kolaborasi ini, maka Kalimantan Barat tidak dapat berharap banyak dari pembangunan kepariwisataannya dan jika ini terjadi tentulah sangat disayangkan mengingat betapa kayanya Kalimantan Barat akan deposit kepariwisataan.

SELAMAT MEMBACA.....!!!!!!

Tim Pengarah :

1. Dr. Mukhlis PaEni
2. Dra. Sri Rahayu Budiarti,MM
3. Drs. Thamrin B. Bachri, M.Sc
4. Dra. Titien Soekarya, M.Si

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
I. IDENTITAS BUDAYA DAN KOMPETITIF LOKAL	1
DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR KEPARIWISATAAN DI KALIMANTAN BARAT	
Oleh : Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alqadrie, M.Sc.	
II. PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SINGKAWANG. 39	
DI ERA OTONOMI DAERAH : PELUANG PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA DAN EKONOMI RAKYAT	
Oleh : Benedikta Juliatri Widi Wulandari	
III. TRANSMIGRASI DAN MULTIKULTURALISME.....	67
DI ERA OTONOMI DAERAH (SEBUAH KASUS YANG TERJADI DI KALIMANTAN BARAT)	
Oleh : Dhidik Apriyanto, S.E.,M.Si	
IV. MEZTISO, PLURALISME DAN.....	99
MULTIKULTURALISME	
Donatianus BSE Praptantya	
V. PLURALITAS ETNIK SERTA USAHA IDENTIFIKASI	125
POLA KONFLIK DAN INTEGRASI ANTAR ETNIK DALAM RANGKA MEMBANGUN MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KALIMANTAN BARAT	
Oleh Dwi Haryono	
VI. PELUANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	161
PEDESAAN Di KALIMANTAN BARAT	
Oleh : Erdi Abidin	

VII.	KERAJAAN KALBAR SEBAGAI OBJEK WISATA.....	197
	SEJARAH BUDAYA	
	Oleh : M. Natsir	
VIII.	IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN.....	233
	PENGEMBANGAN PARIWISATA	
	(Kasus Jagoi Badang Kabupaten Bangkayang)	
	Oleh : Nurfitri Nugrahaningsih	
IX.	EKSTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK.....	265
	EKSTENSINYA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR	
	Oleh : Drs.Poltak Johansen	
X.	NAGA DALAM PERAYAAN IMLEK DAN.....	291
	CAP GO MEH	
	(Upaya Pengembangan Wisata Budaya di	
	Kalimantan Barat)	
	Oleh : Wilis maryanto.	

IDENTITAS BUDAYA DAN KOMPETITIF LOKAL DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR KEPARIWISATAAN DI KALIMANTAN BARAT*

oleh

Syarif Ibrahim Alqadrie**

Guru Besar Sosiologi, FISIP UNTAN

Pontianak, Kalimantan Barat

1. Pendahuluan : Kerangka Global Dalam Realitas Lokal

Perkembangan sektor pariwisata dunia dalam sepuluh tahun terakhir melonjak tajam, dan pertumbuhannya sangat besar dalam sejarah perekonomian dunia. Sejak 2003, pertumbuhan sektor ini, sebagaimana dilaporkan oleh WTO tahun 2004 dan UNWTO tahun 2005, mencapai angka pertumbuhan dua digit yakni sebesar 18,8%, sementara pada tahun 2004 mencapai angka pertumbuhan sebesar 10,6%. Meskipun terjadi penurunan sebagai akibat dari isu **SARS** dan Perang Irak, namun, pertumbuhannya masih termasuk ke dalam angka fantastis (WTO dan UNWTO, 20051).

Gambaran ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata secara global memiliki dimensi sosial ekonomi. Disamping dapat menumbuhkan bisnis yang berkorelasi dengan aktivitas kepariwisataan (hotel, restoran, *travel agent*, penerbangan dan lain-lain) yang membutuhkan tenaga kerja lokal, ia juga dapat melestarikan sistem dan tata nilai budaya dan kearifan lokal (Swrabroke dan Horner, 2001), sepanjang pemerintah melakukan pengawalan secara simultan terhadap sektor ini di masa mendatang.

Pertumbuhan yang besar di sektor ini telah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di seluruh dunia sebanyak 221 juta orang dengan kontribusi berupa penghasilan bagi mereka sebesar 11,3% tahun 2004 dan 8,9% di tahun 2005. Pada tahun 2005, produksi sektor pariwisata mencapai US\$ 6,2 triliun. Dengan peningkatan sebesar 4,6% per tahun, pada tahun 2015 sektor ini diperkirakan akan mendatangkan pendapatan sebesar US\$ 10,7 triliun (Theobald, 2005 dan Hong, 2008:*1).

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian dunia yang semakin besar ini membuat seluruh pelaku kepariwisataan dan juga pemerintah memberi perhatian besar, ingin mendapat manfaat dan ikut memperjuangkan agar daerah mereka menjadi salah satu tujuan wisata yang digandrungi para wisatawan, mulai dari tingkat daerah, nasional sampai pada tingkat global.

Indonesia, setelah 4 tahun menjalankan program kepariwisataan melalui *Visit Indonesia Year 1990*, berdasarkan hasil perhitungan WTO tahun 1996 sebagaimana dikutip oleh Elliot (1997:31) langsung masuk ke dalam 40 besar dunia sebagai daerah tujuan wisata terpopuler (rangking 27 dari 40 negara). Melalui pariwisata ini, turis yang berkunjung ke Indonesia telah mengeluarkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk menikmati paket wisata rata-rata sebesar US\$ 2.198 pada tahun 1985 dan itu menjadikan ranking Indonesia naik ke dalam rangking 20 besar. Peningkatan rank ini sekaligus bermakna bahwa sektor kepariwisataan Indonesia telah memberi kontribusi pada perekonomian negara dan daerah.

Negara yang sektor pariwisatanya telah maju seperti Amerika Serikat, Mexico, Perancis, Cuba, Amerika Latin dan tidak terkecuali juga Negara-negara di Asia seperti China, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand termasuk Indonesia (Wilson, 2008:37) sejak tahun

¹ WTO (World Tourism Organization) sejak 1 Desember 2005, berubah menjadi UNWTO (United Nations World Tourism Organization). Penjelasan lebih lanjut dapat diakses dari <http://www.world-tourism.org/newsroom/releases/2005/december/acronym.htm>.

1990 secara simultan menetapkan Tahun Kunjungan Wisata (untuk Indonesia dimulai dengan kampanye berslogan *Visist Indonesia Year 1990*), dan searah dengan ketetapan tersebut, pemerintah memberi perhatian besar melalui kebijakan yang dipertimbangkan masak-masak (*deliberative policy*) untuk menumbuhkan sektor bisnis dan industri kepariwisataan yang memiliki korelasi aktivitas dengan kunjungan wisata.

Di beberapa negara berkembang yang sektor pariwisatanya telah berkembang dengan pesat, seperti Cuba, Mexico, Singapura dan termasuk Malaysia, pengembangan sektor pariwisata dilakukan baik oleh pelaku bisnis pariwisata maupun oleh pemerintah melalui berbagai macam cara, mulai dari pengaturan kebijakan, perlindungan, promosi dan pemasaran paket wisata, penganggaran dan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian budaya bangsa berpotensi meningkatkan kunjungan wisata (Elliot, 1997).

Oleh karena itu, dengan maksud agar dapat menarik kunjungan wisata secara *massive*, pemerintah di beberapa negara di dunia mengembalikan lagi pendapatan dari sektor ini kepada sektor penghasilnya, yakni sektor pariwisata dengan membangun infrastruktur kepariwisataan dan bahkan diupayakan lagi dengan menganggarkan pembiayaan dari sumber lain, termasuk dana pinjaman luar negeri sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Cuba dan Mexico serta Brazil, dari World Bank melalui *American Development Bank* (Inter-American Development Bank. 2004). Hal ini dilakukan karena manfaat keberadaan infrastruktur kepariwisataan berdimensi ganda; artinya keberadaan beragam infrastruktur kepariwisataan di daerah dimaksud tidak hanya dapat digunakan oleh wisatawan tetapi juga oleh penduduk lokal (Swrabroke dan Horner, 2001). Dengan demikian, dampak pembangunan infra struktur pariwisata terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat lokal dapat memperbaiki kualitas hidup, merubah gaya hidup, memberi kemudahan bagi penduduk, mempunyai efek ganda dalam ekonomi yang akhirnya berdampak pada peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat lokal dalam kerangka global (Brown dan Hall, 2000:5).

Infrastruktur dimaksud antara lain adalah jalan, jembatan, sarana olah raga, toko, fasilitas kesehatan, sarana komunikasi dan perbankan. Tidak mesti pembangunan berbagai infrastruktur di atas dibangun dengan fasilitas yang megah, tetapi paling tidak menunjuk adanya beberapa persyaratan seperti bersih, mudah terjangkau, sistem kerja standar, memberi rasa aman, petugas yang ramah, dapat dipercaya, mudah berkomunikasi dan mau mendengar keluhan pelanggan (Zeithml et al, 1990; Islamy, 2007; dan Shah, 2005).

Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata secara global telah membuat pemerintah di seluruh dunia berjuang merebut pangsa pasar turis dan melakukan pembenahan infrastruktur dan sarana kepariwisataan domestik. Upaya ini dilakukan agar mampu menembus berbagai jaringan pasar global dengan menawarkan produk yang kompetitif yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Desain industri pariwisata dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi tidak ada duanya agar dapat menempati posisi terbaik di pasar dunia (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Porter, 1985; dan Barney, 1991).

2. Evolusi Teori Pembangunan Dan Pembangunan Pariwisata: Perspektif Teoritis dan Realitas

2. 1.Evolusi Teori Pembangunan.

Teori pembangunan secara terus-menerus mengalami evolusi dan berkembang seiring dengan perkembangan isu global yang mengarah pada tidak lagi pada kekuatan konsep tetapi lebih pada aksi (Harrison, 2001:5–8). Sampai saat ini, paling tidak ada 4 (empat) paradigma pembangunan, yakni **modernisasi**, **ketergantungan**, **ekonomi neoliberal** dan **pembangunan alternative** (Sharpley dan Tefler, 2002:38).

Lahir dan berkembangnya teori yang terakhir didasarkan pada gagalnya program pembangunan yang selama ini dilakoni dan dibiayai dari dana pinjaman luar negeri melalui lembaga keuangan internasional (WTO, IMF dan WB) sebagaimana didorong oleh teori modernisasi dalam mewujudkan “kemakmuran” di negara-negara miskin. Kegagalan ini, selain disebabkan oleh terlalu “ketatnya” pengawalan negara-negara industri maju—sejak penyusunan dan implementasi sampai pada evaluasi program pembangunan—juga didasarkan pada kuatnya kepentingan mereka dalam menciptakan ketergantungan pembangunan sebagai bentuk “penjajahan” baru dalam ekonomi dan keuangan.

Teori pembangunan itu sendiri berkembang setelah perang dunia kedua usai. Ia dibagi menjadi dua bagian, yakni ideologi pembangunan dan strategi pembangunan (Sharpley dan Tefler, 2002:38). Ideologi menjadi pembentuk nilai dasar atau paradigma dalam melaksanakan pembangunan sebuah bangsa, sementara strategi pembangunan menjadi alat untuk menunjuk dan memantau bagaimana proses pembangunan itu sendiri dijalankan (Hettne, 1995; Goldsworthy, 1988 dan Sharpley dan Tefler, 2002:38). Ideologi itu sendiri mendasari teori-teori dan perspektif (Fakih, 2000; Alqadrie, 1993), sedangkan strategi pembangunan, khususnya strategi pembangunan pariwisata, yang kuat hendaknya didasari oleh paradigma, teori dan perspektif yang tepat.

Pembagian teori pembangunan ke dalam paradigma dan strategi diprakarsai oleh tiga kekuatan (atau -lebih tepat- peristiwa = tambahan penulis) besar dalam pembangunan ekonomi dan politik dunia setelah perang dunia kedua. Ketiga kekuatan tersebut adalah (1) Rencana Pembangunan Marshall yang ditujukan untuk membangun Eropa pasca

perang dunia kedua, (2) Adanya optimistik pada masyarakat barat (AS) untuk menangkap peluang masa depan sebagai polisi dunia yang dapat mengatur pembangunan Negara-negara berkembang dan sekutunya, (3) Munculnya kekuatan negara berfaham sosialis yang juga ikut melebarkan sayap dan pengaruh serta model pembangunan di negara domino (Dickenson, 1986). Akan tetapi, penulis percaya bukan hanya tiga unsur di atas, tetapi juga kegagalan teori atau aliran Modernisasi dan Marxisme lama menimbulkan paradigma dan strategi (lihat juga Alvin So, 1990). Semua pengaruh tersebut, kemudian larut seiring dengan keruntuhan Sovyet ke dalam negara-negara kecil di teluk Baltik. Krisis ekonomi yang mengguncang dunia memunculkan model baru dalam pembangunan sebuah bangsa. Negara-negara sedang berkembang, selain memiliki sumber kekuatan pada ketersediaan sumber daya alam, mereka juga memiliki kelemahan seperti tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang masih rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan tingkat ketergantungan akut. Potensi dan kelemahan ini menjadi dasar motivasi untuk terciptanya kekuatan dan memberi pengaruh pada ekonomi dan politik pembangunan di negara-negara berkembang (NSB), sementara pada sisi lain, kelemahan dan ketidak-berdayaan ini dimanfaatkan untuk menciptakan sistem global yang memaksa negara-negara miskin untuk ikut terlibat atau melibatkan diri dalam kompetisi global.

Oleh karena itu, sebagian penganjur teori pembangunan tidak menghendaki itu terjadi sehingga terjadi pergeseran paradigma dalam memahami konsep dan konteks pembangunan di NSB. Dalam kondisi NSB yang masih lemah ini, adalah tidak mungkin mereka dipaksa untuk mengikuti model pembangunan Barat dan ikut dalam

kompetisi global, meskipun dengan diberi “pinjaman” modal pembangunan. Kesadaran baru itu melahirkan konsep pembangunan yang berdimensi ganda yakni tidak hanya membangun ekonomi mereka semata tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan budaya yang dapat menuntun proses itu agar tidak kehilangan makna, berjalan dalam koridor moral yang dianut, beretika dan berkelanjutan (Goldsworthy, 1988).

(1) **Paradigma modernisasi**

Paradigma ini menekankan pada upaya peralihan model produksi dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industri berdasarkan nilai-nilai dan institusi “modern” sebagaimana telah diterapkan pada pembangunan di Amerika Utara dan Eropa Barat (Schmidt, 1989). Sumber kekuatan pembangunan adalah pada modal uang, sehingga untuk melaksanakan dan mengupayakan berhasilnya pembangunan, selain masyarakat dan pemerintah di NSB menghilangkan nilai lokalitas, budaya, tradisi dan kearifan lokal, juga harus mengganti mereka dengan nilai dan institusi “modern” serta melakukan pinjaman luar negeri untuk membiayai kebutuhan pembangunan bangsa lebih bercorak material, karena sumber daya manusia dan dana dalam negeri dianggap tidak cukup memadai.

Penganut paradigma atau teori modernisasi dalam analisisnya mengadakan dikotomi antara moderenitas, yang telah dan sedang dialami oleh masyarakat Barat, vs tradisionalisme, yang telah dan sedang dialami oleh masyarakat NSB. Agar supaya masyarakat NSB dapat mengalami kemajuan pesat, mereka, berdasarkan oaradigma ini, hendaknya mengikuti jalan dan arah yang telah dan sedang ditempuh oleh masyarakat Barat. Untuk itu, NSB seharusnya mampu

menghancurkan setiap barikade yang “menghalangi” kemajuan mereka berupa unsur-unsur budaya: tradisi, adat kebiasaan, dan segala bentuk nilai-nilai lokal. Tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah mengembangkan industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional bruto/PNB (*gross national product/GNP*), dan pendapat domestik bruto/PDB (*gross domestic product/GDP*) yang tinggi; menambah pendapatan rata-rata penduduk (Inkeles; Comte dalam Amitai Etzioni dan Eve Etzioni, 1964:342-361), dengan tidak begitu memperhatikan faktor/indikator non-ekonomi atau sosial seperti menekan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan indek pembangunan manusia atau Angka Rata-Rata Kualitas Hidup (So, 1990:89-164; Budiman, 1995:16-41). Target di atas, dari hasil kajian sosilogi politik, dianggap bernilai semu karena ia tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari realitas sosial masyarakat (So, 1990) dan justru menciptakan jurang yang semakin lebar baik dalam lingkup pergaulan antara bangsa maupun dalam negara bangsa itu sendiri.

(2) **Paradigma depedensi**

Berdasarkan struktur politik dan ekonomi dunia dan institusi yang ada, penganut paradigma ini melihat bahwa NSB, dalam hubungan dengan negara-negara industri maju (NIM), berada pada posisi yang lemah (Todaro, 1997). Namun, posisi yang lemah ini menurut Hettne (1995) bukan karena NSB memiliki kekurangan modal ataupun semangat kewirausahaan tetapi lebih pada pembagian kerja internasional, yang sedemikian tidak adil yang menempatkan posisi negara-negara ini sebagai tempat untuk distribusi dan pemasaran produksi NIM. Kekuatan struktur ekonomi,

politik dan institusi dalam negeri akan tidak mampu membendung kekuatan yang berasal dari luar dan secara terus-menerus menjadikannya sebagai negara atau masyarakat yang bergantung pada kekuatan modal dan produksi yang dimiliki oleh NIM. Oleh karena itu, pengkritik teori ini, seperti Schmidt, 1989), mendorong NSB untuk keluar dari keterkungkungan dalam system kapitalis dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya dalam negeri untuk bertahan hidup di atas kekuatan sendiri.

Peran institusi internasional seperti IMF, WB dan WTO sangat besar dalam memuluskan bekerjanya teori pembangunan lain, khususnya teori modernisasi. Pengalaman keluar dari krisis ekonomi pada beberapa Negara di Asia seperti Korea, Jepang, Singapura, Malaysia dan Thailand membuktikan bahwa optimalisasi kekuatan lokal telah berhasil membawa masyarakat dan pemerintah di masing-masing negara tersebut keluar dari “cengkraman” atau “ketergantungan” pada bentukan sistem dan struktur ekonomi global (Hale, 1998), tetapi sebaliknya seperti Indonesia, Brazil, Argentina dan Mexico yang larut dan tunduk pada ketentuan IMF, terus mengalami krisis berkepanjangan dan bahkan mengarah pada krisis kepercayaan serta konflik vertical dan horizontal.

(3) Paradigma ekonomi Neoliberal.

Paradigma atau teori ekonomi ini hadir sebagai bentuk kritik atas terlalu campur tangan lembaga internasional dalam urusan pembangunan ekonomi, politik dan sosial pada negara berkembang (Brohman, 1996). Penganjur teori ini ingin memberi kebebasan kepada pemerintah dan masyarakat NSB untuk menentukan sendiri dengan siapa mereka akan berkolaborasi dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik.

Kebutuhan antara masyarakat di NIM dengan masyarakat di NSB adalah berbeda dan perbedaan ini tidak perlu dipersamakan dengan memaksa NSB untuk mengikuti sistem yang dibentuk dari luar. Pemerintah dan masyarakat di NSB hendaknya diberi kebebasan dan bahkan perlu didukung agar mampu menciptakan kekuatan berdasarkan keunggulan (komperatif yang segera meningkat menjadi kekuatan = tambahan penulis) kompetitif dari sumber daya yang dimiliki dan bukan sebagai subordinasi dari sistem dunia (Brohman, 1996). Akhir dari cerita ini adalah munculnya reformasi sektor publik yang menginginkan dikurangnya peran pemerintah dalam urusan produksi, regulasi pasar dan sistem distribusi pada NSB untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, meskipun akhirnya model pembangunan seperti ini, menurut (Brohman, 1996) melahirkan ‘perselingkuhan’ antara pemerintah dengan pihak swasta dan menciptakan tindakan nepotisme, kolusi dan korupsi (NKK)² yang berujung pada terabaikannya kebutuhan masyarakat dalam kebijakan politik dan ekonomi.

(4) Paradigma Pemangunan Alternatif.

Model pembangunan dari paradigma atau teori ini yang muncul pada awal 1970-an, berawal dari kekecewaan para penganutnya terhadap model-model pembangunan sebelumnya, khususnya modernisasi, yang lebih berorientasi

²

Tindakan seperti ini yang banyak terjadi di NSB dan merugikan Negara dimulai dengan nepotisme yang menjalar menjadi kolusi. Oleh karena ada kesempatan yang lebih luas untuk melakukan dua hal tersebut dan dua tindakan ini merupakan dasar dari tindakan korupsi, maka tindakan korupsi dapat dengan mudah dilakukan. Itulah sebabnya saya lebih cenderung menamakannya NKK bukan KKN. Selain itu KKN sebagai singkatan dari kuliah kerja nyata telah terkenal dan berjalan mulus disetiap perguruan tinggi di Indonesia. Sebaliknya NKK sebagai singkatan dari normalisasi kehidupan kampus mengandung konotasi negative, karena ia merupakan tindakan memberangus kebebasan dan kreativitas mahasiswa yang dilakukan oleh Departement Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan Menteri Daoud Joesoef pada era Soeharto.

pada penghisapan, pembatasan akses pada dan penarikan surplus sumber daya lokal, dan dianggap oleh Schmidt (1989) dan Edward (1989) sebagai telah gagal dalam menanggulangi berbagai masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, ketidak-berdayaan gender, dan ketergantungan pada NSB yang dianggap sebagai objek penindasan. Dilandasi keinginan untuk menuntaskan berbagai persoalan kemanusiaan ini, penganjur teori Pembangunan Alternatif menerobos penghalang (*barricades*) yang selama ini dianggap menghalangi kemajuan. Fokus kajian mereka, menurut hemat Brohman (1996) adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah seputar kemiskinan dan keterbatasan seperti gizi buruk pada bayi, penyakit menular, sanitasi, buta huruf, penduduk setempat yang tidak terberdayakan, dan (ketidaksamaan dan ketidakberdayaan gender = tambahan penulis), pemberdayaan gender. Dengan demikian semangat persamaan dan partisipasi masyarakat terbangun dan menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di NSB.

Kontrol masyarakat atas kebijakan pemerintah, alokasi anggaran yang lebih adil untuk kesejahteraan sosial dan adanya proyek internasional (yang tidak mengikat = tambahan dari penulis) yang diarahkan untuk menuntaskan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan kemanusiaan pada tingkat lokal, selain dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat itu sendiri, juga membentuk sistem penguatan lokal yang memungkinkan terbentuknya partisipasi masyarakat secara *massive* (Sharpley dan Tefler, 2002:48). Kondisi ini akan mengantarkan masyarakat pada keberlanjutan pembangunan yang diterjemahkan ke dalam berbagai konteks, menyangkut tidak saja aspek lingkungan hidup, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, sejarah, budaya

dan politik yang menunjuk pada pembelajaran sosial dan kearifan lokal (Friedmann, 1966).

2. 2. Aplikasi Paradigma atau Teori Pembangunan Pada Kepariwisataaan.

Pengembangan lokalitas selain memenuhi prinsip moral dan etika dalam pembangunan kontemporer, ia juga menjadi sebuah jalan untuk mewujudkan nilai kompetitif dengan mendesain sedemikian rupa faktor atau kelebihan dalam sumber daya alam pedesaan, pantai, gunung, budaya dan sejarah menjadi produk wisata yang menarik dan dapat dihadirkan dalam paket wisata. Keunikan yang tercipta dari pengembangan unsur lokal dapat menjadi salah satu daya saing daerah sebagai destinasi wisata (Malecki, 1997).

(1) Paradigma Modernisasi.

Dari pandangan paradigma ini, pengembangan lokalitas, budaya dan tradisi lokal sama sekali tidak lagi relevan dengan upaya pengembangan pariwisata. Infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang berorientasi dan bercorak lokal dan “tradisional” dianggap kurang menarik, karena “tidak memiliki standar” kenyamanan, kemegahan dan keamanan. Paling tidak sebuah daerah akan menjadi destinasi kunjungan wisata manca negara yang disukai sepanjang terdapat sistem dan jaringan dengan negara maju tidak saja jaringan penerbangan, jaringan bisnis, infrastruktur yang dibangun menurut kebutuhan dan selera turis. Hal-hal seperti itu memang tidak dapat dihindari, itulah salah satu syarat dari pengembangan suatu destinasi kunjungan wisata sekarang ini. Akan tetapi persyaratan itu berkaitan juga dengan

tradisi, pola hidup, kebiasaan dan “kebebasan” yang tidak bertentangan dengan budaya dan karakter “moderen” Barat

Keberadaan turis manca negara di NSB yang dipandang sebagai salah satu sumber penghasil devisa, meningkatkan daya serap tenaga kerja lokal dan menjadi penarik modal pembangunan sekaligus menjadi promosi ekonomi (UNWTO, 2005), hendaknya mengarahkan dan memperkuat ke dalam jaringan satu sistem global, sistem kapitalis. Oleh karena itu, keberadaan turis dalam masyarakat NSB, khususnya dari NIM, sebagaimana diinginkan oleh sebagian penganut paradigma moderisasi, hendaknya diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya untuk melakukan dan mengaplikasikan kebiasaan, tatacara, dan perilaku mereka agar transisi dari “tradisionalisme” dalam masyarakat NSB ke “moderen” dapat berjalan lancar melalui kegiatan pariwisata. Fungsi lain dari pariwisata, menurut pandangan teori ini adalah sebagai salah satu cara untuk mempercepat terjadinya proses tranformasi nilai dan pertumbuhan dari masyarakat “tradisional” dan tidak berkembang, menuju modernisasi, globalisasi dan westernisasi di negara berkembang ke satu sistem kapitalis global.

(2) Paradigma atau teori ketergantungan.

Model dari paradigma atau teori ini paling banyak digunakan dalam menganalisis sektor dan kegiatan pariwisata. Aspek yang menjadi fokus perhatian adalah dampak negatif dan positif pariwisata terhadap kehidupan social, yang terkadang tidak dibahas secara berimbang. Sebagai daerah tujuan wisata, pemerintah dan masyarakat di NSB dituntut untuk melakukan standarisasi produk dan layanan pariwisata. Bilamana pemerintah pada daerah tujuan wisata tidak mampu

mempersiapkan infra struktur, fasilitas dan layanan wisata yang standar, maka pemerintah dari mana para turis itu berasal tidak memperbolehkan warga mereka menggunakan fasilitas itu. Larangan terbang pesawat-pesawat Indonesia, khususnya Garuda ke negara-negara Uni Eropa³ dan Amerika, karena alasan standar keamanan, demikian juga larangan kunjungan ke China sebagai akibat adanya wabah flu burung, merupakan salah satu bentuk dari aplikasi teori ketergantungan karena warga mereka yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia harus menggunakan maskapai penerbangan lain. Sementara dampak turis pada persebaran penyakit kelamin dan perubahan gaya hidup penduduk lokal di NSB, menurut pengamatan Britton (1982), tidak terpublikasikan, (khususnya Amerika Latin, Asia terutama di Thailand dan Philipina = tambahan dari penulis), karena tertutupi oleh dampak positif dalam bidang ekonomi dan tersedianya lapangan kerja.

(3) Paradigma atau teori Ekonomi Neoliberal.

Penganjur paradigma ini menempatkan pariwisata sebagai aktivitas yang memberi kontribusi pada peningkatan nilai tukar dalam negeri dan menambah neraca pembayaran sehingga persebarannya dipacu dengan mengarahkannya pada kepemilikan sumber daya daerah/lokal agar memancing atau mengundang terjadinya investasi melalui aktivitas

3

Larangan terbang pesawat-pesawat terbang Indonesia keseluruh negara Uni Eropah yang mulai diberlakukan 3 (tiga) tahun lalu dan sekarang diperpanjang sejak 25 Juli 2008 selain disebabkan oleh kurang dipenuhinya standar keselamatan internasional, tetapi lebih disebabkan oleh masalah pelanggaran HAM yang belum tuntas proses hukumnya yaitu factor keselamatan di dalam pesawat terbang itu sendiri (*internal safety in an aircraft*). Pada kasus ini sebuah pesawat terbang sipil, bahkan milik pemerintah telah digunakan oleh individu dan instansi non-sipil untuk membunuh seorang warga sipil. Bilamana proses hukum pelanggaran HAM ini tuntas, pelanggaran ini akan segera dicabut setelah Indonesia memenuhi standar keselamatan lainnya.

pariwisata (Dieke, 1995). Untuk mewujudkan kondisi seperti ini, pemerintah di NSB dituntut untuk memberikan dasar pijakan bagi masuknya investasi asing seperti melepas beberapa tugas pemerintah dalam memproduksi barang publik, mengurangi monopoli negara, penjualan aset perusahaan negara serta liberalisasi ekonomi yang memberi akses pada investasi asing untuk masuk dan lain-lain. Konsep ini sering dimaknai secara dangkal atau salah kaprah oleh pengambil kebijakan negara sehingga pada akhirnya mereka melakukan berbagai tindakan konyol mulai dari privatisasi BUMN sampai pada penjualan aset perusahaan negara, seperti terjadi dalam kasus antara lain INDOSAT, Perusahaan Pesawat Terbang Nusantara, dan beberapa perusahaan perbankan.

(4) Paradigma Pembangunan Alternatif.

Isu penting yang diusung oleh para penganjur teori dari paradigma ini dalam dunia pariwisata adalah isu-isu khusus seputar keunikan alam pedesaan, keunikan budaya, keunikan kehidupan suku terasing, program pemberdayaan keluarga miskin, isu gender dan lain-lain yang kesemuanya diarahkan tidak hanya untuk menarik kunjungan wisata, tetapi juga untuk menciptakan program atau kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemberdayaan. Secara khusus, kegiatan pariwisata hendaknya dapat membuka lapangan kerja dalam segala lapisan masyarakat, melestarikan alam, fauna dan flora dan juga menghilangkan ketidaksamaan gender dengan meningkatkan peranan perempuan kawasan lokal dan pedesaan.

Beberapa LSM tingkat dunia, seperti *World Wild Foundation (WWF)*, *Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)*, *The Green Peace*, *Center for International Forestry*

Research (CIFOR), UNICEF dan lain-lain, selain melakukan perjalanan wisata ke lokasi khusus, seperti mengunjungi taman nasional di Kalbar, ke rumah panjang, ke pemukiman Dayak Sungkung di Bengkayang dan lain-lain, tidak jarang pula wisata serupa ini dilanjutkan dengan melaksanakan berbagai aktivitas yang berbasis studi dan kebijakan. Keberlanjutan program kunjungan ini sekaligus mengindikasikan bahwa kekuatan kepariwisataan Kalbar dan NSB pada umumnya bukan terletak pada kepemilikan modal uang, tetapi lebih pada kekayaan nilai, situs budaya, kehidupan sosial dan sumber daya dan keindahan alam yang khas. Oleh karena itu, potensi ini perlu didukung oleh pemerintah melalui pembangunan infra struktur kepariwisataan, mendesain attraksi wisata yang khas atau menjadwalkan kegiatan kunjungan dan bahkan mendirikan pusat-pusat studi sehingga dapat memberi kontribusi tidak hanya pada sektor pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada ilmu dan teknologi, yang berdampak balik (*feedback impacts*) pada peningkatan luas bagi sektor pariwisata..

3. Faktor-Faktor Penarik Permintaan Kunjungan Wisata Di Indonesia Pada Umumnya Dan Kalimantan Barat Pada Khususnya.

Negara-negara ASEAN, terutama Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia, serta Singapura memiliki kekuatan yang sama dalam industri pariwisata, yakni pada kekuatan lokasi geografi, penduduk, sejarah dan situsnya, bahasa, budaya masyarakat, dan sumber daya alam. Dengan letak kekuatan itu, industri pariwisata yang dijual adalah juga memiliki kesamaan, seperti pantai, gunung, keragaman

budaya, karya seni budaya, dan hasil-hasil kerajinan/ayaman tangan (Aznam, 1992). Produk-produk wisata sebagaimana disebutkan di atas sekaligus juga menjadi faktor yang ikut mempengaruhi permintaan wisata ke kawasan ini (Leiper dan Hing, 1998) Ada beberapa faktor yang membuat sebuah destinasi atau tujuan wisata menjadi unik dan meraih tempat tertentu pada pasar global (Middleton dan Clarke, 2001). Faktor-faktor tersebut, menurut hemat Hong (2008 dan Mazanec, 2007) tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan diupayakan melalui pembangunan dan pembinaan secara berkelanjutan. Kepariwisata di Indonesia dan Malaysia secara lebih rinci, menurut pengamatan Tan, dkk. (2002: 63-84), berdasarkan hasil riset mereka mengenai model arus yang mempengaruhi kepariwisataan di negara tersebut, terdiri dari berbagai faktor yaitu: (1) pendapatan rata-rata penduduk di daerah tujuan wisata, (2) faktor harga akumulasi paket wisata, (3) popularitas daerah tujuan wisata, (4) kejadian atau peristiwa khusus di daerah tujuan wisata, dan (5) kurangnya informasi paket wisata dan media periklanan.

Faktor-faktor tersebut dijelaskan pada uraian berikut ini.

Faktor pertama adalah bahwa pendapatan rata-rata masyarakat pada daerah tujuan wisata akan mempengaruhi tingkat kenyamanan turis dalam melaksanakan pariwisata. Para turis menginginkan perjalanan mereka bukan untuk pamer kesejahteraan melainkan untuk menikmati apa yang tidak mereka miliki di daerah mereka. Selain itu, dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik, kebutuhan turis selama melakukan perjalanan wisata akan tidak mengalami kesulitan.

Faktor kedua yang mempengaruhi arus kunjungan wisata ke Indonesia adalah faktor harga, dan faktor ini sekaligus menambah atau mengurangi daya saing. Bila harga paket wisata yang terlalu tinggi, maka calon turis akan melakukan *benmarch* dengan memiliki beberapa daerah tujuan wisata sehingga calon turis memiliki beberapa alternatif daerah tujuan wisata yang mereka pilih. Faktor lain yang masih terkait dengan harga paket wisata antara lain adalah harga kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah tujuan wisata, nilai tukar mata uang mereka dengan mata uang domestik, dan biaya transportasi menuju dan dari tempat wisata.

Selama ini, nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain menjadi daya tarik bagi wisatawan manca negara, namun dua hal lainnya masih menjadi kendala terbesar yang selama ini dialami oleh turis manca negara dan pengalaman itu bergulir melalui “*tells the truth*” oleh seorang mantan turis kepada calon turis (Harrison, 2001). Dengan dasar ini, Tan et al (2002) merumuskan teori mereka bahwa semakin tinggi harga kebutuhan barang dan jasa di daerah tujuan wisata, akan semakin rendah permintaan turist untuk melakukan kunjungan wisata ke daerah tersebut.

Faktor selanjutnya adalah popularitas daerah tujuan wisata. Untuk kasus di Indonesia, daerah tujuan wisata yang telah mendunia antara lain adalah Bali, Danau Toba, dan Pantai Lombok, serta beberapa kawasan di Sumatera Barat, terutama bagi turis asal Jepang, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Inggris. Faktor popularitas sebuah kawasan tidak lepas dari kekuatan iklan yang kemudian membentuk *image* mengenai sebuah kawasan wisata dan harapan untuk menggapai imej tersebut. Faktor ini, juga dikuatkan dengan pengalaman yang baik (*good experience*) dan persepsi yang baik (*good persepction*) dari mantan turis (Pearce, 2005).

Faktor keempat adalah bahwa permintaan turis pada sebuah kawasan juga dipengaruhi oleh ada atau tidaknya *event* atau kejadian khusus dan luar biasa pada daerah tujuan wisata (Wilson, 2008a dan 2008b). Kejadian khusus yang dimaksud antara lain adalah ketidakstabilan politik, konflik sosial, terorisme, wabah penyakit menular, resesi ekonomi dan lain-lain, untuk faktor-faktor yang menurunkan permintaan turis. Sementara hal-hal yang dapat menguatkan atau menaikkan permintaan wisata ke sebuah daerah meliputi pameran bisnis (*expo*), acara perlombaan atau kejuaraan olahraga, seminar internasional dan lain-lain dan termasuk festival budaya daerah.

Beberapa turis yang pernah bertemu dengan penulis di Jakarta, Bali, dan Surabaya, bahkan di beberapa kota di Eropah dan AS berbicara tentang tidak populernya KalBar sebagai kawasan wisata, mengatakan dengan gamblang bahwa mereka tidak mendapatkan data yang akurat yang dapat menuntun mereka pada pilihan destinasi ke KalBar dan ke kawasan lain. Selain itu, Kalbar, dalam ingatan mereka termasuk daerah rawan konflik.

Anggapan orang luar negeri terhadap KalBar seperti ini terkait dengan dua pertikaian besar yang pernah terjadi antar anggota komunitas di daerah ini pada tahun 1996 dan 1998, dan itu tidak dilakukan pembersihan atau penghapusan ingatan sehingga mereka beranggapan KalBar masih sebagai daerah yang tidak aman. Untuk itu, semua komponen bangsa, pemerintah dan semua lapisan masyarakat dapat diminta untuk ikut berperan dalam menjelaskan bahwa Kalbar sebagai bagian dari Indonesia adalah daerah yang aman, nyaman dan eksotik untuk dikunjungi turis manca negara.

Faktor kelima adalah kesulitan data untuk memilih tujuan wisata dan jenis wisata yang ada, kesulitan ini juga dialami oleh turis sebagai akibat dari kurangnya informasi paket wisata dan media periklanan untuk menjangkau mereka (Crouch, 1996; lihat juga Middleton et al, 2001). Akumulasi dari berbagai faktor di atas, mempengaruhi permintaan wisata ke Indonesia oleh turis manca negara.

4. Identitas Budaya Dalam Konteks Kepariwisataaan Daerah

Budaya secara esensial terbentuk dari hasil interaksi antara anggota kelompok dalam atau antar masyarakat, dan oleh karena itu, ia dapat dipelajari, dioptimalkan dan dilestarikan (Greenwood, 1989). Berbicara mengenai budaya dalam dunia kepariwisataan, itu berarti membicarakan tentang interaksi antar penduduk dengan menghasilkan sesuatu melalui proses belajar untuk disajikan menjadi paket wisata. Budaya terbentuk dari hubungan sosial yang dimanifestasikan ke dalam atau menghasilkan situs atau peninggalan yang dapat dilihat atau ditampilkan secara nyata dan berkelanjutan. Budaya dan identitas berisi sejumlah pola, pengetahuan dan nilai yang sedemikian rupa diperoleh dan ditransformasikan dari generasi ke generasi dan diorganisir sedemikian rupa dengan menggambarkan keberlangsungan tradisi dan karakteristik kelompok (Picard, 1995; Peterson, 2004).

Lebih lanjut, Burns dan Novelli (2006:3) menyatakan bahwa unsur-unsur lokalitas atau sesuatu yang bersifat lokal baru dapat dijual setelah diproduksi dan dikombinasikan dengan berbagai faktor produksi lain (seperti tanah, tenaga kerja, modal, wiraswasta, gedung) dan keahlian. Ini berarti bahwa

keunikan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah akan dapat dinikmati bilamana berbagai sarana telah tersedia dan diwujudkan ke dalam satu paket produk yang memudahkan orang untuk mencapainya.. Hampir secara keseluruhan, unsur yang ditonjolkan dalam setiap industri pariwisata adalah sesuatu yang terkait dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki pada tingkat lokal. Penekanan ini menjadi logis karena keberadaan *tangible* dan *intangible goods* di tingkat lokal dapat dikemas dan dioptimalkan sedemikian rupa menjadi produk wisata, dan pengunjung atau wisatawan secara langsung dapat menikmati produk wisata di tempat dimana objek itu berada (Beckerson dan Walton, 2005). Jenis wisata ini biasanya berupa panorama alam, situs budaya atau barang peninggalan sejarah dan fenomena alam lainnya yang mungkin tidak ada duanya di dunia.

Selain itu, ada juga produk wisata yang dapat dibawa dan dipentaskan sesuai dengan penawaran dan pesanan. Katagori jenis wisata yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain adalah wisata budaya, musik dan keahlian khusus (*talent*) yang dikuasai oleh para attraktornya (Burns dan Marina, 2006). Unsur identitas budaya yang kompetitif yang dimiliki daerah dapat berupa warisan budaya (*cultural heritage*), gaya hidup (*life style*) atau keberadaan sumber daya alam (*natural resourches*) yang dapat menjadi kekuatan dan membentuk sebuah imej tentang keunikan daerah (Barney, 1991).

Beberapa contoh imej yang telah melekat dan menunjukkan identitas sebuah bangsa/daerah adalah Thailand dengan wisata sek wanita muda dan cantik; Singapura dengan wisata belanja; Cuba terkenal dengan cerutunya, Amerika Latin dengan Ragam Budaya dan Pesona Wanita Cantik, Afrika

dengan Wisata *Adventure*, Flora dan Fauna; Mesir dengan penari perut dan wisata monumental sejarah; India dengan Wisata Budaya; Paris dengan wisata mode yang pesat; dan Spanyol dengan sajian matador, sementara Indonesia dikenal dengan wisata alam dan budaya (Harrison et al, 2001; dan Eades, 2007). Imej yang terbentuk tersebut sekaligus menjadi kekuatan lokal yang dapat menggelinding menjadi daya tarik khas kunjungan wisata.

Imej-imej yang menggambarkan “realitas” sebuah kawasan sebagaimana tersebut di atas bukanlah sesuatu yang bersifat langgeng (*the permanent thinks*) melainkan sebuah konstruksi sosial (*the social construction*) yang terbentuk dari sebuah apresiasi atau penghargaan atas pengalaman pelaku wisata, dan oleh karena itu, ia perlu dipertahankan oleh masyarakat, pelaku bisnis pariwisata dan pemerintah. Kolaborasi dari ketiga unsur di atas akan membentuk sebuah kekuatan yang dapat melanggengkan imej yang telah terbentuk pada seorang calon turis.

Mengekalkan imej tentang KalBar berarti juga meminta masyarakat untuk berperan sebagai kelompok pelestari budaya dan penjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan, sementara kelompok bisnis diminta untuk bersaing secara sehat dengan hanya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, sedangkan pemerintah berperan dalam memberikan perlindungan, fasilitasi kebijakan dan pembangunan infra struktur yang memberi akses kepariwisataan kepada wisatawan pada objek wisata.

Identitas budaya dan keberadaan kelompok etnis di KalBar bagaikan satu mata uang logam dengan dua sisinya. Oleh karena itu, identitas budaya yang paling menonjol, dengan tidak bermaksud menafikan kelompok etnis lainnya di Kalbar, adalah Dayak, Melayu dan China. Ketiga kelompok

etnis ini merupakan kelompok paling dominan dalam struktur masyarakat KalBar. Oleh karena itu, identitas budaya dalam industri pariwisata yang ditampilkan dalam berbagai *event* di KalBar hendaknya mencerminkan keberadaan, keharmonisan dan integrasi dari ketiga etnisitas di atas (Alqadrie, 1997) Produk wisata yang berbau budaya lokal dapat mengambil berbagai bentuk dan tema. Penelitian Cave, dkk. (2007) di Kepulauan Pasific, New Zealand merangkum sebanyak 5 tema produk wisata yang berbau budaya lokal dan bernilai kompetitif. Kelima tema menjadi kekuatan pariwisata di Kepulauan Pasifik, New Zealand dan sangat digandrungi oleh wisatawan dari Eropah, Amerika, Jepang dan negara-negara di Asia Fasifik. Kelima tema wisata budaya tersebut adalah nilai-nilai tradisi lokal berikut segala kapasitas yang dimiliki daerah, pertunjukan setempat (*local entertainment*), aktivitas sosial kemasyarakatan, gaya hidup masyarakat suku asli, dan tempat yang dirancang secara khusus untuk melepaskan diri dari rutinitas dan keseharian. Meskipun kelima kriteria di atas membutuhkan desain lebih lanjut, namun kelima karakteristik di atas dimiliki oleh KalBar, meskipun secara detil belum termanfaatkan secara optimal. Untuk memotret kelima tema wisata budaya di atas, table berikut merangkum beberapa hal yang disesuaikan dengan aspek lokalitas di KalBar.

Tabel 1
TEMA WISATA BUDAYA LOKALITAS DI KALIMANTAN
BARAT

TEMA	KARAKTERISTIK	CONTOH PRODUK
Nilai-nilai tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. A place to find out about medicinal plants/herbal remedies 2. A place where I feel I belong 3. A place to simply hang out 	Pengobatan Tradisional China di Singkawang, Pembuatan Keramik,
Aktivitas sosial kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. A place for special events and festivals 2. A place for seeing cultural events and festivals 	FBBK, Robok-robok, Tolak Balla, Gawe Dayak, Naik Dangau, Menanti Detik-detik Kulminasi Matahari
Entertainmen lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. A place where I can buy quality souvenirs and gift 2. A place to meet friends and family or the same hobbies 	Musik daerah (untuk sementara baru direpresen- tasikan oleh musik Dayak dan Melayu, Souveir dan Handycraft dll
Gaya hidup masyarakat suku asli	<ol style="list-style-type: none"> 1. A place that explains and displays local culture 2. A training ground to understand customs/values 3. A place to mix with and meet local peoples 4. A place to see special fauna and flora 	Rumah Panjang, Rumah Perahu di Sintang, Penginapan Terapung, Pelestarian Alam dan kearifan budaya lokal oleh penduduk lokal.
Tempat melepas rutinitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. A place to spend weekend or holiday with family 2. A place of escape from everyday life 3. A theme park with boat rides, white sands, blue sea, harm sun shines, etc. 4. A place to see several panorama in one visit 5. A place to see touring shows 6. A place where I can buy fresh food 	Wisata pantai, Off-road Tour, Adventure, Wisata Kuliner dan lain-lain.

Sumber: Rekayasa penulis dari hasil penelitian Cave, dkk. al, 2007.

Tidak hanya sampai di situ, kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan manca negara juga memiliki kemungkinan peluang bisnis pada wilayah tujuan wisata sehingga kemungkinan terjadinya peluang pembukaan bisnis menjadi sesuatu yang tidak boleh dinafikkan begitu saja bagi penciptaan dampak ekonomi yang berlipat ganda (*economically multifier effects*)

5. Identitas Budaya Dan Kemampuan Berkompetisi Lokal (*Local Competativeness*) Dalam Desain Kepariwisataaan Daerah

Kekuatan daerah terletak pada keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Sumber-sumber daya ini disebut sumber daya strategis daerah yang dapat diorganisasikan ke dalam tiga kelompok sumber, yakni (1) sumber daya fisik, (2) sumber daya manusia (SDM), dan (3) sumber daya pengorganisasian modal (Barney, 1991). Bilamana ketiga sumber daya di atas diformulasikan ke dalam kondisi realitas di KalBar, maka ketiga sumber daya di atas, secara berturut-turut adalah (1) kekuatan budaya, yang diwujudkan ke dalam hal yang berkaitan dengan berbagai keindahan dan fenomena alam yang bersifat khusus yang terdapat di Kalbar, (2) SDM yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan kekuatan sumber daya budaya dan keindahan alam, termasuk di dalamnya sikap dan karakter yang mendukung pariwisata (3) kapasitas organisasi dan struktur permodalan untuk menggerakkan kedua sumber daya di atas.

Kolaborasi dari ketiga hal tersebut, sebagaimana disebut oleh APEC *Tourism Charter* (2000) disebut *local competitive advantages*. *Competitiveness* dalam sektor pariwisata didefinisikan sebagai kemampuan menciptakan dan mengintegrasikan nilai-nilai tambahan sebuah paket atau produk

wisata yang dimiliki oleh sebuah daerah agar dapat menempati dan mempertahankan posisi mereka pada pasar global dengan atau terhadap pihak kompetitornya (Hassan, 2000:39) Pembangunan dan pengembangan sector kepariwisataan di tingkat lokal dengan berbasis pada kekuatan ketiga sumber tersebut di atas diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam ekonomi pada tingkat lokal (provinsi, kabupaten dan kecamatan) untuk:

- a. Menjadi sumber ekonomi kunci dalam memenuhi permintaan dan pertumbuhan sektor kepariwisataan.
- b. Membuka lapangan kerja secara berkelanjutan.
- c. Menjadi sumber pembayaran luar negeri.
- d. Menjadi pembangkit bisnis pada usaha kecil dan menengah.
- e. Menyebarkan keuntungan ekonomi pada seluruh tingkat provinsi
- f. Menyumbang langsung pada pencapaian tujuan pemerintah dalam bidang ekonomi dan fiskal.
- g. Menjadi katalisator bagi terbentuknya kerjasama antara sektor publik dan sektor privat.

Meskipun telah berjuang dengan sekeras dan segenap kapasitas yang tersedia, tidak semua pemerintah di dunia ini sukses memasuki pasar global. Porter (1990) kemudian menanggapi dengan menyatakan bahwa industri masyarakat dari berbagai belahan dunia di pasar global akan disandingkan dan dipertandingkan sehingga menentukan tingkat kompetitifnya, dan barang atau jasa dengan kualitas tinggi saja dapat masuk ke pasar global. Dengan penekanan di atas, akan terdapat produksi dan jasa dari satu atau beberapa negara dengan kualitas rendah, sementara produk dari negara lain memenuhi standar yang ditentukan dan diukur dengan kekuatan pasar.

Studi mengenai kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) daerah dalam bidang kepariwisataan menjadi menarik karena

terkait atau berisi tentang analisis mengenai berbagai perlengkapan (*attribute*) di tempat atau di daerah tujuan wisata (*destination*), mulai dari aksesibilitas, atraksi, harga, fasilitas dan, pelayanan dan manfaat yang akan diterima atau didapatkan oleh wisatawan (Enright and Newton, 2004). Tidak semua daerah memiliki sumber kekuatan dalam kepariwisataan.

Pada Negara-negara yang memiliki sumber daya kepariwisataan yang berlimpah seperti negara-negara di Karibia, Mediterania dan Amerika Latin serta Asia Timur dan Asia Selatan, kekuatan kepariwisataannya dikelompokkan ke dalam tiga sumber daya sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga kekuatan ini memiliki peluang yang sama untuk dikembangkan. Namun, secara lokal, adanya perbedaan dalam pengorganisasian ketiga sumber di atas dan juga perbedaan dalam pembangunan infra struktur kepariwisataan, menjadikan setiap daerah memiliki perbedaan daya saing.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan ini adalah pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur kepariwisataan pada tingkat lokal dan nasional, seperti membangun jaringan teknologi informasi, peningkatan SDM pengelola dan jaringan bisnis (Porter, 1990) yang terkait dengan bisnis kepariwisataan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis dimana letak kekuatan mereka dan dimana pula kelemahan itu dan mengoptimalkan sumber yang menjadi kekuatan dan meminimalkan titik kelemahan sampai pada titik nadir (Dwyer et al, 2000:10).

Perlu diingat bahwa pembangunan infra struktur kepariwisataan di banyak negara masih dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari sumber dalam negeri sampai sumber luar negeri. Melalui fasilitas yang tersedia itu, pemerintah kemudian melakukan pengaturan atraksi kepariwisataan ditempat tujuan wisata atau mengalokasikan pengelolaan

satu kawasan kepada pihak ketiga melalui *tendering* dan kemudian menarik pajak, termasuk mendapatkan bantuan atau kredit luar negeri dalam rangka membangun dan membiayai proyek kepariwisataan tingkat lokal.

Poon (1993) melalui studinya tentang *competitiveness* dalam bidang kepariwisataan menemukan 4 prinsip yang mesti dijalankan oleh pemerintah baik pada tingkat nasional, maupun daerah dan lokal agar dapat merebut pasar global dalam bisnis kepariwisataan. Keempat prinsip dan aplikasinya itu adalah (1) Meletakkan kekuatan penarik pada aspek lingkungan, (2) Menjadikan sector kepariwisataan sebagai leading sector, (3) Memperkuat saluran distribusi dan pemasaran, dan (4) Membangun sektor privat yang dinamik sebagai pihak yang menyediakan industri pariwisata.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu kekuatan pariwisata Indonesia adalah kekuatan dalam lingkungan alam dan budaya. Dua sumber kekuatan ini merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui dan oleh karena itu, pengelolaan sumber ini secara baik akan menghasilkan keberlangsungan dalam pembangunan kepariwisataan. Salah satu cara pengelolaannya adalah dengan melestarikan dan menata lingkungan dan menghadirkannya dalam satu kawasan wisata. Sementara aspek budaya dapat disisipkan dengan melakukan gelar atau pentas budaya pada lokasi wisata. Bilamana sumber untuk melestarikan budaya ini belum dapat dipenuhi oleh sector privat, maka peran dan dukungan pemerintah menjadi solusi yang dapat menjembatani kebuntuan ini.

Implementasi dari kebijakan menempatkan sector pariwisata sebagai sector unggulan daerah akan membentuk imej yang positif bagi daerah. Salah satu contoh adalah imej mengenai Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Itu tidak terbentuk secara konstan melainkan melalui proses dan kebijakan yang

memang mengarah pada optimalisasi kapasitas kepariwisataan yang dimiliki Bali. Sementara untuk kasus KalBar, salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan kepariwisataan yang berdimensi budaya dan alam adalah Kota Singkawang yang dikenal tidak hanya sebagai Kota Seribu Amoy tetapi juga Kota Seribu Kelenteng dan Kota Pantai. Kekuatan ini dapat dioptimalkan dengan menempatkan sector pariwisata sebagai sector unggulan melalui berbagai kebijakan pemerintah pada tingkat local dan daerah.

Kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan ijin bagi sector privat untuk melakukan investasi kepariwisataan dan pihak yang diberikan kewenangan melakukan penataan wilayah pada lokasi yang telah dialokasikan merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dalam sector kepariwisataan daerah. Melalui kebijakan ini, akan tersebar daerah tujuan wisata baru, munculnya pelaku bisnis kecil dan menengah. Sementara pada situs yang memiliki nilai historis daerah hanya boleh dilakukan oleh daerah melalui dinas yang secara paraler menanganani bidang ini. Salah satu daerah yang telah melakukan kebijakan ini, selain Provinsi Bali adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah provinsi seperti Wisata Gunung Bromo, Jatim Park I di Batu, Kebun Binatang Surabaya dan Kebun Binatang Pandaan, Wisata Air Hangat Cangar dan Air Terjun Pujon di Kabupaten Malang serta Jatim Park II di Lamongan. Sementara tempat wisata yang dikelola secara privat adalah Taman Selecta, Taman Sengkaling, Pantai Indah Sendang Biru, Pantai Indah Ngliyep, Pantai Balai Kambang dan lain-lain. Pengelolaan wisata baik oleh pemerintah maupun oleh swasta kesemuanya melibatkan penduduk dan pemerintah desa sehingga memberi kontribusi kepada warga masyarakat setempat.

Di dalam harga karcis (tiket tanda masuk) ke Jatim Park, Taman Bunga Selecta dan lain-lain, sudah termasuk kontribusi kepada kas desa sebesar Rp 1000 pada setiap lembar karcisnya. Dana ini akan dibagikan kepada desa-desa yang termasuk dalam areal kawasan wisata. Di dalam kawasan wisata ini, tidak ada pedagang asongan atau peminta-minta yang boleh masuk lokasi wisata tetapi pihak pengelola taman telah mempersiapkan kantin yang representatif agar memberi kenyamanan kepada pengunjung dalam menikmati hiburan atau paket wisata.

Setiap bulan, aparat desa kemudian menghitung besarnya pemasukan desa dari pembagian tiket masuk ini, dan pemanfaatan dana oleh desa diputuskan melalui rembug atau musyawarah desa. Selama ini, pemanfaatan dana dari harga tiket masuk antara lain untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, bantuan modal usaha kepada petani apel, petani bunga dan sektor jasa lainnya. Kehadiran lokasi wisata di daerah ini tidak saja memberi kontribusi kepada pendapatan daerah tetapi juga memberi dampak pada peningkatan ekonomi berskala kecil dan menengah yang secara langsung melibatkan penduduk desa.

Bila model ini telah terbukti sukses dalam implementasinya, ia mungkin dapat menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten serta pelaku bisnis kepariwisataan daerah untuk mampu menghadirkan paket wisata yang bernilai-jual tinggi dan kompetitif bagi menarik kunjungan wisata ke Kalbar.

6. P e n u t u p

Kekuatan industri pariwisata pada umumnya terletak pada kepemilikan sumber daya alam, budaya dan kapital. Oleh karena itu, ada kecendrungan kekuatan pariwisata daerah pada negara-negara yang saling berdekatan adalah sama.

Kesamaan dalam letak kekuatan ini kemudian menjadi berbeda setelah pemerintah, pelaku industri pariwisata dan masyarakat pada tingkat nasional, daerah dan lokal melakukan intervensi dengan mengemas, mengelola dan melestarikan sedemikian rupa potensi-potensi wisata menjadi paket wisata yang diikuti dengan memasarkan produk tersebut secara efektif.

Sumbangan yang besar dari sektor pariwisata secara global pada industri lokal telah menarik perhatian pemerintah untuk melakukan pembenahan infrastruktur yang dibutuhkan oleh sektor pariwisata, mulai dari menyiapkan produk wisata sampai pada pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang dapat memberi kenyamanan bagi kunjungan wisata ke daerah. Pembangunan infra struktur kepariwisataan ini ternyata tidak hanya berimplikasi pada meningkatnya arus kunjungan wisata tetapi juga dimaksudkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan bagi terwujudkan kehidupan yang lebih baik, tertib dan aman.

Paket wisata budaya dapat dikembangkan dengan menggali potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat, dan ini hendaknya menjadi program pemerintah yang dimanifestasikan tidak hanya ke dalam bentuk pembinaan tetapi juga melalui kebijakan dan penganggaran daerah. Wisata budaya tidak akan mencapai titik optimal bilamana pengembangannya hanya diserahkan kepada masyarakat atau kepada pelaku bisnis pariwisata saja. Kolaborasi dari ketiga unsur ini dapat melahirkan paket budaya yang bernilai ekonomis dan eksotis sebagaimana dikembangkan oleh Cuba, Brazil dan New Zealand sejak 1980-an.

CATATAN AKHIR

- * Makalah ini dipersiapkan sebagai bahan diskusi dan penyusunan buku dalam rangka upaya menggalakkan Program Pariwisata Indonesia khususnya di Kalimantan Barat menjelang tahun kunjungan Wisata KalBar 2010 (the 2010 West Kalimantan Visit Year) diselenggarakan di Pontianak, Jum'at 25 Juli 2008 oleh Dirjen Kebudayaan, Departement Kebudayaan dan Kepariwisata bekerjasama dengan Kantor Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, Kalimantan Barat.
- ** Alqadrie adalah Profesor Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak. Sejak Agustus 1995 s/d September 2001 ia menjabat Dekan pada fakultas tsb selama dua kali masa jabatan. Pengalaman kerjanya dimulai dari menjadi Guru SD (Elementary School) Islamyah Kampung Bangka (1966-1968), Guru SMEP Negeri (Junior Economic High School) (1968-1972), Guru SMEA Negeri (Senior Economic High School) Pontianak (1972-1974), Asisten Dosen Luar Biasa (Part Time Assistant Lecturer) UNTAN (1969-1974), Dosen Tetap (Full Time Lecturer) UNTAN (1975-sekarang), dan Dosen Tamu (visiting Professor) di Nordics Institute of Asian Study (NIAS), Copenhagen, Denmark. Pendidikan Sarjana Satu (S1) diperolehnya dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) di FISIP UNTAN (1974). Sarjana Dua (S2) [M.Sc] tahun 1987 dan Sarjana Tiga (S3) [Ph.D] tahun 1990 diperolehnya masing-masing dalam Jurusan Sosiologi Pertanian, Pedesaan dan Kehutanan (Agricultural Rural, and Forestry Sociology) dan Jurusan Sosiologi Politik dan Etnisitas (Political Sociology and Ethnicity) di University of Kentucky, Lexington, AS. Tahun 1993 ia memperoleh Penghargaan David Penny Award dari Pemerintah Australia sebagai penulis terbaik tentang Kemiskinan.

Pada tahun 1999 dianugrahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden R.I. Dalam tahun yang sama dianugrahi Bintang Kesetiaan Dalam Pengabdian 30 tahun dari Pemerintah Daerah Kalbar. Sejak Juli 2000 s/d Nopember 2004 diangkat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial UNTAN. Menjadi Ketua Indonesian Conflict Study Network (ICSN) berpusat di Helsinki, Finlandia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1997. "*Menjalin Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Hubungan Antar Etnis*". dalam *Tantangan Global: Pendekatan Hankam dan Sospol*. Balikpapan – Jakarta: Diterbitkan untuk Kodam VI Tanjungpura oleh Dharma Pena.
- Asnam, S. 1992. "Indonesia 1992-Tourism: Growth from the Asia Market" dalam Beckerson, John dan John K. Walton. 2005. "*Selling Air: Marketing the Intangible at British Resort*" dalam John K. Walton (Edt.). 2005. *History of Tourism: Representation, Identity and Conflict*. Channel View. Clevedon, Great Britania
- Barney, Jay. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage" dalam *Journal of Management*, 17 (1): 99-120.
- Britton, S.G. 1982. "The political economy of tourism in the Third World" dalam *Annals of Tourism Research* 9 (3), 331–58
- Burns, Peter M. dan Marina Novelli. 2006. *Tourism and Social Identities: Global Framework and Local Realities*. Elsevier. London
- Cave, Jenny; Chris Ryan and Charlie Panakera. 2007. "Cultural Tourism Product: Pacific Island Migrant Perspectives in New Zealand" dalam *Journal of Travel Research* 2007; 45;435, diakses dari <http://jtr.sagepub.com/subscriptions>
- APEC Tourism Charter. 2000. *Seoul Declaration on APEC Tourism Charter*. The First APEC Tourism Ministerial Meeting. APEC Tourism Charter. *Fas Eastern Economic Review*. 155 (13), 54–56.
- Brohman, J. 1996. "Newdirections in tourism for Third World Development" dalam *Annals of Tourism Research* 23 (1), 48–70.
- Brown, Frances dan Derek Hall (Edt.), 2000. *Tourism in Peripheral Areas: Case Studies*. Channel View Publication. Clevedon, London Elliot, James. 1997. *Tourism: Politic and Public Sector Management*. Rounledge. London and New York.
- Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Comte, August. 1964. "The Progress of Civilization through Three States," dalam Amitai Etzioni dan Eva Etzioni, *Social Change*. New York: Basic Books.
- Crough, G. I. 1996. "Demand Elasticities in International Marketing: A Meta Analytical Application to Tourism" dalam *Journal of Business Research*, 36, 117-136.
- Dickenson, J.P. 1986. *A Geography of the Third World*. New York Methuen.
- Dwyer, L., P. Forsyth, and P. Rao. 2000. *Destination Price Competitiveness: Exchange Rate Change versus Domestic Inflation*. Journal of Travel Research 40: 328 – 336.
- Eades, Jerry. 2007. "Sex Tourism and the Internet: Information, Amplification, and Moral Panic" dalam Wayne Pease, Michelle Rowe and Malcolm Cooper (Edtr.). 2007. *Information Communication Technologies in Support of the Tourism Industry*. Idea Group Publishing. Hershey, London, Melbourne and Singapore.
- Enright, Michael J., and James Newton. 2004. "Tourism Destination Competitiveness: A Quantitative Approach" dalam *Tourism Management*, 25 (6): 777-88.
- Hassan, S.S. 2000. "Determinant of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry" dalam *Journal of Travel Research*. 38: 239 – 245.
- Etzioni, Amitai dan Eva Etzioni, *Social Change*. New York: Basic Books.
- Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Fikir Teori Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Harrison, David (Edt.). 2001. *Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies*. Cabi Publishing. New York
- Hettne, B. 1995. *Development Theory and the Three Worlds*. New York: Longman.
- Hong, Wei-Chiang. 2008. *Competitiveness in the Tourism Sector: A Comparative Approach from Economic and Management Points*. Physica-Verlag, Springer. London.

- Inter-American Development Bank. 2004. *Various Reports on Tourism Development in Latin America*, diakses melalui <http://www.iadb.org>
- Inkeles, Alex. 1964. "Making Men Modern: On the Causes and Consequences Individual Change in Six Developing Countries," dalam Amitai Etzioni dan Eva Etzioni, *Social Change*. New York: Basic Books.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Upaya Meningkatkan Mutu Kinerja Pelayanan Publik di Jawa Timur dalam Menggapai Pelayanan Yang Bermutu*. Program Doktor Ilmu Administrasi, FIA Univraw. Malang.
- Greenwood, D. 1989. "Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization". In: V. L. Smith (Ed.), *Hosts and Guests. the Anthropology of Tourism* (2nd ed., pp. 171–185). Philadelphia, USA: University of Pennsylvania Press.
- Hale, D. 1998. "The Asian Crisis and the IMF's New Role as Financial Peacekeeper" dalam *World Economic Affairs* 2 (2), 35–9.
- Harrison, David (Edt.). 2001. *Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies*. Cabi Publishing. New York.
- Leiper, N dan N. Hing. 1998. "Trends in Asia Pacific Tourism in 1997-98: From Optimism to Uncertainty" dalam *The International Journal od Contemporary Hospitality Management*. 10 (7). 245 – 251.
- Malecki, E. 1997. *Technology and Economic Development (2nd edn)*. Harlow: Longman.
- Mazanec, Josef A., Karl Wöber and Andreas H. Zins. 2007. "Tourism Destination Competitiveness: From Definition to Explanation?" dalam *Journal of Travel Research* 2007; 46; 86, diakses melalui [http://jtr.sagepub.com/cgi/content/ refs/46/1/86](http://jtr.sagepub.com/cgi/content/refs/46/1/86)
- Middleton, Victor dan Jackie R. Clarke. 2001. *Marketing in Travel and Tourism*. Third Edition. Butterworth Heinemann. London
- Paterson, Brooks. 2004. *Cultural Intelegence*. Intercultural Press. Yarmouth – Maine. USA.
- Pearce, Phillip L. 2005. *Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes*. Channel View Publication. Clevedon, Buffalo dan Toronto.
- Picard, D. 1995. "Cultural Heritage and Tourist Capital: Cultural Tourism, in Bali. Dalam M. -F. Lanfant, J. Wood, & E. Bruner (Eds), *International*

- Tourism: Identity and Change*** (pp. 44–66). London: Sage Studies in International Sociology.
- Poon, A. 1993. ***Tourism Technology and Competitive Strategy***. CAB International. Wallingford, UK.
- Porter, Michael (1985). ***Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance***. New York: Free Press.
- Porter, Michael E. 1988. ***Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors***. The Free Press. New York.
- Schmidt, H. 1989. “What makes development” dalam *Development and Cooperation* 6, 19–26.
- Shah, Anwar (Edt.). 2005. ***Public Sector Delivery: Public Sector Government and Accountability Series***. World Bank. Washington.
- Swarbrooke, John dan Susan Horner. 2001. ***Business Travel and Tourism***. Butterworth Heinemann, Oxford.
- So, Alfin. 1990. ***Social Change and Development Modernisation, Dependency, and World-System Theory***. London: Sage.
- Tan, Amy Y. F., Cynthia McCahon dan Judy Miller. “Modelling Tourism Flow to Indonesia and Malaysia” dalam Wong, Kevin K. F. and Haiyan Song (Edt.). 2002. ***Tourism Forecasting and Marketing***. The Haworth Hospitality Press. New York, London and Oxford.
- Theobald, William F. 2005. ***Global Tourism***. Elsevier. Amsterdam.
- Todaro, M. 1997. ***Economic Development*** .(6th edn). New York: Longman.
- Wilson, Tamar Diana. 2008a. “Introduction: The Impacts of Tourism in Latin America” dalam ***Latin American Perspectives*** 2008; 35; 3-20, diakses melalui <http://lap.sagepub.com>
- Wernerfelt, Birger . 1984. “A Resource Based View of the Firm” dalam ***Strategic Management Journal***, 5: 171-80.
- Wilson, Tamar Diana. 2008a. “Introduction: The Impacts of Tourism in Latin America” dalam ***Latin American Perspectives*** 2008; 35; 3-20, diakses melalui <http://lap.sagepub.com>

- Wilson, Tamar Diana. 2008b. "*Economic and Social Impacts of Tourist in Mexico*" dalam *Latin American Perspectives. Issues 160*, Vol 35 No. 3, May 2008 diakses melalui <http://lap.sagepub.com>
- Zeithml, Valarie A., A. Parasuraman; dan Leonard L. Berry. 1990. *Delivering Quality Services: Balancing Customer Perception and Expectation*. The Free Press. New York.

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SINGKAWANG DI ERA OTONOMI DAERAH : Peluang Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Rakyat

Oleh: Benedikta Juliatri Widi Wulandari¹

1. Pendahuluan

Babak baru dalam pengelolaan tata pemerintahan di Indonesia mulai bergulir sejak pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan mendasar terjadi di level daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) dengan semakin besarnya hak dan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Pada mulanya kewenangan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, namun kemudian mengalami penyempurnaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh urusan wajib ditambah dengan urusan lain yang bersifat pilihan², terkecuali di bidang politik luar negeri,

¹ Penulis adalah staf peneliti pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.
² Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur di dalam Pasal 13 (pemerintah daerah provinsi) dan Pasal 14 (pemerintah daerah kabupaten/kota) UU No. 32 Tahun 2004. Disebutkan pula bahwa urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Implementasi kebijakan otonomi daerah tentunya membuka peluang dan memberikan tantangan baru bagi pemerintah daerah untuk melakukan serangkaian perubahan. Prinsip demokratisasi, partisipasi masyarakat, penghargaan atas keberagaman potensi daerah, desentralisasi kekuasaan, keadilan serta pemerataan pembangunan yang sering kali dikatakan sebagai “jiwa” dari penyelenggaraan otonomi daerah menumbuhkan semangat bagi pemerintah dan masyarakat di daerah-daerah dalam menjalankan roda pembangunannya.

Di sektor pariwisata, pelaksanaan otonomi daerah mendapatkan respon positif karena dipandang sebagai koreksi atas pembangunan kepariwisataan yang sebelumnya hanya terkonsentrasi di wilayah bagian barat Indonesia. Konsep pembangunan seperti ini mengakibatkan wilayah timur Indonesia mengalami ketertinggalan di berbagai bidang yang mendukung perkembangan pariwisata daerah, mulai dari infrastruktur, fasilitas, hingga sumber daya manusianya. Ketimpangan pembangunan kepariwisataan ini perlu segera dibenahi. Setidaknya di era otonomi daerah ini pemerintah pusat dapat berperan semaksimal mungkin untuk mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam menumbuhkan komitmen para pihak pengemban kebijakan, menjaga keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan di sektor pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan daya tarik wisata dan investasi di bidang pariwisata, maupun upaya-upaya lain untuk tujuan pembangunan kepariwisataan.

Pembangunan yang dilakukan di sektor pariwisata berkorelasi dengan pembangunan di sektor-sektor lain yang menjadi pendukungnya. Saling keterkaitan ini dapat terjadi karena pariwisata adalah sebuah sistem³, bukan merupakan aktivitas tunggal yang berdiri

³ Sebagai sebuah sistem, pariwisata mempunyai berbagai komponen, seperti: ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait. Oleh karena itu perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem yang lain (Pitana dan Gayatri, 2005:91).

sendiri. Demikian pula halnya, tidaklah tepat apabila memosisikan pariwisata semata-mata sebagai “mesin” yang berfungsi untuk memproduksi keuntungan secara ekonomis semata, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Berkaitan dengan ini, Nirwandar menawarkan adanya paradigma baru dalam pembangunan kepariwisataan, dengan menegaskan bahwa pada dasarnya pembangunan kepariwisataan ditujukan untuk: (1). *Persatuan dan kesatuan bangsa*. Pariwisata dapat memberikan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air melalui perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia. Dampak lain dari perjalanan ini adalah dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi, serta akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. (2). *Penghapusan kemiskinan*, karena seharusnya mampu memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berusaha dan bekerja, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3). *Pembangunan yang berkesinambungan*, karena dengan pengelolaan kepariwisataan yang baik kondisi lingkungan alam dan masyarakat yang menjadi daerah tujuan wisata akan mengalami peningkatan yang berarti. (4). *Pelestarian budaya*, karena seharusnya mampu memberikan berkontribusi dalam upaya pelestarian budaya suatu daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya.

Mengingat posisi strategis sektor pariwisata dalam pembangunan daerah, maka pemerintah daerah perlu menggali dan mengkaji secara sungguh-sungguh berbagai potensi atau kekayaan yang mampu membangun citra dan berfungsi sebagai daya tarik wisata. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian, kreativitas dan semangat inovasi di jajaran pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi wisata yang dimiliki, melakukan peningkatan terhadap layanan wisata, membangun infrastruktur di bidang kepariwisataan dan melakukan upaya promosi wisata secara optimal.

Dalam kesempatan ini, penulis memfokuskan perhatian pada pengembangan sektor pariwisata di Kota Singkawang sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Kalimantan Barat. Tulisan ini akan memaparkan kebijakan pembangunan di era otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Singkawang dan relevansinya dengan pembangunan di sektor pariwisata. Selain itu, secara khusus penulis akan menyoroti pula tentang potensi pariwisata budaya di kota ini dan alternatif pengembangannya, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan ekonomi rakyat.

2. Profil Singkat Kota Singkawang

Kota Singkawang ditetapkan sebagai daerah otonom pada tanggal 17 Oktober 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. Kini kota ini merupakan salah satu dari 14 (empat belas) daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.⁴ Bila menelusuri sejarah kewilayahan Kota Singkawang, pada mulanya Singkawang merupakan salah satu kota kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten Sambas. Di tahun 1981, Singkawang berubah menjadi Kota Administratif dengan posisinya yang tetap sebagai ibukota kabupaten. Sejalan dengan persiapan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, di tahun 1999 wilayah Kabupaten Sambas mengalami pemekaran, dan terbentuklah Kabupaten Bengkayang. Meskipun di masa itu Kota Administratif Singkawang belum disetujui oleh Pemerintah Pusat menjadi wilayah yang berdiri sendiri (terlepas dari kabupaten induk), tapi secara administratif kota ini beralih ke dalam wilayah Pemerintah

⁴ Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kota/kabupaten, yaitu: 1). Kota Pontianak, 2). Kota Singkawang, 3). Kabupaten Pontianak, 4). Kabupaten Kubu Raya, 5). Kabupaten Sambas, 6). Kabupaten Bengkayang, 7). Kabupaten Landak, 8). Kabupaten Sanggau, 9). Kabupaten Sekadau, 10). Kabupaten Sintang, 11). Kabupaten Melawi, 12). Kabupaten Kapuas Hulu, 13). Kabupaten Ketapang, dan 14). Kabupaten Kayong Utara.

Daerah Tingkat II Bengkayang. Dua tahun kemudian, barulah Kota Singkawang berhasil menjadi daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom.

Kota yang konon berasal dari kata *San Kew Jong*⁵ ini memiliki posisi yang strategis, ditunjang pula dengan kondisi jalan dan ketersediaan sarana transportasi melalui darat, sehingga memberikan dukungan yang cukup memadai bagi aksesibilitas dari dan menuju Kota Singkawang. Kota Singkawang berjarak kira-kira 145 km dari ibukota Provinsi Kalimantan Barat (Kota Pontianak), dengan jarak tempuh sekitar 3 jam perjalanan melalui darat. Daerah ini dapat dikatakan sebagai wilayah transit bagi beberapa kabupaten yang berada di sekitarnya, seperti Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Data profil penduduk Kota Singkawang di tahun 2006 mencatat bahwa jumlah penduduk Kota Singkawang adalah 174.064 jiwa, dengan kepadatan penduduk 345 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,72 %. Komposisi penduduknya terdiri dari berbagai latar belakang etnis, seperti: Tionghua (keturunan Cina), Melayu, Dayak, Madura, dan berbagai etnis lainnya. Namun demikian etnis Tionghua menempati prosentase terbesar, yaitu sekitar 41– 45 %.

Kehidupan masyarakat yang cenderung didominasi oleh budaya Tionghua merupakan refleksi dari kondisi penduduk Kota Singkawang yang sebagian besar merupakan etnis Tionghua. Penggunaan bahasa Cina terutama dialek Hakka yang seringkali dipergunakan dalam interaksi sosial sehari-hari, banyaknya kedai-kedai yang menyuguhkan makanan Cina, deretan pertokoan di

5

Dari beberapa sumber disebutkan bahwa *San Kew Jong* atau *San Kheu Yong* (bahasa Hakka) merupakan sebuah kata yang menjelaskan tentang letak daerah ini, yaitu di antara gunung (*shan*), sungai (*kew*) dan laut (*yang*). Secara geografis wilayah Kota Singkawang berbatasan dengan Laut Natuna, dikelilingi oleh beberapa gunung (Raya, Pasi, Roban, Poteng), dan dialiri oleh Sungai Singkawang.

pusat-pusat kota, serta permukiman penduduk Tionghua yang menyebar di berbagai wilayah kota, seolah menguatkan citra tersebut. Bahkan karena karakteristik Kota Singkawang dengan penduduk Tionghuanya yang khas ini, orang luar sering menyebut dan mengenal Kota Singkawang dengan julukan Kota Amoy, Kota Seribu Kuil/Vihara, ataupun Hongkongnya Indonesia.

Meskipun orang Tionghua merupakan etnis mayoritas di Kota Singkawang, namun hubungan sosial antaretnis di kota ini relatif berlangsung secara terbuka dan berkembang dalam suasana yang damai. Generasi orang Tionghua yang hidup di masa sekarang telah mengalami proses asimilasi dan akulturasi budaya sekian lama, baik yang berlangsung secara alami maupun karena implikasi dari diterapkannya kebijakan pemerintah yang mengatur warga negara keturunan.⁶

3. Pembangunan Kepariwisata Kota Singkawang

3.1 Kebijakan Pembangunan di Sektor Pariwisata dan Permasalahannya

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Singkawang dituntut untuk meningkatkan kemandirian, kreativitas dan kemampuan berinovasi sebagai faktor pendorong dalam melakukan pembangunan. Sikap positif tersebut harus mampu diimplementasikan ke dalam langkah-langkah konkrit dengan tujuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan, misalnya dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, menyusun kebijakan dan strategi pembangunan, memberikan pelayanan secara

⁶ Permasalahan dan proses asimilasi orang Cina di Singkawang lebih lanjut dapat dilihat di Hari Poerwanto (2005), *Orang Cina Khek dari Singkawang* (hal. 155-300).

optimal, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya.

Bagi Kota Singkawang, selain letak strategis dan kondisi penduduk yang menjadi faktor pendukung dan modal dasar pembangunan, potensi lain yang menjadi kekayaan dan patut diperhitungkan adalah berbagai objek wisata yang berbasis pada keindahan alam, tradisi kuliner, kerajinan tradisional, bangunan bersejarah dan khas, serta even-even budaya yang masih berkembang di masyarakat. Wisata alamnya menawarkan keindahan pantai, pegunungan, sungai, flora dan fauna. Objek-objek wisata tersebut antara lain adalah Pantai Pasir Panjang, kawasan Gunung Roban dan Gunung Poteng, Sungai Hangmoy, Taman Bukit Bougenville, serta Sinka Island.

Wisata kulinernya menyajikan berbagai makanan khas dengan harga terjangkau, seperti: rujak ju hie, manisan kelimbauan, mie dan tahu Singkawang, serta suguhan kopi lokal. Di samping itu terdapat industri keramik yang terletak di daerah Sedau (sekitar 2 km ke arah selatan Kota Singkawang) yang masih mempertahankan teknik pembuatan keramik secara tradisional. Kota Singkawang pun memiliki bangunan bersejarah, antara lain jembatan Agen, menara air (*water toren*) di Roban, dan Vihara Chikung sebagai vihara tertua. Tak kalah menariknya adalah berbagai even budaya yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat Tionghua, misalnya perayaan Cap Go Meh dan sembahyang kubur. Secara lebih khusus berbagai bentuk pariwisata berbasis budaya tradisional ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Menyadari potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Singkawang, pemerintah daerah cenderung untuk memberikan perhatian lebih kepada sektor pariwisata.

Data yang disajikan oleh Pemerintah Kota Singkawang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke kota ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, di tahun 2004 angka kunjungan wisata berjumlah 100.601 orang. Tahun 2005 meningkat menjadi 182.470 orang, dan mengalami peningkatan lagi di tahun berikutnya dengan total jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 231.272 orang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, secara umum Kota Singkawang memiliki visi yang sering disebut dengan “Singkawang Spektakuler 2012”, yaitu: Terwujudnya Kota Singkawang sebagai sentra pengembangan ekonomi di Kalimantan Barat yang terpercaya, aman, kompetitif, unik, memiliki layanan publik yang prima, serta berorientasi kepada pengembangan ekonomi rakyat. Sedangkan misi pembangunan yang dirumuskan adalah: (1). Menerapkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pengembangan agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang kompetitif dan berorientasi pasar serta memberikan ruang kepada kesempatan kerja; (2). Mengembangkan daya tarik investasi guna percepatan pembangunan ekonomi; (3). Menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (*social trust*), kemandirian, kreativitas dan inovasi masyarakat; dan (4). Mempercepat pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Strategi pokok pembangunan Kota Singkawang memiliki agenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa sasaran utama. *Pertama*, adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kondisi dan lingkungan usaha yang sehat serta kondusif bagi perkembangan investasi dan membuka peluang peningkatan peranan masyarakat. *Kedua*, adalah berkurangnya kesenjangan pendapatan dengan menanggulangi kemiskinan

dan percepatan pembangunan daerah pinggiran. *Ketiga*, adalah meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh. *Keempat*, adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. *Kelima*, adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembangunan.

Apabila melihat misi pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, terlihat jelas bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dipandang memiliki fungsi strategis dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Singkawang. Di tataran kebijakan, berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang akan mempengaruhi kondisi kepariwisataan pun telah ditetapkan. Salah satunya adalah Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Singkawang Tahun 2003-2013, yang menetapkan beberapa bagian wilayah Kota Singkawang yang diprioritaskan untuk pusat pengembangan agrowisata, pariwisata, terminal dan bandar udara.⁷ Selain itu terdapat Perda yang secara khusus menetapkan Pengelolaan Kepariwisata Kota Singkawang (Perda No. 20 Tahun 2003), di samping Perda lain yang

7

Informasi yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Daerah Kota Singkawang disebutkan bahwa Kota Singkawang dibagi atas 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) atau wilayah pengembangan, yaitu: (1). BWK A (luas wilayah ± 4.302 Ha) akan difungsikan sebagai pusat kegiatan perdagangan grosir dan jasa komersial, pusat pengembangan industri sedang hingga besar, pusat Pemerintahan Kota serta pusat permukiman penduduk; (2). BWK B (luas wilayah ± 8.441 Ha) fungsinya akan dikembangkan sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan budidaya ikan tambak, serta perkembangan permukiman penduduk; (3). BWK C (luas wilayah $\pm 18.455,9$ Ha) akan difungsikan sebagai pusat pengembangan pertanian lahan gambut, mengingat secara fisik memiliki daya dukung rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan bergambut serta rawan genangan dan banjir pasang sehingga sulit dikembangkan sebagai kawasan fungsional; (4) BWK D (luas wilayah 10.570 Ha) akan difungsikan sebagai pusat pengembangan agrowisata, perkebunan, dan peternakan serta konservasi terhadap kawasan Gunung Raya-Pasi dan kawasan Danau Serantangan dan sekitarnya; (5). BWK E (dengan luas 6.120 Ha) akan difungsikan untuk pusat pengembangan pariwisata dan kelautan, terminal dan bandara.

mengatur tentang sektor perpajakan (hotel, restoran, hiburan, reklame, perparkiran).

Di era otonomi daerah, rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah memerlukan keterpaduan dan keselarasan dengan rencana pembangunan lain yang lingkungannya lebih luas. Selain itu kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik⁸ sama pentingnya dengan kemampuan untuk bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi, serta membangun kemitraan secara lintas daerah ataupun dengan sektor swasta. Relasi-relasi seperti ini sangat strategis untuk menyusun strategi pembangunan dan promosi di sektor pariwisata secara bersama-sama, membuka peluang bagi datangnya berbagai investasi yang akan mendukung kepariwisataan daerah, ataupun berbagi peran dalam membangun infrastruktur pendukung pariwisata. Otonomi daerah pun idealnya mampu menyegarkan iklim persaingan usaha di bidang pariwisata sehingga dapat berlangsung dalam suasana sehat dan profesional. Selain mendatangkan pendapatan bagi daerah yang menjadi tujuan wisata, pertumbuhan berbagai jenis usaha ini akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan memberdayakan ekonomi rakyat melalui skema kemitraan yang dikembangkan.

Kesadaran pemerintah Kota Singkawang untuk meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tercermin dalam agenda dan sasaran pembangunan yang telah dicanangkan oleh

⁸ Amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas (Pasal 20). Asas-asas ini diharapkan dapat mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik.

pemerintah. Salah satu prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kota Singkawang menyebutkan secara eksplisit adanya peluang keterlibatan sektor swasta dalam memberdayakan ekonomi rakyat untuk memacu pertumbuhan daerah. Sedangkan keterpaduan rencana pembangunan Kota Singkawang dengan rencana jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Barat menjadi suatu keharusan dengan diterapkannya pendekatan pembangunan Kawasan Potensial yang terintegrasi. Program pembangunan ini menempatkan Kota Singkawang dalam kerangka kawasan SINGBEBAS (Singkawang–Bengkayang–Sambas), yang akan diwujudkan dalam berbagai proyek, seperti: *SINGBEBAS Ring Road*, *SINGBEBAS Airport*, *SINGBEBAS Tourism Network* serta *SINGBEBAS Water Supply*.

Seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan Kota Singkawang selanjutnya. Terlebih lagi dengan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan citra positif Kota Singkawang sebagai destinasi wisata yang kondusif, serta keinginan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menerapkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan pariwisata.

Pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan ragam dan lokasi yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan pelayanan atau jasa pendukung kepariwisataan. Apalagi berbagai informasi, promosi, dan fasilitas yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan hingga saat ini

dirasakan masih belum memadai dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan para wisatawan. Setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, pemerintah masih cenderung menjadi “aktor tunggal” dalam menentukan program pembangunan pariwisata dan memproduksi sejumlah regulasi yang belum tentu bersesuaian dengan kebutuhan atau permintaan para pelaku dan pengguna dunia pariwisata. Kedua, belum terbangunnya sinergitas yang kuat di antara berbagai pihak yang memiliki posisi strategis dalam upaya membangun sektor pariwisata, sehingga mengakibatkan potensi pariwisata di Kota Singkawang belum dapat dikembangkan secara optimal. Ketiga, meskipun kesadaran mengenai pentingnya sektor pariwisata di kalangan pemerintah dan masyarakat telah terbangun dengan cukup baik, tetapi kreativitas dalam mengembangkan ide dan mengaplikasikan ide tersebut relatif terbatas, sehingga masih memerlukan dukungan dan penanganan yang tepat. Berbagai permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan keseriusan dan berbagai upaya konkrit.

3.2 Peluang Pengembangan Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya (cultural tourism) berkembang seiring dengan adanya kebutuhan wisatawan untuk menikmati dan mempelajari berbagai monumen dan tempat-tempat bersejarah, maupun bentuk-bentuk kesenian, upacara tradisional, dan adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat di daerah yang dikunjungi.⁹

⁹

Santoso mengatakan kebutuhan wisatawan yang mengalami perubahan dari wisata alam ke wisata budaya sebagai perubahan dalam *consumers-behaviour pattern*. Gejala perubahan pola konsumsi para wisatawan ini didorong oleh meningkatnya selera pilihan wisata ke jenis wisata yang lebih tinggi (2002)

World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan pariwisata budaya sebagai bagian dari industri yang memberikan perhatian lebih besar kepada atraksi budaya (*special emphasis on cultural attraction*). Atraksi budaya tersebut sangat bervariasi, meliputi pertunjukan-pertunjukan, museum, ataupun pameran yang berkaitan dengan kebudayaan.

Beberapa referensi (Ucer dkk., 2004; Suranti, 2005) memisahkan pariwisata budaya ke dalam dua bagian, yaitu sebagai proses (*process-based approach*) dan sebagai produk (*product-based approach*). Oleh Suranti dijelaskan bahwa sebagai proses, pariwisata budaya merupakan aktivitas pertukaran informasi dan simbol-simbol budaya antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi (di daerah tujuan wisata). Sedangkan Ucer dkk. mensejajarkan *process-based approach* dalam pariwisata budaya dengan *experimental* atau *conceptual approach*, dengan penjelasan bahwa *process-based approach* cenderung lebih menekankan pada motivasi dan pengalaman yang ingin didapatkan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dengan tujuan mengumpulkan berbagai informasi dan pengalaman untuk pemenuhan kebutuhan kultural (*cultural needs*) mereka. Dengan kata lain, pariwisata budaya dijadikan sebagai bagian dari industri ketika muncul adanya motivasi dari seseorang (wisatawan) untuk menggali atau mengalami perbedaan cara hidup, tradisi sosial, upacara-upacara religi, ataupun peninggalan sejarah dan budaya yang selama ini tidak familiar dalam kehidupan wisatawan tersebut.

Sebagai produk, pariwisata budaya berwujud atraksi-atraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan, khususnya atraksi wisata yang mengandung pesan-pesan yang bersifat budaya. Dengan melihat berbagai atraksi

ini wisatawan dapat memperoleh pengalaman kebudayaan dengan cara melihat sesuatu yang dirasakan unik, berbeda, mengesankan dan menimbulkan sensasi untuk memperkaya kebutuhan spiritualnya (Suranti, 2005). Sejalan dengan pandangan ini, Ucer dkk. pun memaknai *product-based approach* sebagai tempat-tempat dan monumen-monumen (*sites and monuments*) atau *descriptive approach*, yang secara khas menunjukkan tipe-tipe dari atraksi yang dapat dikunjungi oleh penikmat wisata budaya.

Di Kota Singkawang, beberapa tipe-tipe atraksi dan tujuan wisata berbasis budaya yang dapat menjadi alternatif daya tarik wisata, antara lain adalah:

- 1). *Perayaan Cap Go Meh*. Sesuai dengan penanggalan Cina, perayaan Cap Go Meh dilaksanakan di hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek. Di Kota Singkawang perayaan ini merupakan even budaya yang terbesar dan bersifat massal. Sehari sebelumnya dilakukan parade lampion¹⁰ dan arak-arakan simbol-simbol yang berkaitan dengan kebudayaan Tionghua. Baru pada keesokan harinya dilakukan arak-arakan barongsai¹¹, naga¹², dan pertunjukan tatung dengan diiringi berbagai musik tetabuhan. Tatung adalah orang-orang khusus

¹⁰ Berdasarkan cerita rakyat, dahulu kala pemasangan lampion atau Chat Tian Can di setiap tanggal 15 bulan 1 Imlek dilakukan oleh para petani di sekeliling ladang dengan maksud mengusir hama dan binatang perusak tanaman lainnya. Perubahan warna api yang terdapat di dalam lampion dipercaya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk meramal cuaca (Asali, 2008: 29).

¹¹ Barongsai merupakan kesenian tarian singa yang berasal dari daratan Cina dan telah diadaptasikan ke dalam bentuk kesenian Indonesia. Hal ini mengingat penyebutannya yang terdiri dari kata *barong* (singa-singaan, Bali) dan *sai* (singa, Hokkian/Tio Ciu). Binatang singa sendiri melambangkan keperkasaan dan kekuatan raja hutan, sehingga binatang ini dipercaya dapat mengusir segala kejahatan dan melindungi rakyat jelata (Asali, 2008: 23-25).

¹² Dalam legenda orang Cina, naga merupakan binatang yang sakral. Binatang ini diyakini dapat membawa kemakmuran dan keselamatan bagi manusia, mengusir roh jahat, menghindarkan mala petaka, dan menolak bala. Dalam ritual Cap Go Meh, sebelum dimainkan di depan umum, naga harus disembahyangkan dan dibuka matanya terlebih dahulu di kienteng. Setelah dimainkan naga akan dibakar agar rohnya kembali ke langit (Asali, 2008: 18-19).

yang memiliki kekuatan tertentu setelah tubuh mereka dirasuki oleh roh-roh baik yang dipercaya dapat membersihkan permukiman penduduk, jalan, ataupun tempat-tempat lainnya dari roh-roh jahat yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya para tatung ini dapat melakukan berbagai atraksi yang menunjukkan kekebalan tubuh, seperti dengan menginjak mata pedang dan pisau, menusuk tubuh dengan berbagai benda tajam, ataupun menancapkan kawat-kawat baja di pipi mereka hingga tembus dari kedua sisi yang berbeda tanpa mengalami luka.

- 2). *Tradisi sembahyang kubur*. Dalam setahun tradisi ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu di awal bulan April dan di bulan ketujuh Imlek (antara tanggal 1 sampai 15). Sama seperti ziarah ke makam pada umumnya, tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mendoakan arwah para leluhur yang telah meninggal dunia. Rangkaian ritual berkaitan dengan tradisi ini memiliki keunikan, antara lain dengan menyiapkan keranjang persembahan yang berupa makanan, kertas sembahyang dan hio; pembakaran hio dan uang kertas; pembagian perlengkapan sembahyang kubur kepada para anggota yayasan penyelenggara sembahyang kubur; serta pembakaran *wangkang* (kapal yang terbuat dari kertas) pada puncak perayaan sembahyang kubur.
- 3). *Festival Kue Bulan*. Peristiwa ini dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan 8 penanggalan Imlek. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi tua Cina, karena telah berlangsung sekitar 5000 tahun. Kisah yang

melatarbelakangi tradisi ini sangat beragam¹³. Hingga kini setiap kali menjelang perayaan Festival Kue Bulan akan banyak dijumpai kue bulan yang dikemas di dalam kotak-kotak khusus dan diujakan di sepanjang jalan Kota Singkawang.

- 4). *Bangunan vihara/klenteng*. Julukan Kota Singkawang sebagai *City of Thousand Temples* secara tidak langsung menunjukkan banyaknya bangunan vihara, atau lebih dikenal dengan istilah klenteng, yang terdapat di kota ini. Bangunan klenteng yang ada di Kota Singkawang memiliki ukuran yang variatif. Letaknya tersebar di mana-mana, ada yang didirikan di tengah dan pinggiran kota, di kaki bukit/dataran tinggi, ataupun di pinggir sungai. Bangunannya didominasi oleh warna merah dan di beberapa bagian dindingnya bertuliskan huruf-huruf Cina dengan warna keemasan. Klenteng merupakan tempat ibadah bagi umat Konghucu (di masa Orde Baru banyak yang diubah menjadi vihara sebagai tempat ibadah umat Buddha). Bangunan klenteng lebih bercorak budaya Cina, di dalamnya terdapat altar, gambar dewa-dewa dari kalangan agama Buddha, Tao, gambar Konghucu, *Ciam Si* (bilah bambu bertuliskan aksara Cina), *Po Pai* (alat terbuat dari kayu dan menyerupai pinang dibelah dua), patung-patung dewa dan sebagainya (Tanggok, 2000: 174).
- 5). *Industri keramik Sakok*. Industri keramik yang berpusat di daerah Sakok-Sedau ini merupakan salah satu bentuk aktivitas masyarakat yang unik, karena

¹³ Lebih lanjut lihat X.F. Asali (2008), *Aneka Budaya Tionghua Kalimantan Barat* (hal. 73-85).

merupakan keterampilan yang dikuasai secara turun temurun dan tetap mempertahankan penggunaan teknologi tradisional. Berkembangnya aktivitas pembuatan keramik menjadi industri rumah tangga dimulai setelah tahun 1930 (Soedarto, 1994: 5). Dari berbagai sumber disebutkan bahwa hingga saat ini pembuatan keramik Sakok masih menggunakan teknologi yang sama dengan teknologi yang dikembangkan oleh nenek moyang tempat di mana keterampilan pembuatan keramik ini berasal (daratan Cina). Misalnya dengan penggunaan roda putar sebagai landasan untuk pembentukan keramik, tungku naga sebagai tempat pembakaran, dan tumbuh-tumbuhan tertentu dalam proses pewarnaan (glasur) keramik. Beberapa bentuk keramik yang diproduksi antara lain berupa teko, guci, dan tempayan dengan motif bunga mawar, burung, naga, delapan dewa, atau motif-motif lain yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Dewasa ini industri keramik mengalami permasalahan yang cukup mengancam eksistensinya, berkaitan dengan proses regenerasi pengetahuan dan keterampilan pembuatan keramik kepada generasi muda, penurunan produksi, serta keterbatasan dalam pemasaran produk (Soedarto, 1994: 60-63).

Selain contoh-contoh yang telah dikemukakan di atas, tentunya masih terdapat objek atau atraksi pariwisata budaya lainnya di Kota Singkawang yang menarik untuk digali, diperbaiki dan dikembangkan. Dalam rangka mengembangkan pariwisata budaya ini, pemerintah dan pelaku wisata Kota Singkawang dapat membuat paket-paket wisata budaya yang di dalamnya mencakup beberapa atraksi wisata yang dapat dinikmati dan pusat/

tujuan wisata budaya atau sejarah yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Misalnya, biro atau agen perjalanan wisata yang memberikan penawaran kepada para wisatawan untuk menyaksikan perayaan Cap Go Meh, sekaligus memasukkan program kunjungan ke industri keramik di Sakok atau tempat bersejarah yang ada di Kota Singkawang di dalam paket wisata tersebut.

Pembangunan di sektor pariwisata budaya sesungguhnya diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada keuntungan ekonomi semata. Bagi Kota Singkawang, pariwisata budaya berpotensi untuk mendukung agenda pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat.¹⁴ Pelibatan masyarakat secara utuh di dalam pembangunan kepariwisataan ini akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program ataupun kebijakan pemerintah, serta menumbuhkan kebanggaan dan tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan yang terdapat di daerahnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan membentuk *Singkawang Tourism Promotion Board*, yang anggotanya terdiri dari para pelaku industri pariwisata (masyarakat pariwisata), seperti: pengelola hotel dan restoran, pemerhati budaya, pelaku seni, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini dapat berperan

¹⁴ Lankford (dalam Kusworo, 1998) menjelaskan setidaknya terdapat 7 (tujuh) area penting dalam pengintegrasian partisipasi masyarakat (*citizen participation*) dalam perencanaan pariwisata, yaitu di dalam proses identifikasi permasalahan, perencanaan, pengumpulan informasi untuk membuat proyeksi, *assesment*, evaluasi, mitigasi, dan monitoring.

untuk menyusun paket dan kalender wisata, merancang dan menyelenggarakan even-even wisata budaya secara berkesinambungan, memberikan usulan kepada pemerintah mengenai perencanaan program pembangunan dan regulasi yang diperlukan di sektor kepariwisataan, ataupun melakukan penyebaran informasi dan promosi wisata secara profesional.

Manfaat lain dari pengembangan pariwisata budaya di Kota Singkawang adalah dukungan terhadap sasaran pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah, khususnya yang mengarah kepada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Di sektor pariwisata, gagasan mengenai pariwisata budaya berkelanjutan (*Sustainable Cultural-Tourism*) merupakan respon dari orientasi pembangunan pariwisata yang selama ini cenderung mengabaikan kondisi sosial, faktor lingkungan, dan pelestarian budaya. Menurut Ardiwidjaja sudah sepatutnya pengembangan pariwisata di era otonomi daerah ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), dan pengelolaan sumber daya budaya. Dengan demikian, warisan-warisan budaya yang berwujud benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*) mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai aset penting dari produk industri pariwisata.

Pengembangan pariwisata budaya dalam batas tertentu dapat mendorong tercapainya pemahaman multikulturalisme. Berbagai bentuk dan atraksi

berbasis budaya yang disuguhkan, secara tidak langsung akan menimbulkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang kebudayaan lain. Ritual tatung dalam Cap Go Meh misalnya, merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya yang telah terjadi antara etnis Tionghua dengan Dayak, dan hanya dapat ditemukan pada perayaan Cap Go Meh yang berlangsung di Kalimantan Barat. Dalam even akbar inipun seluruh masyarakat Singkawang dari berbagai etnis turut berpartisipasi, sehingga perayaan Cap Go Meh ini seolah-olah tidak lagi hanya “dimiliki” oleh etnis Tionghua, melainkan telah menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Singkawang.

Selain memberikan manfaat positif seperti yang telah diuraikan di atas, pembangunan pariwisata budaya pun tidak terlepas dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Pengaruh negatif industri pariwisata yang seringkali menjadi perdebatan, antara lain berkaitan dengan proses komoditisasi dan keaslian budaya lokal. Gayatri dan Pitana (2005: 142-143) menjelaskan bagaimana perubahan bisa terjadi pada kesenian lokal karena adanya proses komoditisasi. Hal ini berakibat pada perubahan orientasi para seniman yang bukan lagi berpijak pada seni yang religius, tapi lebih pada tujuan komersial dan mendatangkan keuntungan berupa uang. Ekspresi budaya lokal di satu sisi seringkali dituntut untuk selalu mempertahankan otentisitasnya (keasliannya) sebagai sebuah keunikan, tetapi di sisi lain terdapat sejumlah kenyataan yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun kebudayaan di muka bumi ini yang tidak mengalami perubahan. Permasalahan-permasalahan ini baru sebagian kecil saja

dari sejumlah permasalahan lain yang mengemuka sebagai dampak negatif dari adanya pariwisata. Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pembangunan pariwisata budaya di daerah dituntut untuk berperan aktif, bersikap bijaksana, dan mampu menawarkan solusi yang cerdas untuk mengantisipasi dan meminimalisir semakin memburuknya kondisi budaya lokal.

3.3 Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pemaknaan pariwisata sebagai suatu industri cenderung akan menggiring pemikiran kita untuk mengaitkan pariwisata dengan serangkaian aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya, sekaligus membicarakan tentang sejauh mana kontribusi pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata. Cara pandang seperti ini wajar adanya, karena pada dasarnya industri pariwisata¹⁵ merupakan suatu kegiatan usaha untuk memproduksi atau menyediakan kebutuhan para wisatawan, baik berupa barang maupun jasa. Lebih lanjut Yoeti (2005: 4-5) mengatakan bahwa produk industri pariwisata terdiri dari 3 (tiga) komponen yang satu sama lain saling terkait, yaitu: 1). *Accessibilitas of the tourist destination* adalah semua yang dapat memberi kemudahan kepada wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Kelompok ini meliputi infrastruktur, transportasi, peraturan pemerintah, dan prosedur operasional; 2). *Facilities of the tourist*

¹⁵ Dalam Yoeti (2006: 49-52), terdapat beberapa definisi industri pariwisata yang dikemukakan oleh para ahli. Hunziker mendefinisikan industri pariwisata sebagai semua kegiatan usaha yang terdiri dari bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan para wisatawan. Sedangkan Bernecker mengatakan bahwa industri pariwisata merupakan kesatuan ekonomi yang memberikan pelayanan untuk memberi kepuasan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau yang berkaitan dengan itu.

destination berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal di daerah yang dikunjungi, meliputi akomodasi, restoran/bar/cafe, transportasi yang tersedia di daerah yang dikunjungi, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya; 3). *Tourist attraction*, yaitu semua yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Termasuk di dalam kelompok ini adalah atraksi alam, atraksi budaya, atraksi sosial dan atraksi bangunan/peninggalan bersejarah.

Keberagaman produk yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan seperti yang tergambar di atas akan membuka peluang usaha bagi banyak pihak. Bagi pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan industri pariwisata di daerahnya tentu akan memetik dan menikmati keuntungan ekonomi yang cukup besar. Di satu sisi, perkembangan industri pariwisata tersebut akan mendorong tumbuh suburnya investasi di bidang-bidang yang berkaitan dengan penyediaan produk wisata. Di sisi lain, perkembangan industri pariwisata di daerah tujuan wisata juga akan mengundang kehadiran para wisatawan yang ingin menikmati berbagai produk yang tersedia di situ.

Sektor pariwisata di Kota Singkawang memiliki peluang yang cukup besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.¹⁶ Hal penting yang tidak boleh dilupakan

¹⁶ Berdasarkan data yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang, diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2004 hingga 2006, kondisi ekonomi kota ini – dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya – menunjukkan trend yang terus meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 adalah 4,95%, tahun 2005 (5,85%), dan tahun 2006 (5,93%). Fakta ini menumbuhkan optimisme pemerintah daerah untuk terus memacu target pencapaian pertumbuhan ekonomi menjadi 7,72% di tahun 2012. Meskipun kontribusi dari sektor pariwisata tidak dapat dideskripsikan secara lebih detail, tetapi dari data prosentase pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Singkawang tahun 2004-2006, terlihat bahwa sektor-sektor yang mendukung kepariwisataan – seperti perdagangan, hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi – mengalami peningkatan pula di setiap tahunnya.

berkaitan dengan dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah adalah komitmen pemerintah Kota Singkawang untuk mengedepankan pembangunan yang berorientasi kepada ekonomi rakyat. Dikatakan bahwa industri pariwisata dengan berbagai aktivitas usaha dan produk yang dihasilkannya, diharapkan mampu memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat. Realisasinya tentu tidak mudah mengingat selama ini ekonomi rakyat seringkali ditempatkan di posisi yang marginal dan dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang tidak berarti, terutama apabila dihadapkan dengan jenis-jenis perusahaan bermodal besar dan berbentuk konglomerasi. Akibatnya, pemilik usaha kecil-menengah yang sebagian di antaranya bergerak di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, serta mengalami kesulitan ketika akan mengakses modal dan pasar.

Salah satu prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kota Singkawang secara jelas telah diarahkan kepada peningkatan partisipasi sektor swasta untuk melakukan kemitraan dengan usaha skala kecil dan menengah, melakukan pembinaan terhadap para pemilik usaha kecil dan menengah, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan masih perlu diterjemahkan ke dalam upaya-upaya yang lebih konkrit dan terukur ketercapaiannya, karena sesungguhnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan sejalan dengan konsep *community-based tourism* (CBT) yang digagas oleh Bank Dunia dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata.¹⁷

¹⁷ Santosa (2002) mengatakan bahwa CBT merupakan bentuk penglibatan masyarakat dan sekaligus merupakan manifestasi dari konsep ekonomi kerakyatan. CBT memberikan peluang untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat di sektor pariwisata, khususnya bagi para pelaku ekonomi rakyat melalui berbagai jenis usaha kecil dan menengah yang dikelolanya.

Salah satu usaha ekonomi rakyat yang dapat dikembangkan adalah berbagai bentuk usaha kerajinan dan makanan tradisional, khususnya yang dapat dikemas menjadi alternatif souvenir atau oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang. Pelestarian tradisi pembuatan keramik bisa jadi merupakan pilihan strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui upaya pendirian sekolah formal (STM) yang secara khusus memiliki jurusan pembuatan keramik, sehingga tradisi dan keterampilan pembuatan keramik ini dapat tidak akan mengalami kepunahan. Di samping itu pemerintah dan pihak swasta juga dapat berperan secara aktif melakukan pendampingan terhadap usaha-usaha keramik rakyat, baik dalam manajemen usaha maupun pemasarannya. Di sektor makanan tradisional, penyelenggaraan festival makanan tradisional secara berkala dan pembangunan pusat-pusat jajanan rakyat (*outdoor cafe*) mungkin dapat menjadi salah satu pertimbangan. Dengan cara ini para pengusaha makanan tradisional berskala kecil dan menengah akan mendapatkan peluang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dewasa ini pariwisata berpotensi untuk berkembang menjadi industri yang semakin besar dengan perannya yang semakin signifikan pula dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu industri pariwisata perlu dikelola secara profesional, dimana tugas ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pariwisata. Paling tidak terdapat 4 (empat) unsur penting dalam pembangunan kepariwisataan yang disebutkan oleh Macintosh (dalam Yoeti, 2006: 48-49). Keempat unsur itu adalah (1). Wisatawan, yaitu orang yang melakukan perjalanan pariwisata; (2). Para supplier, yaitu perusahaan

yang menyediakan kebutuhan, keinginan, serta pelayanan untuk para wisatawan; (3). Pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan, aturan dan arahan hingga wisatawan dapat dilayani dengan baik; (4). Masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Ketiga unsur terakhir inilah – para supplier, pemerintah, dan masyarakat di daerah tujuan wisata – yang berperan penting untuk secara bersama-sama mengelola industri pariwisata dan mempromosikan/memasarkan produk-produk wisata yang terdapat di daerahnya.

4. Penutup

Otonomi daerah harus disikapi secara optimis oleh pemerintah daerah sebagai sebuah peluang untuk memacu pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di sektor pariwisata. Penetapan pedoman dasar yang memberikan arah bagi pembangunan kepariwisataan hendaknya dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi aktif masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata.

Pada dasarnya berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan komitmennya untuk membangun sektor kepariwisataan di Kota Singkawang terletak pada masih tingginya dominasi pemerintah daerah dalam menyusun program dan regulasi di sektor pariwisata. Kondisi ini akan menimbulkan ketergantungan yang besar terhadap pemerintah, sehingga kreativitas dan inisiatif yang diharapkan muncul dari berbagai pihak akan mengalami hambatan. Sementara di sisi lain sumber daya manusia yang ada di jajaran pemerintah juga belum sepenuhnya mampu memberikan

dukungan yang konstruktif terhadap penyusunan rencana kebijakan yang tepat bagi pembangunan sektor pariwisata, sekaligus melakukan realisasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Oleh karena itu pemerintah, pihak swasta, dan pelaku pariwisata Kota Singkawang harus bekerja keras dan bersinergi untuk membangun dan meningkatkan daya dukung bagi pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Misalnya dengan membentuk sebuah lembaga yang mengurus masalah pariwisata (*Singkawang Tourism Promotion Board*), dimana pemerintah tidak lagi memegang peran yang dominan, tetapi hanya sebagai fasilitator saja.

Pembangunan di sektor pariwisata tentunya memerlukan dukungan sumber daya manusia yang akan menjadi aktor penggerak dan pelaksana utamanya. Sumber daya manusia inilah yang nantinya akan menjadi penentu bagi keberlanjutan pariwisata, karena dari mereka akan lahir berbagai bentuk kreativitas dan inovasi yang penting bagi pengembangan kepariwisataan. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dapat diberikan melalui program-program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan secara berkesinambungan. Hal lain tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan dan mengembangkan infrastruktur, termasuk menyiapkan sejumlah alternatif transportasi yang mudah dan murah, yang akan memperlancar aksesibilitas ke daerah tujuan wisata.

Dalam melakukan pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah daerah perlu kiranya untuk mempertimbangkan pariwisata budaya yang berkelanjutan (*sustainable culture tourism*) sebagai sebuah alternatif pilihan. Apabila diimplementasikan secara tepat, pariwisata budaya diyakini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat, melestarikan budaya, memberikan perlindungan terhadap lingkungan, serta membuka ruang dialog bagi masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Industri pariwisata yang berkembang sedemikian pesat, menawarkan sejumlah kegiatan ekonomi produktif yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan perhatian khusus kepada para pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah agar sebisa mungkin dapat terlibat di dalamnya. Pemberdayaan ekonomi rakyat akan mendorong diversifikasi usaha/jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, membuka kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Pada gilirannya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat akan berkorelasi positif dengan penguatan pondasi perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan.

Sumber Bacaan

A. Buku dan Laporan Penelitian :

- Asali, X.F. 2008. **Aneka Budaya Tionghua Kalimantan Barat**. Pontianak: Muare Public Relation.
- Gelgel, I Putu. 2006. **Industri Pariwisata Indonesi Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO): Implikasi Hukum dan Antisipasinya**. Bandung: Refika Aditama.
- Pendit, Nyoman. S. 2002. **Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)**. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. **Sosiologi Pariwisata**. Yogyakarta: Andi.
- Poerwanto, Hari. 2005. **Orang Cina Khek dari Singkawang**. Depok: Komunitas Bambu.
- Soedarto. 1994. **The Traditional Ceramics of Singkawang: Its History and Meaning As One of Our Cultural Heritage**. Laporan Penelitian. Pontianak: STKIP – PGRI.
- Tanggok, M. Ikhsan. 2000. **Jalan Keselamatan Melalui Agama Konghucu**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yoeti, Oka A. 2005. **Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata**. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Yoeti, Oka A. 2006. **Tours and Travel Marketing**. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

B. Artikel dan makalah :

- Ardiwidjaja, Robby. Tanpa Tahun. **Pariwisata Budaya, Mengapa Tidak Sekarang?**. Artikel. Diunduh dari: <http://www.malaytourism.com/id/article.php>. Tanggal 3 Juli 2008.
- Jamieson, Walter. 1994. **The Challenge of Cultural Tourism**. ICOMOS Canada Bulletin, Volume 3, 1994.
- Kusworo, Hendrie Adji. 1998. **Peranan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata**. Makalah pada Temukaji Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata Daerah yang diselenggarakan oleh LAN dan Pemerintah Daerah. Yogyakarta, 15 Desember 1998.
- Nirwandar, Sapta. Tanpa Tahun. **Pembangunan Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah**. Artikel. Diunduh dari: http://www.budpar.go.id/filedata/440_1257-PEMBANGUNAN_SEKTOR_PARIWISATA_1.pdf. Tanggal 27 Juni 2008.
- Santosa, Setyanto P. 2002. **Pengembangan Pariwisata Indonesia**. Artikel. Diunduh dari: http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto_p._santosa/artikel/setyanto_p._santosa/pengembangan_pariwisata_indonesia.html. Tanggal 24 Juni 2008.
- Suranti, Ratna. 2005. **Pariwisata Budaya dan Peran Serta Masyarakat**. Makalah pada Workshop Wisata Budaya bagi Kelompok Masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Jakarta, 12 Juli 2005.
- Ucer, Asli Gurel. et.al. 2006. **Cultural Tourism As A Tool For Sustaining Local Values: Bey pazari Case**. Makalah pada SEAGA Conference, 28 – 30 November 2006.

C. Laman :

<http://www.singkawang.go.id/>

<http://www.kotasingkawang.com/>

Transmigrasi dan Multikulturalisme di Era Otonomi Daerah

(Sebuah kasus yang terjadi di Kalimantan Barat)

Oleh : Dhidik Apriyanto, S.E.,M.Si

A. Pendahuluan

Kalimantan Barat memiliki tingkat pluralitas yang sangat tinggi. Berbagai orang dari agama, dan etnis serta kebudayaan yang berbeda menetap di daerah ini. Namun demikian, Kalbar juga dikenal sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap konflik antar etnis. Hal ini terbukti dengan seringnya terjadi konflik yang melibatkan etnik di Kalimantan Barat, diantaranya pada tahun 1967 yang melibatkan etnis Dayak dengan Tionghoa, tahun 1979, 1996/1997 antara etnis Dayak dengan Madura, kemudian tahun 1999 yang melibatkan etnis Melayu dan Dayak dengan etnis Madura. Kejadian-kejadian tersebut memakan korban yang tidak sedikit, baik nyawa manusia maupun harta benda. Hal itulah yang kemudian membuat Kalbar, terutama bagi masyarakat luar identik dengan konflik antar etnis.

Namun jika dilihat lebih jauh dari akar budaya masyarakat di Kalbar, perdamaian dan harmoni memegang peranan penting. Pluralitas atau keberagaman yang sering dianggap sebagai pemicu konflik justru tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Semua konflik yang terjadi, pada dasarnya bukanlah merupakan penolakan terhadap pluralitas etnik, namun lebih dipacu oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap budaya-budaya lain yang ada di sekitarnya. Prasangka-prasangka negatif yang berkembang di kalangan masyarakat membuat kesempatan terjadinya konflik berkepanjangan semakin terbuka lebar. Hal ini terjadi karena tidak efektifnya komunikasi antar budaya dalam

masyarakat. Oleh sebab itu, penting kiranya pluralitas dan hubungan antar etnik mendapat perhatian khusus dan ditinjau lebih dalam dari segi akademik guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pluralitas di Kalbar, diantaranya yaitu :

A.1. Keadaan Geografis

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia, dimana Indonesia sendiri terdiri atas beribu-ribu pulau yang terpisah oleh lautan. Keadaan yang demikian, apalagi dengan kedudukan Indonesia yang menjadi daerah transit dari berbagai benua, membuat masyarakat Indonesia memiliki berbagai cara hidup yang berbeda. Dengan latar belakang yang demikian lahirlah berbagai kebudayaan dan tradisi yang berbeda pula. Hal ini lebih diperkuat dengan penyerapan budaya-budaya dari luar Indonesia.

Kalimantan Barat juga mengalami hal yang sama. Sebagai daerah yang berada dalam jalur perdagangan Internasional pada masa lalu, Kalimantan Barat menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, baik yang datang maupun budaya masyarakat asli. Tak jarang para pendatang ikut menetap untuk selamanya di Kalimantan Barat. Hal inilah yang kemudian mendorong tingginya tingkat pluralitas di Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini

A.2 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah juga menjadi salah satu penyebab pluralitas budaya di Kalbar. Kebijakan yang dimaksud salah satunya adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke daerah yang jumlah penduduknya sedikit. Kalimantan Barat telah menjadi daerah tujuan transmigrasi sejak dulu. Menurut hasil statistik, jumlah penduduk daerah ini memang

relatif rendah, sehingga Pemerintah menjadikannya sebagai tujuan bagi transmigran yang berasal dari daerah padat, seperti pulau Jawa dan Madura. Perpindahan tersebut menambah keberagaman budaya di Kalimantan Barat, setelah kedatangan penduduk dari daerah lainnya, termasuk masyarakat etnis Tiong Hoa.

Pluralitas yang tinggi memiliki peluang besar terjadinya konflik apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Arogansi kebudayaan pada setiap kelompok masyarakat akan berakibat fatal apabila tidak dapat dibendung dan dikomunikasikan dengan berbagai budaya yang ada. Hal ini merupakan realitas kehidupan yang perlu disikapi secara tepat. Tidak selamanya pluralitas menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat. Bagi setiap manusia yang lahir ke dunia, keberadaannya dalam suatu etnis tertentu bukanlah sebuah pilihan. Pada dasarnya setiap etnik mengajarkan nilai-nilai kearifan pada masyarakatnya. Selain rawan terhadap konflik, keberagaman ini juga memiliki nilai positif. Keberagaman ini merupakan salah satu aset negara yang sangat berharga.

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak orang dari berbagai suku yang bekerjasama dan bahkan bersahabat. Hal ini dapat dilihat di pusat-pusat keramaian, seperti di pasar. Setiap orang bekerjasama dengan tujuan yang sama pula, yakni memenuhi kebutuhan hidup. Namun di beberapa tempat juga terjadi konflik akibat masyarakat yang sama-sama tidak memahami kebudayaan di sekitarnya. Sebagai contoh, di daerah-daerah tertentu umumnya masyarakat tidak begitu menyukai kebiasaan orang Madura yang selalu membawa clurit ke mana-mana. Mereka menganggap hal itu sebagai wujud pamer kekuatan dan tidak wajar.

Namun jika dilihat dari sudut pandang orang Madura, membawa celurit merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi, layaknya keris bagi para bangsawan Jawa. Seperti keris, celurit

juga merupakan pelengkap dalam berpakaian, selain untuk menjaga diri dari perbuatan jahat orang lain. Jadi penggunaan celurit dari sisi ini tidak menunjukkan sikap kesombongan, namun lebih cenderung pada kebiasaan dan tradisi yang berkembang.

Hal ini juga terjadi pada etnis-etnis lainnya. Anggapan yang salah dan terus berkembang di masyarakat membuat hubungan antar etnis yang seharusnya dapat rukun menjadi tersulut konflik. Pandangan yang menyatakan bahwa orang-orang Tiong Hoa selalu korupsi dan bermuka dua, membuat masyarakat etnis lainnya tidak mempercayai mereka. Padahal jika dikaji lebih jauh, masyarakat Tiong Hoa memegang peranan penting dan turut berjasa dalam pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

Anggapan lainnya, seperti orang-orang Melayu yang memiliki sifat malas, dan Dayak yang terbelakang turut memperparah keadaan yang rawan akan konflik. Semua anggapan dan pandangan ini sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara empirik. Sayangnya, pandangan-pandangan negatif ini terus berkembang hingga sekarang. Anggapan-anggapan dan kecurigaan antar etnis di Kalbar harus segera ditangani lebih serius. Hal ini jika dibiarkan hanya akan membawa akibat buruk bagi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

B. Transmigrasi

Pembangunan wilayah transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah percepatan pembangunan di kawasan yang masih terisolasi/tertinggal sekaligus meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Upaya ini penting karena berdasarkan hasil kajian Baswir dkk. (1999), ketimpangan antar daerah di Indonesia, khususnya ditinjau dari pemerataan tingkat pendapatan yang diterima penduduknya dan tingkat kesejahteraannya sangat besar. Dengan program transmigrasi, percepatan pembangunan kawasan

dapat dilakukan, dan pada akhirnya ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antar daerah dapat diperkecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi program transmigrasi terhadap pembangunan nasional dan daerah cukup besar, seperti pembukaan isolasi wilayah, penambahan tenaga kerja khususnya di sektor pertanian, dukungan terhadap ketahanan pangan, serta pembentukan desa-desa baru.

Program transmigrasi disiapkan untuk memudahkan perpindahan penduduk secara teratur dalam jumlah besar dan mempunyai tujuan tertentu. Pola pembangunan serta strategi penyelenggaraan program ditata secara sistematis agar tujuan penyelenggaraan program dapat dicapai. Sesuai dengan amanat UU No.15 tahun 1997, tujuan program transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pembangunan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu propinsi yang sangat luas di wilayah Indonesia yakni dengan luas wilayah 146.807.000 ha. Luas wilayah yang begitu luas tersebut belum diimbangi dengan jumlah penduduk yang memadai dimana jumlah penduduk baru mencapai $\pm 3.892.000$ jiwa. Ini berarti tingkat kepadatan penduduk adalah sekitar 37 jiwa per kilometer persegi. Oleh karena itu potensi yang begitu besar dimiliki Propinsi Kalimantan Barat belum dapat digali dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui proses pembangunan.

Pembangunan ketransmigrasian di Kalimantan Barat pada waktu yang lalu misalnya, sebagaimana pembangunan-pembangunan pada bidang lainnya, disamping sebagai upaya menggali potensi-potensi yang dimaksud juga masih menimbulkan berbagai permasalahan antara lain : adanya perbedaan persepsi dalam penyusunan kegiatan pembangunan kawasan, lemahnya sinkronisasi program antara kegiatan pusat dan daerah, program pembangunan masih bersifat spasial dan masih belum terintegrasinya di dalam satu kesatuan kawasan maupun Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), belum adanya mekanisme yang baku

dalam kewenangan, tanggung jawab, dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah, penyusunan program transmigrasi belum berorientasi pada tujuan (*project oriented*), dan lemahnya fungsi pengendalian pada pelaksanaan pembangunan kawasan.

Muncul juga permasalahan pada sebagian masyarakat di daerah yang berpandangan negatif terhadap transmigrasi, misalnya transmigrasi merupakan program pusat, daerah menerima transmigrasi secara terpaksa, transmigrasi merupakan pemindahan kemiskinan, mengeksploitasi SDA untuk pendatang, dan transmigrasi adalah Jawanisasi (Nakertrans, Kewenangan Pusat Daerah, 2002). Muncul juga berbagai macam opini pada masyarakat setempat bahwa program transmigrasi merupakan program yang dilaksanakan karena alasan-alasan politik, diantaranya adalah ini merupakan program jawnisasi pulau-pulau selain Jawa, Islamisasi , politik penghapusan masyarakat adat, kolusi internasional yang bertujuan menjarah sumber daya di kepulauan Indonesia. Hingga kecurigaan yang berkaitan dengan usaha memperkuat kediktatoran rezim Orde Baru (saat masih berkuasa).

Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian menjelaskan bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Transmigrasi sendiri sebenarnya hanya meneruskan program pengembangan pertanian di luar Jawa yang dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905 dengan nama Kolonisatie. Oleh karena istilah itu dianggap mengandung konotasi yang terlalu peyoratif/negatif, maka setelah Indonesia merdeka, dianggap perlu mencari nama baru untuk program tersebut. Pilihan jatuh pada nama transmigrasi, bukan emigrasi maupun imigrasi karena pemindahan penduduk itu terjadi antar pulau di sebuah negara yang berdaulat.

Sejak tahun 1947, program transmigrasi seolah terus bertualang mencari jati diri dengan dipindahkannya program transmigrasi dari satu departemen ke departemen lain. Dimulai dibawah naungan Departemen Tenaga Kerja dan Sosial pada tahun 1947. Lalu dipindahkan ke Departemen Pembangunan dan Kepemudaan, kemudian ke Departemen Dalam Negeri pada tahun 1948. Sebagai dinas dari Departemen Pembangunan Daerah, transmigrasi kembali ke Departemen Sosial sebelum dijadikan Departemen sendiri pada tahun 1957.

Tahun 1959 transmigrasi digabung dengan Departemen Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dalam tiga bentuk yang berbeda. Kemudian kembali dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri, selanjutnya ke Departemen Veteran, setelah itu kembali ke Departemen Koperasi. Tidak lama kemudian dipindahkan ke Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Lalu sempat sepenuhnya menjadi Departemen Transmigrasi. Kembali bergabung menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya Departemen Transmigrasi dan Pemukiman, Perambah Hutan. Dan kembali menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adalah Asisten Residen, H.G.Heijting (dalam Levang 2003: 10) yang diberi tugas pemerintah kolonial untuk mempelajari kemungkinan pemindahan penduduk Jawa dari Karesidenan Kedu (Jawa Tengah) ke daerah-daerah luar Jawa. Heijting menyarankan agar dalam setiap proyek Pemerintah Belanda pertama-tama membangun kelompok inti yang terdiri dari 500 kepala keluarga. Keluarga-keluarga itu mendapat jaminan hidup selama tahun pertama dan kemungkinan akan diikuti oleh keluarga-keluarga berikutnya. Dengan harapan keluarga yang disubsidi itu akan mendatangkan sanak saudaranya sehingga lambat laun memicu arus migrasi spontan. Tahun 1905 datanglah rombongan pertama yang terdiri dari 155 kepala keluarga dari Karesidenan Kedu di Gedong Tataan, Lampung. Para pendatang yang kelak melahirkan para Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera) ini membangun

sebuah desa yang diberi nama Bagelen, desa kolonisatie pertama. Empat desa lainnya dibangun antara tahun 1906 –1911 dan setiap keluarga memperoleh 70 are sawah dan 30 are pekarangan. Biaya transportasi, bahan bangunan, peralatan dan jaminan hidup selama 2 tahun ditanggung pemerintah.

Daerah-daerah tujuan transmigrasi pun berubah dari waktu ke waktu. Setelah mengirimkan ke daerah selatan Pulau Sumatera di Gedong Tataan (1905), Wonosobo (1921), Metro (1935), dan Belitang (1937), beralih ke Pulau Sulawesi dan Kalimantan hingga Papua. Untuk yang terakhir ini, sempat menjadi polemik, baru dimulai tahun 1979 dan hanya mencapai jumlah 4,5 % dari jumlah seluruh transmigran. Bahkan untuk Papua (dulu Irian Jaya) dan Timor Timur (Timor Leste), transmigrasi didukung oleh unsur militer, dengan memprioritaskan pada para veteran dalam proses perekrutan. Di sini konsep pertahanan teritorial, pertahanan rakyat dan daerah penyangga menjadi hal yang tidak diragukan untuk mencegah disintegrasi dan mempertahankan stabilitas nasional.

Selain itu Pemerintah pusat juga beranggapan bahwa pola perladangan kuno yang dilakukan masyarakat Punan dan Kubu di Kalimantan dan Sumatera, merugikan dan berbahaya. Pola bercocok tanam yang mereka gunakan mengakibatkan kebakaran hutan, tanah gundul, erosi dan banjir. Oleh karena itu pemerintah berupaya mengalihkan perhatian penduduk setempat dari perladangan yang ‘membahayakan’ itu dengan mengintegrasikan mereka pada proyek transmigrasi dan *resettlement* (pemukiman kembali).

Kalimantan Barat sebagai daerah pemukiman transmigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1974. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat, hingga Desember 2005, sudah ada 121.619 KK atau 514.916 jiwa warga transmigrasi di Kalimantan Barat. Pada tahun 2006, masuk lagi 820 KK, tahun 2007 650 KK dan pada tahun 2008 masuk 770 KK dengan sebaran sebagai

berikut: 200 KK di Sukamaju, Boyan Tanjung Kapuas Hulu, 200 KK di Capkala Bengkayang, 20 KK di Tebas Sambas, 250 KK di Kayong Utara dan 100 KK di Meliau Sanggau. Jadi, total populasi transmigrasi di Kalbar adalah 123.859 KK. Berdasarkan kebijakan pemerintah, dari tahun ke tahun, warga transmigrasi ini akan terus bertambah dan menyebar luas diseluruh kabupaten/kota di Kalbar.

Namun demikian dalam proses pembinaan tidak sedikit pula mengalami kegagalan yang mengakibatkan para transmigran kembali lagi ke daerah asalnya (meninggalkan lokasi pemukiman). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut yaitu kegagalan dalam melakukan pembinaan interaksi sosial baik antar transmigran maupun antara transmigran dengan penduduk setempat. Berbagai bentuk konflik sosial atau konflik antar etnis di Kalimantan Barat merupakan suatu bukti kegagalan dalam pembinaan interaksi sosial. Konflik antara etnis Madura dan etnis Dayak dan etnis Melayu beberapa waktu yang lalu juga telah membawa dampak yang negatif pada beberapa unit pemukiman transmigrasi di kabupaten Sambas dan Sanggau.

C. Multikulturalisme di Daerah Transmigrasi

C.1. SINTANG

Kabupaten sintang merupakan daerah kabupaten terbesar kedua di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang. Terletak dibagian timur wilayah propinsi Kalimantan Barat, memiliki luas wilayah 32.729 Km² yang terdiri dari 22.392 Km² merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan, dan seluas 988.655 Km² lainnya merupakan daerah datar. Secara administratif wilayahnya terbagi atas 21 kecamatan, 6 wilayah kelurahan dan 249 wilayah desa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Serawak Negara Malaysia Bagian Timur dan daerah Kapuas Hulu.

- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.
- Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Ketapang dan daerah Sanggau.

Penduduk kabupaten Sintang dilihat dari suku bangsa (etnis) dan agama atau kepercayaan yang dianutnya termasuk katagori penduduk yang bersifat heterogen (majemuk). Suku bangsa (etnis) yang ada di daerah ini antara lain : Suku Dayak, Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Padang, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Batak, Cina, dll. Selain beragam etnis, juga beragam agama (kepercayaan), ada yang memeluk agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu Dharma dan Budha. Di Kabupaten Sintang juga berdiri banyak tempat-tempat ibadah, yaitu: masjid sebanyak 314 unit, surau sebanyak 427, gereja katolik 256 unit, Kapel 199 unit, Gereja Protestan 273 unit, Pura 5 unit dan vihara 3 unit. Rumah-rumah ibadah tersebut tersebar di 21 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

Hasil dari pencapaian dalam penyelenggaraan program transmigrasi di daerah ini pada masa lalu, secara obyektif dan rasional sebagian besar menilai bahwa pelaksanaan program transmigrasi ada aspek positif dan negatifnya. Aspek positif penyelenggaraan program transmigrasi di Kabupaten Sintang selama ini telah menunjukkan hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat misalnya telah tersedianya sarana dan prasarana umum, telah terbukanya daerah-daerah yang sebelumnya terisolir, serta tersedianya bahan-bahan kebutuhan sehari-hari sebagai hasil pertanian. Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Bupati (M. Ade karta) dan Anggota DPRD bahwa pada tahun 1980-an masih sangat terbatas sayuran yang dipasarkan di Kota Sintang. Tetapi sekarang pasar Kota Sintang telah dibanjiri hasil pertanian dari daerah transmigrasi. Begitupula pada awalnya hubungan antar daerah di Kabupaten Sintang relatif sulit namun dengan dilaksanakannya program transmigrasi daerah-daerah tersebut telah terbuka dari isolasi sehingga

hubungan dengan kota sintang relatif lancar. Secara detail perkembangan positif program transmigrasi di Kabupaten Sintang adalah :

1. Penduduk di daerah ini semakin bertambah sehingga tenaga tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan juga semakin banyak.
2. Banyak lahan-lahan yang semula tidak produktif telah tergarap menjadi lahan yang produktif.
3. Dibangunnya infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi sehingga banyak desa yang dulunya terisolasi secara geografis pada saat ini telah terbuka dan dapat dengan mudah dapat berhubungan dengan daerah yang lain bahkan telah menjadi pusat-pusat daerah pengembangan.
4. Pembangunan daerah menjadi bertambah lancar karena selain didukung oleh tenaga kerja yang memadai secara kuantitas juga etos kerja yang tinggi.
5. Dalam bidang perdagangan nampak semakin semarak, mobilitas perdagangan di pasar-pasar lokal semakin meningkat dibandingkan sebelumnya.

Sementara Sekwilcam Dedai dalam merespon pelaksanaan program transmigrasi di wilayah kerjanya (Kecamatan Dedai), mengemukakan bahwa 50% program transmigrasi termasuk dalam kategori berhasil, 25% termasuk kategori kurang berhasil, dan 25% lainnya termasuk kategori tidak berhasil (gagal). Menurutnya banyak transmigran yang kondisi sosial ekonominya sudah jauh lebih baik dibanding sejak awal kedatangannya. Hal tersebut dikarenakan :

1. Para transmigran termasuk pekerja-pekerja yang ulet (etos kerjanya cukup baik), sehingga mampu mengelola lahannya dengan baik. Selain itu para transmigran rata-rata mampu memanfaatkan waktu kerja cukup efektif dan efisien.
2. Para transmigran termasuk tenaga kerja yang hemat dalam setiap menggunakan penghasilannya.

3. Para transmigran termasuk tenaga kerja yang mampu memanfaatkan setiap peluang kerja yang ada.
4. Dalam melakukan suatu pekerjaan, para transmigran tidak terikat oleh perasaan gengsi, yang penting pekerjaan tersebut halal dan dapat menambah penghasilan untuk kepentingan hidupnya.
5. Saat ini para transmigran sudah mulai mengetahui dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dalam (lahan garapan). Sehingga hasil pertaniannya semakin baik.

Dari data pengamatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, para transmigran asal lebih berhasil daripada masyarakat lokal. Etos kerja dan pola hidup transmigrasi dari luar tersebut memang belum sepenuhnya teradopsi oleh penduduk lokal.

Dari aspek negatifnya program transmigrasi yang dilaksanakan 10 tahun terakhir selain telah mencapai aspek-aspek positif sebagaimana telah diungkapkan diatas, program transmigrasi juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dibalik keberhasilan program transmigrasi, menurut Wakil Bupati bahwa dimasa lalu membawa dampak sosial yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan banyak faktor yang saling terkait termasuk sebagai konsekuensi logis dari kebijakan dan pelaksanaan program transmigrasi yang terlalu sentralistik. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan program transmigrasi kedepan pola lama tersebut harus ditinggalkan dan diganti dengan pola baru yang lebih baik, sehingga benar-benar dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal baik bagi pembangunan daerah, masyarakat lokal dan warga transmigran itu sendiri. Secara detail perkembangan positif program transmigrasi di Kabupaten Sintang adalah :

1. Pada unit-unit pemukiman transmigrasi (UPT) apakah jenis transmigrasi pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR-TRANS) atau pola transmigrasi pola umum yang termasuk kategori berhasil

ternyata menimbulkan rasa kecemburuan sosial dikalangan masyarakat lokal. Ini karena pola pembinaan transmigrasi yang terkonsentrasi di dalam Unit Pemukiman Transmigrasi. Masyarakat lokal disekitar UPT yang pada umumnya memiliki kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang relatif masih tertinggal tetapi terabaikan dan tidak tersentuh oleh pembinaan. Akibatnya disisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya para transmigran mengalami perbaikan sedangkan di sisi lain kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tetap tidak berubah dan bahkan merasa termarginalkan. Timbulnya rasa kecemburuan sosial masyarakat lokal terhadap para transmigran tersebut merupakan akumulasi rasa ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pelaksanaan program transmigrasi.

2. Keberhasilan pembinaan transmigrasi terutama di UPT-UPT terutama yang berasal dari luar atau daerah asal (dasal) dalam bidang produksi pertanian mendorong mereka untuk dapat memasarkan hasil produksinya. Oleh karena itu mereka membentuk atau menciptakan jaringan pasar khususnya produksi pertanian sehingga mereka lebih dapat mendominasi perdagangan pasar-pasar lokal dibandingkan dengan penduduk lokal. Dominasi penguasaan pasar lokal ini mengakibatkan pedagang penduduk lokal menjadi terdesak dan termarginalkan. Situasi kehidupan sosial ekonomi seperti itu juga merupakan bibit-bibit munculnya kecemburuan sosial, disinteraksi dan respon negatif masyarakat lokal terhadap program transmigrasi di Kabupaten Sintang.

Kegagalan-kegagalan pembinaan ketransmigrasian di Kabupaten Sintang cukup banyak menimbulkan masalah –masalah sosial baru di daerah misalnya :

1. Kegagalan pembinaan transmigrasi di unit-unit pemukiman transmigrasi tertentu menyebabkan munculnya tuntutan para

transmigran terhadap pemerintah daerah yang harus segera dicarikan solusinya.

2. Kegagalan pembinaan transmigrasi di unit-unit pemukiman transmigrasi menyebabkan cukup banyak transmigran yang tidak betah berada di lokasi dan pergi meninggalkan UPT. Para transmigran sebagian ada yang pulang ke daerah asalnya dan sebagian lagi ada yang ke kota menjadi gelandangan, pengemis, dan bahkan ada yang menjadi Penjaja Seks Komersil (PSK), sehingga dapat mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat.
3. Kegagalan pembinaan transmigrasi di unit-unit pemukiman transmigrasi di daerah ini seringkali oleh pihak-pihak tertentu dipolitisir dan dijadikan sebagai tolok ukur kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Melalui berbagai tuntutan, unjuk rasa dan sebagainya kerapkali dapat mengganggu ketertiban dan keamanan daerah.
4. Munculnya isu-isu yang dapat mengarah pada sara sehingga dapat menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara transmigran dengan penduduk lokal bahkan munculnya sikap penolakan terhadap penyelenggaraan program transmigrasi.
5. Transmigran yang didatangkan pada masa lalu sebagian bukan transmigrasi yang benar-benar memiliki ketrampilan dalam bidang pertanian, sehingga pada saat penempatan di UPT seringkali menimbulkan masalah atau problem atau menjadi beban Pemerintah Daerah.
6. Merasa tersisihnya penduduk lokal oleh para transmigran mengakibatkan hubungan menjadi kurang harmonis dan timbulnya bibit-bibit konflik laten. Akibatnya di lokasi transmigrasi Nanga Pinoh dan Ketungau terjadi pengusiran para transmigran yang sudah puluhan tahun dimukimkan.
7. Aspek negatif dari penyelenggaraan transmigrasi dimasa lalu lebih banyak dilihat dari segi pembebasan lahan dan pola usahatani yang saling menimbulkan masalah, karena tidak

ditangani secara tuntas dengan melibatkan tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat. Dalam hal pembebasan lahan dikalangan masyarakat lokal biasanya perlu dilakukan upacara adat “oselan batu” yaitu memotong jenis-jenis binatang berdarah misalnya : ayam atau babi. Setelah upacara selesai berarti masyarakat lokal telah melakukan penyerahan lahan mereka tanpa adanya tuntutan dikemudian hari. Selain itu masalah pembebasan lahan juga masih menjadi masalah karena di Kabupaten Sintang masih ada lahan yang duplikasi fungsi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Dinas Pertanahan Daerah.

Selanjutnya Mitjang, Remdanus dan kaswadi (tokoh-tokoh masyarakat lokal) melihat usaha tani PIR-TRANS sering menimbulkan masalah karena dianggap oleh sebagian anggota masyarakat sebagai perampasan hak ulayat masyarakat lokal. Sekwilcam Dedai menjelaskan bahwa ketinggalan masyarakat lokal dalam bidang ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masyarakat lokal memiliki rasa ketergantungan pada alam sangat tinggi dan tidak berusaha menguasai alam lingkungannya.
2. Dalam memanfaatkan waktu kerja kurang efektif dan kurang efisien.
3. Pola kehidupan sehari-hari bersifat konsumtif.
4. Kurang mampu memanfaatkan setiap peluang kerja yang ada.
5. dalam melakukan sesuatu pekerjaan masih sering terikat oleh perasaan gengsi atau pretise, sehingga peluang kerja yang dapat menambah penghasilan tidak selalu dapat dilaksanakan. Misalnya pada musim kemarau para transmigran asal tidak merasa malu untuk datang ke kota Sintang untuk menjual air bersih kepada anggota masyarakat yang memerlukan. Pekerjaan semacam ini tidak bisa dilakukan oleh penduduk lokal, padahal pekerjaan ini cukup memberikan tambahan penghasilan yang lumayan.
6. Etos kerja relatif masih rendah sehingga mereka cepat merasa puas dengan apa yang dihasilkan.

C.2. Ketapang

Ketapang merupakan kabupaten terbesar di Kalimantan Barat, yang terletak disebelah selatan di propinsi Kalimantan Barat. Sejak tahun 2001 daerah pemerintahan Ketapang dibagi menjadi 15 kecamatan, 154 desa dan 5 kelurahan (BPS, 2001, 6). Letak geografis Kabupaten Ketapang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap musim yang terjadi dan juga curah hujan. Keadaan ini selanjutnya akan memiliki dampak pada produk pertanian yang dihasilkan para petani. Kabupaten ketapang secara geografis berbatasan dengan :

- Sebelah utara : berbatasan dengan kabupaten pontianak dan kabupaten sanggau.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan laut jawa
- Sebelah barat : berbatasan dengan laut natuna
- Sebelah timur : berbatasan dengan kalimantan tengah dan kabupaten sintang.

Perkembangan realisaai penempatan transmigrasi di kabupaten ketapang dimulai sejak tahun 1982-1999, sementara dari tahun 1999 sampai 2002 terjadi stagnasi. Hal ini terjadi karena perubahan sosial kemasyarakatan yang banyak menyuarakan anti transmigrasi. Karena diantara mereka (ada kecemburuan sosial yang disebabkan ada sebagian warga trans yang hidup lebih berhasil dibanding penduduk lokal sekitar) dan juga mereka juga tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang kehidupan sehari-hari daripada warga trans, sehingga hanya memandang program transmigrasi dari sudut pandang negatifnya saja. Mereka juga memberikan penilaian yang kurang obyektif tentang bagaimana realita di lapangan tentang bagaimana besarnya kontribusi kegiatan ketransmigrasian terhadap pembangunan daerah, baik dibidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Hal-hal yang positif yang tidak mereka paparkan antara lain manfaat ketransmigrasian dalam membuka keterisolasian daerah melalui pembangunan sarana transportasi, pemanfaatan lahan tidur yang menjadi bernilai ekonomis

atau menjadi lahan yang produktif, adanya transfer teknologi pertanian, pendidikan politik bagi masyarakat lokal (pengaruh tidak langsung), serta memperkaya budaya local karena bertambahnya budaya dari luar daerah.

Sesuai dengan sumber informasi dari Bupati, Bepedda, DPRD, Kepala Dinas/Subdin, Kepala Kantor/Badan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten ketapang, dan tokoh masyarakat (tokoh agama, adat, dan pemuda) mengenai program transmigrasi, ditinjau dari sisi positifnya adalah terjalinnya hubungan sosial antara berbagai etnis, mereka membangun persaudaraan, kekerabatan, saling tolong menolong satu sama lain . Pemukiman transmigrasi menjadi pusat berkumpulnya berbagai etnis (Jawa, Sunda, Melayu, Dayak, Bali, Batak), yang selanjutnya akan terjalin kolaborasi antar etnis dengan kelemahan dan kelebihanannya yang didasari atas pengertian satu dengan yang lain. Selanjutnya di kawasan transmigrasi tercipta lapangan kerja di bidang pertanian (berladang, beternak, berkebun). Dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif. Sehingga secara ekonomi, mereka mampu menghidupi keluarga mereka. Dengan bertambahnya penghasilan, berarti terjadi peningkatan mutu pendidikan keluarga mereka, dan juga mendorong semakin meningkatnya kesejahteraan transmigran.

Dilihat dari faktor Agama, Budaya, dan Keamanan, di lokasi UPT Kabupaten Ketapang telah terjadinya toleransi antar umat beragama di kawasan pemukiman, karena disana berkumpul berbagai berbagai agama yang dianut oleh warga trans. Mereka saling menyadari adanya perbedaan dalam kepercayaan yang dianut, namun tidak mau saling menonjolkan agamanya masing-masing. Mereka mau mengunjungi hari-hari besar keagamaan masing-masing, saling membantu membangun tempat ibadah yang mereka perlukan sebatas kemampuan yang mereka miliki.

Yang menyangkut sektor budaya dan informasi, terjadi transformasi informasi dan teknologi pertanian. Meskipun faktor

ini berjalan alamiah, dan belum berlangsung optimal, hal lain yang dapat diamati adalah berkembangnya seni daerah, semakin kaya dengan seni-seni lain yang masuk ke daerah Ketapang (tari, arsitektur, seni bangunan), dan juga mempelajari secara langsung etos kerja, ketekunan bekerja, ketrampilan bekerja, hidup hemat) di kalangan warga trans.

Selain aspek positif, tidak dapat dipungkiri bahwa program transmigrasi tidak luput dari aspek negatif. Hal ini muncul karena adanya berbagai berbagai masalah berikut :

1. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik, dimana masalah-masalah program transmigrasi yang menyangkut aspek sosial yaitu semakin bertambahnya kantong-kantong kemiskinan sebagai akibat gagalnya pengolahan lahan transmigrasi oleh sebagian warga trans. Hal ini terjadi karena lahan yang digarap para transmigrasi bukan lahan pertanian yang subur dan tidak siap pakai, dan juga letak pemukiman transmigrasi relatif terisolasi dari daerah pemasaran produk-produk pertanian (misalnya: jauh dari kota, membuat kota kendawangan hanya mengandalkan transportasi air, desa Alur Bandung kecamatan Teluk Batang warga trans nelayan tinggal beberapa KK, karena yang dikirim bukan nelayan profesional, sehingga hasil pertanian membusuk, dan alat penangkapan ikan seperti perahu, jala semakin habis rusak dimakan waktu tanpa ada perkembangan yang berarti. Hasil pertanian (labu prenggi, sayur-mayur, cabe, mentimun, dll) tidak bisa dijual di pasar, karena semua petani menanam tanaman yang sama, ini perlu pembinaan manajemen pertanian yang memadai. Faktor lain adalah kekeliruan dalam rekrutmen para transmigran baik lokal maupun transmigran penduduk dasar, bahwa mereka bukan benar-benar petani, bahkan diantara mereka banyak yang berkali-kali bertransmigrasi hanya untuk sekedar memperoleh jatah hidup/jadup dan mereka bukan petani yang professional, akibatnya mereka menelantarkan lahan pertanian yang mereka miliki dan lahan yang ada tetap tidak

produktif. Pengamatan dari faktor politik adalah bahwa warga trans lokal belum bisa sejajar pengalaman politiknya dengan warga pendatang (kegiatan kemasyarakatan, pembangunan pedesaan, dan juga kegiatan partai politik seringkali timbul ketidak harmonisan, ketegangan dan gejolak di masyarakat). Faktor ini terjadi karena belum terbangunnya demokrasi ekonomi dan sosial warga lokal yang memadai, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan mereka yang masih tergolong relatif masih rendah.

2. Agama, budaya dan keamanan, dimana sebagian besar tokoh masyarakat adat Dayak menjelaskan bahwa seringkali terjadi pelanggaran terhadap budaya lokal/adat setempat yang menurut mereka dianggap hal yang kecil, yang menurut penduduk setempat hal tersebut merupakan masalah yang cukup serius. Misalnya membawa lari anak/istri orang sehingga banyak anak tanpa ayah. Bukan hanya sampai disini masalah tersebut selesai, akan tetapi bagaimana keperluan hidup sehari-hari mereka, masa depan pendidikan mereka, kejelasan status keluarganya, dan juga pandangan negatif yang melekat pada mereka yang tidak jelas bapaknya. Masalah ini muncul umumnya dilakukan oleh para investor/kontraktor diantaranya terjadi di proyek-proyek pembangunan transmigrasi yang sedang dibangun dan juga perkebunan karet/sawit PIR-Trans.

C.3. Kapuas Hulu

Secara geografis Kabupaten kapuas hulu terletak pada ujung timur Propinsi Kalimantan Barat dengan ibukota putussibau. Jarak dari pontianak sebagai ibu kota propinsi kurang lebih 657 km, dan dapat ditempuh selama 18 jam perjalanan darat atau 2 jam penerbangan dengan pesawat CASA DAS, sedangkan perjalanan sungai bisa menghabiskan waktu 48 jam. Luas secara keseluruhan Kabupaten Kapuas Hulu adalah 29.842 kilometer persegi yang merupakan 20.33%

dari luas wilayah propinsi Kalimantan Barat (146.807 kilometer persegi). Secara administratif kabupaten ini terdiri 23 Kecamatan, 141 Desa, 4 Kelurahan, dan 42 Dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 182 .878 jiwa tersebar tidak merata dengan kepadatan penduduk 6 jiwa perkilometer persegi.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mempertimbangkan dan memperhatikan besarnya aspirasi dan minat masyarakat terhadap penyelenggaraan transmigrasi, yaitu dengan cara mengusulkan perlunya (BPD) diketahui oleh kepala desa dan camat dan adanya rekomendasi dari camat bahwa daerahnya siap untuk dijadikan lokasi pemukiman transmigrasi dan adanya surat keputusan pencadangan areal dan rekomendasi dari Bupati. Beban pembiayaan dalam penyelenggaraan transmigrasi pada APBD II yang didasarkan pada kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi program penyelenggaraan transmigrasi.
- Survey identifikasi calon areal (SICA).
- Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi APPDT.
- Angkutan dan permaknaan calon transmigrasi APPDT.
- Paket pertanian calon transmigrasi APPDT.
- Pelaksanaan kerjasama antar daerah.

Pelaksanaan program transmigrasi di daerah Kapuas Hulu juga seperti daerah lainnya yaitu menimbulkan aspek positif dan negatif. Aspek positif dari program ini adalah terjalinnya hubungan sosial antara berbagai etnis, terciptanya persaudaraan, kekerabatan, saling mengerti adat istiadat antar suku/etnis. Kawasan pemukiman transmigrasi menjadi pusat perkumpulan berbagai etnis seperti jawa, sunda, melayu, dayak, bali, batak dan yang lainnya, yang selanjutnya akan terjalin saling pengertian dari berbagai kelompok sosial, lembaga kemasyarakatan, dan terbentuknya persatuan yang semakin kokoh di masyarakat. Dikawasan transmigrasi tercipta lapangan kerja dibidang pertanian (berladang, beternak, berkebun), dengan memanfaatkan

lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Dengan demikian dapat menambah penghasilan yang mereka peroleh untuk menghadapi keluarga. Dengan bertambahnya penghasilan itu berarti akan dapat meningkatkan mutu kesejahteraan hidup keluarga. Dengan tingkat kesejahteraan yang memadai maka akan mendukung terciptanya demokrasi di berbagai bidang kehidupan.

Pada sisi lain di kawasan pemukiman transmigrasi terjadi adanya toleransi antar umat beragama, hal mana disebabkan berkumpulnya berbagai pemeluk agama. Mereka saling menyadari adanya perbedaan dalam kepercayaan yang dianut, namun tidak saling menonjolkan agamanya masing-masing, saling membantu membangun sarana ibadah yang mereka perlukan sebatas kemampuan yang mereka miliki.

Dalam hal budaya, tampaknya telah terjadi transformasi (inkulturasi) budaya baik dari warga trans pendatang ke masyarakat lokal maupun sebaliknya. Misalnya warga lokal menyerap keahlian dan ketrampilan teknologi pertanian dari trans pendatang, sebaliknya trans pendatang belajar mengenai adat kebiasaan dan bahasa masyarakat lokal, walaupun sifatnya berjalan alamiah dan belum berlangsung optimal. Hal yang lain yang dapat diamati adalah pada perkembangan kesenian daerah yang semakin diperkaya dengan seni-seni lain yang masuk dari luar (seni tari, arsitektur, seni bangunan), dan juga mempelajari secara langsung etos kerja, ketekunan bekerja, ketrampilan bekerja, hidup hemat) dari kalangan warga trans. Program ketransmigrasian tampaknya juga mendukung semakin mantapnya bidang keamanan, hal ini dilihat dari semakin kondusifnya bidang tersebut selama ini. Di Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah terjadi kekacauan atau kerusakan yang bersifat masal, pertikaian-pertikaian yang terjadi bersifat pribadi dan tidak menjurus pada pertikaian kelompok, masal maupun SARA.

Sedangkan aspek negatif program transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah semakin bertambahnya kantong-kantong kemiskinan sebagai akibat gagalnya pengolahan lahan transmigrasi

oleh sebagian warga trans. Hal ini terjadi karena lahan yang digarap para transmigran bukan lahan pertanian yang subur dan tidak siap pakai, letak pemukiman transmigrasi yang relatif terisolasi dari daerah pemasaran produk-produk pertanian (jauh dari kota), peserta trans yang dikirim bukan trans yang menjiwai bidang pekerjaannya). Hasil-hasil pertanian tidak bisa terjual dipasar, karena semua petani menanam tanaman yang sama dan masa panennya bersamaan dengan panen penduduk lokal. Kekeliruan dalam rekrutmen para transmigran baik lokal maupun transmigran penduduk dasar karena banyak diantaranya yang bukan benar-benar petani, dan bahkan diantara mereka banyak yang berkali-kali bertansmigrasi hanya sekedar untuk memperoleh jatah hidup (Jadup), akibatnya mereka menelantarkan lahan pertanian yang mereka miliki dan lahan yang ada tetap tidak produktif, bahkan mereka sering memperjualbelikan lahannya kepada pihak lain.

Aspek negatif lainnya seperti pembangunan infrastruktur, lahan perkebunan, dan rumah-rumah yang tidak memadai, kadang-kadang belum tuntas sementara warga transnya sudah didatangkan. Tidak adanya keseimbangan dalam proses pembangunan antara warga di daerah sekitar lokasi transmigrasi dengan warga dikawasan pemukiman warga trans. Hal ini seringkali menimbulkan kecemburuan sosial dari warga setempat dan pada tahap selanjutnya akan mewujudkan menjadi ketegangan sosial antara warga setempat dan warga pendatang.

Tidak adanya jalinan fungsional antara pemda pengirim trans dan pemda tempat tujuan trans, sehingga tidak ada hubungan emosional dalam bentuk tanggung jawab moral dari kedua pemda yang terkait dengan program transmigrasi masa lalu. Saat kajian awal keadaan tanah lokasi transmigrasi tidak dilaporkan secara transparan kepada calon warga transmigran, tetapi laporannya muluk-muluk dan tidak sesuai realitas sebenarnya. Dengan kata lain membuat laporan asal bapak senang. Pemda lokal kurang dilibatkan secara serius dan tinggal terima barang sudah jadi, tidak ada tempat untuk memberi masukan karena kebijakan dimasa lalu bersifat topdown policy, dengan kata lain daerah tempat transmigrasi tidak punya kekuasaan.

Masalah sosial lainnya adalah terjadinya tempat-tempat pelacuran (komplek WTS), tindak kejahatan/kriminalitas yang berupa pencurian, perampokan sebagai akses adanya kemiskinan dan juga karena lahan pertanian mereka yang tidak produktif dan lahan yang diberikan kepada para transmigran bukan lahan yang subur dan hal ini memicu ketegangan sosial diantara etnis yang berbeda. Timbulnya hal seperti itu seringkali menyudutkan warga trans pendatang, karena mereka saling dijadikan kambing hitam. Ketegangan dan gejolak sosial juga bisa timbul akibat adanya perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah pusat terhadap warga lokal yang tinggal disekitar pemukiman transmigrasi. Lebih-lebih bila kehidupan mereka relatif miskin dan diterlantarkan tanpa mendapat perhatian yang proporsional dari pemerintah.

Dari aspek politik, ada kecenderungan program ketransmigrasian ini dijadikan sebagai misi politik bagi pemegang kekuasaan baik di pusat maupun di daerah. Sasarannya adalah untuk memperkuat dukungan terhadap kekuasaan. Hal ini masuk akal karena para transmigran adalah kelompok lemah yang dapat ditekan dan dipengaruhi aspirasi politiknya. Pada sisi lain terlihat ketimpangan pengalaman politik antara warga lokal dengan warga pendatang dimana terlihat dalam kegiatan kemasyarakatan, pembangunan pedesaan, dan juga kegiatan partai politik. Ketimpangan itu seringkali menimbulkan ketidak harmonisan, ketegangan dan juga gejolak di masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum terbangunnya demokrasi ekonomi dan sosial warga lokal yang memadai. Tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan mereka masih tergolong relatif masih rendah.

Sebagian tokoh masyarakat dan pengurus adat menjelaskan bahwa sering terjadi pelanggaran terhadap budaya lokal/adat setempat, misalnya membawa lari anak-istri orang dan mengambil barang orang sembarangan. Para pelanggar adat tersebut merasa dapat membayar ganti rugi yang diminta oleh pengurus adat dan mereka dengan ringan hati melupakan pelanggaran itu, tanpa ada rasa tanggung jawab yang pasti. Masalah ini karena warga trans pendatang dan para investor

atau kontraktor tidak memahami hakekat hukum adat dan adat istiadat masyarakat lokal dimana mereka tinggal.

D. Pluralisme di Era Otonomi Daerah

Pluralisme adalah istilah yang paling netral ketika berbicara mengenai masyarakat majemuk. Kendatipun teori-teori mengenai masyarakat majemuk biasanya dibangun dengan istilah-istilah yang lain seperti "*ethnic diversity*", "*multi-culturalism*", dan "*ethnic identity*". Teori-teori tersebut cukup relevan dipakai untuk memahami secara lebih mendalam situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini.

Berbicara mengenai diversitas etnis, ada suatu pendapat ekstrim yang mengatakan bahwa "diversitas etnis menimbulkan instabilitas politik dan kemungkinan juga kekerasan". John Bowen dengan gigih menentang pendapat itu seraya berbicara mengenai perlunya menciptakan bentuk-bentuk harmonis dari diversitas etnis. Lebih lanjut Fred W. Riggs (dalam Arman) menyatakan bahwa hubungan silang budaya (*cross cultural*) sudah ada sejak lahirnya kebudayaan. Perbedaan etnis dan interaksi antar kelompok yang memiliki norma kebudayaan yang berbeda (bahasa, agama, adat istiadat, dan leluhur) berlangsung terus sampai sekarang dengan pola yang hampir tidak berubah. Namun dalam negara modern (termasuk Indonesia) poli-etnisitas bertumpang tindih dengan nasionalisme, demokrasi, dan industrialisasi, masing-masing dengan tantangan dan solusinya sendiri-sendiri. Saya pikir bagi Indonesia dimana diversitas etnis itu merupakan faktor yang "*given*" (dalam tanda kutip) maka kita harus menerimanya sebagai suatu realita dan mencoba menonjolkan segi-segi positif dan menekan sebanyak mungkin segi-segi negatifnya.

Sebagian orang lebih menyukai konsep "*multi-culturalism*" dengan alasan bahwa istilah itu menunjuk kepada "*... a generic condition that prevail whenever communities with different*

cultural heritages co-exist and interact with each other. Definisi seperti ini lebih sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, etnis-etnis yang ada di nusantara ini memang harus menerima kenyataan bahwa coeksistensi merupakan suatu landasan atau arena untuk berinteraksi secara wajar dan saling menguntungkan. Kita (dalam arti etnis) bisa saling belajar dari sejumlah kelebihan dan keunikan yang dimiliki berbagai etnis yang ada. Misalnya etnis peladang di luar Jawa bisa banyak belajar dari etnis pesawah untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih efisien dan berkesinambungan. Orang Bali dengan kemahirannya dalam bidang ukir mengukir meskipun masih dalam bentuk yang kasar. Jadi ruang untuk bekerja sama dan saling memberi dan menerima masih terbuka lebar.

Sebagian orang menganggap bahwa terdapat kontradiksi antara “*ethnic identity*” dan “*national identity*”, seolah-olah yang satu cenderung melemahkan yang lain. Sebagai contoh, makin menonjolnya kesadaran etnis akhir-akhir ini, lebih-lebih jika dihubungkan dengan era otonomi daerah yang seolah-olah memberi angin terhadap berkembangnya etnocentrisme, dipandang sebagai suatu proses yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Saya kira kemungkinan itu memang ada, namun sampai saat ini masih dalam skala yang tidak menghawatirkan. Namun demikian, hal itu perlu kita cari solusinya agar tidak meluas dan mendalam sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional kita.

Sejak bergulirnya reformasi dan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan khususnya dalam pembagian wewenang, hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pembangunan. Setelah program transmigrasi dilaksanakan puluhan tahun di Kalimantan Barat terutama di Kabupaten Sintang, Ketapang, dan Kapuas Hulu, telah membawa dampak positif yang diharapkan maupun menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan.

Era reformasi telah membawa implikasi perubahan yang luas di berbagai bidang pembangunan, salah satu tuntutan dari perubahan tersebut adalah direalisasikannya Otonomi Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah dewasa ini membawa perubahan yang besar dalam tata pemerintahan, terutama menyangkut pembagian wewenang berbagai jenjang hirarki institusi pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah mempunyai implikasi yang luas terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Transmigrasi merupakan salah satu program pembangunan, di era sebelum reformasi atau Otonomi Daerah, masih dianggap sebagai orientasi proyek. Oleh sebab itu maka kedepan harus dilakukan perubahan yaitu pemberdayaan masyarakat menjadi dasar untuk membangun kawasan transmigrasi melalui pembangunan kemandirian lokal. Sudah saatnya mengkaji lebih lanjut bagaimana agar kondisi sosial kemasyarakatan di kawasan transmigrasi menjadi lebih kondusif, sehingga menjadikan kawasan tersebut mampu memobilisasi penduduk untuk mencari peluang dan kesempatan usaha.

E. Penutup

Salah satu mekanisme yang besar berpengaruh terhadap pluralitas kependudukan adalah perpindahan penduduk secara internal yaitu transmigrasi. Sebenarnya pluralitas kependudukan juga terdapat pada penduduk asli yang mendiami suatu daerah, tetapi hal itu jarang sekali menimbulkan masalah dan konflik. Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa suku-suku asli telah mengalami proses akulturasi yang panjang, sehingga perbedaan diantatra mereka sudah mencapai titik penyesuaian yang relatif stabil dan tidak lagi menimbulkan masalah yang berat. Tetapi proses penyesuaian antara transmigran dan

penduduk asli baru berjalan dalam kurun waktu yang relatif singkat, sehingga masih dalam proses mencari bentuk-bentuk penyesuaian yang tepat.

Kebijakan transmigrasi pada masa Orde Baru menerapkan pendekatan *top-down*, dimana baik jumlah transmigran, metode rekrutmen, pengiriman ke daerah tujuan, dan pengelolaan di unit-unit transmigrasi, semuanya diatur dari atas dengan mengeluarkan dana yang sangat besar dan melibatkan petugas pelaksana yang cukup banyak. Ternyata pola lama tersebut di sebagian besar daerah tujuan mengalami kegagalan. Diantara masalah yang menonjol adalah tidak berhasilnya program produksi pertanian, gagalnya pemasaran hasil produksi, dan timbulnya kecemburuan dari masyarakat lokal yang merasa dianak-tirikan oleh pemerintah.

Kini program transmigrasi sudah memasuki paradigma baru yang bercirikan pendekatan *bottom-up*. Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pendekatan yang dipakai tidak lagi bersifat *project oriented*, melainkan *demand side approach*, dan secara operasional tidak lagi berorientasi pada *push factors* melainkan lebih mengutamakan *pull factors*. Dengan pendekatan baru ini kegiatan transmigrasi tidak lagi berorientasi kepada upaya mengurangi tekanan kependudukan di daerah padat, tetapi secara aplikatif diintegrasikan dengan keperluan daerah tujuan yang memerlukan tenaga kerja yang terampil.

Di Kalimantan Barat transmigrasi dengan pola baru ini sudah dipersiapkan di beberapa Kabupaten. Di Teluk Melanau, Kabupaten Kettapang pada bulan Desember 2003 akan ditempatkan sebanyak 100 KK transmigran berasal dari Kabupaten Temanggung, di Kabupaten Kapuas Hulu akan ditempatkan 255 KK, dan di Kota Singkawang akan ditempatkan sebanyak 87 KK. Pada saat ini masih terlalu dini untuk membuat prediksi mengenai keberhasilan program

gaya baru ini, namun nampaknya pendekatan yang menjadi pilihan cukup menjadi alasan untuk bersikap optimistis.

Sikap masyarakat berkenaan dengan program transmigrasi yang digagas oleh pemerintah bermacam-macam. Berdasarkan pengamatan lapangan di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak terungkap bahwa masih ada keraguan pada sebagian tokoh masyarakat tentang manfaat program transmigrasi di daerah mereka. Pertama, ada kekhawatiran bahwa dengan datangnya penduduk baru dari luar daerah penduduk asli akan mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Penduduk setempat secara tradisional memanfaatkan sumber daya hutan secara langsung, padahal kini sumber daya hutan yang ada sudah semakin menipis. Dengan datangnya transmigran maka persaingan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas akan menambah beban bagi penduduk setempat yang memang sudah tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberatan yang kedua, bertalian dengan kegagalan produksi dan pemasaran hasil produksi yang dialami oleh para transmigran sendiri, sehingga sebagian terpaksa mencarai profesi baru yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip moral masyarakat seperti menjadi pengemis dan prostitusi. Penduduk lokal merasa khawatir bahwa masalah sosial seperti itu akan merambat kepada anak-anak dan putera puteri mereka. Jika transmigrasi memang merupakan pilihan maka seyogyanya dilakukan pendekatan dan sosialisasi secara bertahap untuk menghilangkan semua keraguan tersebut.

Akhir-akhir ini keinginan untuk mendatangkan penduduk dari luar daerah menunjukkan prospek yang cerah. Keinginan beberapa daerah untuk melakukan pemekaran (pembentukan kabupaten baru) kadang-kadang terhalang oleh kecilnya jumlah penduduk yang tersedia. Untuk mengatasinya telah muncul gagasan-gagasan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah berpenduduk padat dalam rangka mendatangkan transmigran dengan pola baru seperti saya utarakan di atas.

Program perkebunan baik sawit maupun karet yang dijadikan primadona oleh beberapa kabupaten akan mengalami hambatan jika tidak didukung oleh penambahan penduduk melalui program transmigrasi. Mungkin program transmigrasi yang paling rasional adalah dengan pola PIR, karena permodalan, penyiapan lahan, perumahan, dan pemasaran hasil ditangani langsung oleh perusahaan bersama pemerintah. Meskipun demikian masih sering terdengar kekecewaan masyarakat berkenaan dengan pembagian lahan dan harga jual hasil produksi yang mereka anggap terlalu rendah. Oleh sebab itu masih perlu dicari pola operasional yang lebih tepat agar masalah-masalah klasik tersebut dapat diatasi.

Jika ditinjau secara menyeluruh, permasalahan yang muncul pada program transmigrasi adalah permasalahan yang sangat kompleks, yaitu menyangkut tentang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Meskipun ini merupakan wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, patut dipandang perlu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turut mendorong bagaimana agar terciptanya pendidikan budaya yang harmonis di wilayah Kalimantan Barat. Berbagai pertikaian antar suku telah terjadi disini, dan telah memakan banyak kerugian yang dialami oleh warga masyarakat, baik kerugian materi maupun non materi. Memang akhir-akhir ini tidak muncul lagi isu-isu yang mengarah ke arah pertikaian antar suku, akan tetapi siapa yang bisa menjamin hal tersebut tidak akan terulang kembali.

Harmonisasi antar etnis menjadi suatu harga mati yang harus terus dijaga. Upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menghilangkan dampak negatif pluralisme dan menggalang persatuan yang harmonis, harus dilakukan dalam berbagai front baik Cognisi, Afeksi, maupun Tindakan.

Pada tataran Cognisi kita perlu menyadarkan diri kita maupun generasi penerus yang bakal menggantikan kita akan pentingnya mempelajari sejarah, terutama sejarah perjuangan kemerdekaan dari tangan penjajah. Kita perlu memberikan gambaran yang jelas betapa

pahitnya kehidupan nenek moyang kita ketika mereka masih berada di bawah kekuasaan kaum penjajah, dan betapa semua etnis pada waktu itu berjuang bersama-sama untuk memperoleh kemerdekaan. Dengan menyadari dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar biasanya orang bersedia mengabaikan perbedaan kecil-kecil yang bersifat kontroversial. Kita perlu meyakinkan diri kita bahwa pluralitas etnis, sosial dan budaya tidak perlu menimbulkan perpecahan apalagi permusuhan. Kita boleh bangga dengan keunikan dan keunggulan adat istiadat masyarakat dimana kita dilahirkan, tetapi kebanggaan itu tidak menyebabkan kita memandang rendah terhadap adat istiadat masyarakat yang lain, apalagi jika masyarakat yang lain itu hidup berdampingan dengan kita dalam suatu kawasan yang sama.

Pada tataran Afeksi kita perlu memberikan apresiasi yang jujur terhadap keindahan seni budaya etnis yang lain. Apresiasi itu tumbuh dengan sendirinya terhadap seni budaya etnis kita sendiri karena berkembang seiring dengan proses alamiah sejak kita masih bayi sampai menjadi dewasa dan tua. Tetapi untuk menghargai seni budaya lain perlu suatu proses yang direkayasa. Apresiasi itu akan lahir dan tumbuh jika kita sering turut menyaksikan pertunjukan-pertunjukan seni budaya dari etnis yang lain. Program seni budaya dalam bentuk pentas bersama merupakan cara yang ampuh untuk menggalang kerja sama dan saling menghargai diantara berbagai etnis yang ada. Dari pertunjukan bersama ini akan tumbuh semangat untuk mengembangkan seni budaya sendiri agar tidak kurang menariknya dari seni budaya orang lain. Pendekatan afeksi ini jika berhasil akan menambah gairah kehidupan dan meningkatkan etos kerja.

Kemudian tataran yang paling sulit adalah memelihara perilaku atau tindakan agar tidak melanggar norma kebudayaan yang berlaku, terutama norma budaya yang dianut oleh etnis lain yang hidup di sekeliling kita. Upaya ini harus kita lakukan secara terus menerus baik di dalam rumah tangga maupun melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Upaya penyalarsan tindakan ini perlu dilakukan pada semua tingkat pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan lokal. Jadi hendaknya dibangun suatu program yang terarah dan berkesinambungan untuk memperkuat aspek-aspek kehidupan yang dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan antar etnis, diantaranya seperti : dibentuknya suatu forum komunikasi kebudayaan, mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keberagaman etnik, selain itu masyarakat juga harus diberikan pencerahan wawasan tentang model CCU (Cross Culture Understanding) secara berkala untuk membuka wahana berpikirnya lebih luas tentang hidup di tengah keberagaman etnis dan untuk memberikan pemahaman kearifan yang tersimpan dalam budaya masing-masing. Agar lebih melekatnya pendidikan berbudaya sejak dini pada setiap generasi, seyogyanya dapat di buat sebuah acara yang selalu digelar setiap tahun semacam kontes pementasan antar budaya di daerah yang kecenderungan multikulturalismenya tinggi seperti Kalimantan Barat yang melibatkan seluruh suku/etnis yang ada, hal ini untuk selalu menyadarkan kepada setiap generasi akan eksistensi dan kesamaan hak dan kewajiban setiap suku/etnis yang ada disekitar kehidupan mereka.

Dalam hal ini, pemerintah juga dituntut untuk ikut serta secara aktif. Pemerintah lewat aparat penegak hukumnya juga harus mewujudkan supremasi hukum secara tegas. Hal ini penting untuk menindak setiap kejahatan, agar tidak terjadi kecurigaan yang kemudian berakhir dengan kemarahan masyarakat. Sikap keterbukaan, perlakuan yang adil dan pengetahuan luas akan dapat menjembatani semua keberagaman yang hidup, bahkan semakin membuat Kalimantan Barat menjadi kaya akan budaya, tanpa adanya kerusakan dan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, Syamsuni (2003). *Pluralitas Kependudukan Dalam Perspektif Budaya*. Bukit Tinggi : Makalah dari Propinsi Kalimantan Barat disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V.
- Baswir, Revrison., (1999). *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Idea.
- Ditjen PSKT, 2002, *Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi*. Jakarta: Depnakertrans.
- Levang, Patrice, 2003, *Ayo Ke Tanah Sabrang, Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Edisi Terjemahan oleh : Sri Ambar Wahyuni Prayoga.
- Sugito, 2006, *Penilaian Tingkat Kesejahteraan Transmigran di Kalimantan Barat*. Pontianak : Penelitian.
- Sugito, 2003, *Perumusan Kebijakan Pembangunan Ketransmigrasian Paradigma Baru Dalam Era Otonomi Daerah di Propinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : Penelitian.
- Tangdililing, A.B., 2000, *Pola Pembinaan Interaksi Sosial Antar Transmigran dan Antara Transmigran Dengan Penduduk Setempat di Unit-Unit Pemukiman Transmigrasi Kalimantan Barat*. Pontianak: Penelitian.

MEZTISO, PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME

Donatianus BSE Praptantya

Ku sayangi engkau, saudaraku. Siapapun engkau – apakah engkau memuja di gereja, berlutut di kuil, atau berdoa di masjid. Engkau dan aku adalah anak-anak dari suatu kepercayaan, karena jalan-jalan keagamaan itulah jari-jari tangan kasih sayang Yang Maha Agung – tangan yang menghimbau kepada siapa saja, menyampaikan amanat yang sempurna kepada siapa saja, dan dengan hangat menyambut siapa saja.

(potongan sajak Kahlil Gibran, "kata-kata mutiara sang guru").

Meztiso dan Identitas Sosial: suatu identitas imager

Tidak ada seorangpun di dunia ini yang mampu menolak untuk dilahirkan dalam suatu kategori identitas social tertentu. Tidak ada yang meminta atau dapat memilih untuk dilahirkan sebagai orang Kalimantan, dan tidak ada yang dapat menolak untuk lahir di bumi Kalimantan – tidak seorangpun. Begitu pula yang lainnya, tidak ada yang minta untuk dilahirkan sebagai orang Jawa, orang Tionghoa, orang Melayu ataupun orang ini orang itu – semua itu hanya “seolah-olah”, imager belaka. Imager bagaimana? Realitanya ada lho! Ada orang Kalimantan, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Tionghoa dan lain-lain. Bahkan, data penduduk Kalimantan Barat ini saja ditampilkan bahwa jumlah orang Melayunya sekitar 40%, orang Dayaknya sekitar 41%,

orang Tionghoa-nya sekitar 11%, orang Jawa, Madura, Bugis, Batak dan lain-lain sekitar 8% (BPS Kalbar, 2006). Betul, data itu tidak salah. Persoalannya adalah pengidentifikasian atas orang-orang itu yang semena-mena. Adakalanya menurut tempat lahir, adakalanya menurut keturunan dan kemudian semua itu dianggap sesuatu yang “benar”, dan memang benar bahwa semua itu manusia – sama-sama manusia. Tetapi mengapa kemudian dikotak-kotakan sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil: oh ini orang Dayak, oh itu orang Melayu. Itu orang Batak, itu orang Papua dan seterusnya. Atas dasar apa pengelompokkan tersebut? Atas dasar budaya? Apa iya? – atas dasar tempat lahir? Benarkah? – atas dasar keturunan? Masak sih? – atas dasar warna kulit, rambut, mata? Tetapi ada toh orang Dayak, orang Melayu, orang Batak dan lain-lain?

Betul, ada orang yang dilahirkan di Kalimantan. Tetapi apakah otomatis ia disebut orang Kalimantan? Belum tentu, tergantung orangtuanya darimana? Kalau orangtuanya datang dari Jawa, tetap ia dikategorikan sebagai orang Jawa yang kebetulan lahir di Kalimantan. Begitu pula sebaliknya. Sekalipun orang terlahir di Jawa, kalau orangtuanya datang dari Kalimantan, maka seringkali ia tetap dikategorikan sebagai orang Kalimantan yang lahirnya di Jawa.

Sehubungan dengan persoalan di atas, seorang bintang sinetron Indonesia dalam acara Dorce Show tanggal 1 Juli 2008 yang ditayangkan oleh TransTV, ia mengatakan bahwa susah menjadi orang “blasteran”. Sebagai anak yang dilahirkan dari ayah yang Jerman dan Ibu yang Indonesia, ternyata ia sering diperlakukan tidak mengenakkan. Ketika ia berkumpul dengan keluarga besar ayahnya, ia dianggap “si asia” (orang Asia); dan ketika berkumpul dengan keluarga besar Ibunya, ia dianggap “si bule”

Persoalan tersebut, menjadi aneh ketika ada orangtua yang mampu untuk memilih tempat lahir anaknya – misalnya, supaya keren anaknya dilahirkan di Den Haag Belanda. Begitu anak itu pulang ke Indonesia, tetap saja ia diidentifikasi menurut

orangtuanya, bukan dimana ia lahir. Hal ini menunjukkan bahwa betapa semena-menanya identifikasi social itu. Cerita ilustrasi tentang si Beta berikut ini, juga menunjukkan bahwa persoalan pengidentifikasian yang semena-mena membuat betapa repotnya menjadi orang Indonesia.

Siapakah Beta ini? Orang Indonesiakah? Orang Jawa-kah? Orang Dayak-kah? Orang Manado-kah? Orang Bali-kah? Atau orang Papua-kah? Entahlah! Sebab, Beta lahir di suatu kota kecil di Papua, tetapi orang Papua menilai Beta bukan orang Papua, sebab rambutku tidak keriting seperti mereka, kulitku tidak hitam seperti mereka, meskipun dalam keseharianku bahasa yang Beta gunakan bahasa mereka, Beta menari tarian mereka, Beta makan juga seperti apa yang mereka makan. Tetapi mengapa mereka tidak mau menyebutku sebagai orang Papua? Tetap saja dianggap sebagai “orang luar” (liyan, the other).

Ketika Beta sudah dewasa, Beta mencoba merantau ke Kalimantan Barat. Jelas, Beta sebagai pendatang maka wajar kalau orang-orang di sana menyebutku Beta bukan orang Kalimantan. Tetapi kalau Beta amati dengan cermat, hee bukankah rambutku sama dengan orang-orang di sana, kulitku juga sama dengan mereka. Sayangnya, ketika berbicara menggunakan bahasa mereka tetapi logatku bahasa Papua. Beta belum bisa menari tarian mereka. meskipun kalau bicara tentang wilayah dan kondisi masyarakat Kalimantan Barat, Beta sudah masuk ke banyak tempat/desa dipelosok Kalimantan Barat ini – yang barangkali justru belum banyak diketahui oleh kebanyakan orang Kalimantan Barat sendiri. Oleh karena itu, kalau dinilai penjelajahanku ini, Beta lebih banyak mengetahui kondisi wilayah dan masyarakat, rambutku sama dengan mereka, kulitku sama dengan mereka. Cuma Beta tidak dilahirkan di sini, meski Beta berpikir dan berbuat untuk kemajuan masyarakat di sini, Beta tetap tidak dianggap sebagai “orang diri”, tetap saja dianggap sebagai “orang luar” (liyan, the others).

Bagaimana ini, Beta bingung! Untungnya, kalau ada sensus penduduk di Negara ini, sudah tidak lagi mempertanyakan kelompok sukubangsa. Bayangkan kalau masih harus mengisi

kelompok sukubangsa, betapa bingungnya Beta. Mau ikut kelompok sukubangsa bapakku, bapakku sendiri tidak pernah mengajarkan budayanya. Bapakku sendiri sudah tidak jelas kelompok sukubangsanya, ibunya orang Jawa dan ayahnya orang Minahasa. Bapakku lahir dan dibesarkan di Ambon, dia punya kebiasaan hidup layaknya orang Ambon. Ketika kuliah ia pergi ke Jogja, belajar bahasa Jawa meski logatnya logat ambon, lucu sekali jika dia berbicara (menurut cerita nenek Beta). Lama-kelamaan logat ambonnya semakin berkurang dan orang Jawa juga semakin “melupakan” bahwa ia bukan orang yang dilahirkan di Jawa. Proses adaptasinya berhasil dan bapakku sudah tidak dianggap sebagai “orang luar” lagi, tetapi dianggap sebagai “orang dalam” (in group).

Mau ikut kelompok sukubangsa ibuku, ibuku juga tidak mengajarkan kepadaku budaya sukubangsanya. Karena ia juga bingung. Bapaknya orang Dayak yang merantau ke Bali dan ibunya orang Bali yang dibuang oleh keluarganya karena mau dinikahi oleh bukan orang Bali (harap maklum, sebab di Bali ada tradisi seperti itu dikalangan orang-orang berkasta tinggi). Lantas mereka pindah ke Jawa, belajar bahasa Jawa dan beradaptasi dengan budaya Jawa – berhasil, sehingga orang disekitarnya tidak lagi merisaukan siapa mereka.

Ketika Beta dilahirkan, bapak – ibuku ditugaskan sebagai guru di tanah Papua. Di rumah, Beta sering mendengar bapak-ibuku berbicara menggunakan bahasa Jawa (meskipun budaya Jawa hanyalah budaya “cangkakan”, budaya yang “seolah-olah” menjadi milik mereka), maka lama-kelamaan Beta pun menjadi paham dengan apa yang mereka bicarakan, sehingga Beta-pun lama-kelamaan menjadi bisa berbahasa Jawa, meskipun kalau di rumah orangtuaku selalu berbicara denganku dalam bahasa Indonesia. Di luar rumah Beta bergaul dengan anak-anak Papua, maka wajar pula kalau Beta juga dapat berbicara dalam bahasa orang Papua. Prilakuku sama dengan mereka, hanya warna kulit dan rambutku yang berbeda dengan mereka

dan oleh karenanya mereka tetap menganggap Beta bukan orang Papua, sekalipun tembuniku tertanam di sana. Secara cultural Beta “orang dalam” tetapi secara social Beta tetap “orang luar”.

Sebagai “mestiso” dalam negeri, Beta tidak pernah peduli dan tidak pernah mau tahu, termasuk dalam kelompok etnis manakah diriku ini. Dalam benakku, tersimpan suatu rasa bangga yang telah tertanam sejak Beta mengetahui latar belakang etnisitas kedua orang tuaku, lagi pula orangtuaku selalu mengajarkan Beta untuk tetap menghormati dan menghargai orang lain sekalipun ia berbeda dengan kita. Beta bangga bahwa Beta-lah orang yang (betul-betul) menjadi orang Indonesia, hasil silangan orang-orang dari beberapa tempat. Beta-lah “mestiso ke- Indonesia-an” (bhinekka tunggal ika dalam konteks yang lain), baik secara etnisitas maupun budaya yang membesarkanku. Namun, justru “ke-indonesia-an ku” itu secara social Beta menjadi manusia tanpa struktur. Di sana dianggap “orang luar”, di sini juga dianggap sebagai “orang luar”. Kalau berdasarkan tempat lahir, Beta orang Papua tetapi orang Papua menganggapku “orang luar”. Kalau berdasarkan aliran darah orangtuaku, maka Beta dapat disebut orang Manado, orang Bali, orang Dayak dan juga bisa disebut orang Jawa, sebab bapakku berdarah Manado-Jawa, ibukku berdarah Dayak-Bali. Realitas social yang kuhadapi, Beta dianggap orang yang tidak jelas (tanpa struktur, termarginalkan secara etnik). Inilah repotnya menjadi orang Indonesia, yang plural dan otomatis pula multikultur.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, orang lazim bertanya: “dari mana asal anda?”, saya sering menjawab “jujur” bahwa saya berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Lantas, orang yang bertanya (tentu dengan sedikit kesal hatinya) oh bukan itu maksud saya, tetapi anda lahir di mana? Dan Beta menjawab bahwa saya lahir di Papua, tepatnya di Merauke. Ketika Beta menjawab bahwa saya lahir di Papua, orang itu pun terlihat mulai bingung, ternyata apa yang selama ini lazim dalam benaknya maka kali ini menjadi tak lazim. Jadi anda “asli” Papua? Tanya orang itu kemudian. Suatu kelaziman dalam pergaulan hidup di

Indonesia ini, orang selalu mempertanyakan “keaslian” seseorang. Apakah Beta bukan “asli manusia”?

Orang Amerika atau Inggris, kalau bertanya hanya “kamu datang dari mana? (where do you come from?) atau “kamu tinggal di mana? (where do you live?), begitu dijawab “jujur” maka persepsi orang akan identitas social berhenti sampai di situ. Berbeda dengan orang Indonesia. Ketika ia bertanya kepada orang lain “darimana anda berasal” maka dapat dipahami bahwa pertanyaan itu adalah darimana saya berasal, atau di mana saya lahir atau anda “asli” darimana. Nah, pada pemahaman yang terakhir itu justru menjebak pemahaman kita dalam pemahaman yang hanya “seolah-olah asli”. Berbicara mengenai hal ini, penulis menjadi teringat dengan James T. Siegel (1997), salah satu antropolog yang juga indonesianist

Dalam bukunya yang diberi judul *Fetish, Recognition, Revolution*, James T. Siegel (1997) berpendapat bahwa realita social di masyarakat Indonesia ini memperlihatkan bahwa yang namanya ke-indonnesia-an itu imajiner belaka. Orang Indonesia lebih suka mengidentifikasi-dirinya ke dalam identitas etnisitas yang juga imajiner, tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok social dengan identitasnya masing-masing yang masih juga imajiner. Seolah-olah semua itu ada, padahal semua itu hanya “pencitraan” (image), yang kemudian diakui dan dipuja (*recognition and fetish*). Mari kita lihat bagaimana Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, yang selama ini dipahami sebagai miniature kebudayaan-kebudayaan “asli” Indonesia. Kalau mau tahu dan melihat kebudayaan dari sukubangsa Dayak “asli” Indonesia, maka kita akan menuju ke anjungan-anjungan Kalimantan. Kalau mau melihat sukubangsa melayu “asli” Indonesia, maka kita dapat melihatnya di anjungan-anjungan yang me-representasi-kan propinsi-propinsi yang dihuni oleh sukubangsa Melayu, dan seterusnya. Image terbangun seiring dengan melihat anjungan dari anjungan, bahwa anjungan ini merepresentasikan propinsi ini yang penduduknya adalah etnis ini. Suatu penyederhanaan realitas etnis, seolah-olah setiap propinsi hanya dihuni oleh sekelompok etnis yang menjadi satu entitas.

Padahal, entitas etnis hanya pengelompokan yang dilakukan para ahli ilmu social untuk memudahkan pengamatan dan penganalisisan. Realitasnya, dalam satu entitas etnis itu sendiri sangat plural. Orang bisa mengaku bahwa dirinya termasuk etnis Dayak, Dayak yang mana? Sebab Dayak ada Dayak Kanayatn, ada Dayak Ot Danum, ada Dayak Selako, ada Dayak Iban dan lain-lain. Ketika orang berbicara Dayak Kanayatn, orang tidak serta-merta mengarah ke Dayak Baahe, tetapi bisa saja ke dayak Bakatik, Baampe, Banyadu' dan lain-lain. Begitu pula halnya, ketika orang berbicara etnis Jawa, pikiran orang mengarah pada orang-orang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Orang Jawa Barat seringkali dilupakan bahwa mereka juga orang Jawa, hanya karena mereka berbahasa Sunda. Apakah etnis Jawa itu juga hanya satu entitas? Jawabnya plural, tidak hanya satu entitas. Ada orang Jawa "ngapak", ada orang Jawa "halus", ada orang Jawa "timuran", ada orang Jawa yang lebih dikenal sebagai "wong Samin", "wong Tengger" atau pula "wong Osing". Hal ini menunjukkan bahwa Orang Dayak dan orang Jawa dapat dilihat sebagai suatu entitas yang plural secara budaya. Begitu pula orang Sumatra. Ketika berbicara orang Sumatra, benak kita langsung mengarah ke orang Batak. Orang Aceh, orang Padang, orang Melayu, orang Palembang, orang Kubu, orang Lampung dan lain-lain terlupakan. Begitu pula ketika menyebut Sulawesi, maka yang seringkali menyelip dipikiran kita secara cepat yang terbayang adalah Sulawesi didiami oleh sukubangsa Bugis, Toraja, Manado, yang lain tidak diingat alias diabaikan. Padahal ada orang Buton, Makasar, Mindano, Sangir dan lain-lain. Begitu pula dengan Papua, Maluku, Nusa Tenggara.

Hal itu menunjukkan betapa lenturnya identitas social, sehingga menjadi orang Indonesia ternyata lebih sulit dari pada menjadi orang "Melayu" (orang Dayak di Kalimantan Barat – sependek pengetahuan penulis, yang umumnya menganut religi non Islam dan kemudian menganut religi Islam, mengaku bahwa dirinya sudah masuk "Melayu"). Semoga dengan tulisan ini, semakin banyak orang Indonesia yang

menyadari bahwa identitas social adalah identitas yang imajiner, identitas yang “seolah-olah”. Oleh karena itu, identitas social jangan digenggam erat-erat, jangan dijadikan “berhala” (*fetishism*). Sebab, ketika sudah menjadi berhala, maka slogan “Bhineka tunggal Ika” tidak akan pernah membumi di bumi Indonesia ini.

Bhineka Tunggal Ika: Pluralisme dan Multikulturalisme Indonesia

Semua orang Indonesia (barangkali) mengenal semboyan Bhineka tunggal Ika yang mengandung makna pengakuan sebagai bangsa yang pluralis sekaligus multikulturalis. Paling tidak, semboyan itu dikenal oleh orang Indonesia yang pernah menerima pelajaran PMP, Kewarganegaraan, P4 dan sejenisnya. Semboyan itu tertulis pada pita yang digenggam kaki burung Garuda, lambang Negara kesatuan Republik Indonesia. Semua orang Indonesia (barangkali) juga mengerti apa arti semboyan tersebut, tetapi bagaimana mempraktekkan makna semboyan itu masih harus dipertanyakan bahkan harus diperjuangkan untuk dapat menjadi prilaku social.

Bhineka Tunggal Ika merupakan representasi kesadaran kolektif dari bangsa Indonesia yang plural (majemuk), sekaligus multikultur. Artinya, slogan “Bhineka tunggal Ika” tidak hanya sekedar hiasan dinding semata, tidak hanya cukup menjadi slogan doang tanpa upaya untuk menjadikan prilaku social. Kalau hanya menjadi slogan semata tanpa perjuangan untuk mengimplementasikan dalam prilaku social, maka Indonesia diambang kehancuran.

Semua orang Indonesia (barangkali) mengenal Sumpah Pemuda, peristiwa sejarah bangsa yang terjadi di tahun 1928, dan kemudian dijadikan titik tolak kebangkitan nasional. Pada peristiwa itu, dikatakan bahwa para pemuda Indonesia pada waktu itu bertekad bulat untuk Berbangsa satu Bangsa Indonesia, Berbahasa satu Bahasa Indonesia

dan Bertanah Air satu Tanah Air Indonesia. Kini, seabad sudah tekad itu berusia, masihkah tekad itu membara dihati setiap insan Indonseia? Suatu tekad yang menunjukkan untuk menghargai kemajemukan (pluralitas), majemuk dalam budaya (multikultur), majemuk dalam agama (multireligi), majemuk dalam sukubangsa (multi etnik), majemuk dalam kelompok (multigroup), majemuk dalam ide-pikiran (multi idea). Tekad yang membara ini kemudian melahirkan filosofi berbangsa dan bernegara yang lebih dikenal sebagai Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kalau kita mau menyimak dengan cermat “isi” dari UUD 1945 “yang asli”, terutama sebelum di revisi, tampak jelas betapa para penyusunnya sudah paham multikulturalisme. Padahal waktu itu, kajian multiculturalism belum menjadi isu akademis seperti sekarang. Dalam UUD tersebut disebutkan bahwa Negara melindungi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi; disebutkan pula bahwa setiap warga Negara bebas menganut kepercayaan. Bahkan, bertekad pula untuk ikut serta membangun dunia yang damai.

Senada dengan pikiran penulis, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau Ahmad Supardi Hasibuan, dalam salah satu tulisan beliau yang diberi judul Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Membangun Keharmonisan bangsa (<http://www.> di down load tgl. 30 juni 2008, 5:39AM) berpendapat bahwa:

“Sudah merupakan kehendak ilahi atau yang dalam ajaran agama disebutkan sebagai sunnatullah (hukum alam), bahwa Indonesia yang sangat kita cintai ini adalah merupakan salah satu negara di dunia yang sangat prularis dan bahkan multikulturalis sebab negeri ini terdiri atas berbagai etnis, bahasa, agama, budaya, kultur dan lain sebagainya. Kenyataan itu disadari betul oleh para *Founding Fathers* negeri ini, sehingga pluralitas dan keragaman kultur tersebut mereka rumuskan dengan apik dalam bentuk semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya sekalipun berbeda-beda

tetapi tetap satu. Masyarakat yang pluralis dan multikulturalis sudah barang tentu memiliki budaya, aspirasi dan perbedaan-perbedaan yang beraneka ragam, namun demikian mereka tetap sama, tidak ada yang merasa superior ataupun inferior dari yang lain. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam bidang sosial maupun politik.

Hal senada juga disampaikan oleh Dedy Pradipto, Pr. di dalam pengantar diskusi budaya bertema “Menguak Tabir Multikulturalisme” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kemanusiaan dan Keadilan [SEMADI] Keuskupan Bandung beberapa waktu lalu [26/4/08] di Gedung RRI Bandung, menyatakan bahwa:

“kemajemukan adalah *blessing in disguise* bagi tanah ini, bagi bangsa ini. Alasannya sederhana saja; kemajemukan adalah sebuah sunnatullah, hukum alam dan bangsa ini sangat beruntung memilikinya”. Kenyataan tak terbantahkan ini seharusnya disyukuri oleh setiap orang yang mengaku bangsa Indonesia. Kenyataan ini juga harus dirayakan karena tidak banyak negara-negara yang seberuntung Indonesia. “Merayakan kemajemukan adalah merawat Indonesia,” kata Romo Dedy.

Menurut Romo Dedy tak ada nada sebuah entitas bangsa dan negara yang bernama Indonesia, jika yang ada hanyalah ke-ikatan ketunggalan dan monokulturalisme. Karena itulah kemajemukan negara-bangsa ini harus dipelihara, dirawat, diberdayakan, dan difungsionalisasikan untuk hari ini dan masa depan negara-negara Indonesia yang lebih baik. Tetapi menurut Romo Dedy tidak mudah untuk merawat kemajemukan itu. (dalam Frino Bariarcianur <http://beritaseni.com/?p=20> di down load tgl. 24 juni 2008, 12:41PM)

63 tahun usia kemerdekaan Bangsa Indonesia, tetapi diskriminasi masih mewarnai kebijakan bangsa ini; bahkan sikap saling curiga, saling merasa paling berhak terhadap negeri ini tumbuh subur. Stereotyping

dan prasangka social memicu konflik. Salah satu contoh konflik social yang terjadi di tahun 1999 adalah konflik Sambas Kalimantan Barat, yang terjadi karena masalah identitas social. Berikut ini, sebagian dari hasil *assessment* penulis dan kawan-kawan pada tahun 2006, yang menunjukkan bahwa identitas social dapat menjadi pemicu konflik ketika pluralism dan multikulturalisme belum membumi dalam perilaku social.

Jawaban “umum dan standard” dari beberapa informan yang ditemui selama *assesment* di Sambas juga mengungkapkan ada masalah gesekan budaya antara orang Melayu Sambas dengan orang Madura, para informan selalu menyalahkan pihak budaya orang Madura yang bermasalah dan harus berubah terlebih dahulu sebelum dapat hidup rukun dengan orang Melayu Sambas. Francis Steward berpendapat pandangan primordial seperti di atas, yang berasumsi bahwa “kesukuan adalah warisan budaya” patut ditinjau secara kritis karena pandangan seperti ini bersifat naif dan terlalu menggeneralisir tentang pembentukan identitas, peranan dan kemampuan untuk dibentuk, serta mengabaikan faktor lain seperti ekonomi dan politik. Sebenarnya identitas seseorang atau sekelompok orang dibentuk dan dapat berubah serta ciri-ciri khasnya berubah seiring dengan perjalanan waktu, menunjukkan bahwa meski budaya seseorang sebagian diwarisi, namun juga dibentuk dan dipilih, dan banyak orang memiliki banyak identitas¹. Orang Madura asal Sambas tidak memiliki identitas tunggal terutama mereka yang telah melakukan pola perkawinan campur dengan orang Melayu, anak-anak keturunan yang orang tua mereka kawin campur ini memiliki hibritas identitas yakni merasa dirinya memiliki ciri-ciri budaya orang Madura namun sekaligus juga memiliki identitas diri sebagai orang Melayu. Hibriditas identitas itu sebenarnya jauh lebih kompleks lagi karena banyak orang Madura yang telah melakukan perkawinan campuran dengan orang Jawa, Bugis, Dayak dan Cina. Di daerah relokasi Tebang Kacang banyak dijumpai orang yang memiliki identitas majemuk tersebut, konflik tahun 1999 yang

¹ Stewart, Frances, 2005, “Fundamental socio-economic cause of violent political conflict”, dalam Dewi Fortuna Anwar; Helene Bouvier; Glenn Smith; dan Roger Tol (Editors), *Violent Internal Conflict In Asia Pasific*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; LIPI; LASEMA-CNRS; KITLV-Jakarta, hlm 166.

menyebabkan mereka terusir dari Sambas tersebut juga memaksa mereka untuk mengenakan “baju identitas tunggal” yakni identitas sebagai orang Madura meskipun sebagian dari mereka tidak dapat berbicara dalam bahasa Madura.

Identitas “orang Madura” juga dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki “darah” Madura, tidak seberapa penting permasalahan prosentase kemurnian darahnya, dapat disebut sebagai “orang Madura” atau “orang Melayu” adalah merupakan konstruksi sosial yang dibangun oleh warga masyarakat setempat. Sebagai contoh 15 kepala keluarga di Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas oleh warga masyarakat setempat dikategorikan sebagai “orang Melayu Sambas” sehingga mereka tetap selamat jiwa dan harta bendanya sampai saat ini. Orang Melayu “asli” di Sungai Kelambu mengatakan bahwa kelimabelas KK tersebut sudah membaur dan beradaptasi dengan budaya orang Melayu setempat bahkan tradisi keagamaan dan bahasa khas Madura sudah tidak ada lagi dalam diri mereka itu. Dengan demikian permasalahan identitas kesukuan adalah bersifat dialektik sehingga dapat muncul hibriditas identitas kesukuan. Namun dalam kasus Sungai Kelambu ini dapat ditarik kesimpulan ketika jumlah orang Madura di suatu komunitas hanya sedikit, hanya tiga orang Madura yang pertama kali datang di desa ini, akan terjadi proses adaptasi aktif dari pihak orang Madura tersebut sehingga memilih strategi adaptasi kawin campur dan menyerap hampir semua ekspresi budaya Melayu Sambas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu faktor penting dalam fenomena Desa Sungai Kelambu ini adalah peran kepemimpinan Kepala Desa Sungai Kelambu yang berani menyatakan sikapnya pada waktu konflik sedang dalam puncak eksilasinya bahwa 15 keluarga keturunan orang Madura di desanya tidak pernah bermasalah dan wajib dilindungi oleh semua warga desa.

Sikap kepala desa ini cukup berani karena sebagian dari massa yang berada di Kecamatan Tebas ingin membakar rumah Kepala Desa Sungai Kelambu yang dianggap membela orang Madura.

Problem hibriditas identitas ini sebenarnya menarik untuk dikembangkan sebagai wacana multikulturalisme di Sambas. Selama ini masyarakat Sambas dikonstruksi sebagai masyarakat majemuk yang (hanya) terdiri dari tiga suku bangsa dan budayanya yakni Melayu, Dayak dan Cina. Konstruksi ini demikian kuat didukung oleh Pemda Kabupaten Sambas, dalam Gelar Budaya Multietnis di Alun-alun Keraton Alwatzikhoebillah Sambas tanggal 20 Desember 2005 hanya menampilkan kesenian dari tiga suku bangsa tersebut. Sambas sebenarnya lebih kaya akan keberagaman budaya karena ada komunitas-komunitas etnis dan budaya lain yang pantas diperhitungkan seperti Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Madura dan etnis lain serta bentuk-bentuk budaya hibriditas yang merupakan hasil dari proses akulturasi budaya berbagai kelompok etnis. Hibriditas identitas dan budaya ini juga nampak di daerah relokasi, banyak orang Madura yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Melayu Sambas, sebagian orang lainnya menggunakan dua bahasa sekaligus atau bilingual yakni bahasa Melayu Sambas dan bahasa Madura. Selain itu di Relokasi Tebang Kacang sebagian orang Madura asal Sambas masih mempertahankan budaya “saprahan” dan terdapat sanggar seni yang bisa memainkan Tari Jepin Sambas. Meski demikian, hingga kini tali silaturahmi antara orang-orang Melayu Sambas dengan orang-orang Madura Sambas belum sepenuhnya pulih. Masih diperlukan berbagai upaya untuk menuju pada pulihnya tali silaturahmi tersebut

Berbagai pihak sibuk mencari formulasi perdamaian, namun sampai detik ini hal itu belum menampakkan hasil yang memadai, belum menampakkan hasil yang signifikan kata orang pintar nan pakar. Salah satu orang pintar itu pernah bertanya ke saya:” Kira-kira menurut kamu (yang bukan oknum dari etnis yang bertikai) apa solusinya agar mereka berdamai? Jawaban saya ketika itu:” Biarkan mereka mencari jalan

damainya masing-masing”. Artinya, biarkan orang Melayu yang akan menjaring orang Madura mana yang pantas menjadi bagian dari orang Melayu secara alamiah, baik melalui perkawinan ataupun persaudaraan. Orang pintar itu kecewa dan berkata:” Wah kalau begitu kamu tidak ikut memikirkan Kalimantan Barat ini, membiarkan Kalbar tetap konflik?”

Dialog tersebut menunjukkan bahwa membangun kembali suatu perdamaian itu tidak boleh terburu-buru, dan jangan mencari solusi suatu masalah secara instant, ingin cepat selesai. Sebaliknya, pandangan bahwa rekonsiliasi sulit untuk diwujudkan, tampaknya hanya merupakan pandangan yang terlalu pesimistis. Rekonsiliasi bakal terwujud, hanya entah dalam waktu dekat atau lama. Persoalan waktu ini yang seringkali justru membuat proses rekonsiliasi seolah-olah tidak berjalan. Padahal kalau mau menyimak pendapat komunitas Melayu Sambas maupun IDPs (Madura Sambas yang digusur dari Sambas), ke dua-duanya memiliki “citarasa dan nuansa” yang sama, **semua ingin damai.**

Persoalannya, masing-masing pihak mempunyai persepsi, pengalaman dan kepentingan yang berbeda, meskipun keduanya pernah terlibat konflik, dan justru karena itu jalan damai secara terbuka menjadi sesuatu yang agak mustahil (paling tidak untuk saat ini). Meskipun demikian, kalau mau mencermati pendapat-pendapat mereka, sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa proses rekonsiliasi sedang berlangsung. Pinjam istilah orang Sambas, **proses itu berlangsung secara alami.**

“ Di beberapa desa di Kabupaten Sambas masih terdapat orang Madura, artinya tidak semua orang Madura ikut menjadi IDPs Tebang Kacang” ungkap salah satu tokoh dan sesepuh masyarakat desa Sei Kelambu. Hal ini menunjukkan bahwa **kalau orang Madura itu mau dan ikhlas untuk menjadi bagian dari masyarakat Sambas** maka oleh orang Melayu Sambas juga diijinkan dan justru dianggap sebagai bagian dari mereka. Orang-orang Madura itu justru dilindungi

oleh orang-orang Melayu yang menjadi tetangganya. Sebaliknya, meskipun **bukan orang Madura**, kalau memang ia datang ke Sambas dengan sikap “aku kok”, maka wajar kalau ia diusir dari Sambas. Hal ini menunjukkan bahwa kalau orang mau melaksanakan pepatah “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, niscaya orang akan dengan senang hati menerima kehadiran orang lain, di manapun tempatnya, dengan siapapun ia bergaul pasti damai yang ditemui.

Kesan bahwa masyarakat Melayu Sambas “belum dapat menerima etnis Madura” nampaknya menjadi kesan yang kurang tepat. Sekaligus, hal ini juga menunjukkan bahwa kesan-kesan lain yang selama ini dimeteraikan kepada Melayu Sambas pun menjadi kurang tepat karenanya. Berawal dari kesan-kesan yang kurang tepat seperti ini, karena berbagai kepentingan, maka kemudian berkembang menjadi suatu prasangka-etnis dan bahkan seringkali berkembang menjadi stereotype.

Bagaimana pendapat para IDPs Tebang Kacang? Kalau dicermati, pendapat IDPs pun mempunyai “citarasa dan nuansa” damai. Keinginan IDPs setelah lebih dari enam tahun menggeluti relokasi, **tidak pula berkeinginan untuk kembali menetap ke tempat asal di Sambas**. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kalau mereka kembali lagi ke Sambas, maka percumalah kerja selama enam tahun di relokasi – pinjam istilah Subro, Laboratorium Pengungsi terbesar. Pertimbangannya, kalau kembali ke Sambas ya kalau diterima, kalau yang terjadi justru dikejar dan dibunuh, pulang tinggal nama. Belum lagi persoalan lainnya, ya kalau tempat tinggalnya masih berdiri tegak, kalau sudah dibakar massa, berarti tidak punya tempat tinggal lagi; ya kalau tanahnya masih dianggap sebagai tanah mereka, kalau tanah itu sudah dikuasai oleh orang Melayu Sambas (biasanya orang Melayu yang merasa bahwa tanah itu dulu dimiliki oleh orang Madura dengan cara yang tidak fair) berarti pulang kembali ke Sambas justru memunculkan konflik.

Berdasarkan pada pikiran-pikiran IDPs tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mereka menginginkan kejelasan status tanah mereka di Sambas (terutama mereka yang mempunyai bukti kepemilikan). Oleh karena itu, perdamaian bagi para IDPs diperlukan agar dalam mengurus penyelesaian kepemilikan harta benda yang masih tertinggal, terutama tanah, dapat diselesaikan dengan baik. Di samping itu, rasa aman itu diperlukan mengingat cukup banyak pula IDPs yang sudah ber-asimilasi dan ber-amalgamasi dengan penduduk setempat (Melayu Sambas); sehingga mereka berkeinginan untuk dapat melakukan silaturahmi dengan kerabat yang ada di Sambas, ataupun melakukan ziarah ke makam leluhur. Mengingat, kalau mau merunut ke belakang bahwa keberadaan orang Madura di Sambas sudah cukup lama (diperkirakan mulai tahun 1900 an). Meskipun pesan umum warga Melayu Sambas menolak kedatangan orang Madura ke wilayah Sambas. Namun dinamika sosial yang telah terjadi akhir-akhir ini mengarah pada proses transformasi konflik secara perlahan dengan penyadaran-penyadaran dari kedua kelompok sosial yang terlibat konflik tahun 1999 yakni masyarakat Melayu Sambas dan Madura asal Sambas, yang dilakukan oleh teman-teman NGOs.

Proses transformasi konflik dalam ranah yang lain yakni di bidang pendidikan tingkat SLTA juga sudah dimulai dari SMUN I Sambas atas prakarsa Ibu Eny menerapkan model pembelajaran untuk anak-anak didik yang menekankan aspek pemahaman terhadap konflik. Ibu menyatakan : *“Pandangan anak-anak ada yang Pro dan ada yang Kontra bahkan saya merasakan sekali pada pertama sekali saya menerapkan model pembelajaran seperti itu terutama saya modalnya begini membuat kurikulum dengan pertimbangan, faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik, mengapa sampai itu terjadi, apa dampaknya, bagaimana solusinya, ini kita paparkan ke anak jadi supaya dia tidak menyimpang ke lain jadi kita beri kerangkanya dulu terus dia di suruh kembangkan kerangka itu”*. Selain itu Ibu Eny juga menekankan kepada anak

didiknya untuk mengembangkan rasa empati, turut merasakan penderitaan korban kerusuhan, ia mengatakan kepada anak didik:

“...Ibu itu tidak membela siapa-siapa, tidak membela yang B ibu itu berjalan di tengah-tengah. Jadi saya patokan saja kepada Sumpah Pemuda, Bhineka Tunggal Ika itu saja saya arahkan ke anak jadi bagaimana kalau kita ngukur kita diperlakukan seperti itu kita secara logika saja ngomong ke anak jadi Ibu tidak ada mihak yang lain semua manusia di bumi ini sama terus kita arahkan mereka ke nilai-nilai norma, Tuhan itu tidak membedakan manusia ini dengan manusia yang lain apalagi mereka itu pada umumnya muslim keluarga kita jadi kita mengarahkan kesitu ...” .

Metode pembelajaran seperti ini yang diberlakukan secara berkesinambungan ternyata mampu mengubah cara pandang siswa tentang kekerasan. Sebelumnya mayoritas siswa memandang kekerasan langsung (penganiayaan serta pembunuhan) dan kekerasan kultural (stereotype negatif dan membenaran kultural atas kekerasan penganiayaan, pembunuhan dan pengusiran) terhadap orang Madura sebagai sesuatu yang wajar. Namun setelah melalui proses pembelajaran tersebut dalam diri anak-anak didik tersebut tumbuh rasa toleransi terhadap keragaman kultur dan empati yang dalam terhadap korban kekerasan. Beberapa puisi yang menggambarkan kengerian dan kesadisan yang tidak dapat dipahami secara maknawi budaya, dimuat dalam majalah Horison dan serta diterbitkan dalam Buku Kumpulan Puisi Terbaik dari majalah Horison. Metode pembelajaran seperti ini sebenarnya sangat efektif untuk merubah cara pandang pelajar di lembaga pendidikan namun sangat disayangkan pemda atau Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tidak memberi respon yang baik terhadap keberhasilan model pembelajaran ini. Metode pembelajaran ini dapat diimplementasikan secara lebih luas dengan menggunakan media yang berbeda dan mengarah kepada

kelompok sasaran yang juga lebih luas seperti misalnya kerjasama dengan mass media cetak (koran harian) dan radio swasta niaga dalam bentuk lomba diskusi publik dengan tema *peacebuilding*.

Meskipun menghadapi banyak kendala dalam mengupayakan pembangunan perdamaian di Kabupaten Sambas, tidak berarti peluang damai atau proses pembangunan perdamaian lantas terhenti, menyerah di tengah jalan jelas tidak. Kalau mau memperhatikan hasil-hasil wawancara dengan berbagai elemen masyarakat, baik dari masyarakat Melayu Sambas maupun Madura (Sambas) yang sekarang menjadi penghuni Laboratorium Pengungsi (istilahnya Subro untuk relokasi Tebang Kacang), terdapat satu keinginan yang sama yakni **perdamaian**. Hanya saja persepsinya yang berbeda, persyaratan yang diajukan dari masing-masing pihak yang bertikai juga berbeda. Paling tidak modal utama dalam pembangunan perdamaian sudah dimiliki, yakni keinginan untuk berdamai.

Di samping itu, *kesamaan agama* (sebagai sesama Muslim) juga mendorong pembangunan perdamaian. Banyak ungkapan hati dari masyarakat yang pada intinya mempertanyakan: kalau dengan (orang atau etnis) yang berbeda agama saja bisa hidup berdampingan (Dayak dan Cina), mengapa justru dengan (orang atau etnis) yang sesama muslim tidak bisa? Ini kan aneh. Memang, tetapi yang namanya manusia itu pikirannya suka “meloncat, menyimpang, berkelit” agar kepentingannya dapat diakomodir. Dan justru karena hal inilah yang membuat lahirnya paradigma Postmodernisme dalam Ilmu Sosial. Yang jelas, keinginan untuk membangun perdamaian sudah ada, dan mempunyai kesamaan dalam aspek agama.

Selain daripada itu, setiap komunitas pasti memiliki modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keinginan untuk damai tersebut. Kearifan local mengenai perdamaian harus digali terus menerus. Kalau kearifan local terus menerus dicari, digali; maka semakin lama ada proses penyadaran bahwa di masyarakat ada kearifan perdamaian yang dulu diajarkan oleh para nenek moyang.

Rekonsiliasi secara menyeluruh di Kabupaten Sambas tersebut sulit, atau bahkan mustahil, dilakukan karena dalam konflik Sambas 1999 sebenarnya posisi kedua belah kelompok sosial yang bertikai itu dalam keadaan yang sangat tidak seimbang, kelompok orang Madura dalam posisi sangat lemah dihadapan orang Melayu Sambas. Suatu hal yang mustahil dapat dilakukan untuk menuntut pelaku-pelaku kekerasan (orang Melayu Sambas) bersedia mengakui dosa dan meminta maaf atas segala bentuk tindak kekerasan yang telah mereka lakukan. Tuntutan adanya “pengakuan dosa” dan “permohonan maaf” orang Melayu Sambas akan ditafsirkan sebagai penghinaan martabat orang Melayu Sambas. Bahkan wacana yang berkembang sangat luas dalam masyarakat Melayu Sambas, tidak diperlukan adanya rekonsiliasi antara orang Melayu Sambas dengan orang Madura. Kosakata “rekonsiliasi” khususnya dalam konteks rekonsiliasi dengan orang Madura, seakan-akan sudah dihapus dalam perbendaharaan kata sehari-hari orang Melayu Sambas. Kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan kata “rekonsiliasi” di Sambas justru akan menimbulkan sikap resisten pada kebanyakan orang Melayu Sambas. Namun dalam tataran konseptual, rekonsiliasi harus tetap diupayakan.

Hasil assessment itu menunjukkan bahwa slogan Bhineka Tunggal Ika, atau Pluralitas dan atau Multikulturalitas merupakan anugerah yang harus terus-menerus diperjuangkan dan diupayakan keterwujudannya dalam perilaku sosial bangsa Indonesia. Tanpa diperjuangkan dan diupayakan, niscaya semua itu tidak akan pernah mempunyai makna apa-apa bagi bangsa ini. Artinya, bangsa Indonesia tidak pernah ada kalau pluralitas maupun multikulturalitas itu ditolak atau bahkan dihilangkan.

Kata “plural” seringkali disama-artikan dengan “bhineka” atau “majemuk” yang artinya beragam, beraneka-macam, tidak hanya satu atau dua saja. Ketika kata “plural” diberi imbuhan ‘isme’ maka artinya menjadi paham tentang keberagaman, paham tentang kemajemukan. Pluralism berasal dari kata *pluralism* (bhs. Inggris), yang mengadopsi

kata Latin: *pluralis**. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis. Pluralism tidak sekedar pengakuan akan adanya keberagaman, tetapi juga pengakuan bahwa keberagaman itu membawa implikasi politik, ekonomi, social dan budaya. Oleh sebab itu. Pluralism berkaitan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pluralism berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok komunitas dengan seluruh atribut social-budayanya (Lorens Bagus, 2002)

Bicara pluralism dalam kehidupan social, maka konteksnya adalah sejauh masyarakat dipandang sebagai susunan dari pelbagai anasir kelompok yang relative independen, dan organisasi yang mewakili bidang-bidang berbeda, sehingga pada tataran ini nilai kemanusiaan (HAM) dapat memberikan kontribusi pada terwujudnya toleransi kehidupan manusia yang majemuk. Oleh karena itu, bicara pluralism adalah bicara tentang kemanusiaan itu sendiri.

Bangsa Indonesia identik dengan kemajemukan, pluralitas. Siapa pun paham hal ini. Plural dalam ke-sukubangsa-an (multietnik), kebudayaan (multikultur), keagamaan (multireligi) dan bahkan kepentingan golongan. Berangkat dari asumsi tersebut, Parsudi Suparlan (2006) berpendapat bahwa corak masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika bukan lagi keanekaragaman sukubangsaa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut. Tetapi, betulkah pemahaman akan hal itu sampai kepada pemahaman yang tercermin dalam perilaku, pola pikir dan benarkah sudah 'terinternalized' dalam diri kita?

Pertanyaan ini muncul bersamaan dengan ingatan saya yang terbayang pada peristiwa pribadi (subyektif memang!). Ceritanya, ketika saya sedang menjemput anak pulang sekolah, terjadi peristiwa perkelahian antara dua kawan anak saya. Kebetulan kedua anak

tersebut berbeda warna kulit, yang satu berkulit putih bersih dengan mata sipit yang menunjukkan dia seorang anak Tionghoa. Sedang yang lainnya berkulit gelap sawo matang pertanda dia seorang anak – menggunakan istilah lama – pribumi. Si anak berkulit putih berbadan lebih tinggi dan besar dibanding dengan si anak berkulit sawo matang. Dalam perkelahian itu, anak yang berkulit gelap dapat dijatuhkan dan dipukuli wajahnya oleh anak yang berkulit putih. Para orangtua murid yang masih ada di sekolah itu, rata-rata hanya berteriak-teriak meleraikan mereka tetapi tidak turun tangan. Datang seorang bapak yang langsung memegang si anak kulit putih, dan saya spontan berteriak: “pegangi dulu, biar anak yang sawo matang ganti memukul!”. Bapak itu menoleh ke saya dan tersenyum. Senyumnya itulah yang membuat saya tersadar, betapa naifnya saya. Oleh teman-teman, saya dipercaya untuk menjadi tempat bertanya seputar pluralism dan multikulturalisme, dengan alasan saya dianggap sudah tidak mempunyai sekat-sekat pikiran etnosentris, primordial maupun identitas social sempit lainnya. Kenyataannya, alam bawah sadar saya ternyata masih menyimpan sekat-sekat pikiran sempit itu dengan rapinya.

Peristiwa itu sungguh menyadarkan saya bahwa untuk menjadi seseorang yang pluralis atau multikulturalis itu tidak mudah. Teorinya barangkali sangat mudah untuk dikuasai, tetapi prakteknya menjadi tidak semudah mempelajari teori. Bertitik tolak dari itu semua, maka saya semakin yakin bahwa Bhineka Tunggal Ika yang menjadi slogan bangsa Indonesia yang plural dan multikultur ini, harus terus-menerus diupayakan dan diperjuangkan keberwujudannya. Tanpa perjuangan keterwujudan pluralitas dan multikulturalitas itu, niscaya bangsa ini akan terus-menerus mudah dihinggap konflik yang berbau SARA.

Ketika konflik berkecamuk, maka pariwisata pun ikut tergoncang. Pengembangan pariwisata hanya akan berhasil apabila didukung situasi masyarakat yang mampu mengembangkan ideology multikulturalisme menjadi suatu tata nilai bermasyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata dalam masyarakat yang plural, perlu mengembangkan multikulturalisme.

Mari, maju tak gentar. Bangunlah pariwisata, bangunlah multikulturalisme. Seperti, Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya.

Pluralisme

Menurut ensiklopedia (Wikipedia Indonesia) kata pluralism dalam ilmu social adalah suatu kerangka berinteraksi dari beberapa kelompok yang saling menghormati dan adanya toleransi antar anggota kelompok. Pengertian ini lebih dekat dengan pengertian asimilasi budaya yang tetap menghargai hak-hak individu

Samuel P. Huntington (1993) yang “meramalkan” bahwa sebenarnya konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Konflik tersebut menjadi gejala terkuat yang menandai runtuhnya polarisasi ideologi dunia kedalam komunisme dan kapitalisme.

Bangsa Indonesia dilahirkan dalam kondisi yang beragam. Ada yang berkulit gelap, ada juga berkulit terang, ada yang bermata belok ada juga yang bermata sipit, ada yang beragama Islam dengan berbagai aliran, juga ada yang beragama Katolik, Hindu, Budha dan seterusnya. Keberagaman ini adalah kekayaan tak ternilai. Tetapi kenapa persoalan SARA masih kental dan muncul dalam setiap perseteruan juga di dalam pergaulan diantara kita?

Harus diakui sulit menerima perbedaan meskipun perbedaan itu adalah suatu sunnatullah.

Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, kita pernah melihat pengorbanan yang begitu besar atau penghancuran nilai-nilai kemanusiaan diantara kita. Kita menjadi negara yang paling ditakuti. Dan saat ini tentu kita tak ingin lagi melihat peristiwa berdarah yang terjadi di Sambas, Sampit, Poso, atau pembakaran

gereja, intimidasi dan pengrusakan oleh kelompok penjahat atas nama agama, penghinaan terhadap sebuah agama, kasus ahmadiyah, dan masih banyak lagi. Kita tak ingin melihat luka atau jiwa yang hilang gara-gara tak bisa menghargai perbedaan.

Berbagai peristiwa berdarah di Indonesia, menurut Romo Dedy, membutuhkan cetusan rekonstruksi masyarakat Indonesia ke arah pemahaman multikultural. Hal ini penting dilakukan karena hembusan angin konflik yang menjalari tubuh bangsa banyak bermula dari ketidaksadaran warga akan keragaman budaya.

Dengan memasyarakatkan kemajemukan etnis yang ada di Indonesia, menurut Romo Dedy, diharapkan dapat memantik kesadaran bangsa bahwa pluralitas budaya tidak bisa diingkari, dicaci-maki, bahkan di-peta-konflik-an.

Salah satu cara untuk memahami multikulturalisme di Indonesia melalui lembaga pendidikan dari tingkat paling dasar sampai perguruan tinggi. Dengan demikian implementasinya pemahaman multikulturalisme harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Di sinilah anak didik atau mahasiswa belajar berdialogika dalam pemahaman pentingnya menghargai perbedaan tersebut.

Pendidikan multikulturalisme pula tidak bisa diimplementasikan ke dalam satu metode yang hegemonik. Artinya ada partisipasi aktif selama proses pendidikan. Setiap anak didik diberikan hak untuk bicara dan mengeluarkan pendapat mengenai pandangan-pandangannya tentang suku temannya, agama temannya, kebiasaan-kebiasaan temannya, cara bicara temannya dan seterusnya dengan harapan mampu bermetamorfosa menjadi masyarakat berkebudayaan.

Pada akhirnya kita pun tak harus takut lagi atau bingung dengan identitas yang kita miliki sekarang. Sekali lagi kemajemukan diantara kita adalah sunnatullah.

Pernyataan berikut ini adalah hasil bincang-bincang saya dengan salah satu orang Madura yang menjadi “korban” kerusuhan Sambas tahun 1998. Ia mengatakan:”..... kalau ditimbang-timbang

pak, kami orang Madura ini lebih sering kelahi dengan orang Dayak. Tapi pak, kami harus mengakui bahwa orang Dayak itu tak pandai dendam. Maksudnya, sekalipun kami sering kelahi, habis kelahi kalau sudah didamaikan kami bisa berkumpul lagi, silaturahmi lagi. Padahal, kami beda agama. Nah mengapa kami dengan orang Melayu yang se-agama malah tak bisa lagi? Ini pak yang bagi kami tak habis pikir.....". (Hasil FGD di Relokasi Tebang Kacang 2005)

Berbagai peristiwa berdarah di Indonesia, menurut Romo Dedy, membutuhkan cetusan rekonstruksi masyarakat Indonesia ke arah pemahaman multikultural. Hal ini penting dilakukan karena hembusan angin konflik yang menjalar tubuh bangsa banyak bermula dari ketidaksadaran warga akan keragaman budaya. Dengan memasyarakatkan kemajemukan etnis yang ada di Indonesia, menurut Romo Dedy, diharapkan dapat memantik kesadaran bangsa bahwa pluralitas budaya tidak bisa diingkari, dicaci-maki, bahkan di-peta-konflik-an. Salah satu cara untuk memahami multikulturalisme di Indonesia melalui lembaga pendidikan dari tingkat paling dasar sampai perguruan tinggi. Dengan demikian implementasinya pemahaman multikulturalisme harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Di sinilah anak didik atau mahasiswa belajar berdialektika dalam pemahaman pentingnya menghargai perbedaan tersebut. Pendidikan multikulturalisme pula tidak bisa diimplementasikan ke dalam satu metode yang hegemonik. Artinya ada partisipasi aktif selama proses pendidikan. Setiap anak didik diberikan hak untuk bicara dan mengeluarkan pendapat mengenai pandangan-pandangannya tentang suku temannya, agama temannya, kebiasaan-kebiasaan temannya, cara bicara temannya dan seterusnya dengan harapan mampu bermetamorfosa menjadi masyarakat berkebudayaan. Pada akhirnya kita pun tak harus takut lagi atau bingung dengan identitas yang kita miliki sekarang. Sekali lagi kemajemukan diantara kita adalah sunnatullah.

Konsep Multikulturalisme dan Persebarannya yang dilakukan oleh para cendekiawan dan pejabat pemerintah yang pro demokrasi dan HAM, dan yang anti rasisme dan diskriminasi adalah dengan cara menyebarkan konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah di tahun 1970an. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.

(Parsudi Suparlan, menuju masyarakat multikulturalisme).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supardi Hasibuan, tt., Pluralisme dan Multikulturalisme Dalam Membangun Keharmonisan bangsa, *Makalah*, Depag Riau.
- Daan Bronkhorst, 2002, *Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan: Komisi Kebenaran di Berbagai Negara*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Frino Bariarcianur <http://beritaseni.com/?p=20> di down load tgl. 24 juni 2008, 12:41PM
- Hardi Sujaie, Don. BSE Praptantya, Bambang Suta Purwana dan Imanul Huda, 2006, Peluang Peace Building Pascakonflik Sambas, *Laporan Assesment*, tidak diterbitkan.
- James T. Siegel (1997), *Fetish, Recognition, Revolution*, Princeton New Jersey: Princeton University Press.
- Lorens Bagus, 2002, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lambang Trijono, 2001, *Keluar Dari Kemelut Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsudi Suparlan (2002) *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Artikel Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- Priscilla B. Hayner, 2002, *Mencari Akar dan Pandangan Bersama: Studi Banding Lima Komisi Kebenaran di Berbagai Negara*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Stewart, Frances, 2005, "Fundamental socio-economic cause of violent political conflict", dalam Dewi Fortuna Anwar; Helene Bouvier; Glenn Smith; dan Roger Tol (Editors), *Violent Internal Conflict In Asia Pasific*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; LIPI; LASEMA-CNRS; KITLV-Jakarta.

Pluralitas Etnik Serta Usaha Identifikasi Pola Konflik dan Integrasi Antar Etnik Dalam Rangka Membangun Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Barat

Oleh : Dwi Haryono

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan pluralitas etnik, agama dan kebudayaan yang amat beragam. Jumlah kelompok etnik di Indonesia secara keseluruhan sulit dihitung dengan pasti, sebab ruang lingkup istilah dan konsep kelompok etnik bisa mengembang atau menyempit menurut keadaan subyektif (Koentjoroningrat, 1982 : 345). Namun demikian menurut daftar dalam sosiografi Indonesia yang dikutip oleh Bekker (1994 : 9) masyarakat Indonesia minimal terdiri dari 358 kelompok etnik dan 200 sub kelompok etnik.

Kondisi ini menimbulkan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia, terutama masalah yang berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan integrasi dari berbagai macam etnik dan agama, menjadi satu kesatuan masyarakat politik tanpa menghilangkan karakter masing-masing etnis dan agama. Semboyan “*bhinika Tunggal Ika*” merupakan konsep yang mencerminkan kondisi betapa beragamnya bangsa Indonesia jika dilihat dari segi suku, agama, bahasa dan daerah, namun semuanya harus diusahakan dan dibina menjadi satu kesatuan. Dalam sejarahnya, negara Indonesia sebagai negara kesatuan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan pluralisme

misalnya konflik etnik, konflik agama dan pemberontakan daerah. Masalah-masalah tersebut di era Orde Baru biasa disebut dengan istilah SARA (masalah suku, agama, ras dan antar golongan).

Pada saat Indonesia merdeka sampai tahun sekitar 1962, masalah yang timbul dalam kaitannya dengan pluralisme adalah konflik etnik, agama, ideologi dan pergolakan daerah. Konflik agama misalnya adanya keinginan sekelompok partai Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Konflik ideologi misalnya konflik antara kaum komunis dengan kaum nasionalis dan agama. Pergolakan daerah misalnya pembontakan PRRI/Permesta, RMS, Andi Azis dan lain-lain. Feirebend (dalam Bahar, 1995 : 140 - 141) menyatakan antara tahun 1948 - 1962 Indonesia tercatat sebagai negara yang paling tidak stabil di dunia karena masalah etnik tersebut. Setelah tahun 1966 dibawah rejim Orde Baru pergolakan-pergolakan tersebut mereda, dan tampaknya orde baru berhasil mengatasi masalah pluralisme dalam negara kesatuan Indonesia. Namun tampaknya keberhasilan orde baru tersebut bersifat semu, karena di era reformasi ini masalah-masalah yang berkaitan dengan etnis, agama dan daerah muncul lagi dalam bentuk yang lebih vulgar.

Pada tahun-tahun terakhir kekuasaan orde Baru konflik berdimensi etnik semakin meningkat intensitasnya serta sarat dengan muatan yang kompleks. Cara pandang, perilaku, gaya hidup, dan nilai masing-masing etnik dan entitasnya yang berbeda memang dapat menimbulkan gesekan, benturan bahkan dapat menimbulkan pertentangan frontal. Belum lagi kalau ambisi dan kepentingan masing-masing kelompok ikut membakar api konflik (Rajab dalam Prisma, 1996 : 3). Di era reformasi, diidentifikasikan masalah etnisitas tidak berkurang bahkan makin meningkat, misalnya dalam pelaksanaan Pilkada banyak calon kandidat kepala daerah yang menggunakan isu primordialisme terutama ikatan kesukuan untuk memenangkan Pilkada.

Dari berbagai peristiwa konflik yang terjadi tersebut diatas merupakan petunjuk bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah dalam menciptakan dan mempertahankan integrasi nasional. Konflik-konflik tersebut diatas dapat digolongkan sebagai konflik horisontal yang akan dapat menghalangi terdapatnya integrasi secara horisontal. Selengkapnya tentang masalah integrasi yang dihadapi oleh Indonesia dijelaskan secara terinci oleh R. William Liddle (1970 : 4 dan 205) sebagai berikut :

"The problem of national integration facing most of the contemporary new states has, then, two mayor dimensions : (1) a horizontal dimension, which involves a meshing together of disparate social group — kinship, ethnic, linguistic, racial — within a framework of national loyalties and institutions; and (2) a vertical dimension, which involves the closing of the cultural and political gap between an urban, western-educated, nasionalist political elite on the one hand and the masses of yhe largely traditional and rural population on the other.The problem of national integration in a new state (or in any political system) is fundamentaally a problem of loyalties. specifically, a modern polity may be said to be integrated (1) when most people accept the territorial boundaries of the nation state as a given of political live and do not attempt to make them either more or less inclusive, and (2) when most people accept the structure government and the rules of the political process as legitimate and authoritative for the whole society. National integration thus involves consensus on the limits of the political community and on the nature of the political regime"

Dari pendapat Liddle tersebut diatas jelaslah bahwa Indonesia menghadapi dua jenis halangan integrasi yaitu : *pertama*, adalah adanya apa yang disebut pembelahan horisontal yang berakar

pada perbedaan suku, ras, agama dan geografi, dan yang *kedua*, yaitu adanya hambatan yang bersifat vertikal yaitu celah perbedaan antara elit dan massa, latar belakang pendidikan kekotaan yang menyebabkan elite berbeda dari massa yang berpandangan tradisional dan pedesaan. Upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut salah satunya adalah dengan memilih dan mengambil kebijakan strategi integrasi yang menganut prinsip “*unity in diversity*” (Syamsudin, 1989 : 9). Strategi ini menurut Weiner (1968 : 555) sebagai suatu proses integrasi nasional melalui pembentukan kesetiaan nasional yang tidak menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas.

Propinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah yang dihuni oleh berbagai etnik juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Koentjoroningrat (1982) pernah mengingatkan bahwa Kalimantan Barat menyimpan potensi konflik yang terpendam antar suku bangsa selain Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. Hal ini menurut Koentjoroningrat selain daerah-daerah tersebut relatif heterogen, juga karena tidak ada kebudayaan yang dominan (*dominant culture*) sebagai wadah pembauran dari masing-masing etnik atau suku bangsa yang hidup di daerah tersebut.

Kalimantan Barat dapat dikatakan sebagai “miniatur Indonesia” terutama yang berkaitan dengan pluralisme etnik dan agama. Di Kalimantan Barat bermukim banyak kelompok etnik, diantaranya etnik Melayu, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Cina, Batak, Padang dan lain-lain. Jumlah penduduk Kalbar tahun 2006 berjumlah 4.118.225 jiwa dan komposisi jumlah dari masing-masing etnik sulit ditemukan dan dipastikan, karena sejak tahun 1952 sensus penduduk Indonesia tidak mencatumkan kategori etnik. Sebagai gambaran komposisi jumlah masing-masing etnik yang bermukim di Kalbar dalam Forum keadilan (1997) pernah mengungkapkan sebagai berikut: etnik Dayak sebagai penduduk asli merupakan kelompok etnik terbesar yang berjumlah sekitar 1,3 juta jiwa (41%), etnis Melayu 1,2 juta (39.57 %), etnis

Cina 11,33%, dan etnik-etnik lainnya seperti Bugis, Jawa, Minangkabau, Sunda, Madura, dan lainnya sekitar 8.10% . Dari segi agama masyarakat Kalimantan Baratpun bersifat majemuk, seperti ada yang menganut agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

Kemajemukan masyarakat Kalimantan Barat tersebut mengandung potensi yang sifatnya positif dan negatif. Potensi positif dari kemajemukan adalah adanya kemungkinan terjadinya asimilasi, akulturasi maupun integrasi antara berbagai kelompok etnik sehingga membentuk masyarakat Kalimantan Barat yang mempunyai ciri khas dan kaya ragam budaya. Potensi yang sifatnya negatif dapat muncul dalam bentuk kompetisi dan konflik dari berbagai kelompok etnik akibat perbedaan kepentingan maupun perbedaan karakter diantara mereka. Dari dua potensi kemajemukan tersebut, di Kalimantan Barat yang tampak menonjol adalah potensi konflik.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh King (Alqadrie, 1992 : 32) mengenai potensi konflik antar etnik pada 3 propinsi di Kalimantan, menemukan bahwa potensi konflik fisik dan gerakan etnik yang terdapat pada masyarakat Kalimantan Barat lebih besar atau dahsyat (*more violent*) jika dibandingkan tiga propinsi lainnya yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dalam sejarah konflik antar etnik di Kalimantan Barat, tercatat beberapa konflik yang berubah menjadi kerusuhan massal atau lebih tepat dapat dikatakan meletus menjadi “ perang suku “. Perang suku yang pernah terjadi di Kalimantan Barat adalah perang suku antara suku Dayak melawan Madura, antara Madura melawan Melayu dan pernah terjadi Cina melawan Dayak, Cina melawan Melayu.

Menonjolnya potensi konflik dalam interaksi antar kelompok etnik di Kalimantan Barat, menurut penulis dapat dipandang sebagai buah ketidak efektifan dari strategi integrasi yang diambil oleh pemerintah selama ini. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang integrasi Nasional di kalangan pribumi menggunakan strategi integrasi

yang menganut prinsip "*Bhineka Tunggal Ika*" atau dalam istilah Enloe disebut "*cultural pluralism*" dan Weiner (1968 : 555) "*unity in diversity*". Sedangkan strategi asimilasinya adalah menganut prinsip "*reciprocal fusion*" yang dalam istilah Gordon & Enloe disebut "*the melting pot*". Sementara itu dalam hubungan pri & non pribumi strategi yang dikenakan adalah "*full assimilation*" atau "*Anglo conformity*" yang dalam bahasan V. Zaden disebut "*united assimilation*" atau asimilasi sepihak.

Dalam strategi integrasi tersebut pemerintah mengabaikan dampak negatif dari terjadinya "benturan budaya" antara budaya etnik mayoritas melawan budaya etnik minoritas yang dalam kajian Shermerhorn (1970 : 82) akan menghasilkan dua pola konflik yaitu "*forced assimilation with resistance*" dan "*forced segregation with resistance*". Konflik tersebut timbul sebagai akibat perbedaan sikap antara etnik mayoritas dengan etnik minoritas dalam mensikapi nilai-nilai budaya diantara mereka untuk menerima atau menolak nilai-nilai budaya etnik lain. Shermerhorn menjelaskan konflik hanya akan terjadi jika terjadi perbedaan sikap penerimaan nilai-nilai budaya antara etnik mayoritas dengan etnik minoritas, misalnya etnik mayoritas menerima nilai-nilai budaya etnik minoritas, dipihak lain etnik minoritas menolak nilai-nilai budaya etnik mayoritas, kondisi ini akan menghasilkan konflik dengan pola "*forced assimilation with resistance*", sikap sebaliknya akan menghasilkan konflik dengan pola "*forced segregation with resistance*".

Dalam tulisan ini perlu ditegaskan bahwa tingginya potensi konflik antar etnik di Kalimantan Barat disebabkan prinsip-prinsip integrasi yang dianut oleh pemerintah dan yang dipahami oleh masyarakat tidak menghargai budaya dan eksistensi etnik minoritas. Atau dengan kata lain dominasi etnik mayoritas terhadap etnik minoritas adalah sah dan dianggap biasa. Pada tingkat masyarakat misalnya ada peribahasa "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung", yang bermakna etnik minoritas pendatang harus menyesuaikan diri dan kalau bisa melebur ke dalam budaya etnik mayoritas. Kalau kita perhatikan prinsip-prinsip

integrasi yang selama ini kita anut mengandung unsur-unsur paksaan terhadap minoritas, dominasi mayoritas dan kurang menghargai eksistensi etnik minoritas.

Untuk menghilangkan potensi konflik antar etnik diperlukan, *pertama*, mengidentifikasi pola konflik dan integrasi antar etnik. Dengan memahami pola konflik dan integrasi kita dapat mengantisipasi dan mengeliminir kemungkinan konflik yang akan terjadi. *Kedua*, perlu ada perubahan paradigma integrasi dari prinsip dominasi mayoritas menjadi kesetaraan untuk semua kelompok etnik, dari paksaan menyesuaikan diri terhadap budaya mayoritas diubah menjadi prinsip kesukarelaan, dari kurang menghargai budaya dan eksistensi budaya etnik minoritas menjadi menjaga dan menghargai budaya etnik minoritas. Dari merangkai “keaneka ragaman menjadi satu” menjadi “satu dalam keaneka ragaman”. Penulis menawarkan prinsip-prinsip multikulturalisme menjadi strategi dan prinsip untuk menciptakan integrasi antar kelompok etnik di Kalimantan Barat. Dengan prinsip-prinsip multikulturalisme penulis yakin potensi konflik antar kelompok etnik akan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Namun penulis perlu ingatkan multikulturalisme budaya dapat diciptakan jika terdapat rasa keadilan dalam peran ekonomi dan politik diantara etnik-etnik yang ada dalam suatu daerah. Misalnya multikulturalisme budaya tidak akan dapat tercipta jika terdapat kondisi minoritas mendominasi mayoritas dalam bidang ekonomi dan politik. Sebaliknya multikulturalisme budaya akan terancam jika mayoritas bersikap diskriminatif, menghalangi, tidak memberi kesempatan kepada etnik minoritas untuk memasuki dibidang ekonomi dan politik sesuai kapasitasnya. Dalam bidang ekonomi dan politik sebenarnya terdapat batas toleransi dari etnik mayoritas untuk dapat menerima peran etnik minoritas, dimana batas tersebut adalah etnik minoritas tidak boleh menciptakan kondisi dominasi terhadap etnik mayoritas.

B. Pluralitas Etnik di Kalimantan Barat

Istilah etnik atau etnisitas berasal dari bahasa Yunani, *ethnos*, yang diidentikkan oleh Milton Gordon (1964) dengan istilah yang berkaitan dengan kerakyatan, atau masalah yang berkaitan dengan rakyat/penduduk (*peoplehood*). *Ethnos*, sesuai dengan kata awalnya, berarti rakyat (*people*) atau bangsa (*nation*) yang menunjukkan suatu kelompok dengan suatu perasaan keetnikan atau etnisitas bersama sebagai kelompok etnik (*ethnic groups*). Dengan demikian, istilah etnisitas mengandung unsur perasaan bersama atau senasib sepenanggungan dalam suatu kelompok etnik. Dalam pengertian umum istilah etnisitas juga menunjukkan keseluruhan aspek tentang masalah-masalah etnik (Akil, 1994 : 19).

Menurut Sanderson (dalam Arafat, 1998 : 14) Konsep etnik merupakan konsep yang agak sulit dirumuskan para ilmuwan sosial. Etnisitas (*ethnicity*) biasanya dipandang dari beberapa sudut yang berbeda. Hal ini disebabkan konsep etnik seringkali tumpang tindih dengan konsep ras. Para antropolog fisik membatasi istilah ras untuk menyatakan suatu *breeding population*, yaitu sekelompok orang yang mempunyai warisan genetik yang sama dan dimana tingkat perkawinan ke dalam (*in breeding*) sangat tinggi. Kelompok ras ini dapat dibedakan secara fisik seperti warna kulit, warna rambut dan sebagainya. Lazimnya etnik mempunyai *home land* yang jelas batas-batasnya. adanya kebudayaan serta *home land* merupakan ciri khas etnik yang membedakannya dengan ras.

Menurut Narroll (dalam Fredrik Barth, 1988 : 11) menyatakan, umumnya kelompok etnik dikenal sebagai populasi yang : (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan. (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Sedangkan Fedrik Barth (1988 : 11 - 12) merumuskan kelompok

etnik yang umumnya dikenal sebagai suku bangsa sebagai kelompok budaya dan bahasa; sedangkan masyarakat adalah suatu unit yang hidup terpisah dari unit lain.

Dalam kaitannya dengan integrasi nasional pengertian kelompok etnik erat kaitannya dengan pengertian suku bangsa. Schermerhorn (1970 : 12) mendefinisikan suku bangsa sebagai : “a collectivity with in a larger society having real or putative common ancestry memories of a shared historical past and a cultural fokus on one or more symbolic element defined as the epitome of their people hood”.

Dari difinisi tentang suku bangsa yang dikemukakan oleh Schermerhorn dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa identitas yang dapat kita berikan terhadap label suku bangsa yaitu : kesamaan leluhur, kesamaan andil atau peran dalam sejarah suku bangsa, kesamaan fokus budaya pada satu atau lebih unsur simbolik yang dijadikan simbol dari kebersamaan mereka.

Etnik-etnik di Kalimantan Barat dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu etnik pendatang (etnik migran) yang dan etnik non migran atau etnik yang mengaku sebagai penduduk asli. Dalam kelompok etnik migran diantaranya adalah etnik Jawa, etnik Madura, etnik Bugis, etnik Batak, etnik Padang, etnik Tionghoa dan lain-lain. Sedangkan etnik non migran atau penduduk asli di Kalbar adalah etnik Melayu dan etnik Dayak. Dari segi jumlah anggota populasi dan besarnya kekuasaan yang mereka miliki etnik-etnik migran di Kalbar termasuk dalam kategori etnik minoritas sebaliknya etnik non migran berkedudukan sebagai etnik mayoritas. Etnik Melayu merupakan etnik mayoritas terutama di daerah pesisir sedangkan etnik Dayak merupakan etnik mayoritas di daerah pedalaman. Etnik migran untuk kepentingan analisa dibagi dalam dua kategori yaitu etnik migran sebagai minoritas signifikan dalam arti jumlahnya bermakna dalam interaksi dengan etnik mayoritas dan etnik minoritas yang tidak signifikan dalam arti karena jumlahnya yang relatif kecil sehingga dalam analisa dapat diabaikan.

Minoritas yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam interaksi antar etnik di Kalimantan Barat adalah pertama etnik Tionghoa, karena dari segi jumlah merupakan etnik terbesar ketiga setelah Melayu dan Dayak. Kedua adalah etnik Madura yang walaupun jumlahnya tidak sebanyak etnik Tionghoa, namun keberadaannya di Kalimantan Barat paling banyak menimbulkan masalah dan konflik, sehingga memerlukan perhatian khusus. Ketiga etnik Jawa yang walaupun dari segi jumlah tidak sebanyak etnik Madura, namun keberadaannya cukup memberi warna pada bidang birokrasi dan politik terutama di era orde baru. Pada era orde baru etnik Jawa dapat dikatakan merupakan etnik minoritas dominan di bidang politik dan pada birokrasi pemerintahan. Munculnya konsep putra daerah di era reformasi merupakan reaksi terhadap dominasi etnik minoritas pendatang terhadap etnik mayoritas yang merupakan penduduk asli pada bidang politik dan birokrasi. Etnik-etnik lain seperti etnik Batak, Padang, Sunda, Minangkabau, Banjar dalam tulisan ini dapat diabaikan perannya karena yang jumlahnya yang relatif sedikit sehingga kurang dapat memberi warna budaya di Kalimantan Barat. Khusus untuk etnik Bugis yang populasinya cukup banyak namun keberadaannya di Kalimantan Barat diidentifikasi telah melebur kedalam etnik Melayu atau dengan kata lain etnik Bugis telah “menjadi” Melayu di Kalimantan Barat, sehingga dalam tulisan ini tidak dikaji secara khusus.

Etnik Melayu merupakan etnik non migran atau penduduk asli di daerah pesisir, yang merupakan etnik dominan yang akan menentukan pola interaksi dengan etnik-etnik minoritas pendatang. Istilah Melayu berasal dari kata *Mo Lo Yue* yang merupakan nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jambi pada abad ke- 8 Masehi. Di Kalimantan Barat sebutan Melayu adalah untuk menunjukan penduduk asli Kalimantan yang datang setelah Dayak. Bagi etnik Melayu, terutama yang berdiam di Mempawah dan Sambas, mereka mengakui bahwa etnik Dayak adalah penduduk asli Kalimantan, yang datang lebih dulu sebelum kedatangan suku Melayu . Bagi orang Melayu Sambas dan

Mempawah, mereka biasa memanggil “abang” untuk orang Dayak walaupun usianya lebih muda darinya. Panggilan “abang” untuk orang Dayak tersebut untuk menyatakan bahwa orang Dayak adalah “saudara tua” orang Melayu. Pada tahun 1889 Hendrik Kern (dalam Mudiyono dkk, 2000 : 33) mengemukakan teori bahwa Dayak merupakan *proto-malays*, sedangkan Melayu adalah *deutero - malays*.

Khusus di Kalimantan Barat, sub kelompok etnik Melayu adalah kelompok etnik mayoritas di kawasan pesisir/pantai, dan mereka merupakan anggota kelompok etnik yang telah lama bermukim di daerah ini. Berbeda dengan kelompok Melayu, kelompok etnik Dayak merupakan kelompok etnik mayoritas di daerah pedalaman, dimana etnik Melayu berkedudukan sebagai minoritas. Kelompok etnik Melayu, hampir seratus persen dari populasi mereka beragama dan memeluk agama Islam. Bagi Masyarakat Kalbar, istilah “Melayu” lebih merupakan media identifikasi dari pada sebagai kelompok etnik dalam arti ikatan primordialistik. Hal itu tidak lain disebabkan secara umum Melayu dianggap sebagai sangat identik dengan Islam. Memeluk agama atau masuk Islam sama dengan masuk Melayu (Alqadrie,1996).

Dalam kaitannya dengan etnik Dayak menurut La Ode (1999 : 12) kata “Dayak” atau “Daya” sebagai nama untuk menyebut salah satu bangsa pribumi “asal” Kalimantan Barat, sesungguhnya hanya merupakan sebutan dari penduduk pesisir Kalimantan dalam menyebut penduduk yang mendiami daerah-daerah pedalaman. Kondisi ini berbeda dengan di Sarawak, golongan ini disebut “orang Iban”. Sedangkan di Kalimantan Barat orang Iban selalu disebut “Dayak Iban”. Menurut pendapat beberapa ahli ilmu sosial (dalam La Ode, 1999) bahwa sebutan “Dayak” merupakan suatu identitas yang agak merendahkan status sosial penduduk tersebut dibandingkan dengan suku bangsa lainnya yang pada umumnya mendiami daerah-daerah pesisir. Perkataan “orang Dayak” memiliki arti sepadan dengan kata-kata “orang udik”, “orang kolot”, “orang darat”, atau “orang dusun”.

Dengan menganggap Dayak “lebih rendah” dari etnik lain sebenarnya di Kalimantan Barat sebenarnya terdapat potensi konflik budaya yang besar dan hanya bisa dieliminir dengan prinsip-prinsip multikulturalisme.

Sebutan etnik Dayak sebenarnya bukan menyebut entitas yang sifatnya homogen, namun di dalamnya terdapat sub-sub kelompok etnik diantaranya terdapat kelompok Iban, Barito, Dayak Daratan atau Bidayak, Kanyan, Kenyah dan ada sebutan kelompok orang Punan, beketan dan lain-lain dan tiap-tiap sub kelompok masih terbagi dalam sub-sub kelompok etnik lainnya. Kelompok Dayak Iban mempunyai ciri suka berusaha, memiliki semangat tinggi dan senang berperang. Dari kegemaran berperang inilah dikalangan Dayak Iban terdapat pesta yang biasa disebut upacara Gawai. Etnik dayak Iban gemar menghias dirinya dengan perhiasan-perhiasan dalam bentuk benda atau rajahan dan dari hasil kerajinan tenun Dayak Iban menghasilkan kain dan orang biasa menyebut sebagai “tekstil Iban”.

Kelompok Dayak daratan atau Bidayak tinggal di Sarawak barat dan sebagian tinggal di Kalimantan Barat. Ada kesamaan pemukiman dengan Dayak Iban dengan rumah panjang dan menggunakan sebuah rumah bundar yang khas. Sedangkan kelompok Dayak Barito yang tinggal di bagian selatan pulau Kalimantan tidak tinggal di rumah panjang dan terkenal dengan kenyanian religius yang mendalam dan pesta penguburan yang rumit. Kelompok Dayak ini terkenal dengan seni pahat pada monumen-monumen yang biasa disebut Bapatung, ukiran-ukiran bambu, tikar ayaman yang halus dan indah

Pluralitas etnik di Kalbar bertambah komplek dengan kedatangan etnik-etnik lain yang berasal dari luar pulau Kalimantan seperti etnik Bugis, etnik Batak, etnik Madura, etnik Jawa, etnik Tionghoa dan lain-lain untuk merantau dan menetap di Kalimantan Barat. Dalam kaitannya dengan etnik pendatang etnik Madura perlu mendapatkan perhatian khusus, karena etnik tersebut banyak menimbulkan masalah dan konflik di Kalimantan Barat. Menurut Sudagung (1984 : 116) sejarah perpindahan etnik Madura ke Kalimantan Barat dapat dibagi

dalam beberapa tahap, yaitu *pertama* antara tahun 1902 – 1942, masa ini menurut Sudagung disebut sebagai masa perintisan, dimana perpindahan orang Madura ke Kalimantan Barat dilakukan melalui saluran perdagangan, terutama perdagangan garam, Sapi dan Kambing. Orang Madura yang ingin berpindah ke Kalimantan Barat dilakukan dengan jalan menumpang kapal layar yang membawa berbagai barang dagangan yang berasal dari pulau Madura seperti telah disebutkan diatas. *Kedua*, antara tahun 1942 – 1950, pada 1942 ditandai dengan masuknya pasukan Jepang ke Indonesia, dan pengaruhnya terhadap proses migrasi etnik Madura ke Kalimantan Barat adalah amat besar. Pada masa ini dapat dikatakan proses migrasi tersebut terhenti, karena situasi perang dan penuh gejolak. Pada masa tahun antara 1945 - 1950 pada masa revolusi fisik sedang berkecamuk juga dapat dikatakan amat jarang terjadi perpindahan penduduk dari Madura ke Kalimantan Barat. *Ketiga*, antara tahun 1950 – 1980, pada masa ini arus migrasi orang Madura ke Kalimantan Barat semakin lancar, dan ada kecenderungan ada perubahan arah migrasi, yaitu dari tujuan ke desa berubah arah menuju ke kota-kota. Di Kota etnik Migran yang berasal dari Madura sebagian besar bekerja disektor jasa angkutan seperti penarik Becak, Penambang Sampan. Selain itu ada juga yang bekerja menjadi penggali, pencari batu dan pengangkut batu untuk proyek pembangunan jalan raya.

Penyebaran etnik Madura hampir merata di semua wilayah Kalimantan Barat. Mereka bermukim terutama di Kodya Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu jumlah warga Madura masih sangat sedikit. Berdasarkan data Biro Pemerintahan Pemda Kalbar, hingga tahun 1980 perkiraan jumlah warga Madura di Kalimantan Barat sebanyak 62.135 jiwa, atau 2,5% dari total penduduk Kalbar. Perinciannya antara lain yang berada di Kodya Pontianak sebanyak 21.369 jiwa, Kabupaten Pontianak 10.000 jiwa, Kabupaten Sambas 20.000 jiwa, Kabupaten Sanggau

1000 jiwa, dan yang berada di Kabupaten Ketapang diperkirakan 9.766 jiwa. Di Kota Madya Pontianak dari total 21.369 jiwa penduduknya, kantong-kantong Madura terbanyak di Kecamatan Pontianak Utara/Siantan (17%), Pontianak Timur 13,8%, Pontianak Barat 4,5% dan Pontianak selatan sebesar 1,8%.

Pada tahun 1989 jumlah penduduk Madura di Kodya Pontianak diperkirakan berjumlah 26.745 jiwa, atau sekitar 6,4% dari total penduduk Kodya Pontianak yang berjumlah 421.185 jiwa. Di Kabupaten Pontianak pada tahun 1989, diperkirakan jumlah orang Madura sebanyak 17.403 jiwa, atau 2,84% dari total jumlah penduduk 612.509 jiwa. Di Kabupaten Sambas diperkirakan jumlah orang Madura diperkirakan sebanyak 20.000 jiwa, atau 3,3% dari total jumlah penduduk sebesar 601.831 jiwa. Etnik Madura di Kalbar sebanyak 90.570 jiwa atau 2,75% dari 3,3 juta penduduk Kalbar (Edi Patebang & Eri Sutrisno, 2000: 166).

Selain etnik Madura etnik pendatang lain yang banyak memberi warna kehidupan di kalbar adalah etnik Tionghoa. Kedatangan etnik Tioanghoa di Kalbar diawali dengan adanya kebijakan yang diambil oleh Sultan Melayu Sambas dan Mempawah, yang mendatangkan orang-orang Tionghoa, untuk diperkerjakan pada sentra-sentra pertambangan emas. Lokasi pertambangan emas pada waktu itu terletak di Monterado, Budok (Kabupaten Sambas) dan Mandor (Kabupaten Pontianak). Dengan adanya kebijakan tersebut, populasi orang - orang Tionghoa kemudian meningkat drastis mencapai ribuan orang dan membentuk kongsi-kongsi (semacam grup perusahaan) pertambangan emas. Semakin lama kongsi-kongsi tersebut semakin membesar dan semakin mempunyai kekuatan untuk berkuasa. Menurut catatan sejarah pada tahun 1770 Kongsi Monterado dan Budok melepaskan diri dari kesultanan Sambas, diikuti pemisahan kongsi Mandor dari Kesultanan Mempawah.

Orang Tionghoa yang berimigrasi ke Kalimantan Barat atau Indonesia dari keterangan orang-orang Tionghoa di Pontianak

terdiri dari 4 (empat) suku bangsa yaitu Hokkian, Teo Chiu, Khek dan Kanton. Akan tetapi sebagian besar orang awam hanya mengenal mereka sebagai orang Cina dengan identitas sebagai berikut : **pertama**, Cina totok, merupakan generasi imigran Tionghoa yang hidup turun menurun di Kalimantan Barat baik yang bersifat *Stateless*, WNA maupun yang sudah alih warga Negara dan mempunyai ciri memiliki loyalitas yang tinggi terhadap negara leluhur. **Kedua**, Cina peranakan yang merupakan keturunan hasil perkawinan diantara Cina perantauan maupun hasil perkawinan silang dengan penduduk asli Kalimantan Barat. **Ketiga**, Cina Phantong yang merupakan hasil perkawinan silang antara Cina Khek dengan Dayak Kalimantan dan banyak terdapat di daerah Samalantan.

Pada tahun 1967 dari catatan sejarah terkait keberadaan etnik Tionghoa di Kalimantan Barat, terjadi konflik antara etnik Dayak melawan Tionghoa dalam skala besar, dan konflik ini terkait dengan usaha pemerintah untuk menumpas PGRS PARAKO. Pada tahun tersebut terjadi perpindahan atau migrasi besar-besaran orang Tionghoa keluar dari daerah pedalaman Kalimantan Barat, seperti terjadi di Sintang, Sanggau, Kabupaten Pontianak dan pedalaman Sambas. Dalam peristiwa tersebut, menurut catatan Kodam VII Tanjungpura terdapat sekitar 55.521 orang Tionghoa yang berhasil dipaksa keluar dari pedalaman Kalimantan Barat.

Sebelum Peristiwa penumpasan PGRS PARAKO penyebaran etnik Tionghoa di Kalimantan Barat relatif merata baik di daerah pesisir maupun daerah pedalaman. Namun setelah peristiwa PGRS PARAKO ada kecenderungan pemukiman etnik Tionghoa terpusat di daerah pesisir, karena dalam peristiwa tersebut etnik Tionghoa diusir oleh etnik Dayak dari daerah pedalaman. Konsentrasi terbesar pemukiman etnik Tionghoa berada di kota Singkawang, dimana di dalam kota tersebut etnik Tionghoa merupakan etnik mayoritas.

Pluralitas budaya di Kalimantan Barat merupakan ekspresi budaya etnik-etnik yang tinggal di daerah tersebut, yaitu budaya

etnik mayoritas dan budaya etnik minoritas. Menurut penulis terdapat faktor penting yang dapat digunakan untuk memahami pluralitas budaya di Kalimantan Barat, yaitu di daerah ini tidak ada kebudayaan dominan dari etnik Mayoritas yang mampu menundukan budaya-budaya etnik minoritas pendatang. Contoh daerah yang terdapat kebudayaan dominan misalnya daerah Jawa Barat dengan kebudayaan Sundanya dan Jawa Tengah dengan kebudayaan Jawanya. Di kedua daerah tersebut etnik minoritas pendatang cenderung “menjadi” orang Jawa dan Sunda dari segi kebudayaan. Di daerah Jawa Tengah terutama di daerah Yogyakarta dan Surakarta misalnya, dapat dengan mudah kita temukan saudara-saudara kita dari etnik Tionghoa yang dapat berbahasa Jawa halus dan bahkan ikut dalam ritual-ritual Jawa, misalnya mengikuti ritual 1 Syura di Pantai Parangtritis.

Kondisi ini berbeda di Kalimantan Barat, karena tidak ada kebudayaan yang dominan maka masing-masing kelompok etnik dapat dengan bebas mengekspresikan kebudayaan masing-masing tanpa dominasi kebudayaan etnik mayoritas. Di daerah ini orang Tionghoa tetap menjadi orang Tionghoa seutuhnya, dari segi bahasa mereka tetap bertutur dengan bahasa mereka dan mereka dengan bebas mengekspresikan tarian Barongsainya, demikian juga orang Madura tetap menjadi orang Madura. Di Kalbar jarang kita temui orang Tionghoa atau Madura yang menjadi Melayu seutuhnya. Kondisi ini justru merupakan hal yang positif untuk berkembangnya pluralitas budaya etnik di Kalimantan Barat, karena dalam kondisi tersebut terdapat ruang terbuka bagi masing-masing kelompok etnik untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaannya secara otonom.

Di Kalimantan Barat pluralitas Budaya dalam arti ekspresi tarian tradisional, upacara-upacara adat, karya-karya seni bernuansa etnik dan lain-lain berkembang dengan baik. Misalnya etnik Jawa di daerah ini bebas mengembangkan kesenian Jawanya, misalnya melalui pertunjukan wayang kulit semalam suntuh, seni kerawitan dan kesenian

campur sari. Kebudayaan Tionghoa dan Madura di Kalimantan tetap eksis dan malah ada kecenderungan “menenggelmkan” kebudayaan lain di lokasi-lokasi yang menjadi konsentrasi pemukiman dari kedua etnik tersebut.. Contohnya dalam peringatan hari raya keagamaan, antara hari raya Idhul Fitri dengan tahun baru Imlek di kota Singkawang dan kota Pontianak tampak lebih meriah perayaan Imlek. Pada hari raya Idhul Fitri orang Melayu paling-paling hanya merayakan satu minggu, pada hari raya Imlek orang Tionghoa merayakan hampir sebulan penuh lengkap dengan atraksi Barong Sai setiap hari. Yang membuat penulis heran, diantara pemain Barong Sai terdapat orang-orang Melayu.

Demikian juga dengan orang Madura, mereka tetap dapat eksis dengan kesenian ronggeng dan caroknya. Seperti dikisahkan oleh Sudagung (1984) di desa Rambayan A dan Sempadian kabupaten Sambas sebelum pecah konflik sering ada pertunjukan ronggeng. Acara keramaian dengan pertunjukan ronggeng tersebut biasanya berlangsung berhari-hari, dengan disertai judi, dan sering terjadi perkelahian model Carok. Akibat sering terjadinya perkelahian dengan model *cow boy* di dua desa tersebut, penduduk setempat menamai dua desa tersebut sebagai “Texas Sambas”.

C. Pola Integrasi dan Konflik Antar Kelompok Etnik di Kalimantan Barat

Integrasi secara konseptual mencakup pelbagai fenomena politik, sebagaimana dikatakan oleh Wiener (1982 : 41 - 42), berkaitan dengan sikap dan hubungan yang luas dalam rangka menyatukan berbagai komponen masyarakat ke dalam satu kebulatan yang utuh agar memperoleh satu identitas dan tujuan nasional maupun loyalitas nasional. Proses penyatuan itu dapat berupa penyatuan : (1) pelbagai kesetiaan kultural lokal ke dalam satu ikatan kultural nasional; (2) berbagai unit politik kedalam satu ikatan politik nasional; (3) antara

pemerintah dengan rakyat; (4) berbagai golongan warga negara ke dalam proses politik yang diselenggarakan bersama; (5) antara individu ke dalam beberapa bentuk organisasi yang didasarkan pada satu ideologi dan loyalitas nasional dan yang memiliki program yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Sedangkan syamsudin (1995 : 60) dalam kajiannya secara spesifik dalam konteks Indonesia menjelaskan bahwa integrasi nasional menunjuk pada integrasi atau keterpaduan dalam segala aspek kehidupan bangsa yang secara umum meliputi bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Sebagai suatu proses integrasi nasional menekankan pada persamaan persepsi dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Integrasi antar etnik merupakan proses integrasi sosial yang lebih berkaitan dengan proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya dan ikatan primordial lainnya yang lebih kecil ke dalam satu ikatan budaya dan kelompok yang skalanya lebih besar atau kelompok mayoritas (*main stream atau melting pot*) (Yetman dalam Alqadrie, 1992 :11) pada tingkat daerah atau wilayah yang bertindak selaku sub sistem nasional. Penyatuan ini juga diarahkan untuk meningkatkan identitas nasional dan kebangsaan. Schermenhorn (1968 : 67) menyatakan konsep integrasi dalam kaitannya dengan hubungan antar suku bangsa dengan menyatakan : “.....a process where by units or element of a society are brought in to an aktive and coordinated compliance with the on going aktivities and obyectives of the dominant group.

Konflik secara konseptual memang bentuk kontradiktif dari integrasi, tetapi tidak selamanya harus dipertentangkan. Dalam kehidupan nyata integrasi bisa saja bersebelahan dengan konflik, bahkan melalui konflik keseimbangan sebenarnya dapat ditata kembali. Coser (1964 : 151) misalnya yakin bahwa konflik tidak selamanya berakibat negatif, melainkan juga dapat berakibat positif, dalam hal membantu mewujudkan rasa penyatuan dan kesadaran akan hidup

bermasyarakat. Selanjutnya Coser menjelaskan melalui konflik terjadi apa yang disebut “*the readjustment of norms and power relations with in groups*” sehingga konflik adalah fungsional bagi keberadaan struktur sosial secara keseluruhan.

Maurice Duverger (1998 : 251) menjelaskan bahwa konflik dan integrasi tidaklah berlawanan, akan tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses umum yang sama—bahwa konflik secara alami akan menuju integrasi, dan antagonisme cenderung oleh perkembangannya, kearah menghapus dirinya sendiri (*self elimination*) dan berikutnya menghasilkan harmoni sosial.

Melalui paradigma sentripetal dan sentrifugal, yang ditinjau dari sudut pandangan sub ordinat dan super ordinat, Schermerhorn (1970 : 82) mencoba mengadakan suatu identifikasi pola-pola integrasi dan konflik antar kelompok etnik dengan model analisis sebagai berikut :

Congruent and Incongruent Orentations Toward Centripetal
and Centrifugal Trends of sub Ordinates as Viewed by
Themselves and Super ordinates

	A	B
Super ordinates	Cp	Cf Tending toward integration
Sub ordinates	Cp	Cf
	Assimilation incorporation	Cultural pluraliism aotonomy

	C	D
Super ordinates	Cf	Cp Tending toward conflict
Sub ordinates	Cp	Cf
	Forced segregation with resistence	Forced assimilation with resistence

Cp = Centripetal trends

Cf = Centrifugal trends

Kecenderungan-kecenderungan sentripetal menunjukkan pada kecenderungan-kecenderungan budaya, seperti penerimaan atas nilai-nilai, gaya hidup dan lain sebagainya yang bersifat dan berlaku umum, maupun ciri-ciri struktural, seperti partisipasi yang meningkat dalam sejumlah kelompok dan institusi umum untuk mempertahankan kedua aspek ini agar tetap berbeda secara analitik, maka yang pertama dikatakan sebagai asimilasi dan yang kedua sebagai inkorporasi.

Sebaliknya, kecenderungan-kecenderungan sentrifugal adalah kecenderungan-kecenderungan yang mempertahankan pemisahan dari kelompok dominan atau ikatan-ikatan kemasyarakatan dalam satu atau lain hal secara budaya, hal ini sering kali diartikan sebagai mempertahankan dan melestarikan tradisi-tradisi kelompoknya sendiri seperti bahasa, agama dan lain sebagainya, bersama dengan nilai partikularistik yang berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut.

Menurut konsep Schermerhorn, kecenderungan *sentrifugal* tidak selamanya mengakibatkan konflik antar etnik. Konflik terjadi jika terdapat perbedaan sikap dalam interaksi antar etnik dan integrasi akan terjadi jika terdapat kesamaan sikap dalam interaksi antar etnik. Jika dua kelompok etnik sama-sama mengambil sikap "*centrifugal trends*" dalam interaksinya akan menghasilkan integrasi dengan pola "*cultural pluralism autonomy*", sama-sama mengambil sikap "*centripetal trends*" akan menghasilkan integrasi dengan pola "*asimilation incorporation*". Konflik akan terjadi jika terdapat perbedaan sikap dalam interaksi antar etnik. Jika kelompok etnik super ordinates mengambil sikap "*centrifugal trends*" dan kelompok etnik sub ordinat mengambil sikap "*centripetal trends*" maka akan terjadi konflik dengan pola "*forced segration with resistance*". Sikap sebaliknya akan menghasilkan konflik dengan pola "*forced assimilation with resistance*".

Integrasi antara etnik Melayu dengan etnik Dayak cenderung mengarah pada pola "*cultural pluralism autonomy*" dimana kedua kelompok etnik tersebut cenderung mempertahankan pemisahan

dan mengembangkan kebudayaan masing-masing secara otonom. Etnik Melayu mengembangkan kebudayaannya yang berbasis Islam dengan lokasi di daerah pesisir, sedangkan etnik Dayak mengembangkan kebudayaan yang berbasis pada animisme, dinamisme dan ajaran Kristiani dengan lokasi di daerah pedalaman. Kebudayaan Melayu dengan kebudayaan Dayak ibarat minyak dengan air sulit terjadi pembauran atau asimilasi. Contohnya seandainya ada seorang warga dari etnik Dayak yang masuk Islam oleh warga etnik Dayak warga tersebut dianggap telah masuk Melayu dan tidak diakui lagi eksistensinya sebagai warga etnik Dayak.

Di Kalimantan Barat interaksi budaya antar kelompok etnik mayoritas dengan etnik minoritas terutama etnik Madura cenderung mengarah pada konflik dengan pola "*forced assimilation with resistance*". Etnik Melayu dan etnik Dayak sejak awal sebenarnya merupakan etnik yang tidak anti etnik pendatang dan secara terbuka dapat menerima kebudayaan etnik pendatang. Namun dalam interaksi dengan etnik pendatang terdapat fenomena etnik pendatang tetap mempertahankan kebudayaan mereka dan cenderung tidak terjadi proses asimilasi yang signifikan. Dengan demikian dapat kita katakan sebenarnya etnik Melayu dan etnik Dayak terhadap etnik minoritas pendatang sejak awal mengambil sikap "*centripetal trends*" sebaliknya etnik pendatang mengambil sikap "*centrifugal trends*" dan konsekuensi dari perbedaan sikap dalam interaksi budaya ini adalah timbulnya konflik dengan pola "*forced assimilation with resistance*".

Kebudayaan Melayu dan Dayak sebagai etnik mayoritas cenderung tidak dapat mendominasi kebudayaan etnik minoritas pendatang. Kondisi kota Pontianak dan kota-kota lain di Kalbar mirip kota Medan seperti yang digambarkan oleh Prof. Bruner dalam penelitiannya yang ingin menjelaskan corak ungkapan kesukubangsaan. Profesor Bruner (dalam Suparlan, 2000 : 72) dalam upaya menjelaskan corak ungkapan kesukubangsaan di Bandung dan Medan, telah menggunakan model yang dinamakannya sebagai hipotesa kebudayaan

dominan. Inti dari hipotesa tersebut adalah bahwa corak ungkapan kesukubangsaan di suatu masyarakat itu dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya dominasi oleh kebudayaan dan salah satu suku bangsa yang hidup setempat. Di Bandung terdapat kebudayaan Sunda yang dominan, dimana struktur kekuasaan pada tingkat atas sampai dengan tingkat bawah diperuntukan bagi dan dipegang oleh orang Sunda. Dalam kehidupan sehari-hari di tempat-tempat umum kebudayaan Sunda adalah acuan bagi sopan santun dalam tindakan-tindakan dan bahasa Sunda adalah bahasa yang umum berlaku. Para pendatang dari berbagai suku bangsa yang hidup di Bandung cenderung menjadi seperti Sunda atau menjadi Sunda.

Sebaliknya di kota Medan, yang tidak mengenal adanya kebudayaan suku bangsa yang dominan, menghasilkan adanya masyarakat-masyarakat suku bangsa dengan masing-masing kebudayaannya yang relatif otonom. Karena itu di kota Medan, kebudayaan dan bahasa yang digunakan ditempat-tempat umum tergantung dari hasil tawar menawar kekuatan di antara suku bangsa-suku bangsa yang ada setempat dan terlibat dalam interaksi. Hal yang sama juga berlaku dalam posisi-posisi yang ada dalam struktur kekuasaan resmi nasional dan lokal yang ada di kota Medan. Dalam keadaan demikian kesukubangsaan masing-masing biasanya diaktifkan oleh mereka yang menduduki posisi-posisi kunci; dan karenanya solidaritas suku bangsa menjadi ciri yang menonjol dalam kehidupan sehari-hari.

Dari fenomena interaksi budaya antar kelompok etnik di Kalimantan Barat dapat dikatakan, bahwa beberapa etnik pendatang cenderung sulit membaur dari segi kebudayaan dengan etnik mayoritas yang merupakan penduduk asli, bahkan mereka menganggap masing-masing kebudayaannya adalah yang paling baik. Dengan perspektif etnosentrisme kita dapat lebih memahami fenomena konflik antar etnik yang bersumber dari kebudayaan. Perspektif ini berasal dari perspektif evolusi yang menjelaskan kehadiran masyarakat sebagai

suatu bentuk interaksi. Etnosentrisme adalah sikap setiap suku bangsa yang sangat terikat dan mempertahankan nilai dari suku bangsanya sebagai yang terbaik dalam masyarakat plural. Keterikatan itu memperkuat "*rasa kita*" atau *in group* dan berprasangka negatif terhadap "*rasa mereka*" sebagai *out group* (Liliweri, dalam Making, 1997 : 22).

Selanjutnya Liliweri dengan mengutip Poortinga (1990) menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang dibentuk prasangka sosial yaitu : 1. Stereotipe, 2. jarak sosial, dan ke 3, sikap diskriminasi. Dalam hal ini prasangka sosial merupakan *covert action* dan faktor yang dibentuknya merupakan *overt action*.

Prasangka (*prejudice*) adalah sikap yang memalingkan muka atau permusuhan terhadap seseorang yang menjadi anggota suatu kelompok, semata-mata karena ia menjadi anggota suatu kelompok itu dan diduga mempunyai kualitas yang tercela atau tidak disukai yang ditujukan pada kelompokprasangka etnik adalah suatu antipati yang didasarkan kepada suatu generalisasi yang salah dan kaku. Hal itu mungkin hanya dalam perasaan atau mungkin juga diungkapkan. Mungkin ditujukan kepada kelompok sebagai keseluruhan atau ditujukan kepada seseorang karena ia adalah anggota kelompok tersebut (Allport, 1955 : 7)

Adanya prasangka negatif ini akan mempersulit komunikasi antar kelompok, dan mempersulit usaha untuk mencapai kesamaan pendapat. Selain itu cara orang melihat perilaku anggota kelompok mereka dan anggota kelompok lain jadi berbeda (Quattrone & Jones, 1980). Tingkah laku negatif yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok luar (*out group*) akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar, seakan-akan semua anggota kelompok luar berbuat hal yang sama. Karena itu nila setitik rusak susu sebelanga. Berbeda dengan cara memandang perilaku negatif anggota kelompok sendiri yang biasanya tidak digeneralisasikan pada semua anggota kelompok. Cara melihat anggota kelompok luar seperti tersebut diatas

mengakibatkan mudahnya terjadi tingkah laku a-sosial terhadap anggota kelompok luar. Satu perbuatan negatif anggota kelompok luar yang menyentuh emosi anggota kelompok dalam, akan menimbulkan solidaritas kelompok dalam. Solidaritas ini sering terwujud dalam bentuk bentrokan fisik antar kelompok, yang mula-mula hanyalah masalah pribadi anggota kelompok.

Prasangka sosial, seperti telah dijelaskan oleh Liliweri diatas akan membentuk tiga faktor yaitu stereotip, jarak sosial dan sikap diskriminasi. Faktor-faktor ini diduga merupakan faktor yang ikut berperan menyebabkan timbulnya konflik antara etnik Melayu dengan etnik Madura di Kalimantan Barat. Stereotip merupakan gambaran subyektif dari golongan manusia yang lain terhadap manusia tertentu; dan gambaran ciri-ciri subyektif yang diberikan oleh warga satu suku bangsa kepada warga suku bangsa lain secara khusus disebut “stereotipe etnik”. Jadi stereotip etnik merupakan keputusan yang ditetapkan berdasarkan prasangka (Koencoroningrat, 1982 : 347).

Menurut Tangdililing (dalam Petebang & Sutrisno, eds., 2000 : 115) perbedaan budaya akan menyebabkan timbulnya stereotip etnik. Pandangan seseorang atau kelompok masyarakat etnik menurut budayanya masing-masing akan menentukan stereotip etnik lainnya. Kalau ada budaya yang berbeda, maka pada saat itulah muncul stereotip. Orang Dayak mengatakan orang Madura perilakunya tidak sopan, Karena latar belakang Dayak berbeda dengan orang Madura. Begitu juga Madura terhadap Dayak, Tionghoa terhadap Dayak, Melayu terhadap Madura dan sebaliknya.

Dari prespektif budaya menurut Alqadrie (1999 : 37) menjelaskan, bahwa faktor budaya sebagai penyebab konflik antara lain berkaitan dengan perbedaan-perbedaan budaya yang terdapat pada kelompok-kelompok etnik yang sedang mengadakan hubungan. Perbedaan itu sulit dijembatani atau diatasi. Perbedaan budaya antara satu kelompok dengan kelompok etnik lainnya terwujud atau dapat ditemukan antara lain dalam bentuk sistem nilai budaya (*cultural value*

system) dan orientasi nilai budaya (*cultural value orientation*). Perbedaan antara kelompok etnis masih potensial, belum nyata, dan masih abstrak. Mereka baru menjadi nyata bila sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya tersebut terjelma kedalam sikap, mentalitas, perilaku dan perbuatan manusia atau masyarakat sebagai warga dari kelompok etnis tempat mereka menjadi anggotanya.

Dari perspektif kultural, disamping adanya perbedaan budaya yang dapat memicu timbulnya konflik antara etnik Melayu dengan Madura, kalau kita cermati antara kedua kelompok etnik yang terlibat konflik ini juga memiliki kesamaan budaya yang juga potensial menimbulkan konflik, yaitu masing -masing kelompok etnik mempunyai budaya kekerasan. Etnik Melayu mempunyai budaya kekerasan yang kita kenal dengan konsep amuk, etnik Madura dengan budaya carok. Dua budaya kekerasan ini bertemu dalam satu daerah dan mengakibatkan timbulnya konflik yang berlarut-larut. Dari dua akar budaya kekerasan tersebut, budaya carok dari kalangan etnik Madura merupakan budaya yang paling provokatif yang mengakibatkan bangkitnya kembali budaya Amuk di kalangan etnik Melayu.

Menurut penulis faktor budaya hanya merupakan faktor sekunder yang menimbulkan konflik antar kelompok etnik, sedangkan faktor primernya adalah faktor struktural yang bersumber pada perebutan sumber daya ekonomi dan politik yang bersifat langka. Analisis untuk dapat memahami terjadinya konflik dan integrasi dalam masyarakat multi etnik dengan model analisa struktural dapat menggunakan paradigma kelompok dominan (super ordinat/majority group) dan kelompok minoritas (sub ordinat) yang ditinjau dari dua dimensi yaitu pada jumlah dan power yang terdapat pada masing-masing kelompok seperti yang dikemukakan oleh Schermerhorn (1970 : 13) sebagai berikut :

Dominant Groups

	Size	Power	
Group A	+	+	Majority group
Group B	-	+	Elite

Sub ordinate Group

Group C	+	-	Mass Subjects
Group D	-	-	Minority group

AD and BC = Typical inter group configuration.

Berkenaan dengan konsep Mayoritas dan minoritas, Martin & Franklin (1973 : 39) Menyatakan : “ *The term minority is obviously suggestive of groups which are of less than majority size, and its sociological use does indeed have this connotation. The crucial component of its meaning in intergroup relation however, is the relative position of the group in the social structure.* Selanjutnya dijelaskan : “ *a minority group is regarded as having an inferior, sub ordinate position in the society.*

Hari Purwanto (1990 : 12) dengan mengutip dari beberapa ahli, mengemukakan kriteria golongan minoritas dan dominan sebagai berikut : golongan minoritas menurut Wagley dan Moris yang dikutip Simpson dan Yinger (1972 : 12 - 13) mempunyai ciri-ciri : *Pertama*, golongan minoritas adalah bagian dari sub ordinat dalam suatu negara yang kompleks. *Kedua*, memiliki bentuk fisik tersendiri dan unsur-unsur kebudayaan yang dimilikinya, dinilai lebih rendah oleh golongan mayoritas. *Ketiga* golongan minoritas menyadari bahwa dirinya merupakan kesatuan dengan batas-batas tertentu dan bersama-sama anggota minoritas lainnya mereka saling berbagi sifat-sifat bawaan tertentu. *Keempat*, keanggotaan golongan minoritas diperoleh karena keturunan atau melalui ciri-ciri kebudayaan dan fisik yang melekat

pada dirinya. *Kelima*, golongan minoritas cenderung untuk melakukan perkawinan di kalangan sesamanya.

Dalam hal konsep Mayoritas Martin & Fanklin (1973 : 40) menjelaskan : *"majority (dominant) gruops are frequently nomerically superior but there are many historical instances in which a relatively small group has subjugaced a much larger one. The whole history of colonialism is replete with examples in fact.* Karakteristik kelompok Mayoritas (super ordinat), terutama dalam kaitannya dengan otoritas dan struktur otoritas, menurut Max Weber yang dikutip oleh Dahrandorf (1973 : 108) adalah sebagai berikut : *Pertama*, otoritas menunjukkan hubungan super ordinat dan sub ordinat. *Kedua*, pihak super ordinat berkuasa atas sub ordinat yang tercermin dalam bentuk perilaku seperti memerintah dan melarang. *Ketiga*, super ordinat mempunyai hak membuat ketentuan (UU). Otoritas merupakan legitimasi hubungan super ordinasi dan sub ordinasi, dan otoritas tersebut tidak didasarkan atas personal atau akibat situasional, melainkan lebih pada penghargaan yang dikaitkan dengan kedudukan sosial. *Keempat*, hak otoritas terbatas pada kadar dari orang-orang tertentu. *Kelima*, mengabaikan UU ada sangsinya. Sistem yang legal atau adat yang bersifat kuasa legal dapat melindungi efektivitas otoritas.

Berdasarkan pemikiran Schermerhorn dan karakteristik yang terdapat pada masing-masing golongan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hubungan yang wajar antara Mayoritas - Minoritas, sub ordinat dikuasai oleh super ordinat. Namun demikian karena adanya dominasi disuatu bidang tertentu pada golongan minoritas dapat menciptakan suatu hubungan dimana kelompok sub ordinat mendominasi kelompok super ordinat. Sebab, dominasi di satu bidang kehidupan dapat meluas atau berkembang pada dominasi dibidang kehidupan yang lain, sebagai mana ditegaskan oleh Rothschild (1981 : 117) yaitu bahwa setelah pencapaian dominasi ekonomi, golongan minoritas mempunyai kecenderungan untuk memperluasnya ke pengakuan kultural dan kekuasaan politik.

Leiberson (korokawa, ed, 1970 : 10 - 20) menyatakan bahwa dalam hubungan antar etnik yang berbeda masing-masing dari mereka berusaha dan meningkatkan suatu tatanan sosial tertentu demi membela suatu kepentingan tertentu pula, sehingga dalam kondisi seperti ini, situasi hubungan antar etnik yang berbeda tidak saja mempunyai kecenderungan kearah "*sub ordination of an indigenous by migran*" tetapi juga "*super ordination by on indigenous*". Yang pertama menunjukan masyarakat asli dibawah kekuasaan migran, setelah migran mampu merusak, mengurangi dan menundukkan institusi-institusi ekonomi, politik, dan kultural masyarakat asli. Kondisi tersebut amat rawan terhadap timbulnya konflik etnik, karena bagaimanapun juga penduduk asli akan berusaha melawan untuk mempertahankan eksistensi mereka.

Di Kalimantan Barat etnik Cina, Madura, Jawa, Bugis, Padang, Batak termasuk dalam kategori etnik migran, sedangkan etnik Melayu dan Dayak merupakan etnik non migran (penduduk asli). Antara etnik Cina dengan etnik Madura terdapat kesamaan perilaku mereka di rantau, yaitu amat berorientasi pada perbaikan ekonomi lewat jalur kewiraswastaan. Etnik Madura pantas mendapat gelar "Cina hitam Indonesia" karena kegigihannya dalam berwiraswasta. Pada saat sebelum pecahnya konflik tahun 1999 banyak sektor ekonomi di Kabupaten Sambas, terutama sektor perdagangan dan sektor jasa yang dikuasai oleh etnik migran terutama oleh etnik Cina dan Madura. Akibat yang dihasilkan dari stuasi seperti ini adalah adanya kecenderungan yang tinggi akan pecahnya konflik, karena dengan cara apapun, masyarakat asli akan berusaha mempertahankan keberadaannya, baik secara ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Ahli-ahli yang menggunakan pendekatan struktural menurut Sherif (dalam Walkodri & Juyoto, eds., 1985 : 76) beranggapan bahwa adanya kelompok luar akan merupakan saingan di dalam memperoleh "*resources*". Kesempatan dibidang ekonomi, kesempatan dibidang politik, kesempatan kerja, kesempatan studi atau fasilitas lainnya adalah

beberapa contoh "*resources*" yang dimaksudkan diatas. Jika ditinjau dari pendekatan struktural, apa sebabnya seseorang dari kelompok etnik X tidak menyukai seseorang dari kelompok etnik Y dikarenakan kehadiran orang dari kelompok etnik B akan mengurangi kesempatan orang dari kelompok etnik A untuk memperoleh "*resources*". Menurut pendekatan struktural apa sebab terjadinya perbenturan antara para tranmigran dengan penduduk setempat adalah karena persaingan untuk memperoleh "*resources*" ini. Bentrokan antara kelompok etnik yang telah beberapa kali terjadi di Indonesia adalah bentrokan yang timbul sebagai akibat dari persaingan untuk memperoleh "*resources*".

E. Membangun Masyarakat Multikultural di Kalimantan Barat

Multikulturalisme diartikan sebagai berlakunya lebih dari satu identitas budaya dalam sebuah tatanan masyarakat (Harjana dalam Supriyoko, 2005 : 99) Pengertian multikulturalisme terkait dengan konsep heterogenitas penduduk dalam masyarakat. Heterogenitas masyarakat dan sosial budaya tidak hanya terkait dengan perbedaan nominal tetapi juga perbedaan tatanan stratifikasi sosial. Tilaar (dalam Supriyoko, 2005 : 8) menjelaskan multikulturalisme merupakan pengakuan atas hak hidup dari budaya-budaya lokal oleh sebab itu wajib dihormati. Multikulturalisme bukanlah pandangan yang menutup diri terhadap budaya lain namun mengharuskan adanya dialog dengan budaya-budaya yang lain yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Konsep multi- kulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman dalam kesederajatan.

Pluralitas etnik di Kalimantan Barat merupakan fenomena yang nyata dan aktual, namun masyarakat multikultural yang berbasis paham multikulturalisme masih harus diusahakan keberadaannya. Dari pluralitas etnik dalam kenyataannya yang menonjol justru fenomena konflik dan integrasi “semu”. Pola integrasi antara etnik Melayu dengan etnik Dayak diidentifikasi dengan pola “*cultural pluralism autonomy*”, yang tampaknya secara budaya dapat hidup berdampingan dan damai namun kalau kita cermati juga mengandung potensi konflik, karena dikalangan etnik Melayu terdapat sikap etnosentrisme yang menganggap kebudayaan Melayu lebih baik dan lebih tinggi, dibandingkan kebudayaan Dayak. Hal ini tidak sesuai dengan dengan prinsip Multikulturalisme, yang salah satu prinsipnya adalah mengakui kesetaraan budaya. Jadi dengan demikian di Kalimantan Barat akan terdapat masyarakat multikultural jika etnik Melayu mengakui bahwa budaya etnik Dayak setara dan tidak lebih rendah, udik, kolot (seperti diungkapkan La Ode, 1999) jika dibandingkan dengan kebudayaan etnik Melayu.

Usaha untuk menciptakan persepsi bahwa budaya etnik Dayak setara dengan etnik Melayu dapat dilakukan melalui, dialog budaya, komunikasi budaya, untuk dapat lebih memahami nilai-nilai budaya dari kedua etnik. Namun dalam kenyataannya di lapangan dapat kita amati bahwa kedua etnik tersebut saling bersaing untuk menonjolkan eksistensi budaya masing-masing melalui pembentukan lembaga-lembaga budaya misalnya Majelis adat budaya Melayu dan difihak etnik Dayak terdapat Majelis adat Dayak. Untuk menghindari “kompetisi” Budaya dari kedua etnik tersebut perlu adanya lembaga budaya lintas etnik, misalnya “Forum Komunikasi Budaya Melayu-Dayak” atau untuk mengintegrasikan budaya kedua etnik mayoritas tersebut dibentuk “Majelis Adat Kalimantan Barat” dimana budaya Melayu dan Dayak merupakan pilar budaya utama.

Selain pergulatan Budaya antara etnik Melayu dengan Etnik Dayak sebenarnya juga terlibat dalam pergulatan politik dimana

kedua etnik tersebut berusaha untuk memegang kekuasaan politik di daerah-daerah dimana etnik Melayu dan Dayak berkedudukan sebagai etnik mayoritas. Dengan demikian sebenarnya di Kalimantan Barat terjadi gerakan etno politik dimana masing-masing kelompok etnik berusaha untuk menduduki jabatan kepala daerah misalnya, dengan menggunakan isu primordialisme berdasarkan solidaritas etnik. Jadi di Kalimantan Barat dapat kita saksikan disamping terdapat “pembelahan” budaya juga terdapat “pembelahan” daerah politik berdasar komposisi etnik. Untuk kondisi saat ini hampir dapat dikatakan mustahil seseorang dari etnik Melayu misalnya dapat menjadi bupati di daerah yang mayoritas penduduknya etnik Dayak.

Namun jika suatu daerah mempunyai komposisi penduduk yang relatif heterogen dari segi komposisi etnik, maka terdapat fenomena terdapat pasangan bupati atau walikota berasal dari lintas etnik. Misalnya pasangan Bupati Ketapang Markus Efendy – Hendrikus berasal dari etnik Melayu/Dayak yang merupakan cermin dari dua kelompok etnik terbesar yang mendiami Kabupaten Ketapang. Contoh lain misalnya pasangan Walikota Singkawang Hasan Karman – Edy R. Yacub berasal dari etnik Tionghoa dan Melayu yang merupakan dua etnik terbesar di kota Singkawang. Dari pembagian kursi jabatan politik ini tampaknya diantara etnik-etnik yang mendiami suatu daerah Kabupaten/kota berbagi peran dalam politik untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan yang berbasis etnik. Walaupun jika kita amati lebih mendalam sebenarnya fenomena pasangan lintas etnik ini hanyalah salah satu strategi untuk memenangkan PILKADA, namun fenomena ini dapat kita anggap sebagai sinyal positif dari kelompok-kelompok etnik di Kalbar sebagai usaha untuk mengeliminir konflik dan menciptakan hubungan yang harmonis diantara mereka.

Dalam hubungannya dengan etnik minoritas seperti etnik Madura, Jawa, Batak, Padang, Tionghoa dan lain-lain, etnik Melayu sebagai etnik mayoritas di daerah pesisir dan Dayak sebagai etnik mayoritas di daerah pedalaman, untuk menciptakan masyarakat multikultural, harus

menggunakan prespektif baru untuk memandang etnik minoritas. Dalam strategi integrasi yang lama kata kuncinya adalah pembauran, peleburan, asimilasi, akulturasi dan lain-lain harus diganti dengan kemerdekaan dan kebebasan etnik minoritas untuk mengembangkan kebudayaan mereka serta menghormati perbedaan dan keberagaman. Etnik Mayoritas juga harus menghormati etnik minoritas dan tidak berusaha mendominasinya, sebaliknya etnik minoritas juga harus menghormati kebudayaan etnik mayoritas, dan etnik minoritas khususnya pendatang harus menjaga keharmonisan hubungan dengan etnik mayoritas, dengan prinsip pendatang jangan sampai mendominasi kehidupan penduduk asli. Dengan prinsip-prinsip baru hubungan antara etnik mayoritas dan minoritas terutama pendatang diharapkan akan tercipta hubungan yang harmonis dan terhindar dari konflik sehingga masyarakat multikultural di Kalimantan Barat dapat diwujudkan keberadaannya.

D. Penutup

Dari uraian diatas jelaslah bahwa pluralitas tanpa multikulturalisme akan rawan menghasilkan konflik, dan strategi integrasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah ternyata jauh bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme. Prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam praktek di lapangan dimaknai sebagai “merangkai keaneka ragaman menjadi satu kesatuan” yang konsekuensinya antara lain adalah pengabaian, peminggiran kebudayaan minoritas dibawah dominasi kebudayaan Mayoritas. Tidak ada kesetaraan budaya antara mayoritas dengan minoritas yang kadang-kadang menimbulkan perlawanan minoritas yang secara budaya akan menghasilkan konflik dengan pola “*forced assimilation with resistance*”. Dengan prinsip multikulturalisme yang diantaranya kesetaraan budaya, pengakuan perbedaan, penghormatan budaya minoritas dan lain-lain konflik tersebut dapat dihilangkan.

Multikulturalisme sebagai strategi integrasi berbeda dengan strategi integrasi konvensional yang selama ini dianut pemerintah yang “merangkai keanekaragaman menjadi satu kesatuan” dengan mengorbankan kebudayaan minoritas. Strategi multikulturalisme sebaliknya dengan prinsip “satu dalam keanekaragaman”, yang bermakna sebuah masyarakat dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar. Jadi negara atau pemerintah tidak menuntut terjadinya penyatuan budaya tetapi negara membingkai atau hanya menjadi wadah untuk aktualisasi budaya-budaya daerah.

Namun perlu ditekankan bahwa multikulturalisme hanyalah sebuah paham atau ideologi yang untuk implementasinya perlu penyebar luasan, pemahaman dan adanya tekad untuk melaksanakan melalui tindakan nyata. Jika multikulturalisme diadopsi sebagai strategi integrasi perlu dilakukan tindakan konkrit untuk melaksanakannya. Misalnya melalui pola pendidikan yang berbasis multikulturalisme, dialog budaya, komunikasi lintas etnik yang tujuannya adalah untuk dapat lebih memahami nilai-nilai budaya masing-masing etnik sehingga tumbuh sikap saling memahami dan menghargai kebudayaan masing-masing etnik.

Daftar Pustaka

- Akil, M, 1994, *Fenomena Etnisitas di Kalimantan Barat*, dalam Florus dan Juweng (Peny.), *Kebudayaan Dayak : Aktualisasi dan Transformasi*. Grasindo - Gramedia, Jakarta.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, 1992, *Dimensi-dimensi Dalam Integrasi Sosial Dan Nasional : Suatu Tinjauan Kesejarahan Mengenei Proses Integrasi Sosial Di Kalimantan Barat*, Laporan Hasil Penelitian Universitas Tanjungpura, Pontianak.
-
- _____, 1999, *Konflik Etnis di Ambon dan Sambas : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Dalam Antropologi Indonesia Nomer 58.
-
- _____, 2000, *Pertikaian Antara Komunitas Madura Kalimantan Dengan Komunitas Dayak Tahun 1996/1997 Dan Antara Komunitas Madura Sambas Dengan Komunitas Melayu Tahun 1998/1999 Di Kalimantan Barat*, Hasil Penelitian Kerja Sama Antara Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Dengan Fisipol Untan Pontianak.
- Bahar, Sastroedin dan Tandililing, A.B. (eds), 1996, *Integrasi Nasional, Teori, Masalah dan Strategi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barth, Fredrik, (ed), 1988, *Kelompok Etnik & Batasannya*, Peterjemah Nining I. Soesilo, UI Press, Jakarta.
- Bell, Daniel, 1976, *Etnicity and Social Change*, dalam Glazer & Moynihan (eds), [141 -174], *Etnicity, Theory & Experience*, Havard University Press, Cambrige, Massachusetts, and London, England.
- Castles, Lance, 1993, *Etnisitas dan Keutuhan Wilayah Negara : Pandangan Global*, dalam Ichlusul Amal & Armaidly Armandi (Peny.), *Sumbangan Ilmu-ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional*, [199-203], UGM Press, Yogyakarta.

- De Jonge, Huub, 1989, *Madura Dalam Empat Jaman : Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*, Suatu studi Antropologi Ekonomi, PT Gramedia, Jakarta.
- Dahrendorf, Ralf, 1973, *Toward a Theory of Social Conflict Social Change : Sources, Patterns and Consequences*, Amitai Etzioni and Eva Etzioni Herley (ed), Basic Book Inc, New York.
- Enloe, Cynthia, 1970, *Multy Ethnic Politics : The Case of Malaysia*, Research monograph Series, Center for South and South East Asia Studies, University of California, Berkeley.
- , 1973, *Ethnic Conflict and Political Development*, Little, Brown and Company, Boston.
- Eriksen, Thomas Hylland, 1993, *Ethnicity and Nationalism, Anthropological Perspective*, Pluto Press, London, Boulder, Colorado.
- Gordon, Milton, 1964, *Assimilation in American life : The Role of Race, Religion and National Origins*, Oxford University Press, NY.
- Kuncoroningrat, 1982, *Masalah-masalah pembangunan (Bunga Rampai Antropologi Terapan)*, LP3ES, Jakarta.
- , 1993, *Masalah Kesukubangsaan & Integrasi Nasional*, UI Press, Jakarta.
- Korokawa, Minako, (ed), 1970, *Minority Responses : Comparative Views of Reaction to Subordination*, Random House, New York - Yayasan Tunas Bangsa, Jakarta.
- Lidley, R. William, 1970, *Ethnicity, Party, and National Integration*, Yale University Press, New Haven and London.
- La Ode, 1999, *Tiga Muka Etnis Cina Indonesia, Fenomena di Kalbar (Prespektif Tanas)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

- Martin, James G, & Clyde W Fanklin, 1973, *Minority Group Relations*, Charles E Merrill Publisling Company, Colombus, Ohio.
- Mudiyono/ Tim Peneliti Untan, 2000, *Konflik Sosial di Kalimantan Barat : Perilaku Kekerasan Antara Etnik Madura - Dayak dan Madura - Melayu*, Hasil Penelitian Lembaga Penelitian Untan.
- Purwanto, Hari, 1990, *Orang Khek di Singkawang : Suatu Kajian Mengenei Masalah Asimilasi Orang Cina Dalam Rangka Integrasi Nasional di Indonesia*, Disertasi Doktor Pada UI.
- Petebang, Edi & Sutrisno, Eri, 2000, *Konflik Etnik Di Sambas*, ISAI, Jakarta.
- Rothschild, Joseph, 1981, *Etnopolitics, A conseptual Frame Work*, Columbia University Press, NY.
- Sulistyo, Hermawan, 2000, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Gramedia, Jakarta.
- Schermerhorn, R.A, 1970, *Comperative Ethnic Relation Frame Work for Theory and Research*, Random Hause, New York.
- Sudagung, Hendro Suroyo, 1984, *Migrasi Swakarsa Orang Madura ke Kalimantan Barat*, Disertasi, Fisipol UGM.
- Syamsudin, Nazarudin, 1989, *Integrasi Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 2000, *Kerusuhan Sambas*, dalam Jurnal Polisi 2.
- Supriyoko (eds), 2005, *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.
- Weiner, Myron, 1968, *Political Integration and Political Development*, dalam JL. Finkle and RW Gable, *Political Development and Social Change*, John Wiley, New York.
- , 1982, *Integrasi Politik & Pembangunan Politik*, [40-49] di dalam Yahya Muhaimin & Colin Asndrews, *Masalah-masalah Pembanguan Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Zanden, V, Dalam Yetman, Norman R (ed), 1972, *International Encyclopedia of the Social Science*, Collier Mac Millan Publication, London.

PELUANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA PEDESAAN Di KALIMANTAN BARAT

**oleh
Erdi Abidin**

A. Pendahuluan.

Sejak krisis ekonomi dunia pertama, yang terjadi menjelang abad ke-20 yakni pada tahun 1970-an, telah terjadi perubahan paradigma dari para pengambil kebijakan negara yang hasilnya memunculkan konsep baru dalam pembangunan bangsa. Paradigma baru tersebut tidak lain adalah munculnya teori baru dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang lebih mendasarkan unit analisis mereka pada fenomena sosial yang berdimensi ekonomi dan politik (Alt dan Chrystal, 1983; Freiden et al, 2000; dan Vahabi, 2004) atau mencari kohesi sosial dalam pembangunan masyarakat (Battani, 2006). Hasil kajian ini melahirkan berbagai model dan kebijakan pembangunan seperti program pemberdayaan masyarakat pada negara-negara di dunia ketiga (Weiss dan Khan, 2006; OECD, 2003 dan Narayan, 2002) dan program kohesi sosial untuk program serupa pada negara-negara Eropah (Battani, 2006).

Pembangunan masyarakat dilakukan tidak saja membangun ekonomi mereka dengan membagi keuntungan dan keberpihakan pemerintah dan pelaku bisnis kepada masyarakat, yang melahirkan kombinasi yang utuh dan bersinergi antara masyarakat, pemerintah dan sektor privat (Hopkin, 2007) tetapi juga membangun sikap dan mental yang melahirkan kondisi *favourabel* bagi landasan pembangunan itu sendiri (Porter, 1998; dan Hargroves and Smith, 2005).

Harrison (2001:5-8) memandang teori pembangunan masih memiliki perdebatan panjang. Penekanan konsep teori pembangunan masih pada seputar konsep dengan fokus pada “bagaimana”

melaksanakan pembangunan di negara-negara sedang berkembang secara berkelanjutan. Ia mencari-cari dan berusaha untuk menghubungkan atau mendekatkan unit analisis mereka kepada sistem kapitalisme yang berujung pada upaya mengeruk sumber daya (alam dan manusia) oleh pihak yang lebih kuat terhadap mereka atau kelompok yang lebih lemah (Lippid, 2000:5). Sumber daya yang menjadi sasaran utama dan paling mudah tereksploitasi adalah sumber daya alam (SDA) dengan melibatkan penduduk lokal sehingga menjadi hubungan yang tidak seimbang dan pihak yang akan menjadi korban dari penghisapan tersebut adalah mereka yang lemah yang justru mengarah pada proses pemiskinan dan degradasi lingkungan (Vahabi, 2004:98).

Salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses ini adalah penganjur teori modernisasi, globalisasi, dan pembangunan yang kesemuanya berasal dari aliran kapitalisme. Proses ini pada akhirnya melahirkan kesadaran baru dalam memahami konsep pembangunan di negara-negara dunia ketiga bahwa hanya melalui program pemberdayaanlah negara dunia ketiga terbebas dari aktivitas eksploitasi sumber daya yang mengarah pada degradasi dan pemiskinan (Schnabel dan Enhart, 2005) dimana penduduk dari negara-negara kaya tidak lagi menawarkan konsep pembangunan untuk dilaksanakan di negara berkembang melainkan secara langsung melakukan aksi melalui redistribusi pendapatan mereka ke negara-negara dunia ketiga (Panayiotopoulos dan Capps, 2001). Salah satu aktivitas yang memiliki solusi saling menguntungkan adalah pariwisata dimana sumber daya alam lokal tidak dihancurkan melainkan dilestarikan, dijaga kemurniannya termasuk budaya lokal dan dinikmati secara natural (Berkerson dan Walton, 2005:55). Oleh karena itu, aktivitas pariwisata menjadi menarik karena dapat dianalisis dari berbagai dimensi keilmuan dan aplikasi yang pada akhirnya membutuhkan kombinasi yang saling bersinergi diantara berbagai disiplin keilmuan, mulai dari geografi, ekonomi, politik, sosial dan lingkungan sampai pada kesehatan masyarakat dan ahli penyakit menular (Wilson, 2008a: 3-20).

Perkembangan yang cukup pesat pada sektor ini telah menarik perhatian pemerintah untuk melakukan berbagai pengaturan melalui berbagai kebijakan yang mencakup semua aspek kepariwisataan (Theobald, 2005: ix) dengan maksud memacu perkembangannya dan sekaligus untuk menarik manfaat bagi rakyat, pelaku (industri wisata dan segala jaringannya) dan pemasukan devisa (foreign exchange).

Bank Dunia (The World Bank) menyadari akan hal itu sehingga meluncurkan program pinjaman modal kepada pemerintah di negara berkembang (the third world) untuk membangun berbagai infrastruktur kepariwisataan yang dipandang memiliki potensi pariwisata tetapi memiliki infrastruktur penunjang yang masih sangat terbatas, terutama wisata yang berbasis pedesaan dan sumber daya alam diperbaharui yang terkait dengan program pengurangan emisi dan rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global (Thai et al., 2007:1-12; Prizzia, 2007: 19). Beberapa negara yang telah memanfaatkan fasilitas ini antara lain adalah Brazil yang sejak tahun 1994 mengusulkan pinjaman sebesar US\$ 800 juta untuk membangun kawasan the Northeast dan tahun 2004 sebesar US\$ 150 juta untuk membangun kawasan the South. Negara lain yang mengikuti jejak Brazil antara lain adalah Bolivia, Chile, Republik Dominika, Equador, Nicaragua, Panama dan Peru (InterAmerican Development Bank, 2004) dan Cuba (Muller et al., 2008:268)

Hal yang sama juga terjadi di kawasan Asia Tenggara dimana Singapura menempati urutan teratas, disusul oleh Malaysia dan Thailand dalam mengajukan proposal bagi pembangunan infrastruktur kepariwisataan di negara masing-masing melalui Asian Development Bank. Sementara Indonesia, belum sampai ke sana karena disamping berkecukupan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan seperti korupsi, stabilitas keamanan investasi, pembagian kewenangan dan keuangan antara pusat dengan daerah, kemiskinan, juga memandang bisnis pariwisata sebagai urusan privat dan walaupun pemerintah terlibat, itu lebih disebabkan oleh akses atau dampak pembangunan (Kompas, 7 Juni 2004).

Pemerintah di negara-negara yang sektor pariwisatanya telah tumbuh dengan baik seperti Australia, New Zealand, Singapura, Negara-negara di Eropah Barat dan Amerika Serikat, memandang sektor pariwisata sebagai sektor yang dapat secara langsung mendatangkan sumber devisa negara dengan tidak melakukan aktivitas degradasi sumber daya alam, tetapi justru menonjolkan dan menjaga kelestarian mereka, mengaplikasikan kearifan lokal, menjaga keunikan budaya dan lain-lain secara berkelanjutan. Keunggulan alam dan budaya yang dimiliki menjadi salah satu dasar penentuan strategi kompetitif pada pemerintah lokal dan nasional (Porter, 1990) untuk mengupayakan berbagai aktivitas yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke negara dan daerah mereka.

Perhatian yang besar terhadap kepariwisataan ini adalah logis. Secara global, terjadi perkembangan arus wisata dari tahun ke tahun. Tabel-1 membuktikan bahwa 715,6 juta orang melakukan

**Table 1. World Tourism Growth:
1950-2002**

Year	International Tourist Arrivals (millions)	International Tourist Receipts ^a (billions in US\$)
1950	25.3	2.1
1960	69.3	6.8
1970	165.8	17.9
1980	286.0	105.3
1985	327.2	118.1
1990	457.3	263.4
1995	552.3	406.5
1996	596.5	435.6
1997	618.2	439.6
1998	626.4	442.5
1999	652.2	456.3
2000	696.7	474.4
2001	692.7	462.2
2002 ^b	715.6	478.0

^a International transport receipts excluded.

^b Estimates.

Source: World Tourism Organization. 2003. *World Tourism in 2002: Better than Expected*. Madrid, WTO News Release. Dikutif dari Theobald, 2005:6

perjalanan wisata dari dan ke berbagai belahan dunia dan telah membelanjakan dana sebanyak US\$ 478 milyar dollar dalam setahun. World Tourist Organization (WTO) memperkirakan akan terdapat sebanyak 1.6 Milyar orang melaksanakan perjalanan wisata pada tahun 2020 dan akan menghabiskan sebesar US\$ 2 Triliun per tahun atau sebesar US\$ 5 Juta per hari (Theobald, 2005: vii).

Daya tarik ini menjadikan sernua negara berupaya untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara dan daerah mereka. Masing-masing negara, melalui semua

jaringan dan media yang dimiliki menawarkan secara langsung berbagai pesona yang dapat dinikmati oleh wisatawan dan menggerakkan seluruh jaringan bisnis kepariwisataannya untuk secara bersinergi melakukan berbagai aktivitas yang bertujuan menarik kunjungan wisata.

Disisi lain, kemajuan sektor pariwisata akan memberi dampak yang positif bagi masyarakat karena dapat secara langsung menuntun masyarakat pada pola hidup sehat, tertib, ramah, menyenangkan dan aman (Swarbrooke dan Horner, 2001). Pola hidup demikian memang sangat dibutuhkan oleh wisatawan dan itu secara langsung berdampak positif pada kehidupan masyarakat dan sekaligus menjadi salah satu daya tarik yang dapat mengundang ketertarikan wisatawan untuk datang dan menghabiskan waktu kunjungan, memperlama waktu kunjungan dan berbaur dalam kehidupan masyarakat.

B. Perkembangan Pariwisata Nasional dan Kalimantan Barat.

Memasuki Abad ke-20, Perkembangan pariwisata di Nusantara tampaknya tidak begitu menggembirakan. Ini tentunya terkait dengan kerusuhan Mei 1998, Bom Bali I dan II, Bom J.M. Mariot Jakarta dan Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Penurunan ini sangat tajam sebagaimana terlihat dalam data pada Tabel 2.

Sementara data tahun 2006 menunjukkan tren yang menaik. Ini tentunya terkait dengan berbagai upaya promosi dari seluruh komponen bangsa dalam menciptakan kondisi kondusif bagi terbentuknya iklim kepariwisataan di Indonesia. Beberapa daerah yang menjadi barometer industri kepariwisata di Indonesia adalah Bali, Jakarta dan Nusa Tenggara serta Sumatera Barat yang lebih memperhatikan ketimbang objek wisata yang ada di propinsi lain yang kontribusinya pada penerimaan devisa relatif masih kecil.

Tabel 2. Perkembangan Arus Wisata ke Indonesia dari Beberapa Negara Tahun 1997-98.

Negara	1997	1998	+ / -
Jepang	706942	469409	-34
Australia	539156	394543	-27
Taiwan	404929	281595	-30
Belanda	144622	81507	-44
Amerika	171707	150042	-13
Hongkong	103450	53500	-48
Jerman	185976	141314	-24

Sumber: Departemen Pariwisata, 1999

Akhir-akhir ini, Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Papua (Barat, Timur dan Tengah) juga menjadi tujuan wisata berbasis rural, adventure, ecotourism dan budaya. Kondisi keamanan yang kondusif telah menghasilkan arus kedatangan wisatawan manca negara meningkat, sebagaimana data yang ditampilkan dalam Tabel 3 berikut, tahun 2006.

Kalimantan Barat yang berbatasan dan dapat ditembus dengan perjalanan darat dari dan ke Malaysia serta Brunai Darussalam, secara geopolitik dan ekonomis sangat diuntungkan dan ini merupakan nilai kompetitif daerah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Namun, dikarenakan aksesnya yang masih terpisah dari Provinsi lainnya, menjadikan Kalbar masih memiliki keterbatasan akses darat sehingga kunjungan wisata dari provinsi lain relatif masih mengalami kendala.

Perlu disadari bahwa karena kesamaan dalam etnisitas, keragaman budaya dan keunikan alam, maka pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat dituntut untuk mampu berkreasi menciptakan kondisi yang berbeda dari tiga negara serumpun lainnya atau dari Tiga Provinsi lainnya di Pulau Kalimantan ini, agar keunggulan kompetitifnya mampu menyerap wisatawan, terutama dari Malaysia, Singapura dan Brunei, dan juga dari daerah lain di nusantara pada umumnya dan dari tiga wilayah provinsi di Pulau Kalimantan pada khususnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalbar, dikabarkan bahwa wisatawan mancanegara

(wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Barat masuk melalui 2 pintu, yakni Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong dan Bandar Udara (Bandara) Supadio. Namun, pada akhir tahun 2008 ini, arus masuk ke Kalimantan Barat bertambah 2 seiring dibukanya border Badau dan Jagoi Babang.

Jumlah turis asing yang berkunjung ke Kalbar pada 1997 berjumlah 52.327 orang, sementara tahun 1998 berjumlah 211.898 orang. Mereka berasal dari negara-negara ASEAN, Asia, dan benua lain. Secara rinci, jumlah wisatawan yang berasal dari ASEAN mencapai 97%, yang berasal dari negara-negara Asia 1,61%, negara-negara Eropa 0,74%, dan dari benua Amerika 0,61%. Gambaran ini dapat menjadi catatan penting bagi pengambil kebijakan daerah dalam meningkatkan promosi kepariwisataan dan menawarkan suasana khusus bagi menarik wisatawan untuk masuk ke Kalbar.

Data di atas juga sekaligus menguatkan dan membesarkan hati masyarakat Kalbar bahwa gejolak di tingkat nasional dan juga kerusuhan sosial serta terjadinya berbagai peledakan bom di Bali dan Jakarta serta Ambon tidak berdampak pada minat turis untuk berkunjung ke Kalbar dan bahkan peristiwa yang telah terjadi di atas sepertinya menjadi salah satu faktor yang mampu mengalihkan pilihan destinasi ke Kalbar. Kesemua aktivitas kepariwisataan di atas berkorelasi positif dengan peningkatan arus wisata ke Kalbar.

Kenaikan arus wisata ke Kalbar ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah terjaganya stabilitas dan keamanan daerah, adanya perbaikan infrastruktur berupa jalan dan jembatan dari Kucing ke Pontianak dan dibukanya penerbangan langsung dari Pontianak ke Kucing serta adanya beberapa event penting di Kalimantan Barat, yang antara lain berupa kegiatan seminar internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan Universitas Malaysia Sarawak dengan melibatkan universitas-universitas negara serumpun ASEAN, kegiatan festival budaya yang diselenggarakan oleh baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

(seperti FBBK, Naik Dango, Gawai Dayak), pemerintah kabupaten (seperti Penantian Titik Kulminasi di Pontianak, robok-robok di Mempawah, permainan meriam karbit di Sepanjang Sungai Kapuas pada menjelang Idul Fitri dan lain-lain), maupun kegiatan sosial budaya masyarakat Kalimantan Barat lainnya (seperti Cap Go Meh) serta minat khusus dari pelaku perjalanan wisata (seperti Off Road dan acara keluarga).

Tabel 3. Perkembangan Arus Wisata ke Indonesia tahun 2006

ASAL NEGARA	JUMLAH
Singapura	1.468.500
Jepang	595.833
Malaysia	526.167
Australia	413.417
Taiwan	380.417
Korea Selatan	229.167
Amerika Serikat	181.500
Inggris	173.250
Jerman	170.500
China	137.000
Belanda	127.413
Prancis	99.000
Pilipina	95.333
Hongkong	81.583

....

ASAL NEGARA	JUMLAH
Timur Tengah	73.333
Thailand	46.750
Italia	68.750
Swedia	55.917
Rusia	55.000
Portugal dan Spanyol	50.447
India	50.417
Afrika	47.667
Selandia Baru	38.500
Kanada	32.083
Swiss	31.167
Belgia	24.750
Denmark	18.333
Jumlah	5.272.194

Sumber: Suara Karya Online, Senin, 11.09.06

C. Definisi Wisata (*Tourism*) dan Wisata Peclesaan (*Rural Tourism*).

Masih belum ada definisi yang tepat dan berlaku secara internasional tentang wisata (tourism or tourist). Perbedaan definisi terletak pada karakteristik pengukuran dan pengklasifikasian dalam menentukan apakah sebuah perjalanan ke luar kota dapat masuk atau tidak dapat dikategorikan sebagai perjalanan wisata. Bahkan, World

Tourism Organization (WTO) masih belum dapat memutuskan kriteria dimaksud sehingga sampai sekarang, terutama yang menyangkut dua hal tersebut masih dalam tahap perdebatan diantara negaranegara anggotanya.

Namun, yang jelas, secara estimologi, tourism berasal dari kata Latin "*tomare*" dan bahasa Yunani "*termos*" yang bermakna "*a lathe atau cyrcle*" yang bermakna berjalan mengitari titik pusat. Makna ini kemudian dalam bahasa Inggris berubah menjadi "*kembali ke titik awal*". Akhiran "*-ism*" didefinisikan sebagai proses atau sebuah tindakan sementara "*-isf*" menunjuk pada tindakan atau pergerakan berkeliling.

Bagi semua orang, istilah turis atau wisata biasa menunjuk pada sebuah aktivitas perjalanan "*ke luar*" yang sengaja dilakukan untuk melakukan tamasya atau mengisi waktu libur (Medlik, 2003:vii) yang dilakukan baik secara sendiri maupun bersama keluarga atau kelompok. Sementara Theobald (2005:17) memberikan definisi tourism sebagai aktivitas kunjungan yang dilakukan oleh sorang atau lebih dengan melakukan perjalanan "*ke luar*" dan tinggal "*di luar*" komunitas atau kediamannya untuk tujuan tertentu seperti bisnis, ziarah, naik haji dan lain-lain. Dari sisi asal dan tempat tujuan (*destination*), maka perjalanan wisata dibedakan menjadi dua bentuk perjalanan, yakni perjalanan internasional dan domestik.

Secara umum, aktivitas kepariwisataan dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori dan salah satunya adalah wisata pedesaan (rural tourism) dan oleh karena itu ia bukanlah barang baru dalam industri kepariwisataan. Masyarakat Amerika, sejak abad ke-17 telah mengenal wisata ini dan begitu juga dengan Australia serta New Zealand dengan menawarkan berbagai wisata berpetualang (adventure) seperti mendaki gunung, menunggang kuda liar sebagaimana terlihat pada iklan-iklan rokok Marlboro Country.

Pearce (2005:145) mendefinisikan wisata pedesaan sebagai wisata atau piknik yang dilakukan di Luar kota. Ia memiliki

pengertian yang Luas dan masih dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis wisata yang kesemuanya mengarah pada spesifikasi atau keunikan wilayah dan budaya masyarakat. Jenis wisata ini sering disebut dengan *agricultural tourism*. Beberapa contoh diantaranya adalah wisata kebun buah; atraksi binatang; fenomena alam yang bersifat khusus (titik kulminasi, air terjun, gunung merapi dan lain-lain), pemancingan ikan, mendaki gunung (*hicking*) dan lain-lain (Meldik, 2003:69 dan 145).

Salah satu negara yang telah sukses mengembangkan industri pariwisata berbasis pedesaan adalah Amerika Utara. Kekuatan dan kompetitif dalam budaya, alam dan keragaman budaya *clikernas* dalam paket wisata yang unik dan ditawarkan kepada turis. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh daerah dan kepedulian pemerintah untuk terlibat dalam pengembangannya, wisata pedesaan akan memiliki kekuatan penuh karena mengikutsertakan berbagai komponen seperti pemerintah, pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat. Bagaimana tidak, wisata ini tidak jarang melibatkan masyarakat dalam atraksi/pagelaran seni budaya dan menyediakan pemandu sebagai penunjuk jalan, perlindungan dari binatang buas atau menghindari kecelakaan dalam wisata *adventure*, yang kesemuanya akan memberi dampak positif berupa pelestarian budaya, keseimbangan ekosistem (*natural*) dan juga memberi pendapatan kepada masyarakat setempat dan pemerintah.

Selain Amerika Utara, India yang kental dengan nilai tradisionalnya (dansa, arsitektur, gaya hidup, dan kerajinan tangan) juga menekankan pada nuansa alam dan budaya pedesaan sebagai kekuatan wisata mereka (Hall et al., 2005: 45). Kesemua keunggulan kompetitif ini dapat *clikernas* menjadi paket wisata yang disertai dengan penawaran fasilitas akomodasi, catering, caravan atau *campign area/sites*, *traveloque and travelcheque* dan lain-lain, yang kesemuanya disusun menurut paket atau kebutuhan turis.

Dane, sebagaimana dikutip oleh Hall et al (2005:44) merangkum beberapa aktivitas kepariwisataan berbasis pedesaan

yang terpopuler dan digandrungi oleh turis dari berbagai negara di Amerika Utara, seperti terdapat dalam Tabel 4.

Wisata alam dilakukan dengan tidak membiarkan calon turis mencari-cari sendiri tempat yang dapat mereka kunjungi tetapi objek wisatanya telah dipersiapkan dengan baik oleh berbagai pihak yang terlibat dalam industri pariwisata dengan didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu, informasi mengenai paket wisata pedesaan telah digambarkan dengan jelas mulai dari aksesibilitas, lama perjalanan, jumlah minimal peserta paket wisata, alat atau sarana transportasi mencapai lokasi, sistem atau perlakuan pengawasan, aktivitas selama berwisata, lama wisata, biaya yang dibutuhkan sampai fasilitas penginapan, angkutan lokal, konsumsi dan lain-lain.

Tabel 4. Berbagai Bentuk Bisnis Yang Terkait atau Menimbulkan Pariwisata

No	Nama Aktivitas
1.	Mengantar Barang ke konsumen luar kota
2.	Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah
3.	Bekerja di luar kota setiap hari
4.	Pertemuan dan konferensi tingkat lokal, nasional dan internasional oleh sebuah korporasi
5.	Pertemuan dan konvensi Internasional
6.	Perpindahan (mutasi) tenaga kerja ke luar daerah
7.	Perjalanan karena pemberian insentif
8.	Peluncuran produk baru
9.	Pameran dan eksibisi dagang
10.	Pelatihan pegawai
11.	Perjalanan bisnis oleh private
12.	Mengambil barang dari pasar luar kota
13.	Proyek NGO yang berada di luar kota
14.	Pertukaran dosen dan mahasiswa
15.	Kunjungan kerja oleh pejabat militer ke luar daerah

Sumber: *Swarbrooke and Homer, 2001:4 dengan pengubahan model dari gambar ke tabel oleh penulis.*

D. Peluang Pengembangan Pariwisata di Kalimantan Barat

Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Ross and Wall (2001:1) telah lama dikenal oleh masyarakat dunia sebagai sebuah negara kaya, terdiri dari gugusan kepulauan yang indah, memiliki iklim tropis yang cerah, masyarakatnya yang ramah dan bersahabat serta kaya dengan berbagai keanekaragaman flora dan fauna. Berbagai julukan itu mengindikasikan bahwa Indonesia adalah menarik untuk dikunjungi, tidak hanya dikarenakan oleh tawaran seribu keindahan tersebut akan tetapi juga menjadi menarik bagi investasi yang mungkin dapat tercipta dengan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia.

Pengetahuan orang luar negeri mengenai keberadaan Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang menjadi faktor penarik perhatian masyarakat dunia dan ini menjadi salah satu sumber kekuatan untuk mengembangkan wisata pedesaan di Indonesia pada umumnya dan di Kalbar pada khususnya.

Kalimantan Barat dikenal sebagai *The Heart of Borneo* karena terdapat banyak taman nasional dan julukan itu sekaligus mengindikasikan bahwa wisata adventure merupakan keunggulan wilayah. Beberapa kali *event off road* dengan route melintasi tiga negara (Indonesia, Brunai dan Malaysia) yang digelar di Kalbar telah mendapat sambutan yang luar biasa dari baik masyarakat Malaysia, Brunai maupun Kalbar serta Indonesia pada umumnya. Hendaknya event seperti ini dapat dilaksanakan secara periodik (ajek) dan dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan dengan menetapkan agenda yang pasti event minimal untuk 5 kali penyelenggaraan.

Sebagai *The Heart of Borneo*, pesona alam Kalbar tidak diragukan lagi. Namun, hingga kini, keindahan alam dan panorama daerah masih belum termanfaatkan secara optimal. Kebijakan dan keputusan ini tentunya terkait dengan kemampuan ekonomi pemerintah yang masih sangat terbatas, sehingga menempatkan pembangunan

sektor pariwisata pada umumnya dan wisata pedesaan pada khususnya berada pada urutan bawah.

Melihat manfaat yang ditimbulkan oleh pariwisata kepada masyarakat dan pemerintah, kebijakan ini tampaknya perlu dikaji ulang kembali. Pembangunan sektor pariwisata berbasis pedesaan sebetulnya dapat dilakukan sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan, komunikasi dan kesehatan. Akses yang terbuka, tersedianya sarana komunikasi dan kesehatan sampai ke wilayah pedesaan dengan sendirinya akan menimbulkan mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan ke tempat hiburan yang alami.

Fenomena ini terjadi sepanjang tahun, dimana banyak warga Kota Pontianak, pada setiap libur hari kerja (Sabtu dan Minggu) atau menjelang libur sekolah, mereka bersama keluarga ataupun sendirisendiri melakukan perjalanan wisata ke luar kota, yang untuk sementara waktu lebih banyak menuju Singkawang dan Sambas serta Mempawah. Fenomena ini terjadi karena di Pontianak tidak terclapat tempat yang representatif untuk berlibur, kecuali untuk berbelanja. Adalah tidak mustahil, bilamana di kota lain seperti Ngabang, Sanggau dan Sintang serta Kapuas Hulu dan Ketapang juga akan menjadi tujuan wisata bilamana terdapat objek yang representatif untuk dikunjungi.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas wisata, dan dengan serta merta akan menimbulkan bisnis pariwisata. Swarbrooke dan Horner (2001:9) merangkum berbagai bisnis pariwisata sebagaimana terclapat pada Tabel 5.

Dari Tabel 5 tersebut, mengingatkan kita bahwa dimanapun berada, aktivitas untuk menarik tourists (kepariwisataan) tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun pelaku bisnis pariwisata sebagaimana selama ini banyak orang beranggapan demikian, tetapi dapat dilakukan oleh semua orang yang berkompetensi dan berkeinginan melakukan itu dengan tidak terbatas hanya melalui event-event tertentu. Kunci pokoknya adalah kejelasan paket informasi wisata yang ditawarkan.

Sebagai contoh aflikasi dari kegiatan yang dapat menimbulkan bisnis pariwisata, antara lain adalah kegiatan seorang dosen senior yang dengan pemikiran segannya dan jaringan yang dimilikinya, mencari penclanaan Internasional. untuk melaksanakan seminar nasional. atau internasional. dan mengundang berbagai pihak, baik dengan penclanaan panitia maupun sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sementara pernerintah, memberikan dukungan dan sikap yang positif bagi terselenggaranya kegiatan dimaksud.

Tabel 5. Aktivitas Terpopuler dalam Pariwisata Pedesaan di Amerika Utara sd 2001.

Activitas Turis pada Wisata Pedesaan Berkelanjutan	Prosentase (%)
Dining (Menyelam)	70
Shopping (Belanja)	58
Mengunjungi Pantai / kota sungai	44
Kunjungan ke situs sejarah	41
Memancing/Berburu/Berlayar	32
Menghadiri Festival/Pekan Raya	29
Mengendarai Sepeda/Mendaki	24
Menonton Acara Keagamaan	23
Berkemah	21
Ikut dalam kejuaraan olahraga	18
Mengunjungi Pengalengan Anggur/Perkebunan/Kebun Buah	15
Permainan Ketangkasan/Judi	12
Mengunjungi Suku Asli	11

Sumber: Diadopsi dari Dane (2001) oleh Hall et al, 2005:44.

Demikian pula dengan anggota LSM (NGO's), dengan jaringan yang dimiliki, sebuah LSM dapat menyelenggarakan kegiatan serupa yang tidak terbatas hanya pada lingkup daerah dan nasional tetapi juga regional dan internasional. Jadi, tidak ada ruang kosong untuk tidak dapat melakukan usaha menarik wisata berkunjung ke negara kita bilamana sernua orang telah melihat bahwa kegiatan pariwisata memiliki arti bagi kehidupan masyarakat, pemerintah dan LSM.

C. Faktor-faktor Determinan Penentu Sekses Pariwisata Pedesaaan

1. Faktor Politik dan Kebijakan Pemerintah.

Agar dapat menjalin hubungan antara legislatif dan eksekutif pada satu sisi dengan pelaku inclustri pariwisata pada sisi lainnya, maka jaringan komunikasi dari pelaku pariwisata kepada pihak legislatif dan eksekutif mesti lancar. Data mengenai perkembangan dan peran sektor ini dalam menclatangkan devisa negara (foreign exchange), membuka lapangan kerja dan mengalihkan arus migrasi dari desa ke perkotaan serta perkembangan sektor ini secara global perlu terus terbangun sehingga para pengambil kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional memiliki image yang positif terhadap peran inclustri pariwisata bagi pembangunan ekonami dan sosial (Wilson, 2008b). Persepsi yang positif ini akan melahirkan kebijakan yang dapat memacu perkembangan dan pembagunanan sektor ini secara akumulatif dan cliharapkan dapat mengambil. peluang dari kemajuan sektor ini (McGehee dan Meng, 2006:368-378).

Swarbrooke dan Horner (2001:101) mengidentifikasi sebanyak 4 unsur yang menjadikan penyelenggaraan pariwisata sukses. Keempat faktor tersebut adalah faktor ekonomis, faktor lingkungan, faktor reliabilitas dan faktor kapasitas yang secara Lengkap diperlihatkan dalam Tabel. 6, 7 dan 8. Dampak yang akan diharapkan, tidak dapat

dipungkiri memiliki sisi positif dan sisi negatif yang juga dikelompokkan ke dalam 3 dampak, berdasarkan unsur penentu dalam penyelenggaraan pariwisata, yakni dampak ekonomi, dampak lingkungan dan dampak sosial-budaya (faktor realibilitas dan kapasitas).

Tabel 6. : Dampak Ekonomi dari Aktivitas Kepariwisata (The economic impact of business travel and tourism)

Dampak Positif	Dampak Negatif
Sumber pendapatan kepada daerah dan pelaku bisnis pariwisata	Adanya pengeluaran public atau subsidi untuk membangun dan mema-najemen berbagai fasili-tas yang dibutuhkan bagi kelancaran program kepariwisataan
Menciptakan lapangan kerja	
Sumber pajak bagi pemerintah local dan pusat	Terdapat biaya yang dikeluarkan untuk akti-vitas menarik wisata yang mana dana itu mungkin dapat digunakan untuk membangun fasilitas lain untuk masyarakat lokal
Memiliki efek multi ganda pada ekonomi lokal akibat adanya pengeluaran dari turis.	
Stimulan bagi perluasan investasi dan pembangunan daerah	Pengeluaran mungkin tidak sebanding dengan pemasukan bilamana turis tidak datang dan terlalu banyak agen wisata
Menjadi sumber devisa bilamana turisnya berasal dari luar negeri	

Sumber: Swarbrooke and Horner, 2001:76 dengan pengubahan model dari gambar ke tabel oleh penulis.

2. Kejelasan Informasi Mengenai Paket Wisata

Dengan informasi yang jelas, turis dapat menentukan destinasinya wisata dan sekaligus mengetahui seluk-beluk sebuah paket wisata sebelum melaksanakan perjalanan wisata. Pemerintah daerah dalam kapasitas sebagai pengatur atau penentu kebijakan daerah (lokal) semestinya tidak hanya mengalokasikan lokasi yang dapat dikelola oleh pihak swasta untuk menjadi tempat wisata dan atau karena keunikan, faktor sejarah dan nilai budaya yang ada pada objek wisata,

maka pernerintah sendiri, melalui dinas atau pihak yang ditunjuk/ditender mengelola objek tersebut sebagai tujuan wisata.

Tabel 7. Dampak Sosial dari Aktivitas Kepariwisataaan (*The Social impacts of business travel and tourism*)

Dampak Positif	Dampak Negatif
Berpotensi untuk dapat menyerap tenaga kerja terampil, terutama dari kaum muda dan wanita lulusan perguruan tinggi	Jika turis yang datang lebih kaya atau superior, maka dapat menimbulkan sifat rendah diri pada masyarakat lokal.
Menjadi pemacu pembangunan berbagai infra-struktur seperti jalan, bangunan teater, konvensi, pasar kerajinan dan lain-lain padamana itu juga dapat digunakan oleh penduduk lokal.	Akan ada bantahan kepada pemerintah dari masyarakat atas pembangunan berbagai fasilitas kepariwisataan yang semestinya lebih memetingkan fasilitas sekolah, rumah sakit dan lain-kain
Dapat member ide segar kepada pelaku bisnis di tingkat lokal	Dapat membantu percepatan penyebaran berbagai penyakit kelamin Membantu pembentukan jaringan bisnis ilegal dan penyeludupan dan kriminal internasional
Memotivator agen perjalanan dan pekerja untuk berkarya lebih baik, ramah dan bersahaja.	Pelaku bisnis pariwisata sering mengalami stress karena turis yang tidak jadi datang/terlambat, turis yang bertukar/kehilangan bagasi, kesalahan koneksi dan lain-lain.

Sumber: Swarbrooke and Horner, 2001:79 dengan pengubahan model dari gambar ke tabel oleh penulis.

Tabel 8. Dampak Lingkungan (*The environmental impacts of tourism*)

Dampak Positif	Dampak Negatif
Hotel dan ruang konvensi akan terbangun yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.	Pembangunan jalan, hotel dan airport mungkin dapat menyapakan habitat natural dan bertambahnya polusi udara akibat pertambahan kendaraan pribadi.
Adanya upaya dari seluruh komponen masyarakat untuk menjaga dan menciptakan lingkungan kota menjadi indah, unik dan bersih	Pajak yang diperoleh dari aktivitas turis mungkin tidak dibayarkan kepada pemerintah meskipun pemerintah telah banyak mengeluarkan biaya untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.
	Bangunan hotel mungkin tidak mengikuti arsitektur dan standar bistek local sebagai akibat dari kolaborasi dalam jaringan bisnis.

Sumber: Swarbrooke and Horner, 2001:77 dengan pengubahan model dari gambar ke tabel oleh penulis.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu contoh pemerintah yang sukses dalam mengembangkan wisata berbasis pedesaan dimana terdapat beberapa tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah seperti Gunung Bromo, Jatim Park, Kebun Binatang Surabaya dan Pandaan, Wisata Air Hangat Cangar dan Air Terjun Pujon kesemuanya di Kota Batu), dan yang lain dikelola secara privat seperti Taman Selecta, Taman Sengkaling, Pantai Indah Sendang Biru, Pantai Indah Ngliyep, Pantai Balai Kambang dan lain-lain yang kesemuanya bersaing secara sehat dan menjaga kualitas pelayanan dalam menarik minat pengunjung dan bahkan terdapat klasifikasi diantara mereka sehingga dapat menuntun pengunjung pada pemilihan destinasi yang cocok untuk kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, objek wisata yang ada ini memanfaatkan potensi kompetitif dan kapasitas daerah dan dikelola secara profesional sehingga selain mendatangkan pendapatan bagi pengelolanya juga memiliki ekonomi efek ganda bagi masyarakat secara keberlanjutan dan lestari (alam dan budaya).

Beberapa tempat yang indah di Kalimantan Barat seperti Pantai Gosong dan Tanjung Gondol, Pulau Temajoh, Gunung Palung, Bukit Kelam, Danau Sentarum, Pantai Temajok serta The Heart of Borneo Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum masih belum dapat mengangkat kunjungan wisata alam di Kalimantan Barat. Hal ini tidak lain disebabkan oleh faktor aksesibilitas yang masih sangat sulit, media Man yang tidak efektif, tidak ada kegiatan yang dikelola secara periodik di beberapa tempat tersebut dan bahkan tidak ada pula pemanduan yang secara khusus dilakukan untuk dapat menuntun calon wisata memutuskan destinasi ke tempat-tempat wisata tersebut.

Informasi mengenai paket wisata yang tidak jelas hanya akan membuat promosi sia-sia. Beberapa contoh paket wisata yang dianggap tidak jelas tetapi telah terpublis melalui internet dapat dilihat dalam Kotak Dialog 1. Event-event di atas menjadi tidak jelas dan oleh turis dianggap tidak menarik disebabkan oleh tidak ada informasi

mengenai waktu yang pasti dan informasi detail tentang event (jenis kegiatan, manfaat dan dampak event bagi turis).

Tabel 9 Berbagai Bentuk Persepsi Mantan Turis yang dapat ditularkan kepada Calon Turis, para kerabat dekat atau jaringan.

PERSEPSI MANTAN TURIS	TANGGAPAN TURIS LAIN/CALON TURIS	TINGKAH LAKU YANG AKAN DITAMPILKAN CALON TURIS
Persepsi Positif	Peluang Mendapatkan Sahabat	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan yang bersahabat • Belajar dari orang lain • Mempelajari budaya dan lokalitas
	Perjalanan yang Menyenangkan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari partner untuk melakukan kegiatan bersama • Bersosialisasi dan saling menyesuaikan dengan baik
	Siap Memberi Bantuan Saat Dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi sumber informasi • Mau share tentang biaya • Saling membantu
	Saling Menjaga Keselamatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut menjaga apa yang dimiliki bersama • Menghindari kontak yang tidak perlu atau yang kurang mengenakkan
	Memperbaiki Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki suasana di tempat kunjungan • Menikmati suasana secara penuh • Mengingat tempat dan waktu yang paling berkesan

Dengan informasi waktu yang tidak pasti, beberapa turis yang penulis mintai pendapat mengenai paket wisata ini menyatakan bahwa ada kesan perhelatan ini tidak siap dan bahkan tidak memiliki sesuatu yang bernilai/bermanfaat lebih (competitive). Beberapa orang turis menyatakan bahwa informasi mengenai waktu dan manfaat event bagi turis adalah sesuatu yang sangat penting terkait dengan pengaturan waktu libur yang tidak dilakukan secara buru-buru tetapi telah dipersiapkan jauh sebelum waktu tersebut tiba. Informasi paket wisata ini juga menjadi tidak menarik menurut turis disebabkan tidak ada

informasi mengenai jadwal penerbangan, tempat penginapan, sarana transportasi yang dapat mereka gunakan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati paket wisata tersebut.

E. Klasifikasi Turis, Paket Informasi untuk Menjangkau Turis dan Paket Wisata yang Dapat Ditawarkan di Kalimantan Barat.

Aktivitas keseharian yang semakin padat, dengan sendirinya menimbulkan kelelahan, kejenuhan dan bahkan stress (Stranks, 2005). Stress yang lebih menunjuk pada gejala jiwa dan pikiran tidak hanya ditimbulkan oleh faktor psikologis seperti tertekan, bersalah, menyesal, takut, tidak puas dan lain-lain, tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor non psikologis seperti letih, kejenuhan, kepenatan, kurang istirahat dan lain-lain yang secara keseluruhan, timbul sebagai akibat dari aktivitas fisik dan non fisik yang berlebihan (Pettinger, 2001). Jalan untuk memulihkan (recovery) berbagai beban kerja dan pikiran yang melelahkan tersebut adalah dengan melakukan berbagai aktivitas penyegaran fisik dan otak (refreshing) yang salah satunya adalah dengan menjauhkan diri—untuk sementara waktu— dari lingkungan kerja, aktivitas rutin dan komunitas kerja melalui kegiatan pariwisata dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tamasya, tour, travel, olah raga dan lain-lain (Stranks, 2005).

Agar dapat melayani turis dengan baik, penyedia layanan (provider) selain menawarkan paket wisata yang unik dan inlah, juga membutuhkan pengetahuan mengenai karakteristik budaya (daerah dan negara asal), kebutuhan, tujuan atau jenis wisata yang diinginkan oleh turis. Dengan pengetahuan tersebut, industri pariwisata dapat melakukan desain produk dan berkoordinasi secara integratif ke dalam bentuk jaringan (*link*) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada baik turis domestik maupun turis manca negara (Evans et al 2003).

1. Klasifikasi Turis.

Aktivitas kepariwisataan dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis. Selama ini kita hanya mengenal dua jenis turis dan itu telah mencakup sernua klasifikasi, yakni turis domestik untuk menyebut sernua pelaku perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang-orang lokal dan nasional atas sernua objek pariwisata lokal dan nasional. Klasifikasi kedua disebut turis mancanegara yang ditujukan untuk menyebut pelaku perjalanan (wisata) yang berasal dari luar negeri dan berbeda bangsa dari objek wisata yang dikunjungi. Namun, klasifikasi di atas masih terlalu umum sehingga akan menyulitkan pihak penyedia jasa kepariwisataan dalam memberikan layanan terbaik kepada turis.

Pembagian lain dilakukan oleh Theobald (2005:18-23) yang membagi atau mengklasifikasikan jenis perjalanan wisata ke dalam dua kelompok. Kedua klasifikasi tersebut adalah turis domestik bilamana dilakukan oleh orang-orang dari daerah sendiri atau bangsa sendiri, baik dalam kapasitas yang terkait dengan pelaksanaan tugas maupun tidak. Kelompok kedua disebut turis Internasional apabila dilakukan oleh bangsa atau warga negara lain, baik dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas (*inbound*) maupun yang dilakukan sendiri tanpa terkait dengan pelaksanaan tugas/profesionalisme (*outbond*). Klasifikasi di atas juga masih terlalu luas sehingga Theobald (2005) membagi turis dalam versi yang lain.

Versi lain tersebut adalah melihat aktivitas kepariwisataan berdasarkan segmem permintaan turis yang dimaksudkan untuk merancang sedemikian rupa perencanaan dan peneraan paket wisata dengan tidak membedakan asal daerah atau negara tetapi melihat turis sebagai konsumen yang perlu dilayani sesuai dengan kebutuhan atau permintaan mereka. Klasifikasi tersebut dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yakni:

1. Wisata yang ditujukan untuk memanfaatkan waktu Luang, berlibur dan rekreasi.

2. Wisata yang dilakukan dalam rangka mengunjungi teman atau kerabat
3. Urusan dagang dan profesionalisme yang masih terkait dengan urusan dinas atau tugas.
4. Wisata dalam kaitan dengan program pengobatan.
5. Wisata dalam rangka perayaan agama/hari besar umat beragama.
6. Lain-Lain seperti crews, pengantar barang ke luar kota/negeri, transit, dan aktivitas Lain yang tidak diketahui tujuannya secara pasti.

Dengan membagi aktivitas berdasarkan kebutuhan atau tujuan di atas, provider atau pihak yang terlibat dalam pemberian layanan dapat dengan mudah mempersiapkan dan juga melakukan koordinasi tugas sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan standar dari aktivitas tersebut.

2. Paket Informasi untuk menarik kunjungan wisata.

Terdapat banyak media yang dapat digunakan untuk memasarkan produk atau paket wisata dan pemilihan media menjadi sangat penting agar dapat menjangkau pasar potensi. Calon wisata akan tidak tahu apa yang menjadi kehebatan sebuah produk bilamana tidak ada upaya untuk menjangkau mereka. Untuk menjadikan mereka tertarik, dibutuhkan berbagai trik yang perlu dirancang secara khusus dan salah satunya adalah melalui media pemasaran. Jika tidak, calon pembeli tidak akan menaruh perhatian pada produk wisata yang akan dipasarkan. Salah satu media yang paling ampuh untuk dipilih adalah jalur periklanan.

Wan merupakan sebuah alat untuk melakukan hubungan publik yang biasa digunakan oleh manajer atau personal bagian pemasaran untuk mencapai target (pembeli). Pemilihan satu media berkonsekwensi pada biaya dan oleh karena itu, perlu untuk selalu diingat bahwa biaya

yang dikeluarkan untuk menopang aktivitas periklanan wisata mestinya tidak lebih besar dari dampak ekonomi yang akan diterima dari aktivitas keparisataan. Adalah menjadi sia-sia bilamana jumlah pengeluaran tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan, kecuali dibalik aktivitas tersebut terdapat tujuan Lain yang diharapkan memberi hasil yang lebih besar. Biaya periklanan yang besar mungkin saja terjadi bilamana paket wisata yang diwarkan tidak menarik kunjungan wisata.

Middleton dan Clarke (2001: 233-324) mengidentifikasi sebanyak Lima bentuk media yang dapat digunakan untuk memasarkan produk wisata. Kelima bentuk media tersebut adalah (1) periklanan dan komunikasi publik, (2) Sales promotion, merchandising dan personal selling, (3) brosur, dan bentuk cetak yang lain termasuk informasi electronic, (4) Saluran distribusi yang dapat menembus atau membuka akses pernasaran produk wisata, dan (5) Pemasaran langsung. Kelima macam media tersebut tidak dijelaskan dalam makalah ini tetapi yang paling penting untuk dibahas adalah paket informasi wisata karena informasi yang lengkap dapat membantu calon turis dalam memutuskan destinasi wisata.

a. Attraksi Wisata dan Suasana Wisata

Attraksi wisata secara umum dapat menawarkan 4 macam unsur dan itu dapat dipilih menurut keunggulan yang paling tinggi dalam konteks lokal.

Keempat macam attraksi dimaksud adalah:

- 1 Attraksi yang menonjolkan keunikan dan keunggulan alam seperti lanscape, pantai, iklim, flora dan fauna, keajaiban alam yang terdapat di lokasi wisata. Untuk kasus di Kalbar, salah satunya adalah detik-detik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun. Momentum ini hingga kini masih belum terkelola secara baik sehingga belum mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kalbar.

- 2). Operasional faktor seperti route, frekwensi layanan dan harga atau biaya yang dibutuhkan.
- 3). Regulasi pernerintah yang bertujuan untuk melindungi wisatawan yang menjamin kenyamanan selama melaksanakan perjalanan wisata.

d. Imaje tentang Tujuan Wisata

Imaje biasanya berupa khayalan mengenai sesuatu yang diimpikan. Namun, dalam istilah *touris*, image yang dimaksud adalah tempat wisata yang kemudian diwujudkan ke dalam sebuah sketsa atau denah. Image juga menunjuk pada sebuah ingatan yang membekas yang terbentuk dari pengalaman wisata oleh orang-orang yang telah melaksanakan perjalanan wisata. Image ini menggambarkan hal-hal yang akan diperoleh setelah seseorang melaksanakan perjalanan wisata. Beberapa contoh tentang Image Wisata di beberapa negara diantaranya adalah Thailand dengan wisata sek wanita cantiknya; Singapura dengan wisata belanja; Cuba dengan cerutunya, Amerika Latin dengan Ragam Budaya dan Pesona Wanita Cantik, Afrika dengan Wisata Adventure, Flora dan Fauna; Mesir dengan penari perut dan wisata monumental sejarah; India dengan Wisata Budaya; Paris dan Spanyol dengan wisata mode yang pesat; sementara Indonesia dikenal dengan wisata alam dan budaya yang unik dan masyarakat yang ramah.

Kesan-kesan sebagaimana di atas, oleh setiap daerah tujuan wisata perlu diterjernahkan lebih detil dan rinci berdasarkan kontek lokal yang bersifat kompetitive yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga melahirkan sebuah image yang secara realitas menggambarkan kondisi masyarakat, alam dan keanekaragamannya. Image ini sekaligus akan menimbulkan nilai kompetitif yang bila dioptimalkan dapat menjadi sebuah keunikan tersendiri yang tiada duanya. Ini juga menjadi potensi yang dapat dikemas menjadi daya tarik untuk menarik kedatangan turis berkunjung ke Indonesia pada umumnya dan Kalbar pada khususnya.

e. Harga Paket Wisata

Kunjungan wisata berkonsekuensi pada pengeluaran dan ini menjadi sebuah hukum yang berlaku secara global. Akan terdapat sejumlah pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh touris agar dapat menikmati paket wisata. Komponen biaya yang akan dikeluarkan antara lain adalah untuk mencakup biaya perjalanan, hotel dan restoran serta berbagai jasa atau layanan personal yang akan diterima oleh wisatawan. Kasus di beberapa tempat, seperti di Amerika Serikat (Harrison, 2001) dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata pedesaan dan memperkecil biaya paket wisata, wisatawan dapat memilih beberapa alternatif yang disediakan oleh pemerintah lokal, misalnya:

- 1). Menggunakan jalur universitas dimana disana terdapat berbagai pusat studi (PS) dan melalui PS tersebut diaturlah perjalanan wisata pedesaan. Distribusi pendapatan dilakukan oleh lembaga tersebut sesuai dengan paket yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2). Melalui pemerintah lokal yang kemudian menitipkan wisatawan ke rumah-rumah warga dan dengan jalinan yang terbentuk tersebut, wisatawan dibawa ke lokasi yang telah ditentukan atau dipilih wisatawan.
- 3). Secara langsung melalui hubungan personal ataupun travel agent yang secara konsisten menawarkan berbagai paket wisata.

Paket atau jalur apapun yang dipilih turis, pemerintah lokal mendapat pemberitahuan (dengan mengisi blngko isian yang telah dipersiapkan dan membayar sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah melalui agen wisata). Dengan demikian, turis secara otomatis berhak mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan tindakan kejahatan (penipuan, kekerasan atau penelantaran) dan kejadian yang tidak diinginkan (kecelakaan dan bencana lainnya).

3. Paket Wisata Yang Dapat Ditawarkan kepada Turis.

Dari pengalaman mendampingi turis asing berlibur di Kalimantan Barat, tampaknya terdapat persepsi yang tidak sama dalam memahami konteks berlibur antara turis asing dengan masyarakat Kalbar. Turis yang datang bersama keluarga mungkin tidak menghendaki suasana heboh, ramai, ada pertunjukan hingar-bingar musik jalanan dan lain-lain. Kadang-kadang, wisata yang mereka harapkan adalah suasana tenang (*quite*) yang memungkinkan mereka menikmati indahnya pantai, desiran ombak dan hangatnya sinar matahari atau mempelajari kultur dan hubungan antar etnis dan budaya masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa paket wisata yang dimaksud adalah disesuaikan dengan tujuan turis. Untuk itu, informasi detil mengenai paket wisata merupakan bagian yang paling penting bagi mereka sebelum memutuskan untuk memilih satu paket tertentu dan menolak paket yang lain.

Paket wisata sebagaimana dikemukakan oleh Evans et al (2003:29), selain mencakup konten wisata itu sendiri, ia juga paling tidak berhubungan dengan urusan transportasi dan akomodasi atau hal lain yang masih berkaitan dengan konten wisata. Paket wisata merupakan sebuah kombinasi pengaturan awal mengenai apa yang akan dijual (*konten*) atau diupayakan untuk dipertunjukkan dengan harga tertentu yang akan dikeluarkan oleh turis untuk dapat menikmati paket tersebut.

Oleh karena itu, paket wisata yang baik menurut Evans adalah memuat beberapa faktor seperti tingkat kemudahan menjangkau lokasi (aksesibilitas); suasana dan berbagai kemungkinan perubahan mengenai harga dan waktu penerbangan; kemudahan keluar dan masuk dari dan ke arena wisata; dampak bagi masyarakat dan juga bagi pelaku wisata; dan yang terakhir adalah pengaruh sosial pada masyarakat akibat budaya atau gaya hidup yang tidak sama dalam rangka memahami dan menghargai perbedaan.

Sementara Middleton dan Clarke (2001:125) menentukan paket wisata itu paling tidak berisi tentang Lima hal yang terkait langsung dengan aktivitas di tempat wisata. Kelima unsur yang harus ada dalam paket wisata adalah attraksi dan suasana di tempat wisata, fasilitas dan layanan di tempat wisata, aksesibilitas menuju tempat wisata, gambaran mengenai tempat atau daerah tujuan wisata dan harga yang harus dikeluarkan untuk menikmati paket wisata.

Dari dua pakar di atas, tampak bahwa paket wisata secara umum mengandung informasi akurat mengenai waktu penyelenggaraan, budaya dan attraksi yang akan ditampilkan, layanan atau fasilitas di tempat wisata, akses dan harga paket yang kesemuanya dikemas sedemikian rupa ke dalam sebuah paket informasi, termasuk syarat dan kondisi untuk menikmati paket dimaksud. Setelah paket tersebut jelas, barulah ia dapat didasarkan dan memilih saluran yang tepat agar menjadi efektif dan menghasilkan kunjungan wisata sesuai target yang dicanangkan.

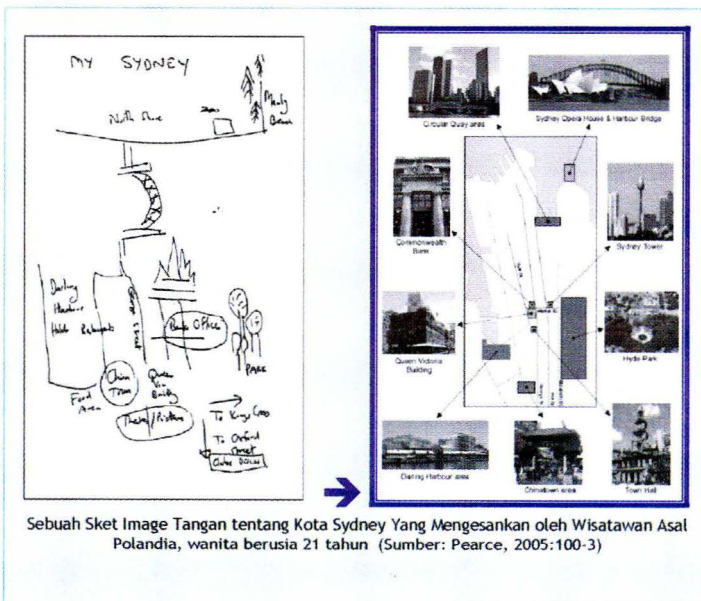
F. Pembentukan Jaringan Komunikasi Diantara Turis.

Kontak Sosial dan hubungan diantara turist terjadi setelah salah satu pihak memiliki pengalaman wisata dan pengalaman tersebut ingin ditularkan atau sebaliknya tidak ingin dialami oleh orang-orang terdekat mereka. Interaksi sosial semacam ini merupakan sebuah konsekwensi dari peran mantan turis sebagai pernain luar, sebagai orang luar dan sebagai pengamat dan partisipan dalam kehidupan masyarakat lokal. Gambaran atau persepsi yang akan diceritakan seorang mantan turis kepada orang-orang terdekat mereka merupakan buah dari layanan yang telah diberikan oleh sernua pihak yang telah berhubungan dengan turis seperti agen dan crew penyelenggara kepariwisataan daerah dan juga sebagai sebuah rekap pengalaman terhadap apa yang telah mereka rasakan selama melakukan perjalanan wisata.

Bilamana seorang turis telah melakukan perjalanan ke berbagai negara, maka akan tercipta referensi wisata yang komplit darinya

Secara umum, persepsi seorang turis dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif atau memiliki persepsi yang netral. Persepsi positif bilamana mereka memperoleh pengalaman dan layanan yang baik dan mendapatkan apa yang mereka cari atau sesuai dengan image yang telah terbentuk sebelum melakukan perjalanan wisata. Persepsi positif juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis turis itu sendiri dan kedekatan pihak pemandu dengan turis (Pearce, 2005:102). Dengan dasar ini, bilamana pemandu mampu melaksanakan tugas pemanduan secara baik, maka akan terbentuk kontak sosial yang akrab antara pemandu dengan turis dan itu dapat mengaburkan hal-hal yang kurang menyenangkan saat turis menemukan sesuatu yang kurang menyenangkan dan biasanya akan terobati setelah turis tersebut menemukan sesuatu di tempat lain dalam satu paket perjalanan.

Persepsi negatif terjadi bilamana pengalaman yang didapat turis tidak sesuai dengan image yang selama ini dibayangkannya.



Kekecewaan demi kekecewaan akan berlanjut bilamana selama perjalanan itu mereka tidak menemukan apa yang ingin didapatnya. Secara lengkap, Pearce (2005:115) merangkum persepsi turis sebagaimana disajikan dalam Tebl 9 berikut ini.

Dengan peta persepsi sebagaimana di atas, berbagai pihak diharapkan dapat membawa sikap dan berbuat yang baik saat bertemu dengan turis sehingga kesan yang bersifat negatif seperti suka usil, meremehkan, tidak bersahabat, mencari perhatian dengan melakukan tindakan yang konyol dan lain-lain tidak dilakukan.

Tabel 9 Berbagai Bentuk Persepsi Mantan Turis yang dapat ditularkan kepada Calon Turis, para kerabat dekat atau jaringan.

PERSEPSI MANTAN TURIS	TANGGAPAN TURIS LAIN/CALON TURIS	TINGKAH LAKU YANG AKAN DITAMPILKAN CALON TURIS
Persepsi Positif	Peluang Mendapatkan Sahabat	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan yang bersahabat • Belajar dari orang lain • Mempelajari budaya dan lokalitas
	Perjalanan yang Menyenangkan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari partner untuk melakukan kegiatan bersama • Bersosialisasi dan saling menyesuaikan dengan baik
	Siap Memberi Bantuan Saat Dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi sumber informasi • Mau share tentang biaya • Saling membantu
	Saling Menjaga Keselamatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut menjaga apa yang dimiliki bersama • Menghindari kontak yang tidak perlu atau yang kurang mengenakan
	Memperbaiki Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki suasana di tempat kunjungan • Menikmati suasana secara penuh • Mengingat tempat dan waktu yang paling berkesan

Sambungan dari tabel halaman sebelumnya ...

PERSEPSI MANTAN TURIS	TANGGAPAN TURIS LAIN/CALON TURIS	TINGKAH LAKU YANG AKAN DITAMPILKAN CALON TURIS
Persepsi Netral	Melihat panorama dan Membuat Perbandingan	<ul style="list-style-type: none"> Hanya ada di sini (lokalitas) Tidak terlalu mengganggu
Persepsi Negatif	Kesan Angker	<ul style="list-style-type: none"> Suasana yang tidak menyenangkan Sesuatu tidak berjalan fair / curiga
	Menimbulkan kesan tidak mengenakan	<ul style="list-style-type: none"> Sumber kebisingan, justru menambah ruwet, bukan refresh yang didapat Crowded (gerah, kacau dan padat) Tidak menjaga privacy dengan baik Sebagai penyebab konflik, terjadinya cultural shock atau tidak dapat memahami perbedaan dan kebutuhan satu sama lainnya.
	Masih ada pilihan lain	<ul style="list-style-type: none"> Akomodasi, harga tiket, suasana yang ditawarkan dan akses untuk menikmati wisata masih banyak pilihan (tidak merekomendasi untuk memilih destinasi).

Sumber: Pearce, 2005:115

G. Penutup

Aktivitas pariwisata merupakan sebuah fenomena global yang dilakukan oleh penduduk mulai pada tingkat local sampai global. Aktivitas kepariwisataan menjadi factor pendorong bagi memerintah dan pelaku bisnis kepariwisataan untuk melakukan pembenahan system sosial, produksi dan distribusi yang mengarah pada persaingan dan oleh karena itu ia menjadi salah satu model pembangunan berkelanjutan karena secara langsung memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat di daerah tujuan wisata. Ia juga menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat dan pernerintah untuk melakukan gerakan pelestarian ekosistem dan nilai budaya lokal (Amador, 2006:1).

Usaha menarik pariwisata tidak hanya dilakukan kepada orang luar (daerah lain dan luar negeri) tetapi juga terhadap penduduk lokal. Dalam kenyataannya, tidak ada perbedaan antara pengunjung dari luar negeri dengan penduduk domestik dan masyarakat lokal dalam menikmati layanan pariwisata. Namun, secara nasional dan global, jumlah kunjungan wisatawan luar negeri pada obyek wisata dalam negeri menjadi barometer bagi pengukuran keberhasilan industri pariwisata karena selain mendatangkan devisa kepada pemerintah, ia juga melibatkan berbagai bisnis dalam negeri dan menimbulkan efek multi ganda kepada masyarakat, mulai dari efek ekonomi sampai pada norma filosofis dan social budaya.

Agar pariwisata tidak dianggap sebagai biang kerok atau penyebab rusaknya tata nilai lokal, penularan berbagai penyakit kelamin, dan penyakit masyarakat lainnya, maka sistem pranata sosial pada masyarakat lokal perlu secara terus-menerus dibina oleh pemerintah melalui berbagai program sosialisasi dan pelatihan social sehingga kekebalan mental menjadi obat yang paling mujarab bagi masyarakat untuk tidak "*erkontaminasi*" oleh berbagai pengaruh yang mungkin menerpa masyarakat dari dasarnya arus wisata secara global pada tingkat lokal.

H. Daftar Pustaka

- Alt, James E dan K. Alec Chrystal. 1983. *Political Economics*. University of California Press. Berkeley.
- Amador, Edgar Allan. 2004. *Globalization, Ecotourism, and Development in the Monte Verde Zone, Costa Rica*. University of South Florida.
- Asian Development Bank. 2004. *Various Reports on Tourism Development in East and South Asia*. Diakses melalui <http://vwww.adb.or>
- Battani, Gabriella Dragoni. 2005. "Promoting Equity through Social Cohesion: The Council of Europe Strategy" dalam Gudrun Kochendorfer dan Boris Pleskovic (Edt.). *Equity and Development*. The Word Bank. Washington.
- Beckerson, John dan John K. Walton. 2005. "Selling Air: Marketing the Intangible at British Resort" dalam John K. Walton (Edt.). 2005. *History of Tourism: Representation, Identity and Conflict*. Channel View. Clevedon, Great Britain.
- Evans, Nigel, David Cambell dan George Stonehouse. 2003. *Strategic Management for Travel and Tourism*. Butterworth- Heinemann, Oxford.
- Frieden, Jeffery; Manuel Pastor Jr; dan Micheal Tomz (Edt.). 2000. *Modern Political Economy and Latin America: Theory and Policy*. Westview Press. Colorado.
- Hall, Derek; Irene Kirkpatrick dan Morag Mitchell. 2005. *Aspects of Tourism: Rural Tourism and Sustainable Business*. Channel View Publication. Clevedon, Buffalo - Toronto.
- Hargrover, Kathleen Charlie and Micheal H. Smith (Edt.) 2005. *The Natural Advantages of Nations: Business Opportunities International Governance in the 21-st Century*. Earthscan. London.
- Harrison, David (Edt.). 2001. *Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies*. Cabi Publishing. New York.
- Hopkin, Micheal. 2007. *Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business the Solution?*. Earthscan. London.

- Inter-American Development Bank. 2004. Various Reports on Tourism Development in Latin America, diakses melalui <http://www.iadb.org>
- Pettinger, Richard. 2001. Stress Management. Capstone, Oxford. London.
- Porter, Michael E. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press. New York.
- . 1990. The Competitive Advantages of The Nations. The Free Press. New York.
- Lippitt, Victor D. 2005. Capitalism. Routledge. London.
- Medlik, S. 2003. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality. Third edition. Butterworth Heinemann, Jordan Hill, Oxford
- McGehee, Nancy dan Fang Meng. 2006. "The Politics of Perception: Legislative Image of the Tourism Industry in Virginia and North Carolina" dalam Journal of Travel Research, Vol. 44, May 2006. pp 368 - 378
- Middleton, Victor dan Jackie R. Clarke. 2001. Marketing in Travel and Tourism. Third Edition. Butterworth Heinemann. London
- Miller, Mark M., Tony L. Henthorne and Babu P. George. 2008. "The Competitive of Cuban Tourism Industry in the Twenty-First Century: A Strategic Re-Evaluation" dalam Journal of Travel Research. Vol 46 Febr, 268-278. Sage Publication diakses dari .h.tti): <http://www.vitr.sagepub.com>
- Narayan, Deepa (Edt.). 2002. Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. The World Bank. Washington.
- OECD. 2003. The Future of Rural Policy: From Sectoral to Place-Based Policies in Rural Areas. Paris, Francis.
- Panayiotopoulos, Prodromos and Gavin Capps. 2001. London. World Development: An Introduction. Great Britain.
- Prizzia, Ross. 2007. "Sustainable Development in an International Perspective" dalam Thai, Khi Vi., Dianne Ramm and Jerre[[D. Cogburn. 2007. Handbook of Globalization and the Environment. CRC Press. London.
- Schnabel, Albrecht and Hans-Georg Ehrhart. 2005. Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding. LIN University Press. Tokyo. Japan.

Kerajaan Kalbar Sebagai Objek Wisata Sejarah Budaya

Oleh :M.Natsir¹

Pendahuluan

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian pembangunan nasional dan terkait dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu keberhasilan pariwisata turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan pengembangan pariwisata nasional sebagai sektor pembangunan yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperkenalkan alam, budaya dan sejarah memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Jika dibandingkan dunia kepariwisataan di Indonesia dengan dunia kepariwisataan di negara-negara Asean yang lain, diakui bahwa Indonesia pada saat ini masih jauh ketinggalan dalam menyerap arus wisatawan yang berdatangan ke kawasan Asia Pasifik (James J, Spilance 1987:69)². Dengan demikian Indonesia belum banyak memperoleh pemasukan devisa melalui sektor pariwisata guna menunjang pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, beraneka ragam keindahan alamnya dan didiami ratusan suku bangsa mempunyai potensi untuk dikembangkan terutama dalam bidang budaya dan sejarah.

¹ M.Natsir,S.Sos.,M.Si Pembantu Pimpinan pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.Staf Edukasi pada Isipol D3 Pariwisata Untan Telp. (0561) 778385. Hp. 085252070084

Email. natsir_ace @ yahoo.com.dan ace-informasibudaya.blogspot.com

² Yufiza Dra,Potensi dan Pengembangan Wisata di Kota Pontianak., Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2004, hlm.1

Pembangunan dibidang kepariwisataan perlu segera dilaksanakan, kepariwisataan dalam suatu produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa. Implimentasi lebih lanjut diatur dalam Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri³. Peraturan dan undang-undang yang telah ada sebaiknya diimplementasikan bagi daerah penyelenggara objek pariwisata. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan dapat berhasil dengan baik apabila masyarakat luas ikut mendukungnya dan berperan serta secara aktif sebagai salah satu faktor pendukung untuk memajukan kepariwisataan. Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai 146.807 km persegi, merupakan 7.53% dari wilayah Indonesia atau 1.13 kali pulau jawa, merupakan propinsi terluas keempat setelah Papua, Kaltim, dan Kalteng, secara geografis berbatasan dengan Serawak-Malaysia Timur.

Kalimantan Barat yang memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata akan tetapi mengapa sampai kini potensi yang begitu besar kurang dimanfaatkan, dilihat dari keadaan geografis, topografis, iklim, keadaan sosial budaya ekonomi dan sejarah kesultanan- kesultanan yang ada di Kalimantan Barat, Masyarakat yang multikultur dari berbagai suku yang ada, suku Dayak, Melayu, Thionghoa dan suku yang lainnya merupakan suku yang mempunyai beragam atraksi yang mampu untuk menjadi andalan pariwisata daerah ini maka wilayah Kalimantan Barat memiliki potensi pariwisata bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

³ I Putu Gelgel, SH., M. Hum, Indrustri Pariwisata Indonesia. Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hlm. 53

B. Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Kalbar

1. Kerajaan Tanjungpura

Kerajaan Tanjungpura yang terdapat di Kalimantan Barat, berkaitan dengan kerajaan yang ada di Jawa, disebutkan pula di Jawa terdapat dua agama yaitu hindu dan budha. Selanjutnya disebutkan bahwa Kerajaan Jawa pada saat itu mempunyai daerah bawahan meliputi : Pai Hua Yuan (pacitan), Ma Tung (Medang), Tan Pel (Tumapel), Hi Ning (Dieng), Jung La Yu (ujung galuh), Tung Ki (Papua), Ta Kang (sumba), Huang Ma Chu (papua Barat), Tan Jung Ho (Tanjungpura), Ti Wu (Timor), Ping Yai (Baggai, Sulawesi) dan Wu Nu Ku (Maluku).

Pengaruh Kerajaan Jenggala-Kediri ini kemudian berlangsung terus hingga kemudian pada tahun 1284 M dimana Kerajaan Tanjungpura kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Jawa yang lain yaitu Kerajaan Singasari yang juga berpusat di Jawa Timur. Penaklukan Kerajaan Tanjungpura ini lewat ekspedisi Pamalayu yang dimulai dari tahun 1275 M hingga 1290 M. Sejak itu Kerajaan Tanjungpura beralih menjadi dibawah pengaruh dari Kerajaan Singasari. Wilayah taklukkan Kerajaan Singasari di Borneo pada waktu itu membentang dari Kerajaan Tanjungpura hingga Kerajaan Banjarmasin.⁴

Raja di Kerajaan Tanjungpura disebutkan bahwa Prabu Jaya kawin dengan Ratu Junjung Buih menjadi Raja di Tanjungpura yaitu pada tahun 1450 M. Hal ini sesuai dengan tradisi lisan yang berkembang pada masyarakat ketapang yang menyebutkan bahwa seorang anak Raja Majapahit yang bernama Prabu Jaya kawin dengan Ratu Junjung buih. Dari perkawinan itu maka Prabu Jaya kemudian menjadi Raja di Kerajaan Tanjungpura ini.

⁴ Radin Muhammad Hamzah, Ir.,Rekonstruksi Berdiri dan Berkembangnya Kerajaan Tanjungpura-Sukadana-Matan. Brunai, 2007, hlm 71.

Dalam perkawinan ini keduanya telah diberkati tiga orang putera yaitu :

1. Pangeran Perabu yang bergelar Raja Baparung, diangkat sebagai pendiri kota kerajaan di Sukadana
2. Gusti Likar diangkat dan mendirikan kerajaan di Meliau
3. Pangeran Mancar diangkat menjadi kepala daerah di kerajaan Tayan.

Sementara mengenai nama Tanjungpura sendiri ada beberapa versi. Menurut A. Chalik Hasan pemberian nama Tanjungpura karena letak dari ibukota kerajaan itu di Tanjung Tikungan Sungai Pawan. Sedangkan Tanjung itu merupakan pintu gerbang dari kerajaan ini. Pendapat JU.Lontaan menyatakan bahwa setelah meninggalnya raja Baparung, naiklah menjadi raja puteranya yang bernama Karang Tanjung. Raja Karang Tanjung mempunyai kesenangan tidur-tiduran di atas daun bunga Tanjung. Menurut cerita rakyat putra mahkota tersebut mempunyai kesaktian, sehingga daun yang kecil-kecil tersebut bisa di tiduri. Maka oleh rakyat dijuluki Karang Tanjung. Rakyat sangat mengagumi raja Karang Tanjung hingga kemudian kerajaan yang diperintahnya menjadi kerajaan Tanjung yang lama-kelamaan menjadi kerajaan Tanjungpura.⁵

• **Peninggalan Kerajaan Tanjungpura di Kabupaten Ketapang**

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Barat. Sungai terpanjang sungai Pawan yang menghubungkan Kota Ketapang

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu daerah kerajaan Tanjungpura di Kalimantan Barat. Kejayaan kerajaan Tanjungpura

⁵ Nurcahyani,Lisyawati,Dra.Pendataan Sejarah Kerajaan Tanjungpura-Matan Di Kabupaten Ketapang, Laporan Penelitian Balai Kajian Jarahnitra Pontianak. Jakarta.2000. hal, 124.

pada abad ke XIV. Nama Tanjungpura menjadi salah satu universitas terbesar di Kalimantan Barat

Dari Pontianak menuju kota Ketapang dapat menggunakan sarana angkutan Darat : Via Rasau Jaya – Teluk Batang – Ketapang

- Motor air (Klotok) \pm 12 jam
- Speed Boat \pm 6 jam
- Ferry \pm 13 jam
- Pesawat jenis F. 27 \pm 90 menit
- Kapal Laut Jakarta – Ketapang \pm 2 hari 2 malam

- **Keraton Muliakarta (Gusti Muhammad Saunan)**

Negeri Baru kerajaan Tanjungpura berpindah ke Sukadana, kemudian ke Sungai Matan. Masa Raja Muhammad Zainudin sekitar tahun 1637 pindah ke Indra Laya, Sungai Pawan (kec Sandai), pindah ke Karta Pura, Tanah Merah (kec, Naga Tayab), ke desa Tanjungpura (Muliakarta) Keraton ini berfungsi juga sebagai museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah peninggalan raja-raja Matan

- **Komplek Makam Raja-Raja Matan**

Makam penembahan G.H.M. Sabran
Makam Pangeran Laksamana Matan
Makam Pangeran Ratu Mohd. Anom

- **Makam Keramat Tujuh Dan Keramat Sembilan**

Pada nisan Keramat Tujuh tertulis tahun 1363 saka atau 1441 Masehi. Nisan terbuat dari batu Andesit bertuliskan huruf Arab, dapat dipastikan makam seorang muslim. Tim Arkeologi Banjarmasin sudah melakukan penelitian di Kaltim, Kalsel, Kalteng maupun Kalbar. Nisan batu andesit di temukan di Jawa dan untuk yang pertama di Kalimantan

adalah di Ketapang dari bentuk nisan tersebut diperkirakan pada abad terakhir Majapahit.

- **Makam Tanjungpura, 35 km dari Kota Ketapang**

Makan para raja-raja Matan dari kerajaan Tanjungpura

2. Kerajaan Sukadana

Ada dua versi cerita rakyat yang masih dinyakini oleh masyarakatnya Pangeran Baparong adalah Brawijaya yang mengawini wanita setempat anak dari raja Tanjungpura, kemudian mereka memisahkan diri dan membangun Kerajaan di Sukadana. Karena Brawijaya sendiri asal usulnya memang masih keturunan raja, maka tidak sulit baginya untuk menjalankan pemerintahannya. Siapun pangeran Boporong yang disebut-sebut dalam beberapa sumber sejarah sebagai raja di Sukadana yang dapat memajukan dan merintis kerajaan Sukadana menjadi berkembang pesat baik dalam bidang politik maupun ekonomi (perdagangan). Terlepas dari siapa sebenarnya Pangeran Boporong itu ada banyak versi, namun sisi kesemuanya adalah Boporong salah satu raja yang besar yang pernah dimiliki Kerajaan Tanjungpura. Pada masa pemerintahannya, beliau melanjutkan kebijakan-kebijakan pendahulunya, dan semakin memperkuat jalinan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Mataram, Kutai dan lain-lain.⁶ Begitu juga dalam bidang perdagangan, hubungan dengan negara-negara seperti China, Coton dan Jazirah Arabia terjalin dengan baik.

Selain Raja Boporong, Raja Bandala merupakan salah satu raja yang berhasil dalam masa pemerintahannya. Berbagai sumber data khususnya dari Belanda menulis bahwa Kerajaan Sukadana masa ini telah melebarkan sayap kekuasaannya dan memajukan perdagangan.

⁶ Nurcahyani, Lisyawati, Dra, op.cit., hlm, 129

Pada masa pemerintahan Air Mala, selama 10 tahun beliau aktif pula dalam memajukan dan mengembangkan pemerintahan.⁷ Pada itu juga, Kerajaan Sukadana mendapat serangan dari Jawa. Dalam penyerangan itu Air Mala ditangkap dan dibawa ke Jawa. Penyerangan itu dipimpin oleh Patih Kendal. Sebab-sebab penyerangan belum dapat dipastikan, dikatakan penyerangan itu diakibatkan kesalahpahaman dari keluarga Datuk Mangku, suami Air Mala.⁸ Namun alasan-alasan ini belum dapat diterima, yang lebih dapat diterima sebab-sebab penyerangan itu adalah dalam buku yang ditulis oleh Soedarto dan kawan-kawan. Dalam buku itu dikatakan bahwa alasan penyerangan itu disebabkan karena Sultan Agung dari Mataram tidak senang hubungan yang terjalin antara Belanda dan Kerajaan Sukadana. Kedatangan Belanda pada tahun 1640 ke Sukadana bertujuan untuk membeli intan dari Landak. Tak lama kemudian datang pula bangsa Inggris dengan tujuan yang sama, malah akhirnya mendirikan kantor dagang di Sukadana. Dengan kedatangan bangsa Eropa ini menjadikan arus perdagangan di Sukadana bertambah maju. Hal ini membuat cemas Sultan Agung sehingga menurut pendapat beliau, hubungan Sukadana-Jawa harus diputuskan. Maka dikirimkan seorang Temenggung dari Kendal yang bernama Bahureksa untuk menyerang Kerajaan Sukadana pada tahun 1622, sehingga akhirnya Ratu Sukadana Air Mala dapat ditawan dan di bawa ke Jawa dan tidak pernah kembali.⁹

Setelah Ratu Air Mala meninggal dunia, berdasarkan pesan yang dibuat, jenazah Ratu dikembalikan ke Sukadana dan dimakamkan di desa Tambak rawang. Pertikaian yang tidak dapat dielakan antara kerajaan Sukadana dengan Kerajaan Landak ketika perebutan intan. Kerajaan Landak meminta bantuan Belanda dan kerajaan Sukadana meminta bantuan fihak Inggeris yang akhirnya kalah dan Sultan Zainudin melarikan diri ke kota Waringin meminta bantuan kepada orang Bugis

⁷ Ibid.

⁸ Ibrahim Bajuri, Akcaya, Selasa 6 Maret 1990.

⁹ Nurcahyani, Lisyawati, Dra, op.cit., hlm, 130.

dan berhasil merebut kembali dari tangan Landak¹⁰ Pertikaian kedua antara Sultan Zainuddin dengan adiknya Pangeran Agung yang melibatkan Opu Daeng Manambon dan saudara-saudaranya yaitu ;

1. Opu Daeng Merewah telah diangkat menjadi Raja Muda bergelar Yam Tuan Muda di Johor
2. Opu Daeng Perani kawin dengan Tengku Tengah saudara Sultan Johor
3. Opu Daeng Celak kawin dengan Tengku Sandak di Riau
4. Opu Daeng Kemasi kawin di Sambas dengan adik Raja Adil bernama Raden Tengah, sewaktu menuju Tanjungpura. Beliau bergelar Pangeran Mangku Bumi.

Perkawinan antara Sultan Zainuddin dengan puteri Raja Sengkauk yang bernama Inderawati, membuat hubungan Sukadana dan Mempawah menjadi semakin erat. Setelah menikah puteri Inderawati diberi gelar Ratu Emas Inderawati. Sultan Zainudin sebelum menikah dengan puteri Inderawati telah mempunyai isteri dari Dusun Air Upas mempunyai puteri 4 orang yaitu :

1. Puteri Kesumbah, bergelar Ratu Agung Sunuhun
2. Pangeran Ratu, bergelar Pangeran Ratu Agung
3. Pangeran Mangkurat
4. Pangeran Agung Kartadipura

Atas jasa Opu Daeng Manambon menyelamatkan orang tuanya maka Ratu Kesumbah menerima lamaran dan menurunkan raja-raja Mempawah. Putera-putera Sultan Zainuddin setelah ayahnya meninggal terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka sehingga menyebabkan kerajaan Sukadana pecah menjadi beberapa kerajaan :

1. Pangeran Mangkurat diangkat Sultan menggantikan ayahnya Sultan Zainuddin di Inderalaya (Sukadana)

¹⁰ Ibid

2. Pangeran Agung Martadipura diangkat Sultan di Kartapura (Tanah Merah)
3. Pangeran Ratu Agung menjadi Panembahan di Simpang bergelar Sultan Kamaluddin tahun 1735.¹¹

Setelah Sultan Mohammad Zainuddin wafat pada tahun 1717 dan dimakamkan di Desa Sandai Sukadana (Indralaya) diduduki oleh puteranya Pangeran Mangkurat yang bergelar Sultan Dirilaga. Pada tahun 1786 terjadi perang antara Sukadana dan Pontianak untuk memperebutkan peran perdagangan. Dalam peperangan tersebut Sukadana mengalami kekalahan, peranan Sukadana dilumpuhkan dengan ditutupnya pelabuhan dagang terbesar di Kalimantan Barat. Sultan Akhmad Kamaluddin segerah memindahkan pusat pemerintahannya dari Sukadana ke Matan membangun kerajaan baru yang diberi nama Tanjungpura¹²

- **Peninggalan Kerajaan Sukadana di Kabupaten Kayong Utara**

Sukadana dengan jarak 82 km, dari Kota Ketapang ditempuh selama 2 jam. Daerah yang sangat terkenal pada jaman dahulu. Menurut catatan situs London.com. Kerajaan Inggris pernah menduduki Sukadana pada tahun 1611. Belanda masuk di Sukadana diduga pada tahun 1617 dijamin Gubernur Jendral VOC Jan Pietersz. Coen.

- **Pelabuhan Sukadana (Pantai Pulau Dato)**

Pada abad 17 Sukadana menjadi pelabuhan jalur sutera perdagangan wilayah maritim pertemuan jalur perdagangan dari barat, timur dan utara baik perdagangan dari luar nusantara,

¹¹ Ibid.,hal 131

¹² Ibid.,hal 132

Eropa, Cina, Johor dan Brunai. Perdagangan dari nusantara, seperti Bugis, Melayu, Jawa, Banjarmasin, Riau dan Palembang. Hasil yang dijual pada saat itu adalah rempah-rempah, intan, kayu gaharu dan kerajinan berbagai bangsa, guci-guci dari Cina dll.

- Istana Keturunan Tengku Akil

Rumah milik Tengku Ismail keturunan ke 7 dari Tengku Akil. Menyimpan beberapa peninggalan antara lain genta kuningan (lonceng istana), menurut cerita suara dari lonceng tersebut bisa terdengar sampai radius lima kilometer. Pedang berhulu emas dengan perhiasan batu delima merah, jambrut legitimasi pedang ini sebagai tanda mahkota raja.

- Makam Raja-Raja Sukadana

Komplek makam raja-raja Sukadana di Kampung Dalam terdapat makam Tengku Akil yang wafat pada tahun 1845. Makam dengan ornamen keramik Cina sering dikunjungi masyarakat dari luar daerah. Terdapat banyak makam yang tulisan nisannya tidak dapat dibaca, terdiri dari kaum kerabat kerajaan Sukadana

- **Komplek Makam Panembahan Air Mala (Puteri dari Karang Tanjung di Desa Gunung Sembilan (Tambak Rawang)**
- Makam Tuk mangku (Suami Panembahan Air Mala) di Desa Pangkalan Buton

Benteng Belanda

Pemerintah Belanda mendirikan benteng dengan nama *Nieuw-Brussel* terletak sangat strategis menghadap kelaut pantai Sukadana, sebagai tempat pertahanan bagi tentara Belanda.

- **Kantor Belanda / Tangsi Militer**

Bagunan kantor Belanda dengan nama *Gezaghebber*. Terletak dilokasi Tanah Merah sebagai suatu daerah pengembangan dan pemukiman bangsa Eropa (Inggeris dan Belanda), dihalaman depan ada dua buah meriam. Bangunan yang kokoh dengan kondisi yang masih terawat. Tangsi militer bagunan tempat para prajurit Belanda. Kondisi bangunan sudah tidak memungkinkan untuk ditempati.

3. Kerajaan Matan

Akibat adanya pertikaian antara Kerajaan Landak dengan Kerajaan Sukadana pada masa Sultan Muhammad Zainuddin memindahkan pusat kerajaan dari Indralaya ke Padang (kota Tanjungpura sekarang). Atas bantuan Opu Daeng Manambon , akhirnya Sukadana dapat direbut kembali, tidak beberapa lama kemudian Sultan Zainuddin meninggal dunia, kerajaan diserahkan kepada anaknya yaitu Pangeran Mangkurat. Pangeran Mangkurat yang bergelar Dirilaga, dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Padang. Pada masa pemerintahan kamaluddin yang bergelar Sultan Muaziddin, juga dengan sebutan Almarhun Tiang Tiga berusaha mengembalikan kejayaan Tanjungpura seperti masa lalu. Sukadana yang pada masa itu diduduki oleh Belanda dengan nama *Niuew Brussels*, berusaha direbut kembali oleh Sultan.

Pengembangan agama Islam dan dengan dibantu seorang guru besar yang bernama Syech Maghribi. yang wafat di daerah tersebut dan dimakamkan di Padang desa Tanjungpura. Atas penghargaan masyarakat kepada Sultan Muaziddin maka beliau juga dikenal dengan sebutan Tiang Tiga yang mempunyai arti memiliki tiga jabatan kekuasaan yaitu:

- Sebagai Sultan Tanjungpura yang berpusat di Kota Padang;
- Sebagai Sultan Sukadana bekas jajahan Belanda yang berhasil direbut;

- Benua Lama sebagai tempat asal Kerajaan Tanjungpura didirikan dengan nama Negeri Baru (sekarang menjadi Negeri Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan).

Untuk mengembangkan kejayaan kerajaan Tanjungpura banyak hal yang telah dilakukan oleh raja Matan. Namun hal ini tidaklah mudah sebab selalu mendapat halangan dari Belanda. Pernah dalam tahun 1822, rombongan Belanda yang dipimpin C. Muller datang ke Matan untuk menguasai Kerajaan Matan. Dua ultimatum dikeluarkan oleh Belanda yaitu perundingan dengan raja dan yang kedua dengan cara kekerasan. Akhirnya jalan kedua yang dilakukan oleh Belanda untuk menguasai Kerajaan Matan. Dengan menyerahnya Sultan kepada Belanda, membuat Pangeran Cakra marah, sehingga beliau meninggalkan Matan menuju Kendawangan sedangkan Pangeran jaya berangkat ke Tanah Pinoh, Nanga Tayap dan sampai ke Sanggau. Pangeran Tumenggung adik Sultan Muaziddin menyingkir ke Nanga Tayap.¹³

Kerajaan Matan diperintah oleh Sultan Zainuddin II yang bergelar Iradilaga. Dalam masa pemerintahannya Sultan Zainuddin II mempunyai peranan penting dalam pengembangan agama Islam sehingga mencapai puncak kehebatannya masa penggantinya. Di dalam Kerajaan Tanjungpura memberlakukan hukum Agama Islam bagi pemerintah dan rakyatnya. Sehingga peranan Ulama Islam sangat dominan di sini, mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan, pendidikan dan pengajaran agama Islam.¹⁴ Hukum Syara benar-benar dilaksanakan di mana yang mencuri akan dipotong tangannya. Seluruh rakyat diundang untuk menyaksikan jalannya hukuman dengan maksud agar rakyat dapat mengambil hikmahnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

¹³ Ibid., hal, 136

¹⁴ Ibid.

Sementara itu dalam bidang pertahanan dan keamanan Tanjungpura memiliki armada angkatan laut yang kuat. Hal ini terbukti pada saat terjadi penyerangan ke Sekadau, dipimpin langsung oleh Pangeran Ratu Kesuma Anom yang menguasai ilmu perang. Begitu juga Pangeran Adi memimpin pasukan menyerang Kendawangan dan memperoleh kemenangan dengan cara damai yaitu dengan jalan perkawinan. Masa Sepeninggal Sultan Zainuddin II, Pangeran Sabran dinobatkan menjadi raja Kerajaan Tanjungpura tahun 1845-1924. pusat ibukota dipindahkan lagi oleh Pangeran Sabran ke Muliakerta Kecamatan Matan Hilir Selatan sekarang. Pangeran Sabran bergelar Panembahan Gusti Muhammad Sabran berputrakan Gusti Muhammad Busrah. Sebelum menjadi raja Gusti Muhammad Busrah meninggal dunia. Sehingga digantikan oleh cucunya yang bernama Gusti Muhammad Saunan sebagai raja di Muliakerta

Pada tahun 1922 M Ketika Gusti Muhammad Saunan diangkat menjadi raja dan setelah 19 tahun memerintah pasukan Jepang datang ke Matan. Menjemput Beliau sehingga tidak ada kabar beritanya dan Beliau tidak meninggalkan keturunan untuk mewarisi kerajaan yang dipimpinnya.¹⁵ Dari tradisi masyarakat yang berkembang bahwa ketika pada masa pemerintahan Gusti Muhammad Sabran sering kali terjadi bajak laut kemudian panembahan Matan membentuk angkatan laut dengan panglimanya Hamzah bin Daud yang disebutkan masih keturunan Brunai. Panembahan Matan juga meminta bantuan dengan kesultanan Pontianak sehingga dikirimlah panglima bernama Encik Walid dan Encik Kamis yang meninggalkan keturunan di kampung Padang dan Kampung Tuan-tuan di Kota Ketapang.

¹⁵ Ibid.,hal 137

4. Kerajaan Simpang

Kerajaan yang didirikan itu dimulai dari kuala Kandang Kerbau dan berpindah ke Sukadana, dari Sukadana kemudian dilanjutkan oleh raja Akil dari Siak Indragiri, Kerajaan Tanjungpura tetap berjalan terus dambil berpindah lokasi. Akibat dari perkembangan keturunan, maka Kerajaan Tanjungpura terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kakak beradik putra Sultan Zainuddin, sehingga Kerajaan Tanjungpura dibagi. Putra mahkota yaitu Pangeran Ratu Agung diberikan wilayah utara dan membangun kota kerajaan baru yang bernama Kerajaan Simpang. Sedangkan Kerajaan Tanjungpura sendiri masih tetap berdiri dengan perubahan nama menjadi Kerajaan Matan yang diperintah oleh Panembahan Busrah dan memindahkan ibukota pemerintahan ke Kerta Mulia.

Kerajaan Simpang didirikan pertama kali oleh Panembahan Ratu Agung pada tahun 1735 dan secara otomatis sebagai raja pertama yang memerintah Kerajaan Simpang adalah Panembahan Ratu Agung. Beliau memerintah sampai dengan tahun 1824 dan pada masa pemerintahan Panembahan Ratu Agung, kerajaan selalu dalam keadaan damai dan aman. Dalam pertumbuhannya kerajaan-kerajaan yang didirikan itu juga mengalami pergantian nama menjadi Matan atau Sukadana tergantung kedudukan raja yang sedang berkuasa saat itu. Pada tahun 1828 Raja Matan yang bernama Sultan Muhammad Kamaluddin diusir oleh pemerintah Belanda karena dianggap melindungi para bajak laut. Sebagai gantinya maka pada tahun 1829 Belanda menetapkan Raja Akil dari Siak Indragiri bergelar Sultan Abdul Jalil Syah berkedudukan di Sukadana yang kemudian berubah nama menjadi *Niuew Brusel*.¹⁶ Pada masa pemerintahan raja Akil wilayah kekuasaannya hanya terbatas di Sukadana sedangkan Matan dikuasai Pangeran Adimangkurat seorang menantu dari Sultan Matan yang lama

¹⁶ Sulistyorini Pembayun, Sejarah Berdirinya Kerajaan Simpang, Dalam Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan. Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Pontianak. Hal, 133

dengan memakai gelar Panembahan Anom Kesumanegara. Panembahan itu tidak mengakui pemerintahan Raja Akil. Pada tanggal 24 April 1837 pemerintah Belanda memutuskan untuk membuat kontrak baru dengan Raja Akil. Dalam kontrak itu dinyatakan bahwa *Nieuw Brussel* terdiri atas Sukadana dan Simpang sedangkan Matan merupakan kerajaan yang berdiri sendiri. Pada tanggal 21 Juni 1843 Raja Akil meninggal dunia. Oleh karena itu Panembahan Matan dan Simpang menuntut hak-hak mereka, sehingga pada tanggal 1 September 1845 *Nieuw Brussel* dibubarkan. Kemudian Kerajaan Matan, Sukadana, Simpang berada di bawah perintah seorang *gezaghebber* Belanda dan kedudukan ketiga kerajaan itu terpisah dan membuat kontrak sendiri-sendiri dengan Belanda. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973 : CI-CII)

Kerajaan Simpang setelah *Nieuw Brussel* dihapus pada tanggal 1 September 1845, maka Simpang berdiri menjadi kerajaan sendiri dan membuat kontrak sendiri dengan pemerintah Belanda. Kontrak itu dibuat pada tanggal 30 September 1845 yang mengakui sebagai Raja Simpang adalah Gusti Asma dan bergelar Panembahan Kesumaningrat. Pada masa kerajaan dibawah Gusti Panji yang bergelar penembahan Gusti Panji. Kerajaan Simpang Tua didirikan di Kampung Mungguk Jering Kecamatan Simang Hilir. Mengenai kapan didirikan tidak ada sumber yang pasti namun dari informasi bahwa kerajaan Simpang Tua adalah penembahan Gusti Panji.

Kemudian penembahan Gusti Panji diturunkan dari jabatannya sebagai Raja Simpang Tua dan digantikan oleh adiknya Gusti Muhammad Rum menjadi raja menggantikan Panembahan Gusti Panji yang memerintah dari tahun 1917 sampai dengan tahun 1942. Pada masa pemerintahan Panembahan Gusti Muhammad Rum inilah pusat pemerintahan Kerajaan Simpang dipindahkan di Desa Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir. Panembahan Gusti Muhammad Rum berakhir setelah dibawa ke Mandor oleh pemerintah Jepang. Sebagai pengganti raja maka diangkatlah adik Gusti Muhammad Rum yang

bernama Gusti Mesir untuk memangku jabatan sebagai raja di Kerajaan Simpang Hilir dengan gelar Panembahan dengan masa pemerintahan dari tahun 1942 sampai 1943 . tanggal 23 April 1943 semua raja-raja di Kalimantan Barat ditangkap dan ditahan di markas *keibitai*. Raja-raja yang ditangkap sejak tanggal 23 April 1943 semua telah dibunuh dan dimakamkan di suatu tempat yang tempat itu dirahasiakan sampai sekarang. Termasuk salah satu raja yang ditangkap dan dibunuh oleh Jepang adalah panembahan Gusti Mesir (Rivai, 1991:57).¹⁷

- Peningalan Kerajaan Simpang
- Wayang Kulit

Wayang kulit menurut menurut salah seorang “dukun” yang bernama Dalang Kunang bahwa wayang kulit pertama kali dikenal masyarakat Simpang sejak berdirinya kerajaan Simpang dan dikatakan bahwa wayang kulit itu berasal dari pulau jawa yang dibawa oleh salah seorang Putera Raja Majapahit yaitu dari perkawinan antara Damarwulan dan Puteri Kencana Ungu yang bernama Brawijaya bersama dengan patihnya Gelagendir (Patih Logender) dan Baggi pada waktu itu merantau ke Kalimantan. Di Kerajaan Simpang biasanya cerita yang dimainkan oleh dalang dalam perkawinan dan keselamatan : Tunggul Ulung, serita dari Kediri seperti Galuh Candra Kirana/Raden Panji. Gandang Purwangi, Buah Teberanang, Kijang Long dan sebagainya (Moelia,1967:11-12). Jenis wayang kulit itu kurang lebih 80 macam kebanyakan bentuknya masih asli dari tanah jawa.¹⁸

- **Makam-Makam Raja Simpang**

Kerajaan Simpang mengalami beberapa kali perpindahan sehingga letak makam para raja ada yang di Kerajaan Simpang Hilir Tua dan Kerajaan di Simpang Hilir berada di Telok Melano.

¹⁷ Ibid, hal 145

¹⁸ Ibid, hal 149

- **Makam Panembahan Gusti Panji**

Makam di Kampung Munggu Jering Kecamatan Simpang Hilir, jalur yang digunakan menyelusuri Sungai Simpang dengan memakan waktu satu setengah jam, setelah itu berjalan sekitar 50 meter dan sampailah kepemakaman.

- **Makam Panembahan Gusti Makhmud**

Makam yang terletak tidak jauh dari terminal Telok Melano lebih kurang 50 meter

- **Keraton Simpang Hilir**

Keraton Simpang Hilir didirikan pada tahun 1921 dan berfungsi sebagai tempat tinggal raja beserta keluarga serta tempat berlangsungnya pertemuan antara raja dengan para pembesar kerajaan namun dalam perkembangannya. Keraton Simpang Hilir mengalami perubahan karena tidak lagi sebagai tempat tinggal raja tetapi berubah fungsi menjadi Kantor Pos.¹⁹

- **Meriam Bujang Koreng**

Meriam yang merupakan hadiah dari Raja Bathin Satia Pahlawan dari Kerajaan Karimata yang diberikan kepada Raja Simpang yaitu Panembahan Gusti Roem sewaktu akan meninggalkan Karimata dan menuju ke kota pusat Kerajaan Simpang.²⁰

5. Kerajaan Kubu

Kesultanan Kubu yang dikenal diantara kerajaan yang ada di Kalbar mempunyai nama besar Al-Idrus adalah gelar marga dari Bani Alawi yang bermakna "*keturunan Alawi*". Alawi adalah cucu Ahmad bin Isa yang dilahirkan di Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir, nasab Bani Alawi turunan dari Sayyidul Al-Husain ra, keturunan nabi Muhammad saw, telah meninggalkan Basrah di Iraq bersama keluarga

¹⁹ Ibid, hal 151-154

²⁰ Ibid, hal 151-154

dan pengikut-pengikutnya pada tahun 317H/929M untuk berhijrah di Hadramaut di Yaman Selatan.

Sayyid Idrus bin Sayyid Abdulrrahman Al-Idrus. Lahir malam kamis 17 Ramadhan 1144 H atau sekitar 1732 Masehi di kampung Riyadh Terim (Hadr al maut), mulai membuka perkampungan baru tahun 1775 Masehi. Pada tahun 1780 Masehi (1199 H) baru dengan resminya bergelar Tuan Besar raja Kubu.²¹ Catatan sejarah bahwa Beliau pernah singgah di Batavia bersama Al-Habib Husain bin Abubakar Al-Idrus (Makam Keramat Luar Batang, Jakarta Utara). Tuan Besar Kubu (1772-1795). Syarif Idrus Al-Idrus kawin dengan H.H. Pangeran Ratu Kimas Sri Susuhanan Mahmud Badaruddin I Jayawikrama Candiwalang Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman, Sultan Of Palembang pada tahun 1747 Wafat pada tahun 1795.²² (Datangnya bangsa Belanda di Indonesia mempunyai pengaruh yang luar biasa dengan sewenangny pemerintah Belanda menurunkan Syarif Abbas Al-Idrus (1800 – 1911) dari jabatan Tuan Besar Kesultanan Kubu. Penurunan ini atas dukungan sepupuhnya, Syarif Zainal Al-Idrus ketika terjadi perebutan jabatan Sultan pada tahun 1911 – 1921. Syarif Zainal Al-Idrus yang dilahirkan pada tahun 1851, dilantik menjadi Tuan Besar Kesultanan Kubu pada 15 Januari 1912. Menyerahkan wewenang Kesultanan kepada Dewan Kabupaten pada 1919. Di turun tahtakan tanpa adanya pilihan pengganti pada 11 April 1921. Delapan tahun kemudian, tidak adanya pewaris tahta baru, selama kurun waktu hanyalah “Pelaksana sementara” (*temporary ruler*).

Syarif Shaleh di lahirkan pada tahun 1881. dikenal sebagai pelaksana sementara kesultanan, pada September 1921. Di lantik menjadi Tuan Besar Kubu pada 7 Februari 1922 ditangkap oleh Jepang pada 23 November 1943 dan dibunuh Jepang pada 28 Juni 1944. Beliau menjadi Tuan Besar Kubu tahun 1921 – 1943 mendapat kehormatan dari pemberian wewenang sebagai sultan akan tetapi

²¹ Yosep Setiawan . Makalah Sejarah Kerajaan Kubu 1995

²² Wikipedia Indonesia Kesultanan Kubu, Down load, hal 1. 6/8/07

tertahan saat kedatangan tentara Jepang di Mandor pada tahun 1943. Dewan kesultanan dan keluarga bangsawan tak semudah menyetujui penganti Syarif Shaleh, pemerintah Minsebu (Pemerintah Jepang di Kalimantan Barat di tahun 1945 tidak punya waktu untuk mengisi kekosongan tahta kerajaan Kubu setelah Syarif Shaleh Al-Idrus terbunuh. Jepangpun menyerahkan persoalan pengantian itu kepada Dewan Kerajaan yang anggotanya terdiri dari kaum kerabat raja dan pembesar-pembesar tinggi kerajaan . Atas usul dan pendapat Dewan Kerajaan, Jepang merencanakan menetapkan Syarif Hasan sebagai pemangku jabatan raja; rencana ini tidak terlaksana karena Jepang meninggalkan Indonesia.²³

Setelah Jepang meninggalkan Indonesia akibat kekalahan tentara Jepang melawan Sekutu dalam perang Asia Timur Raya bangsa Indonesia masih harus menghadapi orang-orang Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Orang Belanda yang tergabung dalam *Nederland India Civil Administration* (NICA) datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan Sekutu yang akan melujuti persenjataan tentara Jepang²⁴. Pada tanggal 29 September 1945 tentara Australia sebagai perwakilan pasukan Sekutu mendarat di Pontianak. Residen Asikin Nur menyerahkan kekuasaannya kepada Van Der Zwaal dari NICA..Kalbar dibentuk menurut ordonasi 22 Oktober 1946 mempersatukan diri dengan kedua belas *zelfbestuur* yang sejak dahulu terdapat dikalbar menjadi satu federasi kekuasaan terpenting yang terletak dalam tangan *zelfbestuur* diserahkan kepada Dewan Kalimantan. Kedudukan istimewa daerah Kalimantan Barat (DIKB) ditetapkan dalam satu dokumen oleh komisi jenderal yang mewakili pemerintahan Belanda., dokumen tersebut ditandatangani komisi jenderal tersebut dan oleh ketua dan para wakil Dewan Kalimantan

²³ Wawancara Soedarto 2008

²³ Purba Juniar, Dra. Dokter Soedarso, Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Pontianak, 1992

²⁴ Ibid

Barat. (*Statuut Kalbar tertanggal 12 Mei 1947*) Statuut ini dicatat dalam *Staat blad* 1948 No.58²⁵.

Dr. Van Mook membentuk banyak negara baru yang bertentangan dengan persetujuan Linggarjati dan Renville. Awal April 1948 Pemerintah Belanda telah mengumumkan susunan dewan-dewan perwakilan negara-negara dan daerah-daerah buatan Van Mook yang telah selesai, sedangkan diwaktu linggarjati yang ada hanya baru NIT²⁶. Dewan Kalimantan Barat beranggotakan 40 orang, 22 dipilih (15 bangsa Indonesia dan 7 Cina), 15 ditunjuk oleh *Zelfbestuur*, 2 orang Belanda serta seorang dari golongan kecil yang diangkat oleh Kepala Daerah

Konsolidasi di Kalbar dilakukan oleh Belanda tgl, 15 Maret 1948 dilakukan pemilihan untuk daerah Kalbar yang harus dipilih 8 suku Dayak, 7 suku Indonesia, 7 Cina. Pada tgl, 12 Mei 1948 dilakukan reorganisasi Dewan Kalbar Dewan Pemerintah terdiri atas ²⁷:

1. M.W. Nieuwenhuisen, J.C. Oevang Oeray Lim Bak Meng A.F. Korak Mohamad Saleh

Zelfbestuurs yang dengan sendirinya menjadi anggota Dewan adalah :

2. R. Abubakar Panji Anom, Tengku Mohamad, Ade Moh.Johan ,Gusti Mustaan Gusti Koleh, Gusti Ismail, Gusti Mohamad Thaufik, Gusti Aplah, Amran Salim, Syarif Hasan, Gusti Makhmud, Hasan Adenan, Abang Bakri

Anggota lainnya adalah :

3. 1 I.A.Kaping, F.C. Palaunsuka, M.Linggi, P.Denggok, M.Jaman, P.F. Banteng, Haji Sudhi, Uray Ibrahim, N.Winokan, Mansyur Rivai, Mohamad Bakri, M.Taib, Mas Syahdan, Lim Liat Nyan, Bong Chun Fat, Sim Tek Hui, Cung Ling Sen, Tio Kiang Sun,

²⁵ Nasution. AH DR. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7 Periode Renville. Disjarah-Ad.,1978 hal 98

²⁶ Ibid, hal 86.

²⁷ Ibid, hal 269

Ng.Ciauw Hien, F. Brandenburg van der grooden, Gulam Abas bin Abdulhusin.

Kedatangan bangsa Belanda yang membonceng NICA maka eksistensi Syarif Hasan Bin Zein Al-Idrus (masuk dalam dua belas *zelfbestuur*). Stantsblad 1946 no. 17 daerah yang tidak termasuk *zelfbestuur* dapat diberi kedudukan yang sama dengan daerah *zelfbestuur* oleh letnan Gubernur Jenderal dinamakan *neo-zelfbestuur*. Kalbar dibentuk menurut ordonasi 22 Oktober 1946 mempersatukan diri kedua belas *zelbestuur* yang sejak dahulu telah terdapat di Kalbar menjadi satu federasi., sehingga wilayah Kerajaan Kubu yang menjadi tanggungjawab Sy Hasan bin Zein Al -Idrus diakui oleh Belanda, ia ikut menandatangani *Zelfbestuurders*. Pada tanggal 12 Mei 1948 yang dilakukan reorganisasi Dewan Kalimantan Barat.

Syarif Hasan bin Zein Al-Idrus baru menerima pengesahan sebagai pemimpin kesultanan Tuan Besar Kubu dan terpilih sebagai *head of the self-governing monarchy* (pemimpin kerajaan pada 16 Agustus 1949²⁸. Pada tanggal 5 April 1950 Sultan Hamid II masih bersatus sebagai Menteri Negara RIS ditangkap dengan tertangkapnya Sultan Hamid II maka DIKB (Daerah Istimewah Kalimantan Barat) dan kerajaan-kerajaan Swapraja yang ada di Kalimantan Barat dinyatakan bubar. Kalimantan Barat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

6. Kerajaan Sambas

Hubungan sejarah tentang asal usul kerajaan Brunei Darussalam dengan kerajaan Sambas mempunyai latar belakang persaudaraan yang terjalin dengan baik jauh sebelumnya di kenal sampai sekarang. Keturunan yang kesembilan Sultan Abdul Jalil Akbar. Beliau

²⁸ Kesultanan Kubu Wikipedia Indonesia hal 2. Donw load 6/8/2007

²⁹ Purba Juniar.Dra. Oevang Oeray.Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 1997

mempunyai anak bernama Sultan Raja Tengah. Raja Tengah yang datang Kerajaan Tanjungpura. dengan prilaku yang baik beliau sangat dihormati. Raja Tanjungpura mengawinkan anaknya yang bernama Ratu Surya, dari perkawinan ini terlahirlah Raden Sulaiman. Kerajaan Sambas saat itu di pimpin Ratu Sepudak dengan pusat pemerintahannya di Kota Lama kecamatan Teluk Keramat sekitar 36 km dari kota Sambas. Raja Sambas dikaruniai dua orang putri. Yang tertua dikawinkan dengan keponakan Ratu yang bernama Raden Prabu Kencana dan ditetapkan menjadi penggantinya. Kedatangan Raja Tengah beserta rombongannya di Sambas, diterima dengan baik rakyat Sambas dan bersimpatik sehingga banyak pengikutnya dan memeluk agama Islam.

Kerajaan Sambas yang dipimpin Ratu Sepudak wafat. Digantikan oleh menantunya Raden Prabu Kencana dengan gelar Ratu Anom Kesuma Yudha. Putri kedua ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu Bungsu dikawinkan dengan Raden Sulaiman (putra sulung Raja Tengah). Perkawinan ini dikaruniai seorang putra bernama Raden Bima. Raden Sulaiman ditunjuk sebagai wasir yang khusus mengurus dalam dan luar negeri dan dibantu oleh menteri-menteri serta petinggi lainnya. Raden Sulaiman meninggalkan kerajaan menuju daerah baru Kota Bandir dan Ratu Anom Kesuma Yudha berangkat melalui sungai Selakau, kemudian agak ke Hulu dan mendirikan kota dengan ibukota pemerintahan yang baru bernama Kota Balai Pinang.³⁰

Kerajaan Sambas berakhir di Kota Bandir dan mendirikan pemerintahan yang baru di Lubuk Madung, daerah persimpangan anak sungai : sungai Sambas kecil, Sungai Subah dan Sungai Teberau yang disebut "Muara Ulakan". Kemudian mendirikan kerajaan dan keraton Sambas. Raden Sulaiman dinobatkan menjadi Sultan pertama kerajaan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syaefuddin I. Beberapa saudaranya, raden Badaruddin bergelar Pangeran Bendahara Sri

³⁰ Budi Rahman, Borneo Tribun Sambas, 27 Des 2007

Maharaja dan Raden Abdul Wahab bergelar Pangeran Temenggung Jaya Kesuma. Raden Bima (anak Raden Sulaiman) pergi ke Sukadana dan kawin dengan puteri Raja Tanjugapura bernama Puteri Indra Kesuma (adik Bungsu Sultan Zainuddin) dan dikaruniai seorang putera diberi nama Raden Meliau, Raden Bima dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin dan dilanjutkan Raden Meliau dengan gelar Sultan Umar Aqamaddin I

Putra Sultan Umar Aqamaddin naik tahta dengan gelar sultan Abubakar Kamaluddin kemudian diganti, Raden Jama bergelar Sultan Umar Aqamaddin II kemudian Raden Gayung bergelar Sultan Muda Ahmad, kemudian digantikan, Raden Mantri bergelar Sultan Abubakar Tajuddin I, Raden Sumba bergelar Sultan Usman Kamaluddin, dilanjutkan oleh Sultan Umar Aqamaddin III setelah wafat diangkatlah putra mahkota Raden Ishak dengan gelar Sultan Abu Bakar Tajuddin II. kemudian diangkat menjadi sultan Raden Toko bergelar Sultan Umar Kamaluddin, kemudian Raden Afifuddin bergelar sultan Muhammad Tsyafiuddin II, Raden Muhammad Aryadiningrat bergelar Sultan Muhammad Ali Tsyafiuddin II, Dan seterusnya digantikan dengan Muhammad Mulia Ibrahim bergelar Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsyafiuddin, memerintah 2 Mei 1931- 1943 M. sampai berakhir hingga beliau di jemput oleh Jepang pada peristiwa Mandor Kalimantan Barat³¹

Peninggalan Kerajaan Sambas

Jarak Kabupaten Sambas dengan Kota Pontianak lebih kurang 220 km. Peninggalan sejarah dan budaya yang masih dapat dilihat sampai saat ini adalah peninggalan keraton Sambas, makam para raja-raja, upacara budaya Melayu dan kesenian masyarakat antara lain ;

³¹ Pangeran Ratu H. Winata Kesuma., Istana Alwatzikhoebillah Tempo Dulu Dan Sekarang. Majelis Adat Istiadat Istana Alwatzikhoebillah Sambas. 2005, hal 7

- **Istana Sambas**

Peninggalan Sultan Sambas yang ke 15 yaitu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin sultan yang terakhir memerintah kerajaan Sambas 1931-1943. Istana dengan gaya Eropa dan Cina mempunyai luas 16.781 m dibangun pada tahun 1933 dan selesai tahun 1935 biaya bangunan istana ini sebesar 65.000,- Gulden, berasal dari bantuan kredit Sultan Kutai Kartanegara terletak tepat dipertemuan tiga Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah dan sungai Teberau. Di depan pintu gerbang bagian atas istana terdapat tulisan "*Alwatzikhoebillah*" Merupakan falsafah kerajaan yang bermakna Berpegang teguh dengan tali Allah diatas tulisan terdapat Simbol Kerajaan yang diberi nama Elang Laut.³²

- **Masjid Jami Sultan Muhammad Tsyafiuddin**

Masjid dibangun Sultan Sambas yang ke -13 pada tanggal 1 Oktober 1885 yaitu Sultan Muhammad Tsafiuddin II memerintah kerajaan Sambas (1886-1922) Masjid dibangun oleh baginda sultan bersama-sama ibundanya Ratu Sabar.

- **Makam Raja-Raja Sambas**

Makam seluas 79X 34,7 M. terdapat makam para raja-raja kerajaan Sambas antara lain :

- Makam Sultan Abubakar Tajuddin, Sultan Muhammad Syaifuddin II
- Kerajinan Songket Sambas yang sangat terkenal dengan kain dengan selendangnya biasanya kain songket ini digunakan untuk menyambut tamu agung dan upacara adat.
- Aneka budaya melayu salah satunya upacara Antar Jung keselamatan bagi para nelayan. Lomba perahu Finisi dan Tanjidor.

³² Ibid, hal 9

7. Kerajaan Landak

Nama kerajaan Landak (yang disebut juga Landa) muncul sejak kerajaan ini disebut-sebut dalam Negara Kertagama dalam tahun 1365 yang ditulis oleh Epu Prapanca di masa pemerintahan raja Hayam Wuruk Rajasanegara yang memerintah di kerajaan Majapahit. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tanjungpura yang dituliskan Prapanca sejumlah 21 kerajaan. Dari 21 kerajaan itu, 18 diantaranya terdapat di Kalimantan. Salah satunya adalah kerajaan Landak. Berawal dari salah seorang bangsawan dari Singasari yang menuju ke Pulau Kalimantan yang membuka pusat pemerintahan awal kerajaan Landak dikenal sebagai Nigrat Batur atau Angrat Batur, kemudian turun temurun bangsawan dari Singasari yang kemudian dikenal sebagai Ratu Sang Nata Pali I memerintahkan kerajaan Landak hingga pemerintahan Ratu Sang Nata Pulang Pali VII.

Raden Iswaramahayana, Raden Ismahayana atau yang dikenal dengan nama Abdul Kahar adalah anak dari Ratu Sang Nata Pulang Pali VII dengan Ratu Permaisuri Dara Hitam. Setelah Pulang Pali VII mangkat, maka naik tahtalah Raden Iswaramahayana. Di atas tahta Kerajaan ia kemudian bergelar Raja Adipati Karang Tanjung Tua (1472). Setelah memerintahkan kerajaan Landak yang semula di Angrat Batur atau Ningrat Batur Sekilap Sepatah (1292-1472). Ke lokasi yang baru yaitu di kaki bukit yang berhadapan dengan sungai Menyuke percabangan sungai Tenganap atau sungai Landak. Setelah kemudian berkembang sebagai ibukota Kerajaan Landak, yang juga dikenal dengan Kota Ayu atau Munggu, yang kini lokasi tempat makam Raden Abdul Kahar.

Persaudaraan antara Raden Abdul Kahar dengan keluarga turun temurun dari ibunya Putri Dara Hitam dengan Aria Sinir yang dikenal sebagai orang Darat (Dayak), sedang perjodohan antara Dara Hitam dan Ratu Sang Nata Pulang Pali VII sebagai orang laut (Melayu). Di Bawah pemerintahan Raja Adipati karang Tanjung Tua Raden

Iswaramahayana (1472-1542), agama Islam masuk dan berkembang pesat di wilayah kerajaan Landak. Raja kerajaan Landak beserta keluarga dan rakyatnya kemudian memeluk agama Islam, dan raja sendiri berganti nama dan lebih dikenal sebagai Raden Abdul Kahar.³³

Raja-raja dan Penerus Kerajaan Landak.

- I. Pada fase pertama ibu kota kerajaan Landak di Nigrat Batur atau Angrat Batur Sekilap Sepatah kurun waktu 1292-1472 atau sekitar 180 Tahun
- II. Ibukota Kerajaan Landak di Ayu Munggu kurun waktu 1472-1703 sekitar 203 Tahun
- III. Ibukota Kerajaan Landak di Bandong kurun waktu 1703-1768 sekitar 65 tahun
- IV. Ibukota Kerajaan Landak di Ngabang sejak tahun 1768 dan merupakan ibukota terakhir Kerajaan Landak dalam perjalanan sejarah pemerintahannya.

Turunan pertama Kerajaan Landak yang berawal dari Ratu Sang Nata Pulang Pali I sampai ke Pangeran Ratu Drs. Gusti Suryansyah Amiruddin, M.Si pangeran Ratu Keraton Landak, sejak tahun 2000 sudah 39 turunan.

- **Peninggalan Kerajaan Landak**
- **Istana Kerajaan Landak/Ngabang**

Istana yang terletak di Kota Ngabang Kabupaten Landak, 177 km dari Kota Pontianak, menyimpan berbagai peninggalan kerajaan Landak, disamping istana terdapat sebuah mesjid kerajaan Landak

³³ Syafruddin Usman MHD,SPd. 2002 Susur Galur Kerajaan Landak, Romeo Grafika Pontianak 2002, hal 6

- **Makam Raja Landak**

Makam Raja Abdul Kahar atau Ismahayana atau Iswara Mahayana yang terletak di daerah Munggu lebih kurang 1 jam perjalanan menyusuri anak sungai Landak, Makam yang terletak di atas bukit mempunyai panjang 2 meter. Makam yang sering diziarahi oleh masyarakat terutama jika ada hari-hari besar.

- **Makam Juang Mandor**

Makam yang terletak di Kecamatan Mandor, 80 km dari Kota Pontianak. Menumen perjuangan di daerah ini dimakamkan sekitar 21.037 penduduk, raja-raja Kalimantan Barat yang dibunuh tentara Jepang pada peristiwa Mandor 1942.

- **Intan Landak**

Sungai Landak dimana banyak penduduk mendulang intan. Intan Landak sangat terkenal dengan sebutan intan Kobi berkualitas lebih baik dari intan Martapura yang berwarna putih, merah, kuning dan hitam. Dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Landak yang memiliki potensi pertambangan berupa intan adalah Ngabang, Air Besar, dan Kuala Behe.³⁴

- **Upacara Ngantar Tumpang Negeri³⁵**

Upacara Ngantar Tumpang Negeri merupakan upacara adat suku bangsa Melayu di kerajaan Landak sekitarnya daerah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Ngantar Tumpang Negeri adalah salah satu upacara sebagai manifestasi dari rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah SWT, dan juga merupakan upaya penghindaran malapetaka/bala, pengusiran penyakit dan ketidak beruntungan, permohonan keselamatan dan pengharapan kehidupan yang lebih baik dan keberuntungan pada tahun yang akan datang.

³⁴ Wahyudi Johan, Opu Daeng Manambon Pelaut Ulung dari Sulawesi Selatan. Borneo Tribune 27 Des 2007

³⁵ Gusti Suryansyah, Upacara Adat Ziarah Akbar dan Ngantar Tumpang Negeri Kabupaten Landak 2006

8. Kerajaan Mempawah

Opu Daeng Menambon beserta saudara-saudaranya berasal dari Kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung dan pemberani. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya merantau mengarungi lautan luas menuju Banjarmasin, Betawi, berkeliling sampai Johor, Riau, Semenanjung Malaya akhirnya sampai pula di daerah Kerajaan Tanjungpura (Matan). "Dalam perantauannya, kelima bersaudara tersebut banyak membantu kerajaan-kerajaan kecil yang sedang mengalami kesulitan. Kesulitan seperti terlibat pada suatu peperangan, baik perang saudara ataupun baru diserang kerajaan lain. Karena kebiasaan tersebut dan sifat suka menolong terhadap pihak yang lemah inilah mereka terkenal sampai di mana-mana.

Terbukti apa yang dilakukan kelima bersaudara tersebut ketika datang di Kerajaan Tanjungpura. Pada saat itu Kerajaan Tanjungpura sedang terjadi perang saudara, disebabkan adik kandung Sultan Muhammad Zainuddin yang bernama Pangeran Agung menyerang Sultan Muhammad Zainuddin. Ketika saudara tersebut berhasil membantu memadamkan pemberontakan dan kudeta dari Pangeran Agung. Bahkan Opu Daeng Menambon berhasil mempersunting puteri Sultan yaitu Puteri Kesumba cucu dari Panembahan Senggaok. "Dari perkawinan Opu Daeng Manambon dengan Puteri Kesumba, lahirlah sepuluh orang putera-puteri, tapi yang paling terkenal yaitu Utin Chandramidi dan Gusti Jamiril atau Panembahan Adijaya Kesuma Jaya," katanya. Lanjutnya lagi ketika Opu Daeng Manambon sampai di Senggaok, diadakan serah terima dari Pangeran Adipati kepada Opu Daeng Menambon, kerana Opu Daeng Menambon adalah cucu menantu Panembahan Senggaok. Sehingga Opu Daeng Menambon memangku jabatan Raja Mempawah yang ketiga dan dia memindahkan pusat Kerajaan Mempawah di Sebukit Rama (kira-kira 10 Km) dari pusat Kota Mempawah. Kesepuluh putra-putri Opu Daeng

Manambon hanya putrinya Utin Chandamidi adalah isteri Sultan Abdurrahman Alkadrie raja pertama kerajaan Pontianak.³⁶

- **Peninggalan Kerajaan Mempawah**
- Keraton Mempawah, Mesjid Jami Mempawah, Makam Raja-Raja Mempawah
- **Upacara Robo'-Robo'**

Hari Rabu bulan Safar terakhir dikenal masyarakat Mempawah sebagai hari. Robo-robo adalah nama upacara tahunan (tahun Islam) yang diselenggarakan oleh penduduk daerah Kabupaten Pontianak khususnya dan pada masyarakat keturunan Bugis yang ada di daerah lainnya.

9. Kesultanan Pontianak

Kerajaan terakhir yang ada di Kalimantan Barat yaitu Kesultanan Pontianak berdiri semasa pemerintahan Van Der Parra (1761-1775), Gubernur Jenderal VOC yang ke-29 Pendirinya adalah Pangeran Syarif Abdurrahman putra Al-Habib Husin Al Kadri penyiari agama Islam dari Arab. Menurut sumber sejarah Kota Pontianak didirikan tanggal, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185). Kerajaan yang terletak dipersimpangan antara Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak di sebuah kampung yang bernama Kampung Dalam Bugis Sultan-sultan yang pernah memerintah tersebut antara lain :

1. Sultan Syarif Abdurrahman Al Kadri (1771-1808)
2. Sultan Syarif Kasim Al Kadri bin Syarif Abdurrahman Al Kadri (1808-1819)
3. Sultan Syarif Usman Al kadri bin Syarif Abdurrahman Al Kadri (1819-1855)

³⁶ Wahyudi Johan Borneo Tribun, Op, cit. 27 Des 2007

4. Sultan Syarif Hamid I Al Kadri bin Syarif Usman Al Kadri (1855-1837)
5. Sultan Syarif Yusuf Al Kadri bin Syarif Hamid I Al Kadri (1873-1895)
6. Sultan Syarif Muhammad Al Kadri bin Syarif Yusuf Al Kadri (1895-1944)
7. Sultan Syarif Taha Al Kadri bin Syarif Usman Al Kadri (1944-1945)
8. Sultan Syarif Hamid II Al Kadri bin Syarif Muhammad Al Kadri (1945-1950).³⁷

- **Peninggalan Kesultanan Pontianak**

- **Kota Pontianak**

Kota Pontianak yang merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat terdiri dari lima kecamatan. Kota Pontianak sebagai tempat pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas pendidikan, serta daerah transit bagi yang akan menuju Kuching ibu kota negeri Sarawak

- **Keraton Kadriyah**

Keraton Kadariyah terletak 3 km dari pusat kota. Salah satu peninggalan dari Sultan Syarif Abdurrahman pendiri kota Pontianak. Menurut inskripsi yang ada bahwa istana itu dibangun pada Tahun 1923 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad AlKadrie, Sultan Pontianak yang ke 6 hingga kini masih menyimpan berbagai macam ragam peninggalan Sultan seperti Singgasana Sultan, Kaca Pecah Seribu, dan Alqur'an tulisan tangan Sultan dan lain sebagainya

³⁷ Nurcahyani, Lisyawati, Dra, Pendataan Peninggalan Sejarah Keraton Kadriah Pontianak. Bag Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, 1995. hal 6-7

- **Masjid Jami' Sultan Abdurrahman AlKadrie**
Masjid peninggalan Sultan Syarif Abdurrahman, dibangun kembali oleh Sultan Syarif Usman pada hari Selasa bulan Muharram Tahun 1238 H menjadi 1821 M yang terletak tepat berada di depan Keraton Kadariyah.
- **Makam Raja-Raja Kerajaan Pontianak**
Makam raja-raja kesultanan Pontianak terletak di Batulayang wilayah Pontianak Utara, dengan jarak 7 km dari pusat kota Pontianak. Makam yang paling tua adalah makam Sultan Syarif Abdurrahman yang mempunyai angka Tahun 1224 H atau 1808 dan beberapa sultan lainnya.

C. Penutup

Secara singkat hubungan keterkaitan beberapa kerajaan yang pernah berjaya di Kalimantan Barat. Kerajaan yang umumnya didirikan oleh para pendatang terutama dari kalangan bangsa Jawa, Melayu, Bugis dan Arab. Hubungan antara satu dengan lainnya dimulai dari perdagangan, pertahanan keamanan bersama seperti dengan kerajaan luar Kalimantan Barat, Brunai, Johor dan Sarawak. Kerajaan yang berperan sebagai simpul sosiokultural masyarakat, dan pemersatu seluruh elemen masyarakat sebanyak 14 buah kerajaan. 9 dari 14 kerajaan yang dapat diinventarisasi. Pada umumnya kerajaan di Kalimantan Barat saling menghargai satu sama lainnya. Meninggalkan sejarah dan budaya yang masih ada, dapat dilihat di wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat.

D. Saran-Saran

Akan lebih baik kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, merevitalisasi kembali khasanah budaya dan peninggalan kerajaan tetap dilestarikan sehingga budaya tersebut akan dapat dipelajari oleh

generasi masa kini, dan dijadikan sebagai objek wisata sejarah dan budaya dengan mempersiapkan sumber daya manusia serta usaha pemerintah untuk memperkenalkan pariwisata Kalimantan Barat dengan menyediakan informasi sebaik mungkin. Objek wisata di daerah harus diketahui oleh wisatawan tentang jenis, letak, dan alat angkutan yang dipergunakan, selain itu berbagai cara yang dapat dilakukan seperti ;

1. Mengadakan promosi melalui surat kabar, majalah, spanduk, brsur, famplet dan lainnya. Memberikan penerangan kepada masyarakat secara luas. Mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang kepariwisataan
2. Mengingat pentingnya informasi tentang kerajaan, sebaiknya kerajaan yang belum ditulis dapat dilanjutkan. Kerajaan Meliau. Tayan. Sanggau, Sintang dan Bunut.

Daftar Pustaka

- Budi Rahman, 27 Des 2007. **Sambas Terkait Erat Dengan Brunai.** Sambas: Harian Borneo Tribun.
- Gusti Suryansyah, 2006. **Upacara Adat Ziarah Akbar dan Ngantar Tumpang Negeri Kabupaten Landak**
- I Putu Gelgel, 2006. **Indrustri Pariwisata Indonesia.** Bandung: PT Refika Aditama.
- Johan Wahyudi, 27 Des 2007.. **Opu Daeng Manambon Pelaut Ulung dari Sulawesi Selatan.** Mempawah: Borneo Tribun.
- Nasution. 1978. **Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7 Periode Renville.** Disjarah-Ad.Jakarta
- Natsir, Muhammad, 2006. **Sekilas Upacara Tumpang Negeri Landak.** Pontianak : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
- Nurchayani,Lisyawati, 1995. **Pendataan Peninggalan Sejarah Keraton Kadriah Pontianak.** Bag Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat.
- Pangeran Ratu H. Winata Kesuma., 2005. **Istana Alwatzikhoebillah Tempo Dulu Dan Sekarang.** Sambas: Majelis Adat Istiadat Istana Alwatzikhoebillah
- Purba Juniar,. 1992. **Dokter Soedarso.** Pontianak.: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional
-
- _____ 2000. **Pendataan Sejarah Kerajaan Tanjungpura-Matan Di Kabupaten Ketapang,** Pontianak.: Laporan Penelitian Balai Kajian Jarahnitra
-
- _____. 1997. **Oevang Oeray.** Pontianak : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
- Radin Muhammad Hamzah, Ir.,2007. **Rekonstruksi Berdiri dan Berkembangnya Kerajaan Tanjungpura-Sukadana-Matan.** Brunai.

- Sulistiyorini Pembayun, 2003. **Sejarah Berdirinya Kerajaan Simpang**, Dalam Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan. Pontianak: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional.
- Syafruddin Usman MHD,. 2002 **Susur Galur Kerajaan Landak**, Pontianak: Romeo Grafika
- Yosep Setiawan . 1995 **Sejarah Kerajaan Kubu**. Kecamatan Kubu
- Yufiza , 2004. **Potensi dan Pengembangan Wisata di Kota Pontianak**, Pontianak : Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional
- Ibrahim Bajuri, Selasa 6 Maret 1990. Akcaya. Pontianak Soedarto. 2008 Wawancara . Pontianak
- Kesultanan Kubu Wikipedia Indonesia. Donw load 6/8/2007

Daftar Riwayat Hidup

M.Natsir, lahir 28 Pebruari 1964 di Pontianak, Sei Jawi Dalam Kalimantan Barat. Beragama Islam. Riwayat pendidikan dari sekolah agama Madrasah dan SD Bawari 1977, Sekolah Tehnik Negeri Transisi 1980, STM Negeri 2 1984. Melanjutkan Universitas Tanjungpura Pontianak Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2002. Tahun 2004 mengikuti Program Magister (S2) pada universitas yang sama pada program Studi Sosiologi selesai tahun 2006

Riwayat pekerjaan diawali sebagai loper koran di Pontianak pada harian Koran Berita Yudha Jakarta 1980, tamat sekolah masuk Perusahaan Negara PTP VII Gn. Meliau Kalbar 1984-1986, PT. Duta Pertiwi Nusantara Kalbar 1986-1994. Tahun 1992 di terima sebagai Pegawai Negeri Sipil Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak. Menjadi dosen tidak tetap pada Jurusan Pariwisata Isipol UNTAN tahun 2002 sampai sekarang, penulis Budaya. Koran APPost., harian Berkat., Borneo Tribun, Jurnal Sejarah Jakarta

Seminar – Simposium. Work Shop Antar Kepala Balai Kajian Sejarah SeIndonesia Malaysia 1996. Seminar Pengembangan SDM Rektorat UNTAN 2004. Antar Universitas Borneo 2 Malaysia-Indonesia 2005. Raker Balitbangda TK.I Kalbar. Work Shop Kepercayaan SeIndonesia Bogor /Jkt 2005/2006, Budaya Melayu STAIN 2005 Pendidikan IKIP Ptk 2006. Kearifan Budaya Lokal Bogor 2006. Nilai-Nilai Budaya Diklat Ptk 2007. Arung Sejarah 2 Ketapang Kalbar 2007. Sejarah Borneo Brunai Negara Brunai 2007. Sejarah Islam UITM Samarahan Sarawak Malaysia 2008

Karya – Karya. Penelitian Naskah Transliterasi Arab Melayu Kitab Kesehatan. Naskah Transliterasi Arab Melayu Silsilah Bugis. Barzanji Pontianak. Hadrah Pontianak. Tokoh Sejarah Kaltim. Tokoh Sejarah Ketapang. Suku Dayak Manjau Ketapang. Suku Bakumpai Kalteng – Kalsel. Penelitian Sosial Budaya Melayu Pontianak. Aktualisasi Budaya Batang Lupar Putusibau. Tesis Identitas Melayu Pontianak.

Adat Istiadat Melayu Kayung Ketapang. Upacara Tradisi Melayu Kab. Pontianak. Menstro Budaya Kalbar. Tumpang Negeri Landak Kalbar 2006. Kearifan Lokal Masyarakat Pontianak 2006. Upacara Tradisi Kab Pontianak 2006. Pristiwa Mandor Kalbar 2007. Prospek Ikan Salai Putusibau Kalbar 2008. Multikultural Kementerian Kebudayaan Pariwisata Jakarta 2008. Inventarisasi Budaya Sejarah Kalbar 2008.

Identifikasi Peluang Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata di Perbatasan Kalimantan Barat.

(Kasus Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang)

Oleh : Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si

A. Pendahuluan

Pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan dewasa ini menjadi isu yang penting, mengingat di era globalisasi kita hidup di dunia yang semakin sempit dan tanpa batas (*borderless world*). Dimana jika kita perhatikan, arus hilir mudiknya manusia, barang dan jasa maupun informasi melalui wilayah perbatasan terus meningkat dengan pesat, sehingga penanganan secara serius wilayah ini menjadi perhatian oleh kita bersama.

Border discourse (wacana perbatasan) atau isu wilayah perbatasan bukan hanya sekedar menegaskan garis (wilayah) batas negara, tetapi jauh lebih penting perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara dimana pengelolaannya tidak terlepas dari kebijakan maupun peraturan yang bersifat nasional sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa maupun negara, juga untuk kepentingan hubungan antara negara.

Jika kita perhatikan dengan seksama, perbatasan mulai merebak menjadi isu nasional setelah masyarakat Indonesia sadar harus kehilangan Sipadan-Ligitan pada tahun 2003 yang lalu. Kemenangan pemerintah Malaysia atas klaimnya terhadap kedua pulau tersebut yang menurut Mahkamah Internasional disebabkan oleh *continuous presence, effective occupation and ecology preservation*, membuat pemerintah dan masyarakat Indonesia mulai sadar, betapa besar kerugian yang harus diderita akibat kurang memperhatikan wilayah perbatasan.

Setelah Sipadan dan Ligitan, disusul kemudian oleh kasus Ambalat (2004) yang sebenarnya bukan sengketa teritorial dengan Malaysia, namun yang diusung adalah masalah sumber daya alam. Kedua belah pihak berseteru tentang klaim tumpang tindih atas landas kontinen dan ZEE, di suatu wilayah 140 mil lepas pantai Tawau (Laut Sulawesi), posisi dimana mereka memiliki hak kedaulatan yang spesifik. Perselisihan ini dimensinya tidak jelas, kendati ada tumpang tindih antara konsesi eksplorasi minyak yang diberikan kedua negara, persengketaannya melampaui wilayah yang diperselisihkan.¹ Kasus ini juga menekankan lebih jauh arti penting penanganan serius wilayah perbatasan di Indonesia.

Perhatian pada kawasan perbatasan saat ini mencakup dimensi yang lebih luas. Perhatian yang cukup besar diberikan dengan tidak hanya menganggap perbatasan negara sebagai *security belt* saja, namun juga kepada fungsi-fungsi sosial ekonomi yang dimiliki perbatasan tersebut. Sebagaimana House² mengatakan bahwa : *“Defence and security are no longer the major concern along most boundaries in the contemporary world; a vast majority of international boundaries are uncontested and mostly have economic and social functions”*

Tidaklah mengherankan jika kemudian, pemerintah berupaya untuk memberikan prioritas lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan. Perhatian dan prioritas tersebut juga telah mengalami reorientasi yaitu orientasi keamanan (*security approach*) menjadi orientasi kesejahteraan atau pembangunan (*prosperity/development approach*). Sejalan dengan Suharsono³ yang melihat hubungan luar negeri perlu dilakukan dalam pendekatan politis ekonomis tanpa mengabaikan stabilitas keamanan, sosial dan budaya bangsa untuk

¹ Awani Irewati (Ed), *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi*, Jakarta, P2P, 2006, hlm.126.

² Dikshit, R.D. *Political Geography : A Contemporary Perspective*, Tata Mc.Grow-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 1982, hlm. 75.

³ Suharsono, *Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia*. dalam Jurnal Luar Negeri No 41, Jakarta, 2000, hlm 51

menunjang pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Fenomena hubungan luar negeri yang sekarang sudah tidak mutlak lagi menjadi milik pemerintah pusat, tetapi juga mulai mengarah kepada hubungan yang lebih luas dan mencakup isu yang luas pula, misalnya hubungan antar *local goverment*, dan terhadap munculnya aktor-aktor baru yang ikut mewarnai hubungan antar negara. Hal tersebut tentunya menjadikan diskursus perbatasan (sebagai pintu keluar masuk orang dan barang yang tentu saja akan lebih intensif) dalam era global ini semakin menarik untuk diperhatikan.

Pemerintah kita saat ini juga telah meredefinikan arti penting wilayah perbatasan. Jika wilayah ini dahulu dianggap sebagai beranda belakang sekarang dianggap menjadi beranda depan negara. Perkembangan ini patut disambut baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain, tentunya melalui upaya-upaya menyusun rencana strategis pengembangan kawasan perbatasan yang sinergis dengan upaya pemerintah pusat memfasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah ini.

Pengembangan pariwisata adalah persoalan yang diangkat oleh tulisan ini. Di era globalisasi ini dewasa ini, pariwisata mendapatkan perhatian yang cukup besar. Bahkan menurut John Naisbitt dalam tulisannya yang menarik, dimana ia melihat konteks internasional sebagai sebuah *Global Paradox*, bahwasannya dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam ekonomi global⁴.

Tulisan ini ingin melihat peluang dan tantangan pengembangan pariwisata di perbatasan Kalimantan Barat, untuk itu terlebih dahulu penulis ingin memotret kondisi kekinian wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia. Tulisan ini lebih memilih lokasi Kecamatan Jagoibabang

⁴ Penjelasan lebih lanjut lihat dalam John Naisbitt, *Global Paradox*, Alih Bahasa Budijanto, Binarupta Aksara, Jakarta, 1994, hal 108-110.

Kabupaten Bengkayang, daripada wilayah perbatasan Kalimantan Barat lainnya yang begitu luas, karena ketertarikan penulis secara khusus terhadap lokasi ini, sebagai lokasi yang menurut penulis sangat potensial dikembangkan sebagai tujuan wisata, mempunyai daya dukung yang cukup dengan sudah berdirinya Pos Terpadu Lintas Batas, namun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah.

B. Kondisi Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan dengan negara bagian Sarawak Malaysia. Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah 966 kilometer. Perbatasan tersebut melintasi 113 desa dalam 15 kecamatan dan di 5 kabupaten Dengan anggapan bahwa lebar wilayah perbatasan adalah 20 kilometer, maka luas wilayah perbatasan Kalimantan Barat adalah 25.197 kilometer persegi, sedangkan luas seluruh kecamatan yang dilintasi garis perbatasan adalah 2.519.744 hektar.⁵

Sementara itu, terdapat 50 jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di kalbar dengan 32 kampung di Sarawak. Dari sejumlah jalan setapak tersebut disepakati 16 desa di kalbar dan 10 kampung di Sarawak sebagai Pos Lintas Batas. Sesuai kesepakatan antar kedua negara, bahwa untuk program pembangunan PLB Kalbar-Sarawak Malaysia bagian Timur telah ditetapkan 5 Zona perbatasan yang menjadi prioritas pintu gerbang masuk dan keluar antara kedua negara yaitu:

1. Entikong Kab. Sanggau (Indonesia) - Tebedu (Malaysia)
2. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu (Indonesia) - Lubuk Antu (Malaysia) .
3. Aruk Kab Sambas (Indonesia) - Biawak (Malaysia)
4. Jagoi babang Kab. Bengkayang (Indonesia) – Serikin (Malaysia)
5. Jasa Kab. Sintang (Indonesia) - Sri Maman (Malaysia)

⁵ Bappeda Provinsi Kalimantan Barat 2005.

Dari kelima pintu gerbang tersebut, yang sudah beroperasi sebagai PPLB (Pos pemeriksaan Lintas Batas) hanyalah pintu gerbang Entikong, di Kabupaten Sanggau. Sedangkan PPLB di Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu dan Aruk Kabupaten Sambas direncanakan beroperasi tahun 2009.

Gambar 1. Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak



Menyikapi penanganan kawasan perbatasan yang begitu luas, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan (RPJM 2005 -2009) , yaitu (1) Mengembangkan Wilayah Perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *Inward Looking* menjadi *Outward Looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga. (2) Pendekatan pembangunan

yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach) juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pelestarian lingkungan (environment approach).⁶

Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) Kabupaten, dan meliputi 15 Kecamatan, yang terdiri dari 11 Kecamatan pada Lini satu dan 4 Kecamatan pada Lini dua.

Tabel 1. Kabupaten dan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia

No.	Kab/Kota	Ibukota	Luas Wilayah Kabupaten (km ²)	Kecamatan
1.	Kab. Sambas	Sambas	6.394,70	Paloh, Sajingan Besar
2.	Kab. Bengkayang	Bengkayang	5.397,30	Jagoi Babang, Siding
3.	Kab. Sanggau	Sanggau	12.857,70	Entikong, Sekayam
4.	Kab. Sintang	Sintang	21.635,00	Ketungau Hulu, Ketungau Tengah
5.	Kab. Kapuas Hulu	Putussibau	29.842,00	Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau dan Kedamin.

Data diolah dari berbagai sumber

⁶ Gubernur Kalimantan Barat, *Potensi Wilayah Kalimantan Barat Dalam Mendukung Pembangunan Pertahanan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Forum Komunikasi Litbang Dephan RI, Pontianak, 17 Mei 2008.

Paling tidak ada 5(lima) isu pokok yang menurut Kaisiepo⁷ merupakan problem yang dihadapi oleh hampir semua daerah yang berada di garis batas. *Pertama*, kurangnya infrastruktur yang berakibat lemahnya komunikasi keluar warga dan tertutupnya kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Kedua*, kemiskinan yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat. *Ketiga*, Lemahnya sistem pengawasan dan buruknya mental birokrat telah menyuburkan praktek-praktek penyeludupan. *Keempat*, terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga dan masyarakat di perbatasan Indonesia. Kelima, Terbatasnya teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai barang begitu rendah. Sering pula potensi di daerah perbatasan dicuri oleh pengusaha negara tetangga.

Lebih jauh penulis setuju dengan Haba dan Siberian⁸ yang mengklasifikasikan persoalan di perbatasan menjadi tiga hal pokok yakni posisi garis batas yang membelah dua teritori dengan dua entitas berbeda, sumber daya alam yang tersedia seperti hutan, pertambangan dan sumber daya alam lainnya yang paling banyak menjadi sumber konflik dan faktor wilayah yang bertalian dengan otoritas dan kedaulatan atas wilayah setiap negara.

Jika kita perhatikan kondisi perbatasan di Kalimantan Barat-Malaysia, tiga hal pokok tersebut menjadi hal yang memang patut kita garis bawahi. Masalah di perbatasan Indonesia –Malaysia di Kalimantan Barat antara lain :

1. Persoalan *Transnational Crimes*

Untuk persoalan Transnational Crimes, khususnya *illegal logging* sebagai TOC (Transnational Organised Crimes) merupakan persoalan yang sangat meresahkan bagi masyarakat

⁷ Lihat dalam Haba dan Siberian, "Faturika dan Mandeu Raimanus: Mengenali Potensi Dan Kendala Daerah perbatasan Di Pulau Timor", dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Jilid XXXI, No.1 2005

⁸ Ibid.

Kalbar. Departemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 150.000 m³ kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia⁹. Hal tersebut tentunya bukan isapan jempol, jika kita perhatikan beberapa fakta dibawah ini : ¹⁰

1. Unit Intel Dim 1203/Ktp Berhasil Mengamankan ± 9.525 Btg Kayu Hasil Illegal Logging Pd Tgl 20-21 Mar 2008 Di Kab. Ketapang Kalbar
2. Satgaster Dim 1205/Stg Rem 121/Abw Berhasil Mengamankan ± 3.700 Btg Kayu Hasil Illegal Logging Pd Tgl 20 Jan – 19 Feb 2008 Di Kab. Sintang Kalbar
3. Satgaster Dim 1206/Psb Rem 121/Abw Berhasil Mengamankan ± 16.434 Btg Kayu Hasil Illegal Logging Pd Tgl 7 Jan 2008 Di Kab. Kapuas Hulu Kalbar
4. Satgas Pamtas Yonif 641/Bru Rem 121/Abw Berhasil Mengamankan 1 Unit Alat Berat & ± 1.491 Btg Kayu Hasil Illegal Logging Pd Tgl 5 Mar – 10 Apr 2008 Di Kab. Sambas Kalbar

Fakta tersebut jelas membuktikan masih maraknya kasus *illegal logging*, khususnya di wilayah perbatasan Kalbar.

2. Persoalan Batas Negara

Wilayah sebuah negara harus jelas batas-batasnya, baik di darat, laut dan udara yang ditetapkan berdasarkan hukum nasional dan perjanjian internasional (legalitas). Legalitas batas-batas itulah yang memberikan justifikasi penuh terhadap ada tidaknya kedaulatan atau yurisdiksi suatu negara.

⁹ Kompas, 20 Mei 2001.

¹⁰ Pangdam Tanjungpura. *RUTR Kalbar Revisi*, dalam Seminar Litbang Dephan di Pontianak, 17 Mei 2008.

Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara memerlukan perhatian serius. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu.

Di sepanjang perbatasan darat Kalbar - Malaysia terdapat 5.784 patok batas. Dari jumlah ini yang sudah dipatroli sebanyak 3.087 patok, dan yang belum dipatroli sebanyak 2.697 patok. Sedangkan kondisi patok pada saat ini, patok yang hilang berjumlah 349 patok, rusak 53 patok, patah 4 patok, dan tertimbun 2 patok. Penyebabnya bisa karena faktor manusia (pencurian kayu dengan menggunakan alat berat), atau karena faktor alam (tanah longsor)¹¹

Selain persoalan patok tadi, masih menurut Pangdam Tanjungpura, beberapa persoalan garis batas antara Indonesia dan Malaysia di perbatasan Kalbar yang telah berhasil diidentifikasi antara lain :

1. Masalah Tanjung Datu, inti masalah : tidak diketemukan *watershed*
2. Masalah Gunung Raya, inti masalah : tidak diketemukan *watershed*
3. Masalah Batu Aum, inti masalah : perbedaan pendapat tentang perjanjian tahun 1928 dengan keadaan sebenarnya di lapangan
4. Masalah Sungai Buan, inti masalah : perbedaan pendapat tentang perjanjian tahun 1928 dengan keadaan sebenarnya di lapangan

Persoalan seperti ini sangat memerlukan perhatian dan penanganan yang serius oleh pemerintah, jika tidak ingin

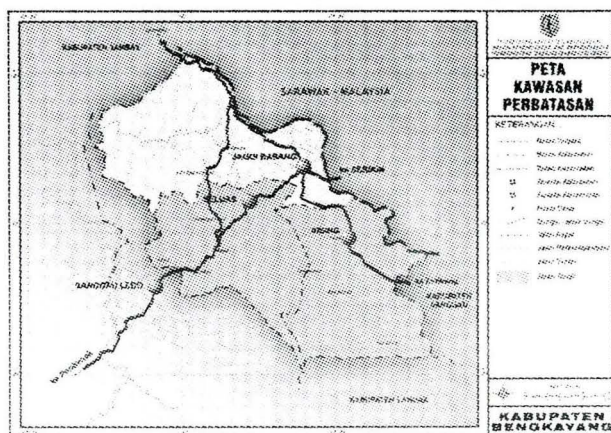
¹¹ *Ibid*

wilayah Indonesia kembali di klaim oleh Malaysia sebagaimana Sipadan-Ligitan. Sebenarnya masih banyak persoalan lainnya yang berkaitan dengan perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia, namun tidak penulis eksplorasi lebih jauh dalam tulisan ini, misalnya persoalan TKI ilegal, barang dan gula ilegal, *trafficking*, dan lain sebagainya. Dua contoh diatas adalah dua persoalan yang sementara ini penulis anggap sudah cukup untuk menggambarkan persoalan di perbatasan Kalimantan Barat.

C. Kondisi Wilayah Kecamatan Jagoi Babang

Kecamatan Lini I adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sedangkan Kecamatan Lini II adalah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lini I. Dari gambar di bawah ini tampak bahwa di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding termasuk Kecamatan Perbatasan Lini 1, sedangkan Kecamatan Seluas termasuk Kecamatan Perbatasan Lini II.

Gambar 2. Peta kawasan perbatasan Jagoi Babang



Sumber : Pemda Kabupaten Bengkayang

1. Geografi Wilayah Perbatasan

Menurut Profil Kecamatan Jagoi Babang tahun 2006, luas wilayah Kecamatan Jagoi Babang mencapai 65.500 Ha, atau 12,14 % dari luas Kabupaten Bengkayang. Kecamatan ini mencakup 6 Desa dan 14 Dusun. Keenam desa tersebut meliputi Desa Jagoi, Desa Kumba, Desa Sekida, Desa Sinar Baru, Desa Gresik dan Desa Semunying Jaya. Desa Jagoi merupakan Ibukota Kecamatan sekaligus pusat pemerintahan.

Secara geografis Jagoi Babang berada pada sebelah Timur Laut Kabupaten Bengkayang, sedangkan pintu perbatasan terletak di Kecamatan Jagoi Babang yang berhadapan dengan distrik Sirikin negara bagian Serawak Malaysia. Jarak antara tapal batas atau titik nol dengan wilayah Sirikin ± 3 kilometer, sedangkan jarak antara tapal batas dengan kantor Kecamatan Jagoi Babang ± 18 kilometer. Wilayah perbatasan Jagoi Babang, saat ini merupakan wilayah perbatasan yang interaksinya dengan negara tetangga cukup besar, baik dalam hal perdagangan, lintas tenaga kerja serta hubungan sosial dan kekerabatan, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana untuk mencapai wilayah perbatasan yang telah dibangun oleh pemerintah cukup memadai dan lancar.

Wilayah perbatasan di Negara Bagian Serawak, Malaysia mempunyai karakteristik geografis yang sama dengan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Namun jika dibandingkan, kondisi wilayah perbatasan Malaysia lebih cepat berkembang. Di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang geografinya relatif datar bergelombang, sehingga lebih mudah untuk dibangun jalan sejajar menuju perbatasan, demikian pula tata guna lahan untuk budidaya perkebunan juga sangat memungkinkan. Oleh sebab itu arus orang dan barang baik hasil tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, dan perdagangan dari Kabupaten Bengkayang ke Serawak sebagian besar menggunakan angkutan darat melalui perbatasan Jagoi Babang.

2. Ekonomi Wilayah Perbatasan

a. Kondisi Ekonomi

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi seperti berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang dilihat berdasarkan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Belum adanya data mengenai PDRB ditingkat kecamatan, maka untuk menilai kinerja perekonomian di wilayah perbatasan Jagoi Babang dilihat berdasarkan kinerja perekonomian di Kabupaten Bengkayang dengan asumsi kinerja perekonomian Kabupaten Bengkayang memiliki kecenderungan yang kurang lebih sama. Perekonomian di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang masih didominasi oleh sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini bisa dilihat dari data tahun 2007 persentase terhadap total PDRB yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 34,89% dan sektor pertanian sebesar 33,78%. Walaupun hampir semuanya sektor mengalami peningkatan persentasenya, tetapi sektor perdagangan dan pertanian ini masih merupakan tulang punggung perekonomian terutama di wilayah perbatasan.

Sebagian besar penduduk di wilayah perbatasan bermata pencaharian di bidang pertanian. Petani yang ada sebagian besar masih bercocok-tanam dengan sistem ladang berpindah. Selain itu terdapat pula kelompok masyarakat perambah hutan yang mencari hasil hutan sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian lain adalah di bidang perikanan, sebagai pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

b. Perdagangan Lintas Batas

Untuk melihat kegiatan perekonomian di pos lintas batas, dapat dilihat dari banyaknya orang dan barang serta kendaraan yang keluar dan masuk (illegal traveling) melalui pintu perbatasan. Jumlah kendaraan yang melintasi perbatasan di Jagoi Babang, baik yang berasal dari wilayah Kabupaten Bengkayang maupun dari Sirikin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun berhubung pos perbatasan belum menjadi pintu perbatasan resmi, maka kendaraan yang keluar hanya sampai pada distrik Sirikin dan sebaliknya kendaraan yang masuk hanya sampai ke kecamatan Seluas.

Gambaran lain dari tingginya kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan dapat dilihat dengan banyaknya pedagang baik yang berasal dari wilayah perbatasan maupun wilayah-wilayah lain yang membawa barang dagangannya sampai masuk ke wilayah Sirikin/ Serawak. Hal ini dilakukan oleh para pedagang dengan alasan lebih mendekatkan barang dagangannya kepada konsumen dengan harga yang lebih menjanjikan. Selain itu dengan membawa barang dagangan sampai ke Sirikin mereka akan memperoleh keuntungan ganda yaitu keuntungan dari penjualan barang dagangan juga memperoleh keuntungan dari penukaran mata uang Ringgit yang mereka peroleh dengan nilai Rupiah.

Perdagangan lintas batas tidak hanya memperdagangkan produk hasil dari daerah perbatasan saja, namun meliputi juga berbagai produk hasil dari daerah-daerah diluar wilayah perbatasan. Dengan adanya hubungan pola perdagangan lintas batas ini, barang-barang dari Indonesia yang masuk ke Serawak terutama kayu gergajian (papan), kakao, karet, lada, rotan mentah. Disamping itu barang-barang yang masuk ke Serawak seperti sayuran/buah-buahan, ikan basah,

pakaian, kerupuk, gula merah dan kerajinan rakyat (anyaman bidai). Barang barang yang masuk dari Serawak ke Indonesia terutama adalah wafer, soft drink, pakaian bekas, telur ayam, daging, biskuit, ammonium nitrate (pupuk), mi instan, gas dan barang-barang lain sebagainya.¹²

Perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Jagoi Babang saat ini cukup besar jika dilihat dari volume maupun nilainya. Wilayah perbatasan sebagai perlintasan arus keluar masuk barang maupun jasa tampaknya sudah mulai menjadi pusat aktivitas perdagangan. Tingginya arus keluar masuk barang dan manusia di perbatasan ini tidak dapat dihindari karena adanya kegiatan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Adanya permintaan (demand) terhadap barang ataupun jasa dari Kalimantan Barat oleh Serawak, demikian juga permintaan terhadap barang dari Serawak, yang kemudian akan menimbulkan pergerakan perdagangan di wilayah perbatasan tersebut.

Potensi perdagangan komoditi antara kedua negara melalui perbatasan cukup besar. Namun karena belum dibukanya secara resmi pos lintas batas menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga masih muncul kegiatan-kegiatan ilegal, maka potensi tersebut tidak dapat dinikmati sebagai pendapatan negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Bahkan lebih buruk lagi setiap tahun negara dan daerah dirugikan oleh kegiatan ilegal tersebut.

¹² Data diperoleh dari hasil penelitian *Penataan Gate Jagoi Babang*, 2006. kerjasama Universitas Tanjungpura dan Bappeda Kabupaten Bengkayang, dimana penulis menjadi salah satu anggota Tim Peneliti.

3. Kependudukan dan Sosial Budaya

a. Penduduk

Disebutkan dalam Profil Kecamatan Jagoi Babang tahun 2006, penduduk Kecamatan Jagoi Babang yang merupakan wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkayang berjumlah 5.823 jiwa, terdiri dari 3.009 jiwa laki-laki dan 2.814 jiwa perempuan. Rata-rata pertumbuhan penduduknya sebesar 1-2 % pertahun. Jumlah ini relatif cukup kecil jika dilihat dari kepadatan penduduk atau rata-rata jiwa per kilometer persegi yaitu hanya sebesar 12 jiwa per km². Sementara itu, persebaran penduduk terjadi tidak merata antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi di lapangan menunjukkan pusat-pusat permukiman masyarakat tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak merata. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu persoalan bagi daerah perbatasan adalah kurangnya sumber daya manusia untuk mengisi dan melaksanakan pembangunan di daerah.

Kecamatan Jagoi Babang termasuk kecamatan yang multi etnis. Suku terbesar adalah suku Dayak dengan suku dominan yaitu Dayak Bidayuh. Masih berdasarkan Profil Kecamatan, Suku Dayak berjumlah 3.343 jiwa atau 65,14%. Suku Melayu merupakan suku terbesar kedua dengan jumlah 1.439 jiwa atau 28,04 %. Suku-suku lainnya seperti Jawa sebanyak 287 jiwa atau 5,59%, Sunda sebanyak 20 jiwa atau 0,39%, Flores sebanyak 19 jiwa atau 0,37%, Cina sebanyak 8 jiwa atau 0,16%, Batak sebanyak 1 jiwa (0,02%) dan lainnya sebanyak 15 jiwa (0,29%). Suku Dayak dan Melayu yang merupakan dua suku dominan di wilayah perbatasan ini memiliki tali persaudaraan dengan suku yang sama di Negara Bagian Serawak dan Sabah, Malaysia.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan relatif lebih rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang belum dapat menjangkau desa-desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan, hal ini mengakibatkan tingkat kemampuan baca tulis dan lama rata-rata sekolah rendah serta pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan tertinggal dibanding daerah lain.

Di samping sarana pendidikan yang sangat terbatas yaitu hanya ada 14 unit gedung SD, 1 unit gedung SMP, 1 unit Gedung SMA, juga minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Seringkali sekolah-sekolah di wilayah perbatasan terpaksa tutup karena murid-muridnya meninggalkan sekolah untuk memanen hasil pertanian mereka ataupun membantu orangtua mencari penghasilan. Juga jarak yang jauh ke sekolah dan minimnya sarana transportasi membuat banyak siswa yang tidak bersekolah.

Tenaga pengajar di daerah ini juga sangat minim.¹³ Pada suatu kesempatan wawancara penulis di Jagoi Babang diketahui bahwa ada sekolah yang tenaga pengajarnya hanya satu orang. Ini menyebabkan banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Serikin.

Alasan mereka karena sekolah yang ada di wilayah perbatasan lokasinya jauh dari rumah mereka dan sekolah yang ada di Serawak selain dekat juga mempunyai fasilitas yang lebih baik.

Keadaan ini disikapi masyarakat dengan menyekolahkan anaknya ke luar Kecamatan seperti di Sanggau Ledo, atau

¹³ Pada suatu kesempatan wawancara penulis di Jagoi Babang diketahui bahwa ada sekolah yang tenaga pengajarnya hanya satu orang. Ini menyebabkan banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Serikin. Alasan mereka karena sekolah yang ada di wilayah perbatasan lokasinya jauh dari rumah mereka dan sekolah yang ada di Serawak selain dekat juga mempunyai fasilitas yang lebih baik.

di ibukota Kabupaten. Bagi keluarga perbatasan yang mampu secara ekonomis dan memiliki keluarga di wilayah Serawak mereka ada yang mengirim anaknya untuk sekolah ke negeri jiran seperti di wilayah Serikin dan sekitarnya.

c. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Budaya hidup sehat masyarakat di wilayah perbatasan Jagoi Babang terutama yang berada dekat pusat kota kecamatan pada umumnya telah mulai berkembang, namun untuk masyarakat yang masih di pedalaman atau jauh dari pusat kota budaya hidup sehat masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan penyakit yang diperburuk lagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis. Sebelum tahun 1990-an banyak penduduk perbatasan yang berobat ke Serawak karena mudah dijangkau dan biayanya lebih murah. Namun saat ini jumlah penduduk di perbatasan yang berobat ke Sarawak semakin menurun dan hanya penderita penyakit-penyakit tertentu dan bersifat darurat yang masih berobat ke Serawak.

Menurunnya jumlah masyarakat yang berobat ke Serawak karena di kecamatan Jagoi Babang kini telah memiliki 1 Puskesmas Induk, 4 Puskesmas Pembantu dan 2 Polides walaupun peralatan dan tenaga medis yang ada tidak selengkap yang ada di Serawak. Selain itu dengan semakin intensifnya penanganan pemerintah di sektor kesehatan maka perilaku hidup sehat pada masyarakat secara berangsur-angsur mulai meningkat.

Bidang kesejahteraan sosial di wilayah perbatasan belum mengalami peningkatan. Berdasarkan Profil Kecamatan Jagoi Babang tahun 2006 hal ini terlihat bahwa dari 5.823

jiwa penduduk Kecamatan Jagoi Babang sebanyak 1.537 jiwa merupakan penduduk miskin. Rumah tangga miskin sebanyak 334 rumah tangga, penerima Askeskin mencapai 619 orang, jumlah penduduk yang terdaftar sebagai penerima raskin sebanyak 350 kepala keluarga, sedangkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 81 kepala keluarga.

4. Infrastruktur (Transportasi, Komunikasi, Air Bersih dan Listrik)

Wilayah perbatasan Jagoi Babang memiliki karakteristik medan yang relatif datar dan bergelombang, wilayah perbatasan yang demikian sangat memungkinkan dibangun jalan raya sejajar perbatasan. Kecamatan Jagoi Babang yang merupakan wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Bengkayang, hampir semua lokasinya dapat dijangkau melalui jalan darat dan adanya kondisi jalur jalan yang memadai untuk dilalui oleh kendaraan roda empat

Saat ini untuk mencapai batas negara di Jagoi Babang terdapat dua alternatif rute perjalanan yang dapat ditempuh mulai dari kota Pontianak yaitu rute I Pontianak – Singkawang – Bengkayang – Jagoi Babang berjarak sejauh 319 Km, sedangkan alternatif janan melalui rute II Pontianak – Anjungan – Bengkayang - Jagoi Babang berjarak sejauh 256 Km. Berdasarkan statusnya pada tahun 2003 wilayah perbatasan Jagoi Babang dilalui oleh jalan negara sepanjang 150 km, jalan provinsi sepanjang 106 km dengan lebar jalan rata-rata 3,5 - 4 meter, kondisi jalan aspal permukaan hotmix. Namun Untuk rute Anjungan – Bengkayang saat ini mengalami kerusakan dan sedang dalam perbaikan.

Kabupaten Bengkayang juga merupakan kabupaten yang juga banyak di lalui beberapa sungai, maka menjadi wajar jika transportasi air merupakan salah satu alternatif transportasi yang ada. Untuk

menjangkau daerah pedalaman transportasi air dapat menjadi pilihan, walaupun transportasi melalui sungai ini memiliki beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan jangkauan yang tergantung pada tinggi permukaan air dan lamanya waktu perjalanan.

Jaringan komunikasi seperti telepon umum, telepon seluler, pos, siaran televisi dan radio di wilayah perbatasan Jagoi Babang belum terlayani dengan baik. Pelayanan komunikasi berupa sambungan telepon hanyalah berupa warung telekomunikasi (wartel) yang menggunakan pemancar satelit. Sedangkan telepon seluler masih belum dapat digunakan dengan menggunakan provider Indonesia, tetapi masih harus menggunakan provider milik Malaysia, kecuali di beberapa tempat yang memang sudah berkembang seperti di Kecamatan Sanggau Ledo dan Seluas. Perkembangan teknologi telekomunikasi seperti pemanfaatan V-Sat dan Gelombang Micro serta telepon satelit untuk komunikasi sudah banyak dimanfaatkan. Sedangkan pemanfaatan internet sampai di kota kabupaten saat ini sudah ada walaupun masih sangat terbatas.

Pelayanan air bersih sehingga saat ini belum sampai ke wilayah perbatasan Jagoi Babang, kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari masyarakat menggunakan penampungan air hujan atau memperoleh dari sumber-sumber air alami seperti seperti dari mata air, sungai dan sumur.

Untuk kebutuhan listrik, sebagian besar penduduk di wilayah Jagoi Babang masih menggunakan listrik dengan sumber non PLN yang berupa mesin diesel yang penggunaannya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan pelayanan listrik oleh PLN masih sangat terbatas yaitu hanya mencapai ibukota kecamatan dan wilayah yang ada didekatnya.

lama karena adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, khususnya suku Dayak dan Melayu, serta mudahnya aksesibilitas ke Serawak maupun Sabah. Hubungan transportasi ke Serawak lebih mudah dan lebih dekat karena melalui jalan darat, sedangkan hubungan ke kota-kota yang ada di Kalimantan Barat juga telah dapat ditempuh melalui jalan darat namun sarana prasarana yang masih terbatas dan jarak tempuh yang cukup jauh.

Selain hubungan kekerabatan, Serawak memiliki daya tarik ekonomi bagi penduduk yang ada di wilayah perbatasan untuk mencari nafkah. Perkembangan sosial ekonomi yang cukup pesat di Serawak mengakibatkan penduduk di wilayah perbatasan cenderung berorientasi ke Serawak karena peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka luas, baik di perkebunan, bangunan, maupun sektor perdagangan (jasa). Di sisi lain, *ethos* kerja penduduk Serawak Malaysia yang cenderung menolak bekerja sebagai tenaga buruh membuat kesempatan kerja bagi para imigran Indonesia terbuka luas. Dengan demikian, kegiatan lintas batas saat ini tidak terbatas pada penduduk lokal saja melainkan pendatang dari daerah lain yang ingin mencari nafkah di Serawak Malaysia.

Dengan telah ditentukannya tapal batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Serawak (Malaysia) melalui pembangunan pilar sepanjang garis perbatasan, maka sejak 26 Mei 1967 mobilitas penduduk lintas batas diatur dengan mendirikan Pos Lintas Batas di wilayah perbatasan. Pada Oktober 1990 dibuka pos lintas batas internasional pertama di Desa Entikong dan pos lintas batas yang kedua berada di Jagoi Babang. Namun sampai saat ini pos lintas batas yang telah mempunyai fasilitas perbatasan yang lengkap hanya di Entikong. Di kedua pos ini sejak 1 Oktober 1990 dibuka Kantor Imigrasi dan Kantor Bea Cukai untuk menangani lalu lintas orang dan barang dari dan ke Serawak. Dengan didirikannya Pos Lintas Batas ini mobilitas

orang dan barang harus menggunakan izin dan dikenakan peraturan kepabeanan.

Dari Survey Kunjungan Asing yang dikumpulkan oleh Kantor Imigrasi Jagoi Babang diketahui jumlah kedatangan baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia dari luar negeri lebih banyak. Ini disebabkan banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya di Malaysia Timur. Dalam tahun 2005 rata-rata keberangkatan Warga Negara Indonesia per bulan sebanyak 354 orang atau 4.254 orang per tahun, sedangkan Warga Negara Indonesia yang datang per bulan rata-rata sebanyak 152 orang atau 1.825 orang per tahun.

Kalimantan Barat memiliki keistimewaan letak geografisnya yang cukup strategis yakni berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Ditambah lagi Malaysia Timur berbatasan darat dengan negara Brunei Darussalam. Adanya jalan darat yang menghubungkan Brunei Darussalam dan Malaysia Timur dan juga dari Malaysia Timur ke Kalimantan Barat menjadikan masyarakat ketiga negara ini mudah untuk melakukan kunjungan/perjalanan antar negara. Fakta yang ada yakni banyaknya pelintas batas yang tidak memiliki surat-surat resmi, pelintas batas tradisional yang melewati jalan-jalan tikus, dan terjadinya penyeludupan barang-barang dan perdagangan ilegal, termasuk kegiatan ilegal logging di Kabupaten Bengkayang, semuanya ini tentunya dapat dicegah dengan dapat dicegah dengan terbukanya border resmi atau PPLB tersebut.

Pembukaan PPLB di Jagoi Babang, adalah salah satu faktor pendukung yang sangat signifikan dalam menunjang pengembangan sektor pariwisata. Orang lebih mudah berkunjung ke wilayah Kalimantan Barat dengan terbukanya *Gate* resmi tersebut. Jika PPLB tersebut dapat difungsikan, maka penduduk akan semakin mudah keluar masuk. Karena *gate* resmi itu sendiri merupakan salah satu sarana penunjang kemudahan lalu lintas kedua negara. Keluar masuknya barang maupun orang lewat pintu

Tabel 5. Objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang:

No	Objek Wisata	Letak	Keterangan
1	Air Terjun Meresap	Dusun Segonde, Desa Pisak, Kec. Tujuh Belas	Ketinggiannya 20 meter. Objek unggulan di kawasan ini selain air terjun adalah aneka flora dan fauna juga patung Bunda Maria.
2	Danau Taipei	Kec. Monterado (53,18 km dari Ibukota Bengkayang)	Objek unggulannya adalah wisata air dan tempat perkemahan.
3	Riam Pelayo	Dusun Riam, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung (7 km dari Ibukota Bengkayang)	Ketinggiannya 10m, terdapat aneka flora dan fauna, juga tempat bermain anak.
4	Rumah Adat Panjang Samalantan	Kec. Samalantan (37, 39 km dari Ibukota Bengkayang)	Objek wisata budaya ini biasa digunakan untuk upacara ritual adat Suku Dayak "Naik Dango" setiap tanggal 27 April.
5	Salib Raksasa	Desa Monterado, Kec. Monterado. (53,18km dari Ibukota Bengkayang)	Didirikan pada zaman penjajahan belanda, sangat cocok untuk wisata sejarah.
6	Tiang Bendera Cina	Desa Monterado, Kec. Monterado. (53,18km dari Ibukota Bengkayang)	Objek wisata ini didirikan pada tahun 1776. Sangat cocok untuk wisata sejarah.
7	Benteng Belanda	Berada di jalur Bengkayang-Singkawang.	Dibangun oleh Belanda, letaknya di puncak gunung Vandreng dalam bentuk beton dengan kedalaman 5-6 m. Cocok untuk wisata sejarah.
8	Goa Romo	Terletak 51 km dari Ibukota Bengkayang	Goa alami dan ada kolam di dalam goa tersebut. Cocok untuk wisata sejarah.

Sumber: data diolah dari Profil Kabupaten Bengkayang, 2007

Dalam melakukan perjalanan wisata, ada banyak motif yang mendasari wisatawan. Motif tersebut antara lain : bersenang-senang, rekreasi, kebudayaan, olahraga, bisnis, konvensi, kesehatan dan spiritual. Dari motif wisata tersebut, tergambar jelas bahwa daerah Kabupaten Bengkayang cukup potensial jika dikembangkan sebagai daerah wisata. Selain itu, kedua tabel diatas jika kita kaitkan dengan bentuk-bentuk pariwisata¹⁴, dapat kita kategorikan sebagai daerah yang mempunyai peluang/potensi wisata, yaitu pariwisata rekreasi atau pariwisata santai , pariwisata budaya, pariwisata sejarah, pariwisata pulih sehat, dan pariwisata *sport* (olah raga). Untuk wisata budaya dan wisata sejarah, barangkali dapat diprioritaskan dan dikemas dengan menarik melalui manajemen pemasaran yang baik.

Wisata sejarah dan wisata budaya ini, dapat pula disajikan dengan bentuk desa-desa wisata, dengan menampilkan kondisi alami masyarakat adat yang memang masih asli. Orang asing kan datang untuk melihat kehidupan sehari-hari suku Dayak (sebagai penduduk asli Kalimantan) , khususnya Dayak Bidayuh di Kecamatan Jagoi Babang, termasuk bagaimana mereka melaksanakan ritual-ritualnya dan kerajinan-kerajinan tangan yang dimilikinya. Keberadaan rumah-rumah adat dan ritual-ritual mereka memang perlu dijaga serta dilestarikan.

Tentunya melalui *marketing* yang baik, dapat ditawarkan objek-objek pariwisata tersebut dengan maksimal. Keunggulannya bagi wisatawan asing terutama yang masuk dari PLB Jagoi Babang menurut hemat penulis adalah :

1. Tujuan wisata yang lebih dekat.
2. Tujuan wisata yang lebih murah
3. Tujuan wisata yang masih alami/natural.

Sedangkan tantangannya adalah belum digarapnya objek-objek wisata yang ada dengan profesional. Keberadaan objek-objek wisata

¹⁴ Lihat dalam Salah Wahab, 2003 *Manajemen Pariwisata*, hal 6

yang indah dan masih alami ini belum didukung oleh sarana-sarana wisata seperti hotel/penginapan, toko souvenir, dan lain sebagainya. Pemerintah dan sektor swasta harusnya tidak tinggal diam, akan tetapi memfasilitasi objek-objek wisata tersebut sehingga lebih memiliki daya tarik untuk dikunjungi.

Jika kita perhatikan dan bandingkan , Malaysia sadar betul dengan keunggulan pariwisata untuk meningkatkan devisa negara. Kemajuan pariwisata Malaysia dengan semboyannya yang terkenal *Malaysia Truly Asia*, tampak jelas dari pengelolaan objek-objek wisata yang ada di wilayahnya. Padahal untuk panorama dan keindahan objek wisata di sana tidak berbeda jauh dengan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, karena masih sama-sama berada di Pulau Borneo.

Keseriusan Malaysia mengembangkan pariwisata tampak dengan bagaimana mereka mengembangkan Sipadan dan Ligitan sehingga dapat memenangkan klaim dari ICJ/Mahkamah Internasional, dimana mereka dianggap telah mengelola dengan baik potensi wisata di kepulauan tersebut. Mereka juga tampak serius dengan keberadaan fasilitas-fasilitas penunjang wisata. Jadi belajar dari Malaysia, menurut hemat penulis yang terpenting untuk objek wisata di wilayah Jagoi Babang ini adalah persoalan promosi dan fasilitas.

2. Faktor Tantangan

a. Perlunya membangun infrastruktur dan pasar

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, angkutan umum, listrik, air bersih, sarana telekomunikasi, sarana dan prasarana wilayah lainnya *is a must* atau mutlak diperlukan untuk mendukung aktifitas, mobilitas maupun pengembangan wilayah ini , sebagaimana diperlihatkan di bagian awal tulisan ini bahwa kondisi infrastruktur di Kecamatan Jagoi Babang belum memadai. Pembangunan ini tentunya harus berlandaskan Rencana Umum

Tata Ruang yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah untuk Kecamatan Jagoi Babang .

Sedangkan mengenai pembangunan pasar, selama ini warga Kalimantan Barat banyak yang berjualan di pasar Serikin (Malaysia). Pasar ini berlangsung tidak setiap hari, namun hanya hari Sabtu-Minggu, jadi sejak Jumat malam warga yang akan berjualan sudah masuk ke Serikin. Masyarakat menjual hasil tani atau kebunnya ke Pasar Serikin. Malaysia. Selain hasil tani dan kebun seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, karet, lada, kakao, kelapa sawit, masyarakat juga menjual anyaman tikar bidai¹⁵ yang ternyata sangat digemari masyarakat Malaysia. Harga jual yang ditawarkan di Pasar Serikin Malaysia cukup tinggi dibandingkan jika dijual di wilayah sendiri. Sehingga meningkatkan arus pelintas batas dari wilayah Jagoi Babang maupun dari wilayah lainnya.

Di pasar Serikin, para pedagang yang berasal dari Kalbar tersebut disiapkan kios kecil atau lapak-lapak di pinggir jalan. Setiap hari para pedagang tersebut ditarik redistribusi sebesar 50 RM . Warga Jagoi Babang sendiri banyak yang berjualan di Pasar Serikin. Selain warga Jagoi Babang, warga dari Kota Pontianak, Singkawang dan Kabupaten lain di Kalbar juga banyak yang berjualan di sini.

Menurut penulis pembangunan pasar yang representatif di Kecamatan Jagoi Babang akan membuat warga masyarakat yang biasa berjualan di Serikin, dan warga Malaysia yang biasa berbelanja di Serikin justru akan masuk ke wilayah Indonesia. Namun pembangunan pasar ini juga harus memperhatikan aspek keindahan dan kebersihan sehingga dapat menjadi tempat tujuan berbelanja bagi pengunjung asal Malaysia. Pasar ini juga perlu dilengkapi dengan hasil-hasil kerajinan khas Kalbar atau kalau

¹⁵ Masyarakat Jagoi Babang banyak yang menjadi pengrajin tikar bidai (terbuat dari rotan dan akar kayu). Tikar ini biasanya digunakan seperti karpet, bisa juga untuk menjemur padi. Biasanya dijual dengan harga Rp.50.000-250.000. Menganyam tikar bidai merupakan pekerjaan pokok masyarakat Jagoi Babang.

perlu dari wilayah lain di Indonesia. Keberadaan pasar dibuat unik dan bernuansa etnik, dilengkapi dengan *art shop* atau *souvenir shop*. Sehingga dapat menjadi tempat yang strategis untuk wisata belanja.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga telah berencana akan membangun pasar rakyat di sekitar titik 0 (nol) /garis perbatasan, yang juga akan dilengkapi dengan arena permainan anak-anak¹⁶. Bila hal itu dapat terwujud tentunya dapat menjadi stimulus bagi perkembangan pariwisata di kawasan perbatasan dan meningkatnya investasi di sektor pariwisata, jika dikelola secara profesional .

b . Perlu adanya produk kerajinan unggulan dan makanan khas unggulan

Selama ini penulis telah melakukan cukup banyak perjalanan ke Jagoi Babang dan Kabupaten Bengkayang, namun belum pernah menemukan produk kerajinan yang menjadi unggulan dan makanan unggulan di daerah ini. Juga belum ditemukan rumah makan/*restaurant* yang representatif di Kecamatan Jagoi Babang. Padahal ini sangat penting direalisasikan untuk menunjang pariwisata daerah.

Di samping itu, produk kerajinan biasanya dicari oleh tamu-tamu asing untuk oleh-oleh, demikian pula makanan khas daerah ini. Sehingga usaha-usaha untuk mengembangkannya juga dianggap penting oleh penulis. Kerajinan tikar bidai sebenarnya cukup potensial dan dapat dijadikan kerajinan khas Kecamatan Jagoi Babang, jika dikelola secara lebih profesional untuk menjaga mutu kerajinan tersebut. Namun perlu juga produk yang mudah dibawa seperti cinderamata atau souvenir yang kiranya bisa dijadikan oleh-oleh.

¹⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Bappeda Kabupaten Bengkayang, bulan Mei 2008

E. Penutup

Daerah perbatasan di Kalimantan Barat masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah Malaysia, demikian pula Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang yang masih merupakan Kecamatan yang langsung berbatasan dengan Malaysia Timur. Dari faktor-faktor peluang dan tantangan untuk mengembangkan potensi wisata di daerah ini, paling tidak dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penanganan wilayah Kecamatan Jagoi Babang untuk menjadikannya sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Barat. Beberapa hal tersebut, yaitu :

1. Perlunya diterbitkan payung hukum wilayah perbatasan
2. Perlunya segera merealisasikan pengoperasian PPLB di Jagoi Babang.
3. Perlunya melengkapi objek-objek pariwisata yang ada dengan infrastruktur pendukung, fasilitas yang memadai, dan promosi yang baik.
4. Perlunya segera dibangun pasar rakyat, dilengkapi dengan *souvenir shop* dan *art shop* di Kecamatan Jagoi Babang.
5. Perlu adanya souvenir khas daerah, produk kerajinan unggulan dan makanan khas unggulan dari daerah ini.

Jika kelima hal tersebut dapat diwujudkan, penulis yakin Kecamatan Jagoi Babang yang merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, akan menjadi daerah tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun manca negara, khususnya yang masuk melalui PPLB Jagoi Babang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Awani Irewati (Ed). 2006, *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi*, Jakarta : P2P

Dikshit, R.D. 1982. *Political Geography : A Contemporary Perspective*, New Delhi: Tata Mc.Grow-Hill Publishing Company Limited.

Suharsono, 2001, *Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia* dalam Jurnal Luar Negeri No 41, Jakarta

Wahab, Salah. 2003 *Manajemen Pariwisata*, Jakarta : Pradnya Paramitra

Jurnal, makalah, dan lainnya:

Haba dan Siberian, “Faturika dan Mandeu Raimanus: Mengenal Potensi Dan Kendala Daerah perbatasan Di Pulau Timor”, dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Jilid XXXI, No.1 2005

Laporan Hasil Penelitian, 2006. *Penataan Gate Jagoi Babang*, Tim Peneliti Universitas Tanjungpura dan Bappeda Kabupaten Bengkayang,

Pangdam Tanjungpura, *RUTR Kalbar Revisi*, Disampaikan dalam Seminar Litbang Dephan di Pontianak, 17 Mei 2008.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, 2007. *Profil Kabupaten Bengkayang*

Kecamatan Jagoi Babang, 2006. *Profil Kecamatan Jagoi Babang*

HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK: EKSISTENSINYA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR

Oleh: Poltak Johansen¹

Pendahuluan

Terkait dengan hukum adat, Cicero pernah menyatakan “dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas, ibi ius*)”. Hal ini dikarenakan sesederhana apapun suatu masyarakat, selalu mempunyai aturan atau hukum yang dijadikan penuntun dan pedoman dalam kehidupan masyarakat, baik ke dalam maupun ke luar masyarakat bersangkutan (Anyang, 2003:1). Prilaku mereka di pengaruhi oleh aturan yang bersifat dinamis, baik yang diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya maupun adanya aturan baru atas dasar kesepakatan yang timbul akibat perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Anyang (2003:1) di Indonesia aturan yang tumbuh, berkembang dan berlaku dalam masyarakat disebut adat, dan adat yang memiliki sanksi disebut hukum adat. Istilah hukum adat yang dikembangkan di Indonesia, merupakan terjemahan dari perkataan Belanda, yakni *adatrecht* yang digunakan semasa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Kartohadiprodjo (1967:131) istilah *adatrecht* untuk pertama kali dipakai Snouck Hurgronje. Dipertegas oleh Soemadiningrat (2002:14), hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang

¹ Penulis adalah staf peneliti pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai tradisional Pontianak

berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.

Istilah hukum adat mengemuka mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keanekaragaman hukum adat² yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam menyelesaikan perkara dalam suatu masyarakat tidak selamanya menggunakan hukum pemerintah tetapi diserahkan pada kelompok masyarakat menurut adat yang berlaku. Demikian halnya dengan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Landak, mereka memiliki aturan atau hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan. Aturan atau hukum tersebut bersifat dinamis, baik yang diwariskan dari generasi ke generasi maupun aturan baru atas kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan perkembangan mereka.

Oleh karenanya, adat istiadat dan hukum adat dalam suatu masyarakat sebagai hasil budaya leluhur memiliki nilai yang sangat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pentingnya adat dan hukum adat ini diberlakukan karena merupakan pengatur atau piñata seluru prilaku sosial masyarakat dengan segala aspek kehidupannya. Thambun Anyang (2001:10) mengemukakan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki aturan yang mengatur prilaku mereka dalam hubungannya ke dalam dan ke luar masyarakatnya .

Masyarakat Adat Dayak

Sebutan Dayak adalah sebuah sebutan untuk menjelaskan suku bangsa yang disepakati sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan. Kehidupan keluarga orang Dayak berwujud keluarga batih dan juga berwujud pada keluarga luas yang pada awalnya hidup dalam satu

² Secara garis besar Van Vollenhoven, membagi wilayah Indonesia dengan dal 19 lingkungan hokum adat (*rechtskringen*)

kesatuan yang tinggal dalam rumah panjang. Sehingga dalam satu kesatuan tempat tinggal merasa dirinya satu pertalian kekerabatan dan menumbuhkan kohesi sosial yang amat kuat.

Masyarakat adat yang bersifat homogen memiliki kekuatan internal yang sangat besar untuk mempertahankan penerapan hukum adat. Homogenitas masyarakat adat dari segi etnis dan agama (kepercayaan asli), dengan sendirinya memiliki persepsi relatif sama terhadap masalah sosial dan hukum adat yang mengaturnya. Kesamaan pandangan tersebut, tidak akan menggeser adat-istiadat dan hukum adat. Kalaupun terjadi dinamika, masih dapat dikontrol secara efektif. Karena itu, pandangan, sikap, dan penerapan terhadap hukum adat masa lalu tidak pernah menimbulkan masalah. Keberadaannya telah mampu mengantarkan masyarakat mencapai hidup damai dan sejahtera secara internal.

Mereka hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan dan hukum adat tersendiri. Bagi masyarakat Dayak Kanayat'n, adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun temurun, sedangkan hukum adat merupakan aturan-aturan dan sanksi yang dibelakukan bagi masyarakat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keefektifan peran adat istiadat telah memperkuat komitmen masyarakat untuk mempertahankannya sebagai aturan tidak tertulis. Upaya tersebut telah melahirkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari adat istiadat. Adat istiadat yang diikuti oleh sanksi tersebut telah melahirkan konsep hukum adat yang diikuti oleh berkembangnya lembaga dan perangkat hukumnya dengan tugas melaksanakan kontrol terhadap kehidupan masyarakat adat.

Mereka juga memiliki pimpinan persekutuan di setiap wilayah dan memiliki sebutan yang berbeda-beda di setiap wilayah kesatuan adat. Untuk wilayah Kabupaten Landak yang dihuni oleh masyarakat Dayak Kanayat'n dengan pimpinan persekutuan memiliki sebutan *Temenggung*. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih dengan

ketentuan-ketentuan seperti mengetahui dan menguasai adat istiadat, hukum adat dan penerapannya, pandai bicara dan pemberani. Sehingga dalam diri seorang temenggung ada kharisma yang patut ditiru dan perkataannya dituruti.

Hal ini mengingat para pemimpin adat ini dipilih dari orang yang benar-benar memahami adat istiadat demikian juga masalah hukum adat. Seorang temenggung dengan demikian merupakan orang yang memahami tentang adat, mempunyai kewenangan dalam hal adat, dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat. Kekuasaan dan wewenangnya sebatas pada wilayah kesatuan genealogis atau kesatuan wilayah adat. Hal ini juga membuat tradisi adat dilingkungan mereka sangat kuat, mengingat ikatan kekerabatan yang begitu kuat dalam kalangan masyarakat. Adat juga dianggap sebagai kontrol dalam pola pengendalian sosial dalam masyarakat, masyarakat yang melanggar adat akan diberi sanksi. *Temenggung* atau Ketua adat selaku pemimpin dalam satu wilayah teritorial ketika memutuskan sanksi harus berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Kesatuan wilayah masyarakat Dayak Kanayatn yang dikenal dengan *binua* itu adalah “wilayah kesatuan hukum adat yang dihuni oleh suatu masyarakat dengan kepemimpinan *Timanggong*” (Bahari-S., Alloy, & Flavia, 1996: 21). Untuk menjalankan peranannya dalam kehidupan, masyarakat hukum adat memiliki unsur-unsur dasar dari sistem hukum adat itu sendiri. Unsur dasar tersebut menjadi corak atau pola yang mewujudkan struktur kejiwaan dan cara pikir dalam masyarakat adat. Menurut Soepomo, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kesamaan yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kebersamaan yang menyeluruh
2. Mempunyai corak *magis-religijs*, yang berhubungan dengan pandangan hidup

3. Sistem hukum adat itu diliputi pikiran yang serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkrit dalam mengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum di-anggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan satu ikatan yang dapat di-lihat atau tanda yang tampak (Soekanto, dan Taneko, 1983).

Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Landak secara turun temurun dan secara alami telah menciptakan suatu nilai-nilai dan aturan-aturan, kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, yang meliputi hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan alam serta hubungan dengan “Sang Pencipta” (*Jubata*). Hubungan tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan upacara-upacara adat, adat istiadat dan hukum adat, di mana dalam pelaksanaannya diatur oleh pengurus adat yang dianggap sebagai orang yang terpercaya dan berwibawa serta memiliki kemampuan yang istimewa dibandingkan dengan orang lain.

Dari segi teritorial komunitas, masyarakat adat, adalah penguasa dan pemilik kesatuan wilayah adat yang dihormati dan diakui secara adat. Kelompok masyarakat lain harus mengakui dan menghormati keberadaan tersebut secara itu. Dengan kata lain komunitas masyarakat Dayak (adat) membentuk kelompok yang bertetangga terdiri dari persekutuan hidup yang kecil dan secara adat memiliki pemerintahan sendiri suatu pemerintahan, yang secara adat dan hukum adat daerah itu disebut wilayah adat³.

Sebagai wilayah adat ada kepastian hubungan hukum antara anggota persekutuan dengan suatu bidang tanah tertentu dan

³ Dalam pemerintahan tradisional sebelumnya wilayah kesatuan ini masih diakui oleh pemerintah yang disebut dengan *kampung* atau wilayah yang lebih luas adalah *binua*. Munculnya UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979 maka wilayah adat atau *binua* berubah menjadi desa.

menyatakan diri berlaku “ke luar” dan “ke dalam⁴. Tanah yang telah digarap, secara adat mendapat pengakuan sebagai hak penguasaan atas tanah⁵. Namun apabila orang yangenggarapnya meninggalkan wilayah persekutuan dan tidak akan kembali lagi hingga tanah tersebut telah lama tidak diolah, maka penguasaan atas tanah dapat hilang. Hak penguasaan tanah kembali kepada persekutuan dan melalui musyawara tanah tersebut dapat menjadi tanah adat, dan atas izin pemimpin adat dan persetujuan masyarakat, tanah tersebut dapat diberikan untuk diolah kembali.

Hak tanah secara adat atau yang dikenal dengan hak ulayat dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) juga mengakui tentang keberadaan hak ulayat ini. Dimana dalam penjelasan UUPA menjanjikan bahwa suatu masyarakat hukum adat akan didengar pendapatnya, apabila suatu hak tanah akan diberikan kepada seorang di luar masyarakat adat. Dan kepada masyarakat adat yang bersangkutan akan dibayarkan *recognitie*, yang memang berhak menerima sesuai dengan hukum adat yang berlaku (dalam Singarimbun 1992:5).

Sistem pemerintahan Masyarakat Adat di Kabupaten Landak sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 mengenal bentuk pemerintahan *Binua* (pemerintahan asli). Namun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

⁴ Fauzi Ridwan bukunya *Hukum Tanah Adat* Tahun 1982. mengatakan: Hubungan yang erat antara persekutuan hukum dalam masyarakat dengan tanah dalam wilayahnya dinamakan *hak ulayat*. Berlaku “ke luar” dalam hal ini hanya anggota masyarakat adat yang memiliki dan memegang hak penuh untuk mengerjakan, mengolah,enggarap dan memungut hasilnya dari tanah yang digarap maupun dari hutan yang ada di sekitarnya.

Berlaku “ke dalam” merupakan pengaturan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah atau lahan sesuai dengan norma-norma adat yang disepakati bersama. Dalam pengolahan lahan masyarakat adat dapat menguasai, mengolah, menanami tanah dan memungut hasilnya.

⁵ Bahwa adat demikian menunjukkan pada suatu konsepsi dimana pada awalnya pemilihan tanah perorangan bagi masyarakat Dayak dibentuk dan ditentukan oleh relaita kerja atas tanah. Lihat tulisan Mudyono dalam Makalah “Perubahan Struktur Pedesaan Masyarakat Dayak: dari Rumah Panjang ke Rumah Tunggal”. Disampaikan pada seminar Expo Budaya Dayak 1992 di Pontianak.

telah merusak sistem pemerintah *Binua* yang telah dimiliki oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Landak sejak sebelum Negara Indonesia terbentuk. Beberapa penulis telah menunjukkan, banyak *Timanggong* telah menuturkan, bahwa perubahan dari *Binua* ke Desa tanpa disadari telah mengikis adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat

Berubahnya *Binua* menjadi Desa menimbulkan sejumlah implikasi negatif, dalam masyarakat adat yakni; lembaga adat menjadi lemah dan berakibat berkurangnya kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pemimpin adat dan hukum adat. Walaupun lembaga adat masih dibiarkan hidup, tetapi fungsinya dibatasi pada hal-hal yang tidak mengurangi hegemoni negara melalui Pemerintahan Desa atas Masyarakat Adat. Perubahan tersebut juga memunculkan dualisme kepemimpinan pada tingkat desa, dimana kepala desa mencoba menerapkan legalitas hukum formal sedang *Timanggong* bertahan pada kebenaran hukum adat.

Berubahnya struktur sosial, telah mempengaruhi sistem kemasyarakatan yang berdampak pada perilaku dan pola pikir masyarakat. Bersamaan dengan itu persepsi pemahaman dan ketaatan terhadap hukum adat banyak sedikitnya mulai mengalami perubahan. Sorotan terhadap hukum adat dari sudut pandangan yang berbeda telah menimbulkan sikap pro dan kontra terhadap eksistensi adat-istidaat dan hukum adat.

Namun bagaimanapun, masyarakat setempat tetap berpegang pada hukum adat sebagai alat penyelesaian berbagai persoalan sosial mereka. Dengan demikian, eksistensi hukum adat sebagai salah satu kebutuhan keamanan tetap akan dipertahankan oleh komunitas setempat walaupun berada di tengah masyarakat yang cenderung berkembang.

Hukum Adat dalam Masyarakat Adat

Di awal telah dikatakan bahwa tidak adak satu suku bangsa di Indonesia ini yang tidak mempunyai adat dan hukum adat. Sesuai dengan tradisi dan adapt istiadat masyarakat, hukum adat diberlakukan hanya untuk mengutamakan kerukunan, kepatutan, keselarasan, kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat. Dengan kata lain, suatu keadaan apabila hukum adat tidak lagi menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan seseorang atau suatu keluarga, sementara berbagai aturan dari luar diberlakukan maka masyarakat akan kurang memahami dan bahkan dapat meninggalkan tata nilai yang selama ini mengatur kehidupan mereka.

Bagi masyarakat Dayak Kanayat'n, dalam beriinteraksi terhadap sesamanya terikat dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat hal ini bagian dari adat istiadat⁶ yang berkembang dalam masyarakat dan sangat dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Pelaksanaan aturan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat umumnya masih dipatuhi dan dihormati mengingat sanksi adat masih diberlakukan bagi siapa yang melanggarnya. Sehingga warga masyarakat tidak ada yang berani melanggar tatakrma yang telah termuat dalam aturan-aturan atau norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Mereka percaya, pelanggaran terhadap adat, tidak saja mendatangkan marabahaya bagi diri yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Apabila ada yang melanggar norma atau aturan yang berlaku untuk menjaga keharmonisan alam sanksi adaat haruslah dijalandkan Oleh karena itu, tatakrma adat ini mereka jaga dengan utuh dan diusahakan akan tetap lestari .

Bagi masyarakat Dayak, adat istiadat tidak boleh dilanggar atau ditentang, tetapi harus dipatuhi dan dilasanakan oleh warga masyarakat. Barang siapa melanggar adat istiadat, ia akan menerima

⁶ Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat selalu diikuti dengan pelaksanaan hukum adat, bagi masyarakat Dayak adat dan hokum adat haruslah sejalan.

hukuman secara langsung dari masyarakat berupa sanksi adat yang telah disepakati bersama dalam bentuk hukum adat atau mendapat *tulah*⁷. Adat istiadat ini mencakup seluruh tata tertib, baik itu tentang kehidupan maupun kematian. Adanya sanksi adat yang diberikan membuat masyarakat Dayak selalu menginginkan keharmonisan baik terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungannya⁸. Jika mereka tidak menjaga keselarasan dalam berhubungan dengan alam maka dalam kepercayaan mereka alam akan memberikan bencana pada kehidupan mereka

Oleh karenanya terbentuknya hukum adat tidak terlepas dari upaya-upaya komunitas yang menginginkan keteraturan hidup dalam hubungan sosial mereka. Menurut Soekanto dan Taneko (1983) hukum adat bermula dari keinginan seseorang untuk mempertahankan kesusilaan dalam pergaulan hidup pribadinya melalui cara-cara (*usage*) tertentu. Cara pribadi tersebut, kemudian meluas dan mempengaruhi perilaku masyarakat dan membentuk kebiasaan umum (*folksways*). Selanjutnya, kebiasaan menjai tata kelakuan (*mores*) dan akhirnya menjadi adat istiadat (*custom*).

Pemberlakuan hukum adat (hukum tidak tertulis) terhadap suatu kasus tidaklah meniadakan pemberlakuan aturan perundangan (hukum tertulis) manakala aparat penegak hukum menghendaknya dan ada dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan hukum adat, semua persoalan hanya dapat diselesaikan oleh fungsionaris adat⁹. Berbagai persoalan adat diupayakan selesai pada hari atau malam diselenggarakannya

⁷ Menurut kepercayaan masyarakat *tulah* merupakan suatu hukuman atau ganjaran yang diberikan Sang Pencipta pada manusia. *Tulah* yang diberikan dapat berupa wabah penyakit, gagal panen atau bencana. Oleh sebab itu masyarakat Dayak sangat kuat dalam melaksanakan adat istiadat terlebih yang berkaitan dengan kehidupan religi berupa tradisi-tradisi yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

⁸ Lingkungan masyarakat Dayak adalah hutan, rusaknya hutan juga akan merusak tatanan hidup dan adat istiadat masyarakat Dayak itu sebabnya masyarakat Dayak tidak berani merusak hutannya. Di satu sisi dalam kepercayaan masyarakat Dayak hutan merupakan tempat tinggal Sang Penguasa Alam dan roh para leluhur, Lihat *Laporan Hasil Penelitian Poltak Johansen tentang "Persepsi Masyarakat Dayak Terhadap Hutan"* Tahun 2001.

⁹ Fungsionaris adat dalam Masyarakat Adat Dayak merupakan orang yang berkompeten dalam memutuskan perkara adat dengan sebutan, Temenggung, Patih, Demang, Pasirah, Pangaraga, Tetuah Adat.

penyelesaian perkara adat, sangat jarang yang memakan waktu berhari-hari. Berbeda dengan pelaksanaan hukum tertulis atau hukum positif yang proses penyelesaiannya akan memakan waktu yang begitu panjang.

Penerapan hukum adat dalam Masyarakat Adat Dayak (khususnya Dayak Kanayat'n) memiliki suatu filosofi yaitu "*adat labih Jubata bera, adat kurang antu bera*". Maksud dari ungkapan tersebut adalah jika hukum adat diterapkan berlebihan maka *Jubata* atau Tuhan akan marah, jika hukum adat diterapkan tidak sesuai atau kurang maka hantu yang marah. Pesan utama yang terkandung dalam ungkapan tersebut adalah bahwa Masyarakat Adat Dayak selalu mengutamakan keadilan dalam segala aspek kehidupannya. Pada dasarnya Masyarakat Adat Dayak berupaya untuk menerapkan hukum adat dengan seadil mungkin sehingga tercipta suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan Koentjaraningrat dalam Hendarta (2005:41) yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan norma sosial yang sangat penting bagi terciptanya keteraturan sosial untuk seluruh kelompok sosial yang ada. Dengan kata lain hukum adat adalah sebagai sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, pada Masyarakat Dayak hukum adat juga memiliki sifat sakral. Sifat sakral tersebut, menuntut dalam pelaksanaannya hukum adat dijalankan secara adil dan bijaksana dan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itu, lahirlah figur-figur pelaksana atau kaum fungsionaris adat yang sangat dihormati oleh warga masyarakat. Sebagai pengambil keputusan perkara adat yang bijaksana, istilah *timanggong* berasal dari kata *timang* (*nimang*) dan *gong*. *Timang* artinya mem-pertimbangkan (*nimang-nimang*), sedangkan *gong* menunjukkan suara yang mengakhiri atau memutuskan perkara. Artinya, keputusan perkara yang dilakukan *timanggong* berdasarkan pertimbangan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, sangatlah bijaksana. Kebijakan

yang melekat pada figur *timanggong* tersebut telah menambah kekuatan hukum adat sehingga mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakatnya.

Pada prinsipnya, dalam dunia hukum belum ada istilah khusus yang digunakan terhadap hukum adat. Dunia hukum hanya mengenal istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* (Prancis), *recht* (Jerman dan Belanda), dan *diritto* dalam bahasa Italia yang berarti hukum (Kartohadiprodjo (1967). Dengan demikian, hukum adat boleh dikatakan sebagai dunia hukum yang sangat spesifik. Dalam sejarah penjajahan di Indonesia, pemerintah Jajahan Belanda (VOC) tidak pernah berminat memahami hukum adat. Hal tersebut diperkuat Vollenhoven (1981) yang mengatakan bahwa masa kompeni tidak sampai pada penemuan hukum adat. Kurangnya motivasi untuk menemukan hukum adat se-tempat, kemungkinan disebabkan oleh perkembangan hukum positif di Eropah.

Menurut Soerjono dan Taneko (1983) hukum adat bermula dari keinginan seseorang untuk mempertahankan kesusilaan dalam pergaulan hidup pribadinya melalui cara-cara (*usage*) tertentu. Cara pribadi tersebut, kemudian meluas dan mempengaruhi perilaku masyarakat dan membentuk kebiasaan umum (*folk-ways*). Selanjutnya, kebiasaan menjadi tata kelakuan (*mores*) dan akhirnya menjadi adat-istiadat (*custom*). Dengan demikian pandangan bahwa masyarakat sejak awal sudah diatur berdasarkan hukum formal hampir tidak mungkin. Eksistensi hukum adat diperkuat oleh Vollenhoven (1981). Ia mengatakan, walaupun tidak sampai pada penemuan substansinya, namun setelah tahun 1600-1800 pemerintah Hindia Belanda sering menerima laporan-laporan tentang catatan-catatan hukum adat dari pendeta-pendeta dan orang lain yang berasal dari luar negeri.

Tidak menutup kemungkinan, pengalaman-pengalaman tersebut menjadi masukan dari orang-orang Belanda untuk mulai mendalami konsep hukum adat di Indonesia. Karena itu jangan heran, jika istilah

hukum adat yang berkembang di Indonesia, merupakan terjemahan dari perkataan Belanda, yakni "*adatrecht*" yang digunakan semasa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Kartohadiprodjo (1967: 131) istilah *adatrecht* untuk pertama kali dipakai Snouck Hurgronje, sehingga ia dianggap sebagai penemu hukum adat. Kemudian dipakai oleh pengarang-pengarang lainnya seperti Nederburg, dan Juynboll. Tetapi pemakaian mereka baru sekedar sambil lalu, hanya untuk kasus hukum Indonesia asli, terlepas dari akibat pengaruh-pengaruh luar, seperti pengaruh agama.

Sementara itu pada penyelesaian sengketa menurut hukum adat, dikenal tahapan-tahapan dalam proses penyelesaiannya, yakni melalui tahapan proses penyelesaian secara kekeluargaan¹⁰ dan tahapan penyelesaian melalui peradilan adat. Penyelesaian melalui Peradilan adat terdiri dari beberapa tahapan, walaupun tahapan ini kini sudah tidak selalu diikuti secara ketat. Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa dalam Hukum Adat ini, tidak dapat dipandang sebagai lembaga banding atau kasasi seperti dikenal pada peradilan Umum, sebab yang terjadi adalah hanya memperluas atau memperbanyak jumlah tetua adat dan fungsionaris Adat yang terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa.

Sanksi adat biasanya dibayar pada saat keputusan adat, sebab hal ini akan menimbulkan rasa malu jika tidak dibayar pada saat itu juga, apalagi kalau sama sekali tidak dibayar. Bagi masyarakat berperkara saja sudah dianggap memalukan, apalagi kalau dikenakan sanksi adat. Oleh karena itu, masyarakat adat lebih mengutamakan menghindari terjadinya pelanggaran adat.

Adanya isu tentang komersialisasi Hukum Adat dalam beberapa tahun terakhir ini perlu diteliti dan dikaji kebenarannya. Hal ini tentu dapat saja terjadi dalam pemberlakuan Hukum Adat, terlebih jika

¹⁰ Dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan biasanya hanya dihadiri oleh kerabat dari masing-masing pihak yang berperkara, penyelesaian pada tahap ini juga berdasarkan hukum adat. Penyelesaian secara kekeluargaan bukan merupakan peradilan adat sehingga tidak dilakukan di depan umum.

yang memutuskan perkara bukan dilaksanakan oleh para Fungsionaris Adat atau tetua adat yang sesungguhnya yang tidak memahami dan menguasai Hukum Adat. Komersialisasi hukum adat ini umumnya dilakukan oleh mereka-mereka yang bukan Fungsionaris Adat atau bahkan lebih dikenal dengan istilah “preman adat”¹¹ Namun tidak menutup kemungkinan selaku manusia biasa oknum-oknum Fungsionaris Adat dapat terjerumus dalam hal-hal komersialisasi. Perbuatan komersialisasi Hukum Adat ini tentu sangat merusak nama baik Fungsionaris adat bahkan merusak Masyarakat Adat sebagai pemegang teguh Hukum Adat, dan jika dilihat dari perbuatannya hal ini juga melanggar adat.

Dalam menyelesaikan perkara adat, para tetua adat atau fungsionaris adat tidak dapat melakukannya secara semena-mena tetapi tetap berpegang pada sistem nilai dan aturan serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada masyarakat Dayak Kanayat'n ada beberapa falsafah yang telah hidup dalam masyarakat yang mendasari tata kehidupan masyarakat dan sebagai pegangan bagi para Tetua Adat atau fungsionaris Adat dalam menjalankan tugasnya terlebih ketika harus menjatuhkan sanksi, seperti; “*Adil ka' Talino, Bacarumin ka' Surga, Basengat ka' Jubata*” (yang mengandung arti berbuat adil terhadap sesama manusia, bercermin ke surga dan berdoa pada Tuhan). Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kehidupannya manusia harus menjaga hubungan terhadap sesamanya begitu juga terhadap Tuhannya. Di satu sisi juga adanya makna ungkapan tersebut tentang kehidupan dunia dan akhirat. Filosofi tersebut kini telah berkembang, sebab disetiap pertemuan dalam komunitas adat selalu diucapkan pada setiap awal pembicaraan.

Selain itu dalam memutuskan perkara melalui hukum adat para Tetua Adat dan Fungsionaris Adat juga berpegang pada ungkapan

¹¹ Umumnya mereka yang mengkomersialkan hukum adat adalah orang yang tidak memahami benar makna dari adat dan hukum adat itu sendiri, disatu sisi mereka-mereka ini hanya mencari kesempatan dalam suatu persoalan untuk kepentingan sepihak. Lihat Christiaus Atok dkk, dalam buku “Dayak Menggugat” YPB. Pontianak 2003

yang mengatakan “*Adat labih jubata bera, adat kurang antu bera*” (artinya Adat lebih Tuhan marah, adat kurang hantu marah) Ajaran atau falsafah yang telah lama mereka pegang, dimaksudkan agar putusan-putusan yang ditetapkan para fungsionaris adat dalam menjatuhkan sanksi adat untuk *peraga adat* tidak dilebih-lebihkan atau juga tidak boleh kurang, tetapi harus melahirkan keindahan, kedamaian bukanlah untuk dilebih-lebihkan. Putusan yang diberikan tidak boleh berdasarkan kehendak pribadi atau demi kepentingan sekelompok orang hingga berlebih-lebihan atau kurang dari seharusnya. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, hal tersebut dapat menimbulkan tidak harmonisnya hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Sebenarnya dalam penyelesaian suatu permasalahan berdasarkan hukum adat pada awalnya haruslah berdasarkan asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, sehingga hubungan mereka dengan alamnya maupun hubungan mereka terhadap sesama dan terhadap Sang Pencipta senantiasa dapat dijaga. Oleh karenanya kehidupan mereka senantiasa tetap perpedoman pada adat atau norma-norma serta nilai-nilai yang mengatur tatanan kehidupan mereka, bagi siapa yang melanggar tentu akan diberlakukan sanksi adat berdasarkan hukum adat.

Persoalan hukum adat tidak semuda apa yang dipikirkan atau diucapkan dalam realitanya banyak hal-hal yang terkadang dijumpai benturan-benturan dalam masyarakat terlebih bagi masyarakat luar. Adanya anggapan bahwa dengan hukum adat tidak ada kepastian hukum suatu anggapan yang timbul oleh karena hukum adat bersifat tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Namun bagi masyarakat adat Dayak Kanayat', hukum adat dianggap sebagai sarana yang mampu mengontrol atau menjaga keserasian hubungan mereka dengan sesama dan alamnya demikian juga terhadap sang penciptanya. Rusaknya moral atau bergesernya nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat sebagian besar disebabkan oleh pengaruh kurang berperannya lagi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Oleh

karenanya peran hukum adat tidak hanya mempersatukan dan mendamaikan dalam kehidupan bermasyarakat melainkan juga dapat menjaga masyarakat untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Bahkan hukum adat dapat menyelesaikan persoalan premanisme dan berbagai bentuk kekerasan serta kerusakan lingkungan dengan cara membuat sanksi adat yang sesuai dengan adat kepatutan dan rasa keadilan yang hidup pada masing-masing suku sesuai dengan kesepakatan adat atas dasar musyawara. Untuk itu diperlukan para fungsionaris adat yang berwibawa mampu menegakkan hukum adat yang berlaku pada masing-masing suku atau pendukung budaya yang bersangkutan

Dalam penerapannya hukum adat memiliki sanksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, penerapan adat istiadat dan hukum adat dapat menjamin perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya penyelesaian hukum adat, seorang terdakwa dapat menunaikan kewajibannya melalui dua cara. Pertama, membayar sanksi hukum adat (*pabayar*) dengan cara mengeluarkan semua peraga sanksi hukum adat tersebut secara natura (dinamakan *kurobokng*) sesuai keputusan. Kedua, membayar sanksi hukum adat dengan cara menggantikannya (*disintakngan*) dengan uang.

Esensi hukum adat pada hakekatnya adalah pedoman bagi dapat diperoleh keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan antar sesama. Esensi ini merupakan muara akhir dari peradilan adat. Ia sekaligus merupakan dambaan dan harapan. Pamor hukum adat, dengan demikian, sepenuhnya ditentukan oleh esensi tersebut, apakah ia dapat diwujudkan atau sebaliknya. Ini persoalan sangat problematis, mengingat dalam penyelenggaraan peradilan adat terkait dengan struktur dan sistem sosial serta mentalitas para penyelenggaranya. Bahkan kebanyakan esensi tersebut dilanggar hingga hukum adat terkadang menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat diluar komunitas adat.

Peradilan adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat merupakan satu fenomena yang tidak luput dari problem yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Ini mengingat banyaknya kasus/persoalan hukum yang harus diselesaikan dengan hukum adat yang akhirnya memberatkan bagi para tersangka (pelanggar hukum). Kalimantan Barat berpenduduk mayoritas Dayak yang selama ini dikenal amat gigih memperjuangkan hak-hak dan identitasnya terutama melalui hukum adat. Sehingga tidak sedikit pelanggaran hukum harus diselesaikan secara adat atau hukum adat.

Praktik hukum adat masyarakat adat Dayak Kanayatn mengacu pada dasarnya kombinasi antara geneologi dan teritorial. Dasar geneologi digunakan dalam penerapan hukum adat yang melibatkan dua pihak yang berasal dari dua binua (asal) yang berbeda. Dalam kasus ini sanksi adat dalam penerapan hukum adat menggunakan sanksi adat pihak yang menggugat. Sedangkan penerapan hukum adat yang melibatkan dua belah pihak dari binua yang sama didasarkan pada teritorial.

Hukum adat Dayak khususnya Dayak Kanayatn, berorientasi pada akibat, bukan sebaliknya, sebagaimana ditekankan hukum positif. Oleh karena itu, katanya, sebagai konsekuensinya, dalam hukum adat Dayak Kanayatn ada tidaknya kehendak suatu perbuatan, sengaja atau tidak sengaja, menjadi tidak penting. Dalam hukum adat, dikatakan, juga tidak mengenal sangsi kurungan; yang ada hanyalah sangsi berupa denda yang sering disebut dengan denda adat. Denda ini sendiri pada dasarnya, bukan berbentuk uang melainkan benda atau yang disebut peraga adat. Penggunaan Uang, hanyalah sebagai ganti peraga adat untuk mempermudah proses pembayaran, namun dalam penentuan harga pengganti perga adat tersebut diputuskan pada sidang peradilan adat yang diputuskan oleh fungsionaris adat.

Pada masyarakat Dayak Kanyat'n dalam penyelenggaraan peradilan adat, tidak selalu berprinsip pada azas musyawarah, kecuali di luar 6 jenis kasus pelanggaran. Keenam jenis pelanggaran yang saat

pemutusan hukumannya tidak diperkenankan dilakukan dengan cara musyawarah itu antara lain: (1) *raga nyawa*, yakni suatu kasus yang berakibat kematian; (2) *balah nyawa*, satu kasus yang berakibat cedera berat; (3) *parangkat* atau sejenis poligami; (4) *pangamar* juga sejenis poligami; dan (5) *buntikng*, yakni perzinahan yang berakibat kehamilan; dan (6) *kampakng*, perzinahan seorang yang masih dalam status suami atau istri.

Terhadap keenam jenis pelanggaran tadi, maka pemutusan sangsinya dilakukan secara sepihak oleh pengurus adat, yakni tanpa memberikan pertimbangan apapun yang meringankan terdakwa. Cara peradilan tersebut ternyata tidak sama dimasing-masing ketimanggongan, tentu hal ini membuat bagi orang luar yang melihat dan terkena sanksi adat selalu bertanya-tanya tentang keputusan denda adat yang diberlakukan di daerah ketimanggongan tertentu unsur musyawarah merupakan prinsip yang mewarnai setiap peradilan adat. Sementara diwilayah lain keputusan peradilan adat adalah mutlak yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh yang terkena sanksi adat.

Besaran sanksi yang dikenakan kepada terdakwa menggambarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Namun demikian, besaran sanksi (dalam hukum adat), secara mutlak tidak dapat dijadikan standar adil tidaknya suatu keputusan. Karena itu keadilan keputusan persidangan hukum adat harus dilihat dari berbagai aspek, terlebih dalam konteks keanekaragaman adat-istiadat dan hukum adat yang dianut setiap *binua*.

Pada umumnya menurut tingkat penyelesaian persoalan sosial yang terdapat masyarakat Dayak Kanayat'n ada mengenal empat lembaga yang berperan, yakni waris sebagai pihak terkait, *pangaraga*, *pasirah*, dan *timanggong*. Namun, pada saat persoalan atau kasus sosial sudah menjadi perkara adat, maka penyelesaian hanya berada pada *pangaraga*, *pasirah*, dan *timanggong* sebagai institusi resmi masyarakat adat. *Pangaraga* Berperan di tingkat *bide baulakng* (di tingkat kampung), *Pasirah* Berperan di tingkat *bide baragup* (di

tingkat dusun), *Timanggong* Di tingkat *bide barukupm* atau *bide binua* (di tingkat binua). ketiga jenjang institusi resmi tersebut yang dinamakan sebagai fungsionaris adat

Profesi memutus perkara adat, sebagaimana yang diemban para fungsionaris adat bukan pekerjaan mudah. Ketidakmudahan itu pada hakekatnya terletak pada adanya resiko moral yang harus ditanggung, lebih-lebih jika dalam proses pemutusan perkara terjadi ketidakjujuran. Kepercayaan terhadap timbulnya resiko-resiko itulah, yang menjadi pendorong pada para *timanggong* untuk tidak melakukan tindakan menyimpang. Kasus-kasus seperti ini disatu sisi dalam menyelesaikan sesuatu perkara hukum adat tidak efektif, sebab didalamnya sering terdapat unsur kesubjektifitasan. Pemberlakuan hukum adat (hukum tidak tertulis) terhadap suatu kasus tidaklah meniadakan pemberlakuan aturan perundangan (hukum tertulis) manakala aparat penegak hukum menghendaknya dan ada dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan hukum adat, semua persoalan hanya dapat diselesaikan oleh fungsionaris adat. Namun tidak sedikit pelaksanaan hukum adat diselesaikan di jalanan, walaupun dari esensinya ini bertentangan.

Oleh karenanya, di dalam diri *timanggong* sebenarnya terdapat kesadaran yang dapat menjadi faktor pengawasan melekat, terutama pada saat memutus perkara. Kesadaran itu diantaranya adalah: (1) *antunan* atau preseden buruk, misalnya jika sekali diberikan keringanan maka selanjutnya akan terus dijadikan contoh untuk dimintakan perlakuan yang sama; (2) *sangar*, yakni perbuatan semena-mena yang berakibat kutukan; (3) *kisas* bermakna perlakuan buruk terhadap seseorang akan berbalik dalam bentuk yang sama pada diri sendiri; (4) *tulah* atau kualat; (5) sifat sakral hukum adat, yakni memaksa dan mengatur demi tegaknya keadilan.

Bentuk “komersialisasi hukum adat” pada masyarakat Dayak dalam beberapa tahun terakhir ini, membuat hukum adat kehilangan rohnyanya dimana didalamnya ada keteraturan dan keadilan. Hal ini tentu dapat saja terjadi dalam pemberlakuan hukum adat, terlebih

jika yang memutuskan perkara bukan dilaksanakan oleh para fungsionaris adat atau tetua adat yang sesungguhnya tidak memahami dan menguasai hukum adat. Walaupun banyak pendapat mengatakan bahwa “komersialisasi hukum adat” ini umumnya dilakukan oleh mereka-mereka yang bukan fungsionaris adat atau bahkan lebih dikenal dengan istilah “preman adat”¹² Namun tidak menutup kemungkinan selaku manusia biasa oknum-oknum fungsionaris adat juga dapat terjerumus dalam hal komersialisasi, sebagai bentuk tuntutan ekonomi. Perbuatan komersialisasi hukum adat tentu sangat merusak nama baik fungsionaris adat bahkan merusak masyarakat adat itu sendiri. Namun dalam beberapa tahun terakhir baik masyarakat maupun para fungsionaris adat tidak mampu melarang atau mengendalikan warganya yang semena-mena memberlakukan hukum adat.

Selain itu, esensi yang terdapat dalam hukum adat dan penerapannya yakni *adat labi Jubata* bera dan *adat kurang antu bera* tidak lagi terdapat didalamnya apabila keputusan dari hukum adat diputuskan secara sepihak tanpa melalui fungsionaris adat. Bahari & Poltak (2005) mengatakan dalam konteks keanekaragaman, keputusan hukum adat di samping mendengarkan para saksi yang dihadirkan haruslah juga memiliki konsistensi dan transparansi. Dengan kata lain, bilamana pemberian sanksi relatif konsisten terhadap pelanggaran yang sama, sedang faktor transparansi dalam keputusan adalah terincinya sanksi adat yang dijatuhkan kepada terdakwa. maka keputusan pengadilan adat sudah adil.

Jika pemberlakuan hukum adat dianggap sebagai satu cara untuk mengatur tatanan hidup masyarakat adat, maka masyarakat terlebih dahulu menghargai esensi yang terdapat pada hukum adat tersebut, sebab disatu sisi hukum adat menjadi tidak efektif pemberlakuannya jika hukum adat hanya diberlakukan secara sepihak. Kalaupun

¹² Umumnya mereka yang mengkomersialkan hukum adat adalah orang yang tidak memahami benar makna dari adat dan hukum adat itu sendiri, disatu sisi mereka-mereka ini hanya mencari kesempatan dalam suatu persoalan untuk kepentingan sepihak. Lihat Christiaus Atok dkk, dalam buku “Dayak Menggugat” YPB. Pontianak 2003

hukum adat diberlakukan pada masyarakat luar, hukum yang diberikan haruslah sesuai dengan norma dan aturan. Persoalan lain apabila masyarakat adat ingin memberlakukan hukum adat, timbul suatu apakah peradilan adat yang dilaksanakan selama ini telah efektif dalam menyelesaikan sengketa? Suatu pekerjaan besar bagi para fungsionaris adat untuk menjawabnya. Inilah pangkal dari persoalan hukum adat yang selama ini dianggap tidak efektif dalam penerapannya.

Akhirnya, membahas persoalan hukum adat tidaklah semuda apa yang dipikirkan atau diucapkan sebab dalam relaitanya dalam pelaksanaannya banyak hal yang menjadi benturan dalam masyarakat terlebih bagi masyarakat luar. Keputusan-keputusan adat yang diberikan kepada masyarakat luar yang melanggar aturan atau norma terkadaing menimbulkan anggapan bahwa dengan hukum adat tidak ada kepastian hukum, suatu anggapan yang timbul oleh karena ketidak konsistenan dalam keputusan hukum adat. Walaupun disatu sisi bagi masyarakat adat Dayak Kanayat'n, hukum adat dianggap sebagai sarana yang mampu mengontrol atau menjaga keserasian hubungan mereka dengan sesama dan alamnya demikian juga terhadap sang penciptanya, oleh sebab itu perlu konsistensi pelaksanaan hukum adat agar masyarakat luar tidak selalu dirugikan dalam pelaksanaannya.

Hukum Adat Dalam Masyarakat Multikultural

Hukum adat dalam lingkungan lokal ditinjau dari praktis merupakan masa lalu Indonesia dan sering dianggap sebagai pangkal terjadinya “disintegrasi nasional”, dan karenanya dalam politik hukum Indonesia hal ini menuntut unifikasi hukum dengan menghadirkan hukum Nasional Indonesia (Abdoerahman, 2005:36). Namun disatu sisi pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 menyatakan :”*Nagara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sasuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Repoblik Indonesia*”

Multikultural adalah paham yang memperjuangkan sekaligus mempercayai keberagaman kebudayaan atau keberagaman etnis Parsudi Suparlan (2004) mengatakan multikultur adalah suatu paham atau ideology yang sangat menjunjung tinggi adanya perbedaan dan kesederajatan. Dalam konteks ini multikulturalisme janganlah semata-mata dipahami sebagai sekumpulan perbedaan dari latar belakang berbagai etnis Keberagaman kebudayaan dan etnisitas tersebut didudukan sejajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya multikultural secara mutlak mensyaratkan adanya empaty, solidaritas dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam rangka memperjuangkan hak-hak golongan minoritas, seringkali konsep multikultur dijadikan acuan dan konsep ini paling sesuai dan dapat diterima dalam masyarakat yang majemuk. Dalam masyarakat yang multikultur juga menekankan pentingnya pemahaman dan upaya hidup dalam konteks sosial budaya yang berbeda, baik secara individu maupun kelompok. Adanya perbedaan dalam kebudayaan dan adat istiadatnya tidaklah menjadikan penghalang untuk kebersamaan dan persatuan. Justru melalui perbedaan kita dapat mengenal siapa dirinya dan siapa orang lain yang berbeda dengan dia.

Hukum adat dihadirkan dan hadir untuk mengekspresikan norma-norma dan sistem nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat, juga dapat diharapkan untuk menata hubungan antar budaya dan melangsungkan pergaulannya. Jika hal ini dapat dipahami, tentu hukum adat dapat dipakai sebagai pedoman dalam masyarakat yang plural, sebab dalam hukum adat tidak hanya mengatur sanksi tetapi didalamnya juga terdapat sistem nilai, aturan dan norma yang mengatur kehidupan sosial bermasyarakat. Sistem nilai, aturan dan norma yang bukanlah untuk membatasi ruang gerak masyarakat tetapi dalam beraktivitas tetapi lebih untuk sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu jika hukum adat dianggap sebagai aturan dan norma dalam kehidupan masyarakat dengan mengutip pernyataan Simamarta (2005) rasanya tidak mungkin membayangkan masyarakat multikultural tanpa

kehadiran hukum adat. Oleh karena, hukum adat adalah bagian inheren dari masyarakat adat sehingga apabila kita menghilangkannya sama artinya kita tidak menghargai dan empaty terhadap masyarakat adat.

Hukum adat Masyarakat Dayak dalam kontek masyarakat Kalbar yang multikultur, janganlah diartikan sebagai wujud yang “menakutkan”, tetapi dapat sebagi pengayom dalam kehidupan masyarakat jika hal tersebut diterapkan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta tidak menyimpang dari roh yang terkandung di dalamnya. Jika hukum adat berjalan secara normatif maka hukum adat dapat dianggap sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu tetap dijaga dan dilestarikan. Namun jika hukum adat hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk “kepentingan” sekelompok golongan dan dalam penerapannya tanpa mempertimbangkan kaidah system nilai dan norma yang berlaku, tentu dalam konteks masyarakat Kal-Bar yang plural hal ini dapat menjadi kendala dalam proses terwujudnya masyarakat yang multikultural.

Dalam Hukum adat, *tetua adat* atau fungsionaris adatlah yang berperan dalam menerapkannya dan bagi para tetua adat atau fungsionaris adat dalam menjalankan tugasnya terlebih ketika harus menjatuhkan sanksi baik itu sanksi sosial maupun sanksi yang bersifat benda, tetap berpegang pada *adat labi Jubata bera adat kurang antu bera*. Pemberlakuan hal ini tentu bukan semata untuk komuntias masyarakat adat saja tetapi sanksi adat dapat dijadikan kepada siapa saja dalam satu wilayah kesatuan adat, namun tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang terdapat dilamnya.

Bahkan dalam aspek kehidupan senantiasa tetap mengingat falsafah hidup dalam masyarakat Dayak seperti; “*Adil ka’ Talino, Bacarumin ka’Surga, Basengat ka’ Jubata*” (yang mengandung arti Berbuat adil terhadap sesama manusia, bercermin ke surga dan berdoa pada Tuhan). Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kehidupannya manusia harus menjaga hubungan terhadap sesamanya begitu juga terhadap Tuhannya. Dalam hal ini dalam aplikasinya hukum

adat dapat dimaknai sebagai pola yang mengatur bagaimana hubungan ke atas maupun terhadap sesama manusia baik diluar komunitasnya. Hubungan terhadap sesama dalam konsep hukum adat masyarakat Dayak tidaklah untuk menekan melainkan untuk menjaga keharmonisan hubungan tersebut. Itulah sebabnya dalam konteks masyarakat multikultural hukum adat dapat menjadi tatanan aturan dan norma agar setiap orang untuk bertindak secara hati-hati dan tetap dalam norma yang berlaku dan bukan untuk alat menekan masyarakat lain di luar komunitas masyarakat dayak.

Penutup

Masyarakat Adat Dayak adalah sebuah sebutan untuk menjelaskan suku bangsa yang disepakati sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan. Mereka hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat tersendiri. Adat istiadat yang berlaku diikuti oleh sanksi dan telah melahirkan konsep hukum adat yang diikuti oleh berkembangnya lembaga dan perangkat hukumnya dengan tugas melaksanakan kontrol terhadap kehidupan masyarakat adat. Sementara pimpinan persekutuan di setiap wilayah dengan sebutan *Temenggung*. Yang dipilih dari orang yang benar-benar memahami adat istiadat demikian juga masalah hukum adat. Hal ini membuat tradisi adat dilingkungan mereka sangat kuat, dimana adat dianggap sebagai kontrol dalam pola pengendalian sosial dalam masyarakat, masyarakat yang melanggar adat akan diberi sanksi.

Dalam menyelesaikan kasus baik sengketa maupun bukan sengketa haruslah berdasarkan keputusan, kerukunan dan keselarasan sehingga terwujud suatu kehidupan yang tertib, harmonis, damai, tentram dan sejahtera. Untuk itu dalam penyelesaian sengketa atau perkara seharusnya dilakukan oleh mereka yang benar-benar fungsionaris adat atau tetua adat yang memahami dan menguasai adat dan hukum adat serta berpegang teguh pada ajaran adat agar tidak

terjadi komersialisasi hukum adat dan penggunaan kekerasan atau ancaman dalam pemberlakuan hukum adat.

Komersialisasi hukum adat dan penggunaan kekerasan atau ancaman dalam pemberlakuan hukum adat pada hakekatnya adalah perbuatan pelanggaran adat yang merusak citra dari fungsionaris adat dan menodai keluhuran dari system nilai yang terdapat dalam jiwa hukum adat itu sendiri, sehingga perlu ada ketegasan dari para Fungsionaris Adat untuk bertindak tegas terhadap mereka-mereka yang memanfaatkan hukum adat sebagai sarana komersialisasi.

Adat dan hukum adat sesuai ajaran adat yang luhur dari masing-masing pendukung adat budaya itu sendiri terutama ajaran budaya malu, religius magis, komunal, pada masyarakat yang multikultur ini Bahkan hukum adat dapat berperan untuk mengatasi dan berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat seperti penyakit masyarakat, premanisme dan berbagai bentuk kekerasan dan kerusakan lingkungan/alam dalam hal ini diperlukan fungsionaris adat yang berwibawa dan mampu menegakkan hukum adat dengan dukungan positif dari semua warga masyarakat yang bersangkutan agar apa yang terungkap dalam falsafah masyarakat "*Adil ka' Talino, Bacarumin ka' Saruga, Basengat'n ka' Jubata*" bukan hanya sebagai slogan tapi dapat mengilhami jiwa masyarakat Dayak.

Daftar Pustaka

- Anyang, Thambun, 2003. *Peran Hukum Adat Dalam Masyarakat Majemuk*. Makalah
- 2005. *Kemajemukan Hukum di Kalimantan Barat*. Makalah.
- Awie, I. Libertus, 2002. *Peran Adat Dalam Dimensi Kehidupan Orang Dayak*. Makalah, pada Dialog Antar Tokoh, Singkawang.
- Bahari, S.H dan Poltak Johansen. 2005. *Penerapan Hukum Adat Dayak Kanayat'n di Kabupaten Landak*. Laporan Penelitian. LPPMA. Pontianak
- Hartono, S. 1991. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Citra Adtya Bakti. Bandung.
- Kartohadiprodo, S. 1967. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia I Hukum Perdata*. Cetakan ke-5, Jakarta: PT Pembangunan.
- Lontaan, J.U. 1975. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pemda Tk. I. Kalimantan Barat.
- Johansen, Poltak. 1997. *Sistem Kepemimpinan Tradisional Pada Masyarakat Dayak*. Laporan Penelitian BKSNT, Pontianak.
- 2001. *Persepsi Masyarakat Dayak Terhadap Hutan*. Laporan Penelitian. BKSNT. Pontianak.
- Julipin (ed), 1997. *Mencermati Dayak Kanayat'n*. Pontianak. IDRD

- Mudiyono, 1994. "Perubahan Struktur Pedesaan Masyarakat Dayak Dari Rumah Panjang Ke Rumah Tunggal". dalam *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*. LP3S – IDRD. Pontianak.
- Patebang, Edi, (Editor). 2001. *Masyarakat Adat di Dunia; Eksistensi dan Perjuangan*. Pontianak: IWGLA – Intitut Dayakologi
- Supomo, R. 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848*, Jilid I, Cetakan II. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Soekanto, S dan Taneko. S.B. 1983. *Hukum Adat di Indonesia*. Rajawali, Jakarta.
- Soemadingrat, Otje Salman, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung PT. Alumni.
- Vollenhoven, C.V. 1981, *Penemuan Hukum Adat*. Penerbit Djambatan, Jakarta. Terjemahan

NAGA DALAM PERAYAAN IMLEK DAN CAP GO MEH

(Upaya Pengembangan Wisata Budaya di Kalimantan Barat)

Oleh: Wilis Maryanto

A. Pendahuluan

Masyarakat pendukung suatu kebudayaan berupaya melestarikan kebudayaannya bukan dengan cara mundur ke masa lalu justru menyesuaikan diri dengan perubahan kebudayaan (Dove, 1994 : xxv). Dalam perspektif ekologi budaya (Keesing, 1989:170),perubahaan kebudayaan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan material kehidupan manusia. Sistem hubungan sosial, nilai-nilai dan teknologi yang berkaitan dengan matapencapaian hidup adalah basis primer tatanan sosial suatu masyarakat sedangkan kepercayaan atau religi merupakan pranata sekunder.

Perubahan kebudayaan yang terwujud dalam perubahan sistem matapencapaian hidup sering disertai dengan munculnya ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Perubahan peran-peran sosial ekonomi dalam masyarakat yang menyebabkan semakin kendornya solidaritas sosial dalam masyarakat tersebut. Solidaritas sosial menggambarkan suatu hubungan antar individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral serta kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosiolan bersama. Solidaritas sosial pada masyarakat tradisional bersifat mekanik yang diikat oleh kepercayaan bersama, cita-cita dan komitmen moral. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu "kesadaran kolektif" bersama (collective conciouness) yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan senitimen-sentimen bersama yang rata-

rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen dan sebagainya. Homogenitas serupa ini hanya mungkin ada kalau pembagian kerja bersifat minim. Solidaritas mekanik nampak dalam kelompok keagamaan dan pada sejumlah ikatan sosial yang bersifat primordial mekanik seperti kekerabatan, kesukuan dan komunitas. Perubahan atau kemajuan ilmu penegathuan dan teknologi yang akhirnya akan mempengaruhi pada perubahan sistem matapencaharian akan menimbulkan adanya spesialisasi atau pembagian kerja. Spesialisasi kerja ini mengakibatkan berkembangnya otonomi individu dan mengarah pada heterogenitas sosial, namun hal ini tidak harus membuat individu menjadi terpisah sama sekali dari ikatan sosial yang didasarkan pada konsensus moral. Solidaritas pada masyarakat yang relatif heterogen adalah solidaritas organik. Masyarakat yang memiliki solidaritas organik memiliki ciri-ciri antara lain tingkat pembagian kerja tinggi, kesadaran kolektif warga masyarakat lemah, setiap orang mendahulukan kepentingan sendiri atau individualitas warga masyarakat tinggi (Johnson, 1994 : 181-189). Masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat telah mengalami proses modernisasi dalam segala bidang kehidupan, juga sedang mengalami proses diferensiasi peran-peran sosial ekonomi sehingga mengarah pada masyarakat heterogen. Proses modernisasi yang dialami masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat telah menyebabkan mudarnya solidaritas pada masyarakat Tionghoa itu. Peralihan dari solidaritas mekanik ke yang organik tidak selalu merupakan proses yang lancar dan penuh keseimbangan tanpa ketegangan-ketegangan sosial. Karena ikatan sosial primordial yang lama dalam bidang agama, kekerabatan dan komunitas dirusak oleh meningkatnya pembagian kerja, mungkin ada ikatan-ikatan sosial lainnya yang tidak berhasil menggantikan. Akibatnya masyarakat menjadi terpecah di mana individu terputus dari ikatan-ikatan sosialnya.

Dalam konteks perubahan sosial budaya seperti inilah, permainan Naga dan Barongsai dalam ritual perayaan Tahun Baru Imlek yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat seharusnya dipahami. Masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat adalah masyarakat yang sedang mengalami proses transisi sosial seiring dengan proses modernisasi dalam segala bidang kehidupan sehingga solidaritas sosial mereka menjadi semakin lemah. Permainan Naga dan Barongsai sebagai bagian dari ritus keagamaan masyarakat Tionghoa, apabila dipahami dalam perspektif teori Emile Durkheim tentang hubungan antara agama dengan masyarakat, merupakan mekanisme sosial untuk membangun solidaritas sosial orang Tionghoa di Kalimantan Barat. Durkheim (1971:42-54) mengatakan bahwa ritus keagamaan dapat mempersatukan individu dalam kegiatan bersama dengan satu tujuan bersama dan memperkuat kepercayaan, perasaan dan komitmen moral yang merupakan dasar struktur sosial. Dalam aktivitas seperti ini agama berfungsi untuk mempersatukan orang dalam satu komunitas moral dan meningkatkan kekompakan serta solidaritas sosial.

B. Orang Tionghoa di Kalimantan Barat

1. Kedatangan

Dari beberapa literatur yang ada, tidak ada yang pasti menyatakan tahun kedatangan orang Cina pertama ke Indonesia. Kedatangan orang-orang Cina di Indonesia tercatat sejak beratus-ratus tahun yang lalu, sejak pedagang-pedagang Cina yang secara rutin mengunjungi pulau Jawa dengan tujuan utama berdagang. Orang-orang Cina datang ke Indonesia sudah sejak lama, ini diperkuat dengan tulisan seorang Cina yang bernama Ma Huan. Dari lawatannya ke Majapahit, ia melaporkan bahwa penduduk Majapahit terdiri dari orang-orang Islam yang datang dari Barat, orang-orang Cina yang beberapa beragama Islam, dan barang tentu orang-orang pribumi. (Siswono Yudo Husodo, 1985 : 55.)

Kontak pertama orang Cina dengan penduduk asli di negara-negara Asia Tenggara, diperkirakan pada abad ke 3 Sebelum Mesehi, yaitu pada waktu tentara Cina berada di Tongkin dan Aman. Dari daerah inilah kemudian merembes ke daerah Camboja, Siam dan dengan melalui jalan laut terus ke Semanjung Malaysia, Sumatera dan sampai di Pulau Jawa. Proses ini kemudian berlangsung sampai berabad-abad. (Hidayat ZM, 1997 : 63)

Pius Caro lebih lanjut menjelaskan, bahwa; “Sejak abad ketiga para pelaut Cina dari daratan RRC sekarang, berlayar menyusuri pantai Asia bagian Timur ke selatan, untuk berdagang”. (1984 : IV)

Siswono Yudo Husodo selanjutnya menjelaskan; “Pada saat-saat pertama datang ke Pulau Jawa, banyak dari orang-orang Cina tersebut yang bertempat tinggal di Pantai Tuban, Surabaya dan Gresik”. (1985 : 55)

Hal ini bisa dimengerti mengingat pelabuhan-pelabuhan besar di Pulau Jawa yang baik untuk berdagang dengan Cina atau bertempat tinggalnya, semuanya terletak di sepanjang pantai Utara Pulau Jawa, menghadap ke laut Cina Selatan. Akibatnya penduduk Cina terpusat di sana dan bekas-bekas peninggalan tersebut masih terlihat pada masa-masa sekarang dengan adanya daerah-daerah Pecinan di pinggir pantai.

Menurut beberapa literatur resmi di kalangan perguruan tinggi maupun yang diterbitkan dengan rekomendasi aparat pemerintah tertinggi di Propinsi Kalimantan Barat, sejak abad ketiga para pelaut Cina dari daratan RRC sekarang berlayar menyusuri pantai Asia bagian Timur ke Selatan untuk berdagang. Dalam perjalanan pulang mereka menyusuri pantai Kalimantan Barat, Serawak dan kepulauan Filipina. (Pius Caro, 1984 : IV)

Mengenai kedatangan orang Cina di Kalimantan Barat, Mas'ud dan Basry H. Zahri lebih lanjut menjelaskan; Dari

riwayat-riwayat diketahui bahwa pelaut-pelaut Cina dalam abad ke III dan IV telah berlayar untuk berdagang ke Selatan (Nan Yang) menyusur pantai Timur Kontingen Asia, pantai Timur Sumatera terus ke pantai Kalimantan Barat, ke Filipina dan pulang ke Cina. Pada abad ke VII hubungan antara Cina dan Kalimantan Barat sudah banyak tapi belum ada yang menetap di Kalimantan Barat. (1988 : 1)

Kedatangan orang-orang Cina di Kalimantan Barat pada abad ke XVIII melalui dua rute, yaitu:

1. Menyusur pantai Timur kontingen Asia (Indocina) terus ke Selatan ke pantai Timur Sumatera sampai pulau-pulau Bangka-Belitung terus ke pantai Kalimantan Barat terutama Sambas dan Mempawah.
2. Dari Utara melewati pantai Kalimantan bagian Utara (sekarang daerah Serawak, Brunei Darussalam dan Sabah) ke Paloh di pantai Kalimantan Barat terus ke pedalaman Sambas dan Mempawah Hulu. (Mas'ud dan Basry H. Zahri, 1988 : 1)

Mereka datang ke Kalimantan Barat (Sambas) dengan tujuan untuk mencari emas, sebab Sambas terkenal akan emasnya. Pendatang Cina itu membentuk "kongsi" yang semula untuk kepentingan pencarian emas, kemudian meningkat menjadi persekutuan sosial politik.

"Di daerah Sambas terbentuk kongsi-kongsi, yang terbesar antara lain Thai Kong yang berpusat di distrik Lara, Lumar dan Monterado, serta Sam To Kiu yang berpusat di Pemangkat, Semanis dan Sebawi." (Mas'ud dan Basry H. Zahri, 1988 : 1)

Dalam literatur lainnya sebutan kongsi-kongsi itu tidak sama yaitu: Thai Kong = Taikong - Thai Kwong (yang artinya Sungai Raya) dan Sam To Kiu = Sam Thiau Kew = Sam To Kiaw = Sam Thiao Keeuw (yang maksudnya tiga jembatan). Orang-orang Cina pendatang itu, oleh Sultan Sambas (penguasa daerah Sambas

pada waktu itu) diperkerjakan di tambang-tambang emas dan sebagai imbalanya, kongsi-kongsi itu membayar upeti kepada Sultan.

2. Orang Tionghoa Pada Umumnya

Imigran Cina ke Indonesia hampir seluruhnya datang dari dua propinsi yaitu Fukien dan Kwangtung. Kedua propinsi ini lain daripada yang lain di Tiongkok karena adanya kekhususan regional yang besar. Setiap imigran Cina yang datang ke Indonesia, tidak bisa tidak selalu membawa serta ciri kultural setempat yang khas dari kampung halamannya. Dalam hal ini Mely G. Tan menjelaskan: Yang menjadi dasar dari perbedaan kultural golongan-golongan sub etnis ini ialah linguistik; oleh karena itu golongan tadi biasanya disebut saja golongan bahasa (speech-group). Bahasa-bahasa dari ketiga golongan bahasa yang besar yang ada di Indonesia, ialah bahasa Hokkian, Hakka dan Kanton. Pemakai bahasa satu tidak bisa mengerti bahasa lainnya, karena bahasa-bahasa itu saling berbeda seperti bahasa Italia dengan bahasa Spanyol atau bahasa Spanyol dengan bahasa Portugis. (1981 : 6)

a. Orang Hokkian

Orang-orang Hokkian (Hok Ca), adalah orang Cina pertama kali bermukim di Indonesia dalam jumlah yang besar dan mereka golongan terbesar di antara imigran-imigran sampai abad ke 19. "Daerah asal mereka adalah Fukien Selatan". (Mely G. Tan, 1981 : 7) Daerah yang sangat penting menurut catatan sejarah perdagangan luar negeri Tiongkok. Sifat yang kuat dalam hal berdagang yang dimiliki kebudayaan Hokkian selama beberapa abad itu masih nampak jelas di Indonesia. Orang-orang Hokkian berkecimpung dalam perdagangan dan lebih berhasil.

Di sebelah Selatan daerah asal orang Hokkian, terdapat golongan Cina berikutnya yaitu orang Teociu, mereka diam di pedalaman Swatow dan sepanjang pantai Barat Daya kota pelabuhan itu. Di Indonesia orang-orang Teociu sebagian besar terdapat di luar Jawa, yaitu di sepanjang pantai Timur Sumatra bekerja di perkebunan, di kepulauan Riau dan Kalimantan Barat terutama di Pontianak dan distrik-distrik sekitarnya. Secara tradisional bidang spesialisasi mereka adalah bidang pertanian terutama sayur mayur dan pertanian komersial lainnya hingga sekarang. Namun pada perkembangan terakhir ini orang-orang Teociu menunjukkan kemajuan di segala bidang perdagangan.

b. Orang Hakka

Orang Hakka termasuk golongan bangsa Cina besar yang merantau keluar negeri dan bukan merupakan bangsa maritim. "Selama gelombang perpindahan yang besar dari tahun 1850 hingga 1930, orang-orang Hakka merupakan imigran yang paling melarat dari Tiongkok". (Mely G. Tan, 1981 : 7) Semula mereka tertarik masuk ke daerah-daerah di luar Jawa untuk mengusahakan sumber-sumber mineral, yaitu tambang emas di Kalimantan Barat dan timah di Bangka. Sejak akhir abad ke 19 banyak orang Hakka berdatangan di Jawa Barat, tertarik oleh cepatnya pertumbuhan Kota Jakarta dan dibukanya Priangan untuk pedagang-pedagang Cina.

c. Orang Kanton

Seperti halnya orang Hakka, maka orang Kanton ini di Asia Tenggara terkenal sebagai pekerja tambang. "Perpindahan mereka ke Indonesia pada abad ke 19 kebanyakan ke pertambangan timah di Bangka". (Mely G. Tan, 1981 : 8) Banyak orang Kanton datang ke Indonesia dengan modal

yang besar dengan memiliki keterampilan yang tinggi di bidang pertukangan dan berusaha dalam bidang industri. Di Indonesia, orang-orang Kanton menempatkan dirinya di kota-kota sebagai tukang yang mahir, pekerja mesin, pemilik toko besi atau industri kecil, dibandingkan orang Hakka dan Hokkian, serta menyebar secara merata di seluruh daerah di Indonesia, menyebabkan orang Kanton ini kurang penting artinya di kalangan masyarakat Tionghoa di perantauan.

Mengenai orang-orang Tionghoa di Kalimantan Barat antara lain terdiri dari orang-orang Khe (kek), Teociu (Tio Ciu), Hok Ca (Hokkian) dan Hainan. Suku-suku keturunan Cina di Kalimantan Barat, menurut beberapa kalangan, terbesar adalah Khe, Tio Ciu, Hok Ca (Hokkian) dan Hainan. Secara umum digambarkan bahwa suku Hok Ca banyak bergerak sebagai pedagang sepeda, sepeda motor, mobil dan onderdil, dan lain-lain. Suku Hainan banyak terlihat sebagai pemilik warung kopi, sedangkan Tio Ciu banyak pada industri, pedagang menengah ke atas dan lain-lainnya. (Mas'ud dan Basry H. Zahri, 1988 : 2)

Dibanding lainnya, golongan Khe dianggap lebih dinamis sebagai pengusaha walaupun dianggap banyak yang miskin. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa jika orang Tionghoa bermukim dalam jumlah yang cukup besar di suatu daerah sejak sebelum abad ini, maka masyarakat Tionghoa di situ sampai batas tertentu terbagi dua. Di dalam masyarakat itu, bagian yang satu terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak yang dilahirkan di Indonesia, mempunyai orientasi ke Tiongkok yang makin menipis dan mendapat pengaruh kebudayaan penduduk setempat, selanjutnya golongan ini disebut sebagai golongan "peranakan".

Dalam kaitan ini Siswono Yudo Husodo menjelaskan: Sebagian kecil dari pendatang asing ini menikah atau hidup

bersama sebagai keluarga dengan orang-orang pribumi, sehingga terbentuk suatu golongan penduduk baru, golongan peranakan, turunan dari perkawinan campuran antara orang-orang pribumi dengan pendatang-pendatang asing. (1985 : 33)

Bagian lain terdiri dari kaum imigran abad ke 20 dan keturunan langsung yang belum begitu berakulturasi, dan orientasinya ke Tiongkok masih lebih kuat, yang selanjutnya disebut sebagai golongan Tionghoa "Totok". Mengenai istilah "totok" ini Mely G. Tan menjelaskan: Disebut totok yaitu sebuah istilah dalam bahasa Indonesia yang dalam arti sempit dipergunakan untuk menyebut tidak hanya kaum imigran yang dilahirkan di luar Indonesia, tetapi yang sering juga mempunyai arti lebih luas meliputi keturunan imigran, yang terutama sekali berorientasi ke negeri asalnya, dalam hal ini Tiongkok. (1981 : 11)

d. Golongan Tionghoa Peranakan

Tionghoa peranakan orientasinya sudah condong ke Indonesia, dalam arti bahwa orientasinya ke negeri leluhur Tiongkok sudah semakin menipis. Mereka lebih suka menikmati kesenangan hidup, menggunakan waktu senggang, kedudukan sosial dan rasa perasaan terjamin. Tempat tinggal mereka sebagian besar tidak mengelompok di komplek pertokoan atau di pusat-pusat kota, tetapi lebih suka menyebar ke seluruh wilayah kota.

Rumah-rumah tempat tinggal mereka sudah bergaya arsitektur barat yang cukup modern. Dalam banyak unsur struktur kekerabatan kaum peranakan mulai meninggalkan ciri-ciri patrilokal dan patrilineal dan lebih menjurus ke kekerabatan yang bilateral, yang tercermin dengan jelas pada peristilahan kekerabatan, misalnya dalam generasi

kedua dan ketiga ke atas, istilah kekerabatan tidak membedakan keluarga dari pihak ibu atau pihak ayah. Kewenangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial di lingkungan keluarga menurut urutan generasi dan usia.

Kecendrungan untuk memuja leluhur, golongan peranakan lebih membagi sama rata baik menurut garis ibu maupun garis ayah. Persamaan hak bagi kaum wanita dan laki-laki pada golongan peranakan tidak hanya mencerminkan kebilateralan mereka tetapi juga di dalam cara memilih kekerabatan di antara mereka. Pengaruh program keluarga berencana juga nampak pada golongan peranakan untuk mempunyai keturunan sedikit saja.

Para pemuda peranakan melakukan pemujaan dewa-dewa lebih sering di rumah daripada di kelenteng-kelenteng, walaupun para orang tua asal mereka cenderung menjadi orang yang taat beribadah di kelenteng-kelenteng atau toapekong.

Dilihat dari sudut keagamaan, golongan muda peranakan lebih banyak yang memeluk agama Kristen. "Kaum peranakan lebih banyak yang beragama Kristen, karena sekolah-sekolah yang baik, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Khatolik maupun Protestan telah melapangkan jalan bagi mereka untuk menjadi Kristen". Mely G. Tan, 1981 : 14)

Golongan peranakan lebih suka pada pekerjaan kejuruan dan administrasi atau sebagai staf perusahaan-perusahaan besar. Di bidang pendidikan, golongan peranakan sebagian besar memasuki sekolah-sekolah berbahasa Indonesia terutama yang disponsori oleh orang-orang atau organisasi golongan peranakan.

e. Golongan Tionghoa Totok

Golongan Tionghoa totok boleh dikatakan mempunyai sikap dan perilaku yang hampir berlawanan dengan golongan peranakan. Orientasi ke negeri leluhurnya Tiongkok masih kuat. Dalam kehidupannya, golongan totok lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri atau bersifat egois dan sebagian besar berkecimpung di bidang usaha perdagangan.

Golongan Tionghoa totok lebih menghargai kekayaan, kehematan, kerja keras, kepercayaan pada diri sendiri dan keberanian, serta dalam orientasi pada karir dan keberhasilan maka golongan totok lebih maju. Mereka bertempat tinggal lebih senang berkumpul di daerah pusat perdagangan secara eksklusif. Mereka lebih senang mendiami rumah-rumah yang merupakan toko dan sekaligus juga sebagai tempat tinggal, seperti yang terdapat di pusat-pusat kota atau daerah Pecinan.

Dalam kekuasaan politik, ekonomi dan sosial yang masih dipusatkan di dalam keluarga menurut urutan generasi maupun usia, pada golongan totok masih memakai salah satu garis ibu atau garis ayah saja. Dalam hal memilih anak, golongan totok lebih senang pada anak laki-laki dari pada wanita.

Golongan Tionghoa totok melakukan pemujaan dewa-dewa lebih sering dilakukan di kelenteng-kelenteng atau toapekong dan memang mereka masih cenderung menjadi orang yang taat beribadah di kelenteng. Demikian juga sifat kekeluargaan pada golongan totok semakin renggang atau kurang mendapatkan perhatian.

Di bidang pendidikan, golongan Tionghoa totok sangat kurang yang bersekolah berbahasa Indonesia. Sewaktu masih diijinkan sekolah-sekolah swasta milik Tionghoa

oleh Pemerintah Indonesia, maka anak-anak orang totok banyak yang masuk sekolah yang menggunakan bahasa Cina.

Keanggotaan menurut golongan bahasa bagi golongan totok sangat penting dan menentukan dalam usaha membina hubungan-hubungan sosial. Setidak-tidaknya seorang totok benar-benar akan merasa leluasa jika dia ada di antara orang-orang yang bisa diajak bercakap-cakap dalam bahasa ibunya.

Dalam kaitan ini Mely G. Tan lebih lanjut menjelaskan: Dia akan lebih mudah mempercayai mereka yang segolongan dengannya, dan biasanya akan mencari dan memperoleh sahabat dan pemimpin-pemimpin di antara mereka itu. Keanggotaan dalam golongan bahasa ini memberikan azas orientasi bagi perkumpulan yang paling penting di dalam masyarakat totok. (1981 : 16)

Dengan mengikuti uraian seperti tersebut di atas, di antara golongan peranakan dan totok menunjukkan adanya perbedaan di berbagai bidang kehidupan mereka. Golongan peranakan pada umumnya lebih maju di dalam pola pikir, cara hidup dan orientasi politiknya. Golongan peranakan lebih berorientasi ke negara di mana mereka bertempat tinggal (Indonesia), sedangkan golongan totok masih kuat berorientasi ke negeri leluhurnya yaitu Tiongkok. Golongan peranakan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berakulturasi dengan budaya setempat dan sensitif menerima pengaruh sosial dari luar, dibanding dengan golongan Tionghoa totok.

C. Naga Dalam Perayaan Imlek dan Cap Go Meh

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Tionghoa senantiasa berusaha mempertahankan tradisi dari negeri leluhurnya, walaupun tradisi tersebut sekarang ini tidak lagi bersifat asli seperti yang terdapat di negeri leluhurnya karena telah berakulturasi dengan budaya setempat. Salah satu tradisi yang telah mengalami perubahan tersebut adalah perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Me. Dalam perayaan ini, masyarakat Tionghoa selalu melaksanakan tradisi permainan Naga. Walaupun permainan ini sempat dilarang pada masa Orde Baru berkuasa. Permainan Naga di negeri Cina sendiri dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu Tahun Baru Imlek atau Cap Go Me.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa masyarakat Tionghia di Kalimantan Barat pada umumnya memeluk agama Khong Hu Cu, Tao, Budha dan Tri Dharma. Khusus dalam pembahasan ini, penulis lebih menitikberatkan pada masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Khong Hu Cu. Adapun pertimbangannya adalah bahwa agama ini pengikutnya lebih banyak daripada agama-agama yang lainnya (Tao, Budha dan Tri Dharma).

Agama Khong Hu Cu adalah suatu kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Khong Hu Cu dianggap mereka sebagai Nabi, sedangkan yang disembah adalah *Tai Pak Kung* atau semacam Dewa dan Kitab Suci mereka adalah *Thung Sun*. Di tempat peribadatan pemeluk Khong Hu Cu yaitu disebut *Klenteng* terdapat patung yaitu *Tai Pak Kung*. *Tai Pak Kung* adalah tangan kanan Dewa yang sangat ditakuti dan memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Dewa ini menurut keterangan telah dimandulkan sehingga tidak bisa memiliki keturunan. Selain Dewa ini, masih ada dewa yang lain, seperti Dewa Pencatat Kelahiran dan Kematian bagian Selatan dan Utara yang bernama *Sak San Tahi Bong*, Dewa Perang bernama *Sak Bong Chian Sui*, Dewa Pemberi bernama *Fa Kong Tai Ti*, Dewa Penjaga Neraka bernama *Im Yau Shin Ti*, dan Dewi Kelahiran bernama *Thian Hew Shen Mu*.

Satu hari menjelang pergantian tahun, masyarakat Tionghoa baik yang memeluk Kong Hu Cu, Tao, Budha dan Tri Dharma mendatangi tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan sembahyang besar. Cara-cara melakukan sembahyang beraneka ragam sesuai dengan niat masing-masing; artinya ada yang memberikan sesajian, ada pula yang cukup dengan membakar lilin dan gaharu saja.

Khusus pemeluk Khong Hu Cu, peribadatan diawali dengan pengambilan dupa serta segenap perlengkapan lainnya. Setelah siap seluruhnya segera menyembah dewa-dewa diiringi dengan doa. Doa yang dipanjatkan sesuai dengan keinginan serta cita masing-masing. Atau dengan kata lain doa yang mengandung pengertian harapan atas masa depan yang baik dan cerah. Peribadatan sembahyang besar ini dapat dilakukan di kelenteng-kelenteng atau boleh pula dilaksanakan di rumah. Dan biasanya sembahyang besar ini dilaksanakan sampai malam Tahun Baru Imlek.

Pada malam Tahun Baru Imlek, selain melakukan sembahyang besar, masyarakat Tionghoa mempunyai tradisi menyulut petasan. Menyulut petasan bukan sekedar bersuka-ria di dalam menyambut pergantian tahun, melainkan mempunyai makna tradisi yang diyakini oleh masyarakat Tionghoa sebagai alat untuk mengusir binatang jelmaan yang akan memangsa manusia.

Menurut cerita yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa bahwa pada zaman dahulukala, setiap hari akhir menjelang pergantian tahun, akan muncul sejenis binatang buas bernama "*Nian Show*" yang hendak memangsa apa saja yang dijumpai. Untuk menjaga keselamatan keluarga, pada saat itu semua jendela, pintu ditutup rapat, sambil menantikan hari maut berlalu. Selang beberapa tahun, Nian Show tidak muncul lagi, sehingga masyarakat merasa tenang. Akan tetapi, tak diduga pada suatu saat menjelang pergantian tahun, mendadak muncul kembali binatang buas Nian Show, kemudian menyerang dan memangsa apa saja yang dijumpainya. Ternyata ada beberapa rumah yang terhindar, karena kebetulan rumah tersebut ditempel kain merah dan kertas merah "*Suang-Shi*".

Selain itu, orang yang main petasan juga lupa dimangsa oleh Nian Show. Sehingga orang-orang pada saat itu yakin bahwa Nian Show juga takut dengan suara petasan. Sejak saat itu dan hingga sekarang ini, bagi masyarakat Tionghoa yang masih yakin dengan cerita tersebut, pada setiap akhir tahun, menempel rumahnya dengan kain merah dan kertas merah bertuliskan puisi yang baik-baik. Serta tidak lupa dibunyikan petasan semalam suntuk.

Seperti telah diketahui, salah satu tradisi yang telah mengalami perubahan pada masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat adalah perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Me, di mana dalam perayaan ini dimeriahkan dengan acara Ritual Naga. Sedangkan di negeri leluhurnya, ritual naga ini tidak selalu digelar pada saat perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Me saja, tetapi hari-hari besar lainnya dapat digelar juga.

Dalam legenda naga yang diyakini oleh masyarakat Tionghoa, konon ketika menjelang lahirnya Nabi Kong Hu Cu, muncullah naga yang mendekati Gan Tiong Cay – ibunda Khong Hu Cu. Seiring dengan hadirnya naga tersebut, langit berubah menjadi kemerahan, seolah menyambut hadirnya bayi lelaki yang kelak akhirnya melahirkan suatu ajaran yang dikenal dengan agama Kong Hu Cu sekarang ini.

Terhadap cerita legenda ini, akhirnya naga dianggap sebagai makhluk yang sakral. Karena dianggap sakral, maka naga dianggap makhluk yang dapat membawah keselamatan dan kemakmuran bagi manusia. Sehingga dalam ritual buka mata, banyak orang-orang Tionghoa yang berebut mengambil jenggot naga.

Berdasarkan keyakinan inilah, maka setiap perayaan Tahun Baru Imlek masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat pada khususnya melaksanakan tradisi permainan Naga dengan maksud dan tujuan agar memberikan keselamatan dan kemakmuran bagi manusia yang hidup di bumi ini.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa waktu penyelenggaraan ritual Naga adalah pada saat perayaan Tahun Baru

Imlek sampai dengan perayaan Cap Go Me. Imlek adalah sistem pengkalenderan yang berasal dari negeri Cina. Dasar penanggalan tahun Imlek adalah berdasarkan peredaran bulan mengeliling bumi dan bulan – bumi kemudian mengelilingi matahari. Berbeda dengan penanggalan tahun Masehi yang hanya didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari saja. Oleh karena itu dalam tahun Imlek biasanya dalam satu tahun terdiri dari 13 bulan.

Bagi masyarakat Tionghoa yang masih percaya terhadap legenda naga, bahwa naga dipandang sebagai makhluk sakral, oleh karenanya harus disembahyangkan terlebih dahulu di klenteng sebelum diarak di muka umum atau keliling kota. Acara ini dikenal dengan istilah Ritual Buka Mata.

Dalam Ritual Buka Mata, upacara dipimpin oleh seorang “So-hu” atau pemimpin doa. Tujuan Ritual Buka Mata adalah agar naga dapat melihat segala macam sifat kejahatan dan kesialan yang nantinya akan dimakan pada saat naga diarak keliling kota.

Karena naga dianggap sakral, maka didalam membuatnya harus memenuhi 9 syarat, yaitu:

- a. Muka naga seperti kuda.
- b. Tanduk naga seperti tanduk rusa.
- c. Mata naga seperti mata kelinci.
- d. Badan naga seperti ular.
- e. Perut naga seperti ulat sutra.
- f. Sisik naga seperti sisik ikan mas.
- g. Cakar naga seperti cakar elang.
- h. Dan telapak naga seperti telapak kaki harimau.
- i. Selain itu, bagian badan atau ruas naga jumlahnya harus ganjil. Jumlah ruas ini tergantung dari panjang pendek badan naga. Semakin panjang badan naga maka semakin banyak jumlah ruasnya, yang terpenting jumlahnya harus ganjil.

Naga sebagai legenda yang diyakini oleh orang Tionghoa, adalah makhluk di luar duniawi yang menguasai hujan dan angin di langit. Oleh karenanya banyak dijumpai ornamen-ornamen naga di klenteng-klenteng, Vihara-vihara atau hiasan di jubah yang dipakai oleh So-hu pada saat memimpin ritual keagamaan.

Setelah melalui prosesi ritual buka mata, naga kemudian diarak keliling kota. Tujuan mengarak naga ini adalah untuk membersihkan kota dari segala macam sifat kejahatan dan kesialan yang akan membawahkan kesengsaraan hidup bagi manusia, sehingga kehidupan manusia akan aman, tentram dan sejahtera di kemudian hari.

Naga selain memiliki makna ritual bagi masyarakat Tionghoa, juga dapat digelar dalam bentuk atraksi yang memukau. Untuk melakukan atraksi ini, naga harus dimainkan oleh satu tim. Tim ini terdiri dari 1 orang yang bertugas mengarahkan gerak naga, 1 orang yang bertugas membawahkan bola mutiara, 1 orang membawahkan kepala naga, beberapa orang yang bertugas membawahkan badan naga sampai ke bagian ekor naga serta kelompok penabuh alat musik yang mengiringi atraksi naga.

Seluruh anggota dalam tim ini saling bergantian dengan anggota lainnya apabila ia telah kelelahan membawahkan naga. Masing-masing anggota dalam tim ini harus dapat bekerja sama dan saling mengisi satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan gerak naga yang indah. Kesalahan yang dilakukan salah satu anggota akan berpengaruh terhadap anggota yang lainnya.

Dengan demikian nilai luhur yang dapat dipetik dalam atraksi naga adalah:

- Kerjasama masing-masing anggota yang terlibat dalam atraksi naga.
- Ketaatan terhadap pimpinan terlihat dari pembawa naga yang selalui mengikuti kemana bola mutiara bergerak.
- Kebersamaan, masing-masing anggota tidak membedakan status sosial dan ekonominya pada saat melakukan atraksi. Mereka bahu membahu satu dengan yang lainnya untuk menggerakkan naga agar terlihat indah dan memukau.

Atraksi naga dalam perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Me, juga dapat dijadikan sarana dalam upaya pembauran etnis yang ada di Kalimantan Barat. Hal ini terlihat, bahwa anggota yang terlibat dalam pagelaran atraksi naga tidak seluruhnya berasal dari masyarakat Tionghoa, melainkan ada juga yang berasal dari luar etnis tersebut, seperti etnis Dayak, Melayu, Jawa dan Madura. Demikian pula halnya dengan para penonton, yang tidak hanya berasal dari etnis Tionghoa tetapi juga dipadati oleh etnis-etnis lain yang ada di Kalimantan Barat.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa atraksi naga yang digelar pada perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Me dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang berada di Kalimantan Barat sebagai pagelaran seni dan budaya.

Dalam melakukan atraksinya, Naga memiliki gerakan-gerakan seperti:

1. Naga menghisap air atau Ta Sui, yaitu gerakan kepala naga dari bawah ke atas kemudian lari ke kiri dan ke kanan dengan badan lurus seolah-olah sedang menghisap air.
2. Naga mencuci kaki atau Ce Chau, yaitu gerakan kepala naga menjilat kaki-kakinya dengan badan lurus ke belakang.
3. Naga mencuci badan atau Ce Sin, yaitu gerakan naga dengan posisi badan lurus – kepala menunduk ke depan kemudian menjilat seluruh badan sampai ke ekor.
4. Naga memberikan penghormatan atau Sam Pai, yaitu gerakan kepala naga menunduk sebanyak tiga kali.
5. Naga menggigit ekor atau Ngaw Mui, yaitu gerakan kepala naga ke arah belakang mengejar ekor dan kemudian menggigitnya.
6. Naga bermain bola atau Thu Tjau, yaitu gerakan kepala naga yang mengejar bola mutiara di atas tanah.
7. Naga melakukan gerak silang atau Con Kien, yaitu gerakan kepala naga melewati badan naga secara menyilang ke kanan dan ke kiri.

8. Naga melewati rintangan atau Tap Tang, yaitu posisi badan naga bersusun ke belakang dan kepala naga mengejar ke arah belakang bagian ekor kemudian di lanjutkan kepala naga masuk ke bagian bawah naga lurus ke depan.
9. Naga bangun tidur atau Min Lung, yaitu gerakan naga menggeliat ke belakang sambil menjilati badannya.
10. Naga menggulingkan badan atau Pian Shin, yaitu gerakan kepala dan ekor naga masuk ke bagian bawah badan naga dilanjutkan dengan posisi badan naga lurus ke depan.
11. Naga berputar membuat lingkaran atau Tai Ton Tjau, yaitu gerakan kepala naga masuk ke arah dalam dan diikuti bagian badan sampai ekor mengelilingi kepala naga.
12. Naga melewati pintu atau Ko Liong Mun, yaitu gerakan badan naga lurus ke belakang dan kepala naga menunduk ke bawah terus bergerak ke belakang.

Semua gerakan naga tersebut memiliki tingkat kesukaran yang berlainan. Namun demikian tanpa kerja sama yang baik, mustahil dapat melakukan semua gerakan tersebut.

Kadangkala dalam melakukan atraksinya mengililingi jalan-jalan di kawasan perkotaan, naga saling bertemu dengan naga dari kelompok lain dan saling melakukan penghormatan. Di sini jelas terlihat bahwa sikap saling menghormati juga terkandung dalam pagelaran atraksi naga.

Pagelaran atraksi naga yang diselenggarakan pada saat perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Me di Kalimantan Barat, tidak hanya disaksikan oleh pengunjung lokal. Tetapi juga disaksikan oleh pengunjung dari luar propinsi ini dan bahkan juga disaksikan secara langsung oleh pengunjung dari negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia. Dengan demikian event ini dapat dijadikan sebagai agenda wisata budaya daerah di Kalimantan Barat sehingga dengan sendirinya dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan daerah setempat.

Upaya melestarikan tradisi perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Me, telah diupayakan oleh para orang tua dengan melibatkan secara langsung anak-anak dan remaja dalam menggelar atraksi naga. Sudah selayaknya, apabila kita turut berperan aktif melestarikan permainan naga ini, sehingga menjadi investasi budaya yang dapat memperkaya khasana budaya daerah Kalimantan Barat dan dengan harapan akhirnya dapat dijadikan sebagai potensi wisata budaya demi kemajuan daerah Kalimantan Barat dalam menyongsong otonomi daerah yang sedang berlangsung saat ini.

Sehari sebelum Cap Go Me, yaitu hari keempatbelas bulan pertama Tahun Imlek, hadir pula atraksi dari tatung-tatung. Tatung adalah orang-orang yang telah disucikan yang dimasuki roh-roh ghaib.

Kehadiran tatung di sini, bukan sekedar memamerkan kekebalan tubuhnya dari benda-benda tajam atau tidak sakit dan tidak berdarah ketika lidah dan pipinya ditembus dengan benda runcing, tetapi merupakan suatu kegiatan ritual untuk membersihkan kota atau daerah dari segala macam malapetaka dan memohon keselamatan serta kemakmuran pada hari-hari selanjutnya.

Kekuatan tatung atau kekebalan tatung dipengaruhi oleh ajaran Tao yang percaya adanya kekuatan ghaib yang tidak menempati ruangan sebagaimana benda alam lainnya. Lewat persiapan awal, seorang tatung harus menjalankan puasa dan menjauhi pantangan-pantangan yang telah disyaratkan.

Kemudian dengan bacan-bacan mantra, ruh ghaib masuk ke dalam tubuh orang yang bersangkutan. Setelah ruh ghaib ini masuk, maka tatung akan kebal dari benda-benda tajam dan tidak sakit ketika ditembus dengan benda-benda runcing.

Saat kemasukan ruh ghaib inilah, seorang tatung selain memamerkan kekebalannya juga akan memanjatkan doa memohon keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian untuk seluruh masyarakat.

Pada hari kelimabelas bulan pertama Tahun Imlek atau disebut Cap Go Me, masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Konghucu,

Tao dan Tri Dharma melakukan peribadatan sembahyang besar di Vihara, Tepekong dan Klenteng. Peribadatan sama seperti peribadatan yang dilakukan pada saat penyambutan Tahun Baru Imlek, yaitu menyembah dewa-dewa dan diiringi dengan doa.

Pada hari keenambelas bulan pertama Tahun Imlek, naga-naga yang telah dilakukan Ritual Buka Mata harus dibakar. Tetapi sebelum dilakukan pembakaran naga, terlebih dahulu harus dilaksanakan Ritual Tutup Mata. Dalam Ritual Tutup Mata, jalannya prosesi acara sama seperti Ritual Buka Mata, yaitu dipimpin oleh seorang Sho-hu. Maksud dilaksanakan pembakaran naga, berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat adalah untuk mengembalikan naga ke alamnya yang menguasai hujan dan angin di langit.

Selain mengembalikan ke alamnya, dipercaya bahwa kesialan dan sifat-sifat jahat yang telah dimakan oleh naga pada saat naga diarak keliling kota juga akan lenyap. Apabila naga ini tidak dibakar, ada keyakinan pada masyarakat Tionghoa, bahwa naga tersebut dapat mendatangkan malapetaka bagi yang menyimpannya.

Untuk itu, pelestarian, pengembangan dan pembinaan terhadap tradisi ritual naga pada perayaan Tahun Baru Imlek perlu ditingkatkan lebih lanjut guna memperkaya khasanah budaya daerah Kalimantan Barat dan diharapkan juga dapat menjadi potensi wisata multikultur bagi Kalimantan Barat dalam menghadapi otonomi daerah yang sedang berlangsung.

D. Penutup

Alam pikiran yang mendasari diselenggarakannya ritual naga dalam perayaan Tahun Baru Imlek adalah adanya kepercayaan bahwa di dalam kehidupan manusia selama satu tahun telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang diyakini akan mendatangkan bencana atau malapetaka yang menimpa umat manusia. Dengan diselenggarakannya ritual naga ini, maka segala bencana atau malapetaka yang akan

menimpa umat manusia itu akan dimakan dan dimusnakan oleh naga tersebut. Pelaku ritual naga mempercayai dengan melakukan ritual keagamaan ini mereka akan memperoleh kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan serta akan terhindar dari segala malapetaka selama satu tahun.

Ritual naga apabila ditinjau dari pendekatan interpretatif menekankan peranan sistem religi bagi pemenuhan tuntutan kognitif dan afektif demi sebuah dunia yang stabil dan menggambarkan bagaimana sistem religi memberikan jaminan rasa keamanan batiniah bagi orang yang meyakini dan menghayati nilai-nilai religiusnya. Rasa keamanan batiniah itu termanifestasikan pada keyakinan akan terbebas dari marabahaya (malapetaka) dan selanjutnya akan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan setelah mereka melakukan ritual naga. Pada sisi lain ritual naga dapat dikatakan juga berperan dalam memperkuat ikatan-ikatan sosial tradisional di antara individu-individu yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai religisu tersebut.

Untuk itu, pelestarian, pengembangan dan pembinaan terhadap tradisi ritual naga pada perayaan Tahun Baru Imlek perlu ditingkatkan lebih lanjut guna memperkaya khasanah budaya daerah Kalimantan Barat dan diharapkan juga dapat menjadi potensi wisata multikultur bagi Kalimantan Barat dalam menghadapi otonomi daerah yang sedang berlangsung.

Dan pada akhirnya, kesimpulan yang dapat dipetik dalam acara perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Me dengan menggelar ritual naga, adalah terkandungnya nilai-nilai luhur dalam ritual tersebut, yaitu:

- Kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa.
- Manusia harus dapat bekerjasama dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial.
- Kebersamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat status sosial dan ekonomi.

Kepatuhan terhadap pimpinan dan keteladanan seorang pemimpin bagi komunitas yang dipimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Winarno, **Faktor-Faktor Penghambat Proses Peleburan di Kabupaten Malang**, Penerbit Unibraw Malang, Malang, 1980.
- Belanad, **Apa Kabar Tionghoa Kalbar**, No. 05/Th.I/Juni 2000, Grahafika Utama Pers, Pontianak, 2000.
- Djamaludin Ancok, **Pembauran Itu Penting Kan**, Tempo, No. 36 Tahun XVI, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta, tanggal 1 Nopember 1986.
- Hidayat ZM., **Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia**, Cet. I, Penerbit Tarsito, Bandung, 1977.
- Ismani HP., **Pengantar Sosiologi Pedesaan**, Cet. I, FIA Unibraw, Malang, 1988.
- Junus Jahja, **Garis Rasial Garis Usang, Liku-liku Pembauran**, Bakom PKB Pusat, Jakarta, 1983.
- Koentjaraningrat, **Sikap Mental Untuk Lepas Landas: Integrasi Nasional**, Harian Kompas, tanggal 27 Oktober 1988.
- Leo Suryadinata, **Dilema Minoritas Tionghoa**, Cet. I, Grafiti Pers, Jakarta, 1984.
- Mas'ud dan Basry H. Zahri, **Pembauran Keturunan Cina Di Kalimantan Barat**, Majalah Business News, No. 26 Tahun 1/1988, Penerbit Business News Pers, Jakarta, tanggal 9 Juni 1988.

Mely G. Tan, **Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia**, Cet. I, LEKNAS
- LIPI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1981.

Mudiyono, **Pri dan Non Pri Saling Adopsi Unsur Kebudayaan:
Suatu Topik Dalam Temu Budaya Daerah Kalimantan
Barat 1988 Di Pontianak**, Harian Akcaya, Pontianak, 10
Maret 1988.

Nasikun, **Sistem Sosial Indonesia**, Cet. I, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

Pius Caro, **Proses Asimilasi Terus Berlangsung**, Harian Kompas,
tanggal 14 Desember 1984.

Panitia Penyuluhan Asimilasi Pusat, Lahirnya Konsepsi Asimiliasi,
dalam Junus Jahja **"Garis Rasial Garis Usang, Liku-liku
Pembauran"**, Bakom PKB Pusat, Jakarta, 1983.

Rustijono, **Regenerasi Pembauran Orang Tionghoa**, Harian Kompas,
tanggal 27 Oktober 1988.

Siswono Yudo Husodo, **Warga Baru (Kasus Cina Di Indonesia)**, Cet.
I, Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Edisi Baru Ketiga,
Cet. VIII, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

Pengarah,
Dr. MUKHLIS PAENI
Dra. SRI RAHAYU BUDIARTI, MM
Drs. THAMRIN B. BACHRI, M.Sc
Dra. TITEN M. SOEKARYA, M.Si

Perpustakaan D
Jenderal Kebu

306.483
KAL

ISBN 979127400-2



9 789791 274205

